

**PENGARUH PENDIDIKAN TERHADAP UNEMPLOYMENT dan
UNDEREMPLOYMENT di PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
(ANALISIS SAKERNAS AGUSTUS 2008)**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Magister Sains**

**JOKO PITOYO NOVARUDIN
NPM. 0806447910**



**UNIVERSITAS INDONESIA
KAJIAN KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN
PROGRAM PASCA SARJANA
DEPOK
M E I 2010**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Joko Pitoyo Novarudin

NPM : 0806447910

Tanda Tangan : 

Tanggal : 21 Mei 2010

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Joko Pitoyo Novarudin
NPM : 0806447910
Program Studi : Kajian Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Judul Tesis : Pengaruh Pendidikan terhadap Unemployment dan Underemployment di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Analisis SAKERNAS Agustus 2008)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Kajian Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Fakultas Pasca Sarjana, Universitas Indonesia.

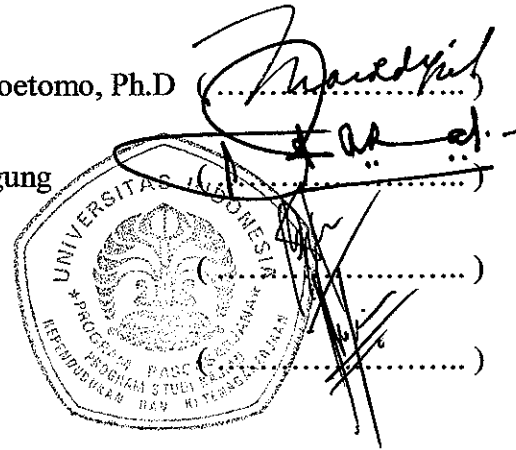
DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : Prof. Sri Moertiningsih Adioetomo, Ph.D

Pembimbing I : Prof. Dr. I Gusti Ngurah Agung

Pembimbing II : Drs. Chotib, M.Si

Penguji : Dr. Wendy Hartanto



Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 21 Mei 2010

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kahadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains pada Program Pasca Sarjana, Program Studi Kependudukan dan Ketenagakerjaan Universitas Indonesia.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, selama masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, sudah selayaknya penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dan tak terkira kepada:

1. Prof. Dr. I Gusti Ngurah Agung selaku pembimbing I atas keluangannya memberikan bimbingan, dukungan dan perhatian kepada penulis untuk dapat menyelesaikan tesis ini.
2. Drs. Chotib, M.Si selaku pembimbing II atas kesempatannya memberikan perhatian dan saran – saran yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
3. Prof. Sri Moertiningsih Adioetomo, Ph.D selaku Ketua Tim Penguji dan Ketua Program Studi Kajian Kependudukan dan Ketenagakerjaan Universitas Indonesia yang telah memberikan banyak masukannya yang sangat berharga bagi penyempurnaan tesis ini.
4. Dr. Wendy Hartanto selaku penguji dari Badan Pusat Statistik atas kesediannya menjadi penguji dan memberikan komentar serta saran bagi penyempurnaan tesis ini.
5. Para dosen yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dan memberikan nasehat di luar perkuliahan khususnya berkaitan dengan penyusunan tesis ini.
6. Seluruh staf Lembaga Demografi Universitas Indonesia atas dukungan dan bantuannya selama saya mengikuti perkuliahan dan menyelesaikan tesis ini

7. Dr. Rusman Heriawan selaku Kepala Badan Pusat Statistik beserta seluruh jajarannya atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengikuti program tugas belajar ini.
8. Kepala dan Pejabat di lingkungan Pusdiklat Statistik atas dukungannya selama saya mengikuti tugas belajar ini.
9. (Alm) Achmad Mudjeni, Ayahnda tercinta, atas semangat dan prinsip hidup beliau yang selalu menjadi inspirasi dan suri tauladan bagi penulis dalam menjalani hidup.
10. Sri Mulyani, Ibunda tercinta atas doa dan dukungannya yang tulus dan ikhlas selama penulis menuntut ilmu di Universitas Indonesia.
11. Rita, istri saya tercinta serta Azzahra Fajriani Chaerunnisa dan Fahira Dwi Zahrani anak – anak saya tercinta atas dukungan moral dan materil yang memotivasi penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan pasca sarjana ini.
12. Teman – teman mahasiswa seangkatan yang telah memberikan dukungan, semangat, kritik dan saran yang sangat bermanfaat dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan tesis ini teriring harapan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membalas segala kebbaikannya. Semoga tesis ini memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bagi masyarakat luas.

Mei 2010

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Joko Pitoyo Novarudin
NPM : 0806447910
Program Studi : Kajian Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Departemen :
Fakultas : Pasca Sarjana
Jenis Karya : ~~Skripsi~~/Tesis/Disertasi

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

PENGARUH PENDIDIKAN TERHADAP UNEMPLOYMENT dan
UNDEREMPLOYMENT di PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
(ANALISIS SAKERNAS AGUSTUS 2008)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*) merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di : Depok
Pada Tanggal : 21 Mei 2010

atakan

(Joko Pitoyo Novarudin)

ABSTRAK

Nama : **Joko Pitoyo Novarudin**
Program Studi : **Pasca Sarjana Kependudukan dan Ketenagakerjaan**
Judul : **Pengaruh Pendidikan terhadap Unemployment dan Underemployment di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Analisis SAKERNAS Agustus 2008)**

Studi ini mengevaluasi permasalahan *unemployment* dan *underemployment* di Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan data SAKERNAS Agustus 2008. Publikasi Badan Pusat Statistik tentang ketenagakerjaan dan kesejahteraan rakyat digunakan sebagai data pendukung analisis. Permasalahan ketenagakerjaan mempengaruhi tingkat kesejahteraan rakyat. *Unemployment* dan *underemployment* perlu dievaluasi secara bersama untuk memperoleh gambaran masalah ketenagakerjaan yang lebih lengkap. Rangkuman analisis deskriptif disajikan untuk menunjukkan perbedaan kecenderungan *unemployment* dan *underemployment* antara kelompok yang dibentuk berdasarkan faktor – faktor Demografi dan Sosial Ekonomi. Pengujian hipotesis disajikan dengan menerapkan model Regresi Logit Binner dan Multinomial.

Kata Kunci:

unemployment, underemployment, ketenagakerjaan, Nusa Tenggara Barat

ABSTRACT

Name : **Joko Pitoyo Novarudin**
Study Program : **Pasca Sarjana Kependudukan dan Ketenagakerjaan**
Title : **The Education Influence to Unemployment and Underemployment in Nusa Tenggara Barat Province (The Analysis of SAKERNAS August 2008 Data)**

This study evaluates unemployment and underemployment problems in Nusa Tenggara Barat Province based on SAKERNAS August 2008 data. Badan Pusat Statistic's publications about labor force and people prosperity are used to support the analysis. Labor force problems are influencing the people prosperity's level. Unemployment and underemployment need to be evaluated together to give a fuller picture of labor force problems. Descriptive analysis summaries have presented the difference of unemployment and underemployment's odds between group which is formed by demography and social economic factors. Hypothesis tests presented by applying binary and multinomial logit regression model.

Keyword:

Unemployment, underemployment, labor force, Nusa Tenggara Barat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
ABSTRAKSI	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan masalah	8
1.3. Pertanyaan Penelitian	11
1.4. Ruang Lingkup Penelitian	12
1.5. Tujuan Penelitian	12
1.5.1. Tujuan Umum	12
1.5.2. Tujuan Khusus	13
1.6. Manfaat Penelitian	13
BAB II. TINJAUAN LITERATUR	14
2.1. Klasifikasi Penduduk dan Angkatan Kerja	14
2.2. Pengangguran (<i>Unemployment</i>)	16
2.3. Setengah Pengangguran (<i>Underemployment</i>)	21
2.4. Utilitas Individu dalam Keterbatasan Jam kerja	24
2.5. Penawaran Tenaga Kerja	26
2.6. Job Search Theory	32
2.7. Kerangka Pikir Teoritis	35
2.8. Hasil Penelitian Sebelumnya	37
BAB III. KERANGKA ANALISIS dan METODOLOGI	45
3.1. Kerangka Analisis	45
3.2. Sumber Data	46
3.3. Definisi Variabel	48
3.3.1. Variabel Terikat	48
3.3.2. Variabel Bebas	49
3.3. Hipotesa Penelitian	52
3.4. Metode Analisis	55
3.4.1. Analisis Deskriptif	55

3.4.2. Analisis Inferensial	55
BAB IV. PEMBAHASAN dan ANALISIS	63
4.1. Kondisi Umum Wilayah	63
4.2. Analisis Deskriptif	72
4.2.1. Karakteristik Angkatan Kerja	72
4.2.1.1. Distribusi Status Angkatan Kerja Menurut Kelompok Tingkat Pendidikan	74
4.2.1.2. Distribusi Status Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur	75
4.2.1.3. Distribusi Status Angkatan Kerja Menurut Status Perkawinan	77
4.2.1.4. Distribusi Status Angkatan Kerja Menurut Daerah Tempat Tinggal	78
4.2.1.5. Distribusi Status Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin	79
4.2.2. Kondisi Human Capital Angkatan Kerja di Provinsi NTB	81
4.2.2.1. Persentase <i>Underemployment</i> dan <i>Unemployment</i> Menurut Tingkat Pendidikan, Wilayah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin	81
4.2.2.2. Persentase <i>Underemployment</i> dan <i>Unemployment</i> Menurut Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin dan Kelompok Umur	85
4.2.2.3. Persentase <i>Underemployment</i> dan <i>Unemployment</i> Menurut Tingkat Pendidikan, Wilayah, Jenis Kelamin dan Status Perkawinan	92
4.2.3. Karakteristik Angkatan Kerja yang Bekerja	95
4.2.3.1. Persentase <i>Underemployment</i> Menurut Tingkat Pendidikan, Wilayah, Jenis Kelamin dan Status Migran Komuter	96
4.2.3.2. Persentase <i>Underemployment</i> Menurut Tingkat Pendidikan, Wilayah, Jenis Kelamin dan Lapangan Pekerjaan	98
4.2.3.3. Persentase <i>Underemployment</i> Menurut Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin, Kelompok Umur dan Sektor Pekerjaan	100
4.2.4. Upah Pekerja di Provinsi NTB	103
4.3. Analisis Inferensial	106
4.3.1. Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Faktor – Faktor Klasifikasi terhadap Status Angkatan Kerja	106
4.3.1.1. Pengaruh Tingkat Pendidikan, Wilayah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin terhadap Status Angkatan Kerja	107
4.3.1.2. Pengaruh Tingkat Pendidikan, Status Perkawinan dan Jenis Kelamin terhadap Status Angkatan Kerja	110

4.3.1.3. Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Kelompok Umur terhadap Status Angkatan Kerja	113
4.3.2. Pengaruh Variabel Bebas terhadap Status Pekerja	117
4.3.2.1. Pengaruh Tingkat Pendidikan, Lapangan Pekerjaan dan Daerah Tempat Tinggal terhadap Status Pekerja	117
4.3.2.2. Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kelompok Umur dan Sektor Pekerjaan terhadap Status Pekerja	120
4.3.2.3 Pengaruh Tingkat Pendidikan, Status Migran Komuter dan Jenis Kelamin terhadap Status Pekerja	122
BAB V. KESIMPULAN dan REKOMENDASI	125
5.1. Kesimpulan	125
5.2. Saran dan Rekomendasi	128
DAFTAR REFERENSI	131
L A M P I R A N	136

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Trend Angkatan Kerja di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Indonesia Tahun 2001 – 2008	3
Tabel 3.1. Definisi Operasional Variabel Terikat	49
Tabel 3.2. Klasifikasi Sektor Formal dan Informal	51
Tabel 3.3. Klasifikasi Lapangan Pekerjaan	52
Tabel 4.1. Penduduk Usia 15 Tahun ke atas Menurut Kegiatan Utama di Provinsi NTB periode Agustus 2007 – Agustus 2008	64
Tabel 4.2. Distribusi PDRB (%) dan Tenaga Kerja (%) Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2007	68
Tabel 4.3. Persentase Penduduk Berusia 10 Tahun Keatas Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005 dan 2007	70
Tabel 4.4. Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Umur dan Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005 dan 2007	70
Tabel 4.5. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi NTB	71
Tabel 4.6. Distribusi (%) dan Rasio Prevalensi Kerja Menurut Variabel Bebas dan Status Angkatan Kerja di Propinsi NTB Tahun 2008	72
Tabel 4.7. Proporsi <i>Underemployment</i> dan <i>Unemployment</i> Menurut Tingkat Pendidikan, Wilayah dan Jenis Kelamin	82
Tabel 4.8. Proporsi <i>Underemployment</i> dan <i>Unemployment</i> Menurut Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin dan Kelompok Umur	85
Tabel 4.9. Status Angkatan Kerja Anak Usia Sekolah Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi NTB Tahun 2008	89
Tabel 4.10. Status Angkatan Kerja Anak Usia Sekolah Menurut Kelompok Umur dan Daerah Tempat Tinggal di Provinsi NTB Tahun 2008	91
Tabel 4.11. Proporsi <i>Underemployment</i> dan <i>Unemployment</i> Menurut Tingkat Pendidikan, Wilayah, Jenis Kelamin dan Status Perkawinan	93
Tabel 4.12. Proporsi <i>Underemployment</i> Menurut Tingkat Pendidikan, Wilayah, Jenis Kelamin dan Status Pekerja Komuter	96
Tabel 4.13. Proporsi <i>Underemployment</i> Menurut Tingkat Pendidikan, Wilayah, Jenis Kelamin dan Lapangan Pekerjaan	98
Tabel 4.14. Proporsi <i>Underemployment</i> Menurut Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin, Kelompok Umur dan Sektor Pekerjaan	101
Tabel 4.15. Rata – Rata Pendapatan Bersih (Rupiah per bulan) dan Standar Deviasi Menurut Karakteristik Pekerja di Provinsi NTB Tahun 2008	104
Tabel. 4.16. Ringkasan Statistik Mengenai Perbedaan Resiko <i>Underemployment</i> dan <i>Unemployment</i> Menurut Tingkat Pendidikan, Wilayah dan Jenis Kelamin	107

Tabel. 4.17. Ringkasan Statistik Mengenai Perbedaan Resiko <i>Under employment</i> dan <i>Unemployment</i> Menurut Tingkat Pendidikan, Status Kawin dan Jenis Kelamin	110
Tabel. 4.18.a. Ringkasan Statistik Mengenai Perbedaan Resiko <i>Under employment</i> Antar Tingkat Pendidikan dan Kelompok Umur	114
Tabel. 4.18.b. Ringkasan Statistik Mengenai Perbedaan Resiko <i>Unemployment</i> Antar Tingkat Pendidikan dan Kelompok Umur	114
Tabel. 4.19. Ringkasan Statistik Mengenai Perbedaan Resiko <i>Under employment</i> Antar Tingkat Pendidikan, Lapangan Pekerjaan dan Wilayah Tempat Tinggal	117
Tabel. 4.20. Ringkasan Statistik Perbedaan Resiko <i>Underemployment</i> Antar Tingkat Pendidikan, Kelompok Umur dan Sektor Pekerjaan	120
Tabel. 4.21. Ringkasan Statistik Perbedaan Resiko <i>Underemployment</i> Antar Tingkat Pendidikan, Status Migran Komuter dan Jenis Kelamin	123

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. <i>Dependency Ratio</i> dan Proporsi Penduduk Non Produktif Usia 0 – 14 dan 64 Tahun keatas di Provinsi NTB Tahun 2000 – 2025	7
Gambar 2.1. Klasifikasi Angkatan Kerja (Badan Pusat Statistik, 2008a) ...	14
Gambar 2.2. <i>Basic Labor Force Category</i> (Dooley and Prause 2004)	16
Gambar 2.3. <i>The Labor Force Frame Work</i> (Hussmanns et al., 1990)	19
Gambar 2.4. Alokasi Waktu Kerja bagi Pekerja <i>Underemployed</i> (Feather dan Shaw, 2000)	26
Gambar 2.5. Kurva Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja (Todaro, 1997)	27
Gambar 2.6. Kondisi Keseimbangan Mencari Kerja yang Optimal (Sumber: Suratman, 1994)	33
Gambar 2.7. Kerangka Pikir Teoritis Pasar Kerja (Siregar & Sukwika, n.d.)	36
Gambar 2.8. Kerangka Pemikiran Status Angkatan Kerja (Cendrawati, 2000)	37
Gambar 3.1. Kerangka Teoritis Model (Modifikasi dari Cendrawati, 2000; Siregar dan Sukwika, n.d.)	45
Gambar 3.2. Alokasi Sampel SAKERNAS 2008 Propinsi NTB	48
Gambar 3.3. Kerangka Analisis Model Status Angkatan Kerja	57
Gambar 3.4. Kerangka Analisis Sub Model 1	58
Gambar 3.5. Kerangka Analisis Sub Model 2	58
Gambar 3.6. Kerangka Analisis Sub Model 3	59
Gambar 3.7. Kerangka Analisis Sub Model 4	60
Gambar 3.8. Kerangka Analisis Sub Model 5	61
Gambar 3.9. Kerangka Analisis Sub Model 6	62
Gambar 4.1. Distribusi Pekerja Menurut Lapangan Usaha di Provinsi NTB, 2008	65
Gambar 4.2. Trend Distribusi PDRB menurut 3 Klasifikasi Sektor di Provinsi NTB Tahun 2000 – 2007	67
Gambar 4.3. Distribusi Status Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan di Provinsi NTB Tahun 2008	74
Gambar 4.4. Distribusi Status Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur di Provinsi NTB Tahun 2008	76
Gambar 4.5. Distribusi Status Angkatan Kerja Menurut Status Perkawinan di Provinsi NTB Tahun 2008	78
Gambar 4.6. Distribusi Status Angkatan Kerja Menurut Wilayah Tempat Tinggal di Provinsi NTB Tahun 2008	79
Gambar 4.7. Distribusi Status Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Provinsi NTB Tahun 2008	80
Gambar 4.8. Proporsi <i>Underemployment</i> dan <i>Unemployment</i> Menurut Tingkat Pendidikan, Wilayah dan Jenis Kelamin	84
Gambar 4.9. Proporsi <i>Underemployment</i> dan <i>Unemployment</i> Menurut Kelompok Umur, Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin ..	88

Gambar 4.10. Proporsi <i>Underemployment</i> dan <i>Unemployment</i> Menurut Tingkat Pendidikan, Wilayah, Jenis Kelamin dan Status Perkawinan	94
Gambar 4.11. Proporsi <i>Underemployment</i> Menurut Tingkat Pendidikan, Wilayah, Jenis Kelamin dan Status Pekerja Komuter	97
Gambar 4.12. Proporsi <i>Underemployment</i> Menurut Tingkat Pendidikan, Wilayah, Jenis Kelamin dan Lapangan Kerja	99
Gambar 4.13. Proporsi <i>Underemployment</i> Menurut Kelompok Umur, Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin dan Sektor Pekerjaan	102

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu dari 33 provinsi di Indonesia. Sumber daya manusia di Provinsi NTB masih tertinggal dibandingkan provinsi lain, hal tersebut dapat dilihat dari peringkat Indeks Pembangunan Manusia Provinsi NTB yang menempati peringkat 32 dari 33 provinsi di Indonesia pada tahun 2007 (BPS, 2009). Angka kematian bayi (IMR) provinsi NTB adalah yang tertinggi di Indonesia pada tahun 2007 sebanyak 44 bayi meninggal dalam 1000 kelahiran hidup (BPS, 2009). Dalam bidang pendidikan, walaupun bukan yang terburuk namun rata – rata lama sekolah provinsi NTB masih tergolong rendah yaitu 7,30 tahun bagi laki – laki dan 5,80 tahun bagi perempuan (BPS, 2009). Melihat kondisi tersebut Provinsi NTB juga mengalami masalah kesenjangan gender terutama dalam partisipasi pendidikan.

Persentase penduduk miskin di Provinsi NTB terus mengalami penurunan dari 27,17 persen tahun 2006 menjadi 24,99 persen tahun 2007 dan 23,81 persen tahun 2008 (BPS, 2009). Walaupun terjadi penurunan persentase penduduk miskin namun dibandingkan dengan kondisi nasional (15,42 persen) persentase kemiskinan Provinsi NTB masih cukup tinggi. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan tahun 2008 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya (BPS Provinsi NTB, 2008c). Wiebe, 1996 menyebutkan bahwa NTB merupakan provinsi dengan *underemployment rate* tertinggi di Indonesia diantara pekerja sektor informal. Pada tahun 2005 sebanyak 47,77 persen pekerja bekerja di bawah 35 jam seminggu, pada tahun 2007 persentase tersebut meningkat menjadi 48,42 persen. Tingginya pekerja paruh waktu berpotensi meningkatnya *underemployment* yang dapat berdampak pada meningkatnya kesenjangan pendapatan dan kemiskinan.

Memajukan kesejahteraan umum merupakan tujuan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam mengemban amanat tersebut, Pemerintah dalam RPJM Nasional 2004 – 2009 menetapkan sasaran pengurangan penduduk miskin dari 16 persen menjadi 8 persen pada tahun 2009. Penetapan penduduk miskin berdasarkan kriteria Badan

Pusat Statistik menggunakan Garis Kemiskinan Makanan dan Non Makanan. Dengan demikian pengkategorian penduduk miskin berkaitan erat dengan daya beli. Daya beli ditentukan oleh pola konsumsi, pendapatan yang diterima dan harga komoditi (makanan dan non makanan). Secara umum sumber pendapatan berasal dari hasil bekerja (*labor income*) maupun pendapatan bukan dari bekerja (*non labor income*). Pendapatan dari bekerja biasanya berupa upah/gaji. Upah/gaji sebagai balas jasa faktor produksi tenaga kerja yang berasal dari rumah tangga.

Penggunaan modal (*capital*) dan penyerapan tenaga kerja (*labor*) secara optimal akan mampu menghasilkan output yang maksimal (Bellante dan Jackson, 1990). Penciptaan output tersebut setelah dipisahkan dengan biaya antara merupakan nilai tambah bruto dari sektor perekonomian di suatu wilayah, yang akan terakumulasi menjadi Produk Domestik Bruto (PDB). Laju pertumbuhan PDB atas dasar harga kostan merupakan salah satu cerminan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas akan mampu menyerap tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi pengangguran. Berdasarkan hal tersebut, maka pertumbuhan angkatan kerja terkait dengan kuantitas dan kualitasnya sangat penting bagi perekonomian suatu negara.

Perencanaan pembangunan ketenagakerjaan di berbagai wilayah lebih terfokus pada masalah pengangguran. Demikian juga di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dimana dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2009-2013 untuk masalah ketenagakerjaan hanya ditetapkan target penurunan tingkat pengangguran terbuka dari 6,48 persen tahun 2007 menjadi 5,00 persen tahun 2013. Beberapa peneliti berpendapat pengangguran belum menggambarkan permasalahan sebenarnya dari ketenagakerjaan. Kondisi ini berkaitan dengan konsep definisi bekerja yang selalu digunakan dalam penyusunan program pembangunan. Tenaga kerja yang bekerja di bawah jam kerja normal dan masih bersedia menambah jam kerja, bekerja dengan upah yang dibawah standar atau mempunyai kualifikasi melebihi dari yang diperlukan dalam pekerjaannya (*over qualified*) juga merupakan masalah dalam ketenagakerjaan. Kondisi tersebut dikenal dengan *underemployment*. *Underemployment* merupakan cerminan menyia-nyiakan potensi tenaga kerja yang tersedia (*underutilized labor resource*) dan permasalahan yang akut bagi negara berkembang (Görg and Eric, 2001).

Rendahnya jam kerja, rendahnya upah dan rendahnya produktivitas pekerja dikatakan sebagai indikator setengah pengangguran, yang ditentukan oleh tingkat pendidikan, jenis kelamin, tempat tinggal dan umur (Sutomo, 1996). Pada negara berkembang pengangguran terlihat kecil karena kompensasi bagi pengangguran sangat minim, sehingga mereka harus melakukan kegiatan ekonomi apa saja yang seringkali berskala kecil atau tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kondisi tersebut nampaknya membuat *underemployment* tidak saja merupakan *underutilization of labor resource* dan inefisiensi dalam pasar kerja, namun lebih jauh lagi dapat meningkatkan kesenjangan pendapatan di negara – negara berkembang (Görg dan Eric, 2001).

Tabel 1.1. Trend Angkatan Kerja di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Indonesia Tahun 2001 – 2008

Status Angkatan Kerja	Nusa Tenggara Barat	Indonesia
(1)	(2)	(3)
1. Unemployment		
2001	107.828	8.005.031
2005	174.996	10.854.254
Agustus 2006	186.259	10.932.000
Agustus 2007	135.264	10.011.142
Agustus 2008	124.300	9.394.515
2. Bekerja		
2001	1.746.164	90.807.417
2005	1.784.832	94.948.118
Agustus 2006	1.906.816	95.456.935
Agustus 2007	1.951.182	99.930.217
Agustus 2008	1.904.781	102.552.750
3. Setengah Pengangguran		
2001	622.008	27.736.427
2005	695.671	29.702.498
Agustus 2006	618.826	29.100.749
Agustus 2007	756.452	30.370.179
Agustus 2008	782.462	31.089.368

Sumber: Badan Pusat Statistik (2009 dan 2008b) dan BPS Provinsi NTB (2008a dan 2009a)

Tabel 1.1 di atas menunjukkan *trend* yang hampir serupa antara kondisi Indonesia dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Pengangguran cenderung menurun namun setengah pengangguran cenderung meningkat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada periode 2001 – 2005, pertumbuhan angkatan kerja nasional sekitar 1,72 persen per tahun yaitu dari

98.812.448 jiwa tahun 2001 menjadi 105.802.372 jiwa tahun 2005. Pertumbuhan angkatan kerja perempuan sekitar 1,26 persen per tahun, lebih rendah daripada pertumbuhan angkatan kerja laki – laki sekitar 2,01 persen per tahun. Publikasi BPS (2008b) menyebutkan bahwa pada periode Agustus 2006 – Agustus 2007 angkatan kerja perempuan tumbuh 6,68 persen dari 38.639.044 jiwa tahun 2006 menjadi 41.221.472 jiwa tahun 2007. Pertumbuhan angkatan kerja perempuan tersebut lebih tinggi daripada laki – laki yang hanya tumbuh sekitar 1,43 persen pada periode yang sama. Periode Agustus 2007 – Agustus 2008 pertumbuhan angkatan kerja laki – laki hanya sebesar 0,62 persen sementara pertumbuhan angkatan kerja perempuan sebesar 3,84 persen. Walaupun secara kuantitatif angkatan kerja laki – laki masih lebih banyak daripada perempuan, kondisi tersebut menggambarkan peningkatan partisipasi kerja perempuan lebih tinggi dibandingkan laki – laki. Semakin banyaknya jumlah perempuan dalam angkatan kerja, maka diperlukan kebijakan yang responsif gender pada bidang ketenagakerjaan di Indonesia.

Publikasi BPS (2008b) tersebut lebih lanjut menyatakan bahwa jumlah pengangguran terbuka laki – laki di Indonesia lebih tinggi daripada perempuan pada periode Agustus 2006 – Agustus 2007. Penurunan pengangguran terbuka perempuan pada periode tersebut sekitar 13,96 persen lebih besar daripada penurunan pengangguran terbuka laki – laki yang hanya turun sekitar 3,48 persen. Periode selanjutnya Agustus 2007 – Agustus 2008, pengangguran terbuka laki – laki turun 5,87 persen lebih rendah daripada penurunan pengangguran terbuka perempuan sebesar 6,53 persen. Kondisi setengah pengangguran laki – laki tahun 2006 sebesar 15.189.810 jiwa lebih tinggi daripada perempuan yang hanya sebesar 13.910.939 jiwa. Namun pada tahun 2007, jumlah setengah pengangguran perempuan mengalami peningkatan tajam menjadi 15.200.628 jiwa melebihi jumlah setengah pengangguran laki – laki sebesar 15.169.551 jiwa. Data tersebut menggambarkan bahwa tenaga kerja perempuan lebih banyak terserap untuk bekerja sebagai setengah pengangguran dibandingkan laki – laki. Perempuan khususnya yang telah menikah memang cenderung bekerja di bawah waktu normal karena beban ganda yang dialaminya (Saddewisasi, 1997). Periode Agustus 2006 – Agustus 2007 terjadi peningkatan setengah pengangguran sebesar

4,36 persen. Sementara pada Agustus 2008 jumlah setengah pengangguran mengalami peningkatan 2,37 persen dibandingkan Agustus 2007. Nampaknya fenomena *underutilized* dari sumber daya tenaga kerja terus mengalami peningkatan.

Wiebe (1996) dalam papernya menyebutkan bahwa pekerja sektor informal Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki *underemployment* tertinggi di Indonesia yaitu hampir mencapai 33 persen. Lebih lanjut disebutkan bahwa hal tersebut tidak mengherankan karena *underemployment* biasa terjadi pada daerah perdesaan dengan karakteristik memiliki sektor ekonomi yang berhubungan erat dengan *agriculture*, rata – rata *human capital* yang rendah dan rata – rata tingkat pendapatan yang rendah (*low average income level*). Badan Pusat Statistik (2008b) dalam publikasinya menyebutkan Upah Minimum Regional Provinsi NTB tahun 2005 sebesar Rp 475.000,- lebih rendah dibandingkan kebutuhan hidup layak provinsi tersebut tahun yang sama yaitu sekitar Rp 526.040,-. Pada tahun 2006 UMR Provinsi NTB meningkat menjadi Rp 550.000,-, namun kebutuhan hidup layak provinsi ini juga meningkat menjadi Rp 570.000,-. Tingkat upah yang diterima pekerja mempengaruhi partisipasi pekerja dalam pasar kerja (Sutomo, 1996). Kebijakan UMR hanya mampu menjangkau sektor formal, namun demikian kebijakan tersebut diharapkan mampu menjadi “*pseudo price*” bagi tingkat upah pekerja sektor informal.

BPS (n.d.1.) menyebutkan dalam website datastatistik-indonesia bahwa jumlah angkatan kerja di Provinsi NTB terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2001 jumlah angkatan kerja sebesar 1.853.992 orang meningkat menjadi 1.959.828 orang tahun 2005, atau terjadi peningkatan hampir 1,4 persen per tahun. Jumlah pengangguran Provinsi NTB tahun 2001 sebesar 107.828 orang meningkat menjadi 174.996 orang atau terjadi peningkatan sekitar 12,9 persen per tahun. Jumlah penduduk yang bekerja hanya mengalami peningkatan 0,55 persen per tahun selama periode 2001 – 2005. Kondisi tersebut menunjukkan belum seimbangya pembukaan lapangan kerja dengan banyaknya angkatan kerja baru setiap tahunnya.

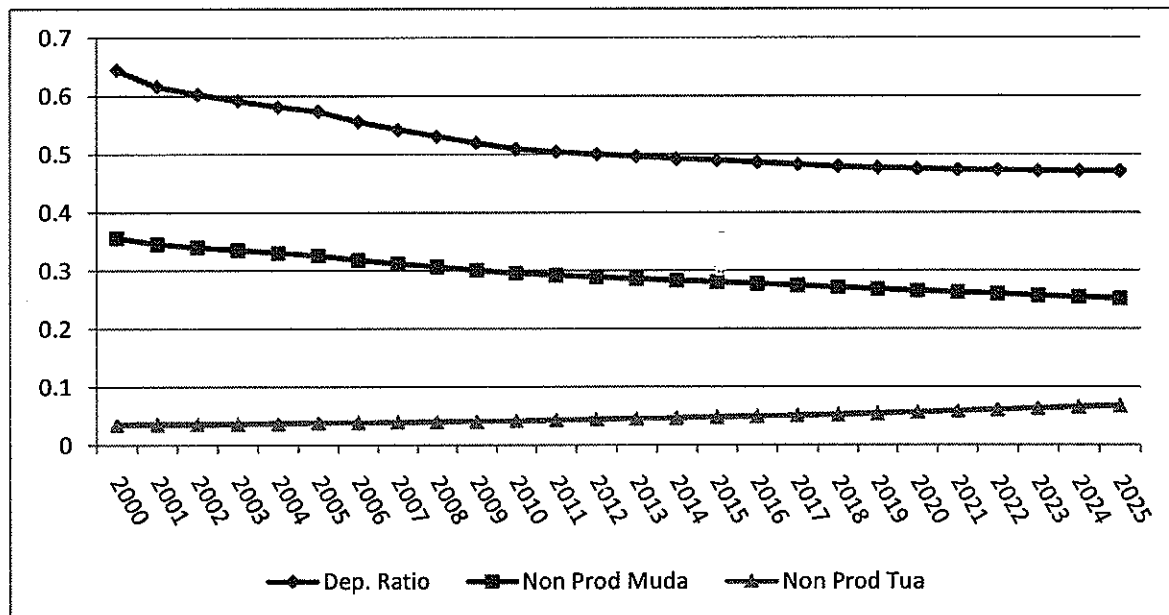
Publikasi BPS NTB (2008a) menyebutkan Angkatan kerja dan jumlah pengangguran di Provinsi NTB mengalami penurunan periode Agustus 2006 –

2007, sehingga *unemployment rate* pada Agustus 2006 sebesar 7,97 persen turun menjadi 6,31 persen pada Agustus 2007. Pada periode Agustus 2007 – Agustus 2008 juga terjadi penurunan jumlah angkatan kerja dan pengangguran masing – masing turun 2,75 persen dan 8,11 persen. Tingkat pengangguran terbuka Provinsi NTB pada Agustus 2008 sebesar 6,13 persen. Penurunan pengangguran yang terjadi periode Agustus 2006 – Agustus 2008, nampaknya menunjukkan penyerapan angkatan kerja dalam pasar kerja semakin membaik.

Penduduk yang bekerja di bawah 35 jam seminggu di Provinsi NTB tahun 2001 sekitar 38,43 persen dari jumlah seluruh orang yang bekerja. Proporsi tersebut meningkat menjadi 43,45 persen pada tahun 2005 atau jumlah pekerja yang bekerja di bawah 35 jam seminggu mengalami peningkatan sekitar 2,84 persen per tahun. Berdasarkan Berita Resmi Statistik BPS Provinsi NTB (2009a), terjadi penurunan jumlah penduduk yang bekerja pada periode Agustus 2007 – Agustus 2008 sekitar 2,38 persen. Pada periode yang sama, jumlah setengah penganggur di Provinsi NTB meningkat sekitar 3,44 persen atau dengan kata lain terjadi penurunan proporsi penduduk yang bekerja penuh (*full time worker*). Kondisi tersebut mencerminkan penyerapan angkatan kerja dalam pasar kerja belum mampu mengoptimalkan potensi sumber daya tenaga kerja yang tersedia.

Berita resmi BPS NTB (2009a) menyebutkan terjadi penurunan tingkat pengangguran pada Agustus 2008 dibandingkan Agustus 2007 namun jumlah setengah pengangguran mengalami sedikit peningkatan. Seiring dengan kondisi tersebut jumlah maupun persentase penduduk miskin mengalami penurunan. Tingkat kedalaman maupun keparahan kemiskinan pun semakin kecil. Hal tersebut mengindikasikan rata – rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan rata – rata pengeluaran di antara penduduk miskin semakin berkurang (BPS NTB, 2008c). Berita Resmi Statistik yang dipublikasikan oleh BPS NTB menyebutkan tingkat pengangguran terbuka dan setengah pengangguran mengalami peningkatan pada Februari 2009 dibandingkan Februari 2008 (BPS NTB, 2009b). Seiring dengan itu jumlah dan persentase penduduk miskin mengalami penurunan pada tahun 2009 dibandingkan tahun 2008. Namun tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan semakin meningkat (BPS NTB, 2009c). Hal tersebut menunjukkan terdapat korelasi antara

partisipasi bekerja dengan kondisi kemiskinan dalam arti luas. Publikasi tersebut di atas juga menunjukkan tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan lebih buruk di perkotaan dibandingkan di pedesaan.



Gambar 1.1. *Dependency Ratio* dan Proporsi Penduduk Non Produktif Usia 0 – 14 dan 64 Tahun keatas di Provinsi NTB Tahun 2000 – 2025
(Sumber: Badan Pusat Statistik (n.d.2.))

Jumlah penduduk usia produktif yang besar merupakan modal pembangunan yang strategis. Transisi Demografi berdampak pada penurunan fertilitas dan mortalitas, yang mana kondisi tersebut akan meningkatkan proporsi penduduk usia produktif sehingga angka ketergantungan semakin rendah (Adioetomo, 2005). Lebih lanjut Adioetomo menjelaskan bahwa rendahnya angka ketergantungan meningkatkan kesempatan penduduk untuk menabung (*saving*) dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam pasar kerja. Semakin banyak penduduk yang produktif dan semakin rendah penduduk yang sebagai beban diharapkan ada kelebihan pendapatan yang dapat ditabung. Menurunnya fertilitas memperpendek masa perempuan untuk hamil dan melahirkan serta "tugas" perempuan untuk merawat anak. Sehingga perempuan dapat memanfaatkan waktunya dalam pasar kerja. Bertambahnya angkatan kerja merupakan modal dasar bagi penciptaan nilai tambah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Namun hal tersebut tentunya harus dibarengi dengan peningkatan *human capital* dan perluasan lapangan kerja (Hong dan Shanta, 2007).

Penurunan tingkat kelahiran merupakan dampak positif program Keluarga Berencana. Pada pihak lain perluasan akses kesehatan dan perbaikan pelayanan kesehatan telah berhasil menurunkan mortalitas serta meningkatnya usia harapan hidup. Kedua hal tersebut berdampak pada penurunan angka ketergantungan yang merupakan bonus demografi (Adioetomo, 2005). Penurunan angka ketergantungan akan berlanjut sampai pada suatu periode dimana angka ketergantungan mencapai titik terendah, periode tersebut dikenal sebagai *windows of opportunity*. Pada grafik di atas terlihat bahwa Provinsi NTB belum mencapai periode *windows of opportunity* hingga tahun 2025. Kondisi ini berarti masih ada kesempatan untuk mempersiapkan sumber daya manusia menjelang periode *windows of opportunity* sehingga periode tersebut dapat dimanfaatkan dengan sebaik – baiknya.

Produktivitas tenaga kerja didefinisikan sebagai banyaknya output yang dihasilkan oleh individu dengan jam kerja yang digunakan. Tenaga kerja diterjemahkan sebagai jumlah jam kerja dari setiap tenaga kerja, karena kuantitas saja belum menunjukkan kemampuan yang sebenarnya dari tenaga kerja dalam menghasilkan nilai tambah. Pengangguran memang masih menjadi masalah ketenagakerjaan di Provinsi NTB, namun peningkatan jumlah setengah penganggur menunjukkan semakin menurunnya pemanfaatan sumber daya tenaga kerja yang tersedia. Rendahnya pemanfaatan tersebut akan berdampak terhadap penciptaan nilai tambah domestik yang tidak seimbang dengan pertumbuhan penduduk. Pada jangka panjang kondisi ini akan berdampak menurunnya daya beli masyarakat karena pendapatan perkapita riil penduduk semakin berkurang. Hong dan Shanta (2007) dalam penelitiannya menunjukkan *underemployment* cenderung mengakibatkan kemiskinan.

1.2. Perumusan Masalah

Pembangunan yang dilaksanakan di seluruh wilayah bertujuan memacu pertumbuhan ekonomi wilayah. Pertumbuhan ekonomi wilayah yang tinggi diharapkan mampu membuka lapangan kerja guna menyerap tenaga kerja yang ada. Namun pada beberapa wilayah, pertumbuhan ekonomi tidak sejalan

dengan penciptaan lapangan kerja dan justru semakin meningkatkan pengangguran. Kondisi tersebut disebabkan ekspansi usaha yang lebih berorientasi padat modal sehingga mengurangi jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Kondisi yang demikian menyebabkan investasi pada *human capital* khususnya pendidikan menjadi suatu pemborosan yang dikhawatirkan berdampak pada meningkatnya angka putus sekolah. Pendidikan sebagai salah satu *human capital* merupakan investasi yang menguntungkan bagi individu jika didukung oleh kesempatan memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan pendapatan yang lebih tinggi (Hong dan Shanta, 2007).

Seseorang bekerja bertujuan memperoleh pendapatan untuk membiayai kehidupannya dan keluarganya. Kelayakan upah yang diterima dan kesesuaian jenis pekerjaan yang dilakukan menjadi harapan bagi setiap penduduk angkatan kerja. Namun karena berbagai faktor, kondisi yang diharapkan tersebut tidak dapat terwujud. Bagi sebagian orang dengan latar belakang ekonomi mapan, pada umumnya tetap bertahan pada statusnya sebagai *unemployment* sampai memperoleh pekerjaan yang diharapkan. Sebagian yang lain karena desakan pemenuhan kebutuhan hidup sehingga harus bekerja apa saja. Keterpaksaan tersebut sering kali mengakibatkan pekerja bekerja di bawah jam kerja normal, menerima upah yang tidak selayaknya dan atau bekerja pada bidang yang tidak sesuai dengan keahliannya. Kondisi diatas tersebut dikenal sebagai *underemployment*. Baik *unemployment* maupun *underemployment* merupakan permasalahan ketenagakerjaan yang perlu dicarikan solusinya dengan mencermati faktor – faktor yang menyebabkannya. Ketenagakerjaan tidak dapat digambarkan secara lengkap hanya dengan kondisi *unemployment*, perlu ditambahkan dengan data *underemployment* (Taşçi, 2005).

Sebagai dampak dari transisi demografi terjadi *trend* penurunan tingkat kelahiran (yang berdampak berkurangnya penduduk usia muda) dan meningkatnya usia harapan hidup (berdampak meningkatnya penduduk usia tua). Hal itu akan membawa komposisi penduduk suatu wilayah berada pada angka ketergantungan terendah yang selanjutnya akan meningkat lagi pada beberapa tahun kemudian. Periode waktu tersebut dikenal sebagai *Windows of opportunity* (Adioetomo, 2005). Sebagai suatu peluang, maka periode tersebut memerlukan

perhatian dan tindakan yang tepat untuk dapat memanfaatkannya dan memaksimalkan keuntungan dari rendahnya angka ketergantungan. Keuntungan tersebut hanya diperoleh jika kelompok penduduk usia produktif memiliki kesempatan untuk memaksimalkan potensinya dalam lapangan kerja. Pekerjaan pada sektor formal merupakan harapan bagi sebagian besar angkatan kerja. Namun sektor pekerjaan tersebut membutuhkan kualifikasi pendidikan yang baik dan atau pengalaman kerja yang memadai. Kedua kualifikasi tersebut tidak semuanya dimiliki oleh setiap angkatan kerja di Provinsi NTB, akan tetapi hanya sebagian saja yang memiliki semuanya.

Status *unemployment* dan *underemployment* penduduk dipengaruhi oleh karakteristik sosial demografi angkatan kerja. Karakteristik yang sering dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya *unemployment* dan *underemployment* adalah pendidikan sebagai salah satu aspek dari *human capital*. Pembangunan *human capital* salah satunya dapat tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia suatu wilayah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi NTB tahun 2006 maupun 2007 tetap berada di peringkat 32 dari 33 provinsi di Indonesia. Komponen IPM terdiri atas Indeks Pendidikan (rata – rata lama sekolah dan angka melek huruf), Indeks Kesehatan dan Indeks Daya Beli. Dibandingkan dengan kondisi nasional, Indeks Pendidikan dan Indeks Kesehatan Provinsi NTB berada di bawah angka nasional. Data tersebut mencerminkan bahwa secara rata – rata *human capital* di Provinsi NTB masih lebih rendah. Masih rendahnya rata – rata lama sekolah merupakan cerminan tingkat pendidikan masyarakat yang relatif masih rendah. Sebagai salah satu karakteristik masyarakat, maka pengaruh tingkat pendidikan terhadap status *unemployment* maupun *underemployment* tidak terlepas dari pengaruh karakteristik – karakteristik lainnya dalam masyarakat seperti umur, jenis kelamin, daerah tempat tinggal, status perkawinan dan status dalam rumah tangga.

Provinsi NTB mempunyai masalah rendahnya sumber daya tenaga kerja. Pada tahun 2007, sekitar 70 persen penduduk usia 10 tahun ke atas berpendidikan SD ke bawah dan kondisinya sedikit lebih buruk di wilayah perdesaan sekitar 75 persen berpendidikan SD kebawah (BPS Provinsi NTB, 2008b). Pendidikan penduduk yang rendah akan menghasilkan produktifitas yang

rendah pula, kondisi tersebut akan menghambat peningkatan kesejahteraan rakyat. Persentase penduduk yang bekerja di bawah 35 jam seminggu mengalami peningkatan dari 47,77 persen tahun 2005 menjadi 48,42 tahun 2007 (BPS Provinsi NTB, 2008b). Hal tersebut mengindikasikan belum optimalnya pemanfaatan tenaga kerja yang tersedia.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2008 lebih rendah dibandingkan tahun 2007. TPAK laki – laki tahun 2008 sebesar 81,15 persen lebih tinggi dibandingkan perempuan yang hanya 55,88 persen. Tingkat pengangguran terbuka perempuan tahun 2008 sebesar 6,27 persen lebih tinggi dibandingkan laki – laki sebesar 6,01 persen (BPS Provinsi NTB, 2009a). Setengah penganggur terpaksa perempuan lebih tinggi dibandingkan laki – laki. Setengah penganggur terpaksa perempuan tahun 2007 sebanyak 270.660 lebih tinggi dibandingkan laki – laki sebesar 236.831. Kondisi yang sama terjadi pada tahun 2008, dimana jumlah setengah penganggur terpaksa perempuan sebesar 254.501 lebih tinggi dibandingkan laki – laki sebesar 237.700. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya masalah pemanfaatan tenaga kerja secara umum dan ditambah adanya masalah kesenjangan gender dalam partisipasi kerja.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka ada beberapa pertanyaan yang dicoba untuk dijawab melalui tesis ini, yaitu:

1. Bagaimana karakteristik sosial demografi angkatan kerja di Provinsi NTB menurut status *unemployment*, *underemployment* dan *full time worker*?
2. Apakah investasi terhadap *human capital* (pendidikan) memberikan *benefit* sesuai yang diharapkan dalam bidang ketenagakerjaan?
3. Apakah terdapat indikasi kesenjangan gender terhadap status angkatan kerja menurut tingkat pendidikan?
4. Apakah terjadi kesenjangan *unemployment* maupun *underemployment* antar wilayah perdesaan dan perkotaan pada setiap tingkat pendidikan?
5. Bagaimana penyerapan dan pemanfaatan tenaga kerja perempuan berstatus kawin menurut tingkat pendidikan?
6. Khusus angkatan kerja yang telah bekerja terdapat beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana pemanfaatan potensi pekerja menurut tingkat pendidikan dan kelompok umur dalam pasar kerja?
 - b. Apakah terdapat perbedaan pemanfaatan tenaga kerja antar tingkat pendidikan pada kelompok lapangan pekerjaan maupun sektor pekerjaan tertentu?
 - c. Bagaimana pemanfaatan tenaga kerja komuter dan bukan komuter menurut tingkat pendidikan?
 - d. Bagaimana kesenjangan upah bagi pekerja *underemployment* dan *full time worker* menurut karakteristik pekerja?
7. Kebijakan apa yang dapat disarankan untuk mengurangi *unemployment* dan *underemployment* dan lebih memberdayakan *labor resources* yang tersedia di Propinsi NTB?

1.4. Ruang Lingkup Penelitian

Underemployment terbagi atas *visible* dan *invisible underemployment*. Görg dan Eric (2001) menyebutkan sulitnya mendefinisikan *invisible underemployment* karena didasarkan atas kelayakan pemanfaatan produktivitas (*adequate productivity*) dari tenaga kerja. Oleh sebab itu tesis ini hanya membahas mengenai *visible underemployment*. Sampel yang digunakan adalah angkatan kerja berusia 15 – 64 tahun (usia produktif), kondisi ini disesuaikan dengan angka ketergantungan (*dependency ratio*) yang menjadikan penduduk usia produktif sebagai “penyangga” penduduk usia non produktif.

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya *unemployment* maupun *underemployment* seperti faktor sosial budaya, investasi, karakteristik perusahaan dan sebagainya. Namun faktor – faktor penyebab yang akan dibahas lebih lanjut dalam tesis ini difokuskan pada variabel sosial demografi dan disesuaikan dengan ketersediaan data.

1.5. Tujuan Penelitian

1.5.1. Tujuan Umum:

Memperoleh informasi mengenai faktor – faktor sosial demografi yang terkait dengan permasalahan *unemployment* maupun *underemployment* di Provinsi NTB. Kemudian memberikan saran kebijakan yang mungkin dilakukan untuk

Universitas Indonesia

mengurangi *unemployment* dan *underemployment* sehingga pemanfaatan sumber daya tenaga kerja dapat ditingkatkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.5.2. Tujuan Khusus:

Tujuan khusus dalam tesis ini guna menjawab pertanyaan penelitian mengenai permasalahan *unemployment* dan *underemployment* di Provinsi NTB, yaitu sebagai berikut:

1. Mempelajari distribusi status *unemployment*, *underemployment* dan *full time worker* menurut karakteristik sosial demografi angkatan kerja.
2. Mempelajari proporsi *underemployment* dan *unemployment* menurut tingkat pendidikan angkatan kerja yang dikontrol oleh variabel sosial demografi lain.
3. Mencermati kecenderungan *underemployment* dan *unemployment* antara laki – laki dan perempuan berkaitan menurut tingkat pendidikan.
4. Mencermati kecenderungan *underemployment* dan *unemployment* antara wilayah perkotaan dan perdesaan menurut tingkat pendidikan.
5. Mempelajari penyerapan dan pemanfaatan tenaga kerja perempuan berstatus kawin menurut tingkat pendidikan.
6. Mencermati kejadian *underemployment* menurut tingkat pendidikan bagi angkatan kerja yang telah bekerja berkaitan dengan lapangan kerja, sektor pekerjaan dan status pekerja komuter.
7. Memberikan rekomendasi saran kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengurangi permasalahan ketenagakerjaan di Propinsi NTB.

1.6. Manfaat Penelitian

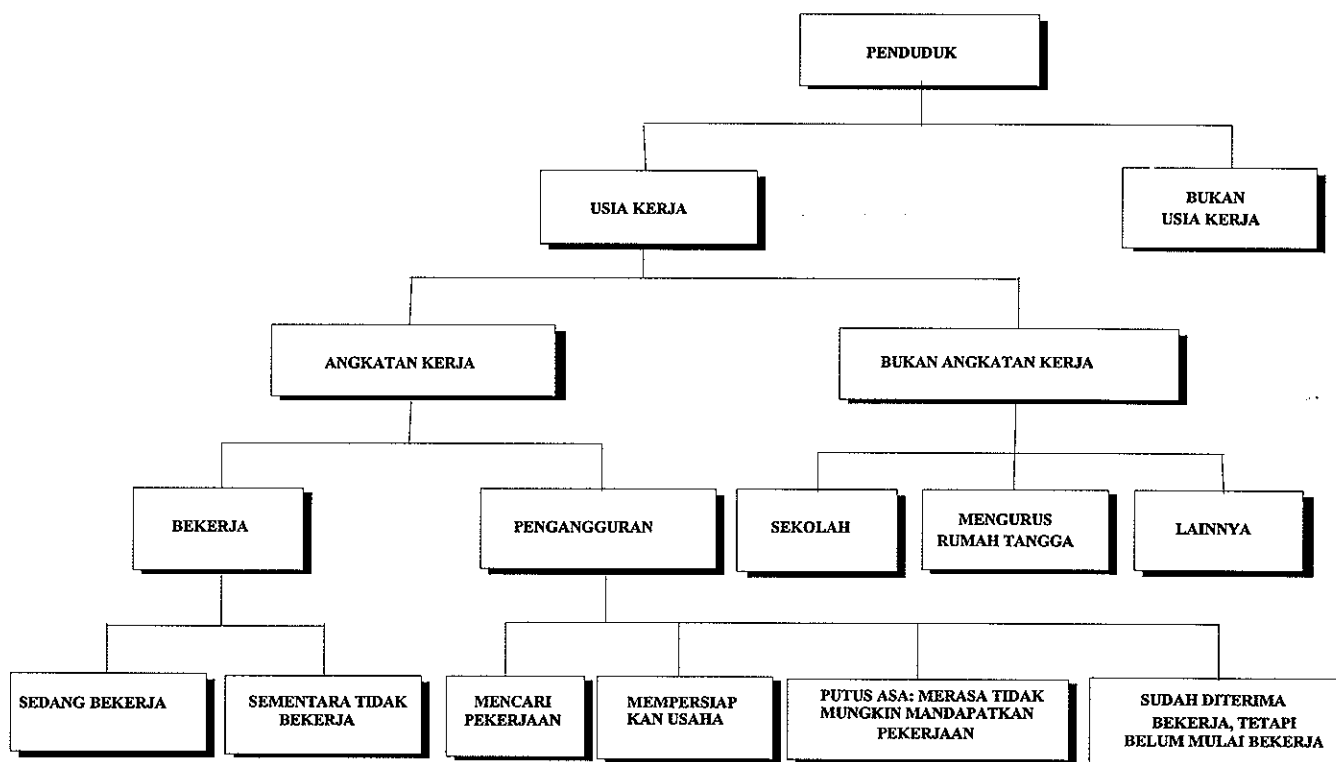
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum mengenai permasalahan ketenagakerjaan di Provinsi NTB. Selain itu diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengambil kebijakan dan penyusunan program pembangunan di bidang ketenagakerjaan untuk meningkatkan pemanfaatan *labor resorces* guna mencapai kesejahteraan rakyat.

BAB II TINJAUAN LITERATUR

2.1. Klasifikasi Penduduk dan Angkatan Kerja

Sebagaimana definisi yang digunakan oleh BPS, penduduk adalah orang yang tinggal di suatu tempat minimal 6 bulan atau tinggal kurang dari 6 bulan tapi berniat tinggal lebih dari 6 bulan. Anggota rumah tangga adalah seorang atau sekelompok orang yang tinggal dalam satu bangunan dan pengelolaan makan dalam satu dapur. Kepala rumah tangga adalah salah seorang anggota rumah tangga yang bertanggung jawab atau dianggap bertanggung jawab dalam kepengurusan rumah tangga (BPS, 2008a).

Secara umum penduduk terbagi menjadi usia kerja dan bukan usia kerja. Usia minimum sebagai penduduk yang aktif secara ekonomi (usia kerja minimum) yang sering digunakan adalah 15 tahun (Liu dan Jackie, 1999). Klasifikasi angkatan kerja dapat dilihat pada gambar 2.1.



Gambar 2.1. Klasifikasi Angkatan Kerja
(Badan Pusat Statistik, 2008a)

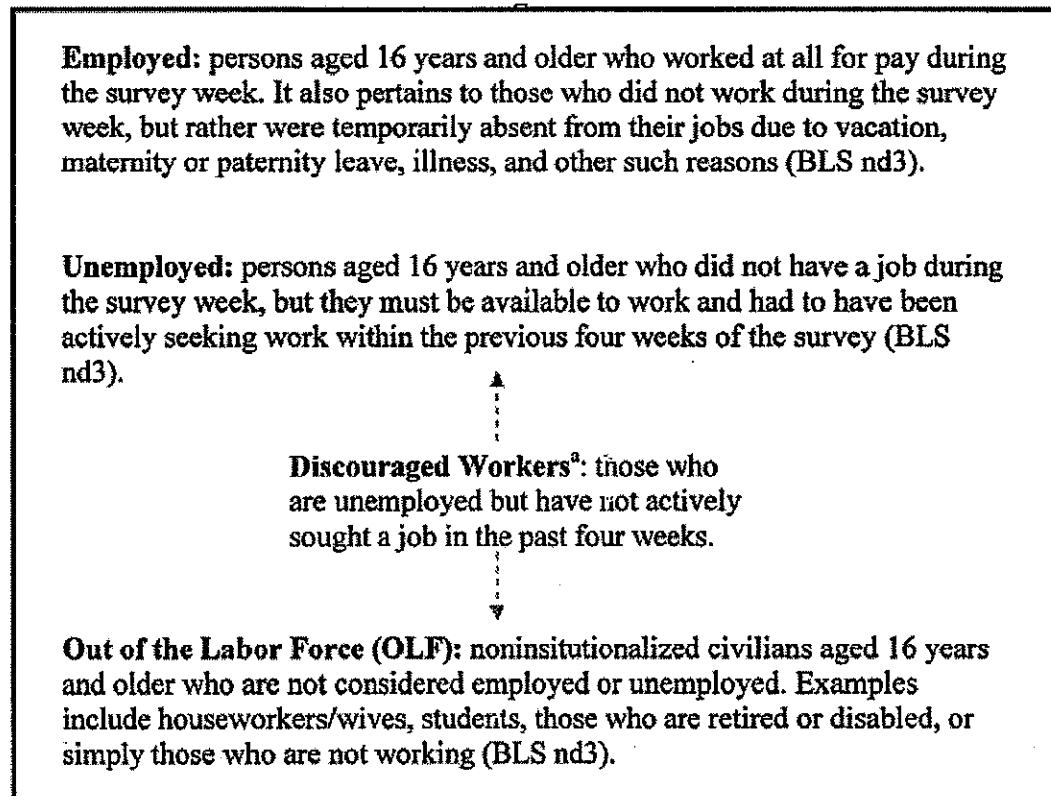
Pada gambar 2.1 menunjukkan bahwa angkatan kerja terdiri dari 2 kategori yaitu bekerja dan pengangguran. Yang tergolong bekerja adalah sedang bekerja dan sementara tidak bekerja. Pengangguran adalah angkatan kerja yang

tidak bekerja dan sedang mencari kerja, mempersiapkan usaha, merasa putus asa tidak memperoleh pekerjaan dan sudah diterima tetapi belum mulai bekerja. Angkatan kerja yang tidak bekerja dan putus asa dalam memperoleh pekerjaan disebut sebagai *discourage worker*.

Konsep bekerja internasional yang diadopsi oleh BPS (2008a) yaitu bekerja minimal 1 jam berturut – turut selama seminggu yang lalu memiliki keunggulan dapat diperbandingkan secara internasional. Lapangan kerja di Indonesia yang masih didominasi sektor informal, jam kerja minimal 1 jam seminggu belum sesuai. Karena definisi tersebut akan menggambarkan kondisi *open unemployment* negara berkembang (Indonesia) lebih rendah daripada negara – negara maju, padahal jika dilihat dari segi produktifitasnya negara – negara berkembang jauh di bawah negara – negara maju (Cendrawati, 2000).

Angkatan kerja terdiri dari pengangguran dan orang yang bekerja, namun di antara keduanya terdapat kelompok orang yang potensinya belum dimanfaatkan secara optimal dalam pasar kerja yang dikenal sebagai *underemployment* (O'Hare, William, Kelvin dan Amy, 2004). *Virginia Economic Development Partnership* (VEDP) menyatakan bahwa untuk memperoleh gambaran lebih lengkap mengenai ketenagakerjaan maka pembahasan masalah *unemployment* dan *underemployment* harus dilakukan secara bersama – sama (VEDP, n.d.).

Seseorang yang tidak termasuk bekerja atau mencari kerja biasanya dikategorikan sebagai *out of labor force* atau bukan angkatan kerja. *Discourage worker* adalah seseorang yang sebelumnya mencari kerja (*unemployment*) namun sudah tidak lagi mengharapkan memperoleh pekerjaan dalam kurun waktu 4 minggu terakhir. Mencermati kondisi tersebut, beberapa peneliti tetap memasukannya sebagai *unemployed* atau sebagai angkatan kerja. Dasar teori yang digunakan adalah bahwa kelompok *discourage worker* tersebut "sensitif" terhadap perubahan ekonomi, mereka menjadi putus asa karena efek perekonomian yang kurang baik. Apabila perekonomian kembali membaik dan kesempatan mencari kerja kembali terbuka, maka mereka akan kembali aktif sebagai angkatan kerja (Dooley dan Prause, 2004).



Gambar 2.2. *Basic Labor Force Category*
(Dooley dan Prause, 2004)

Penduduk bekerja penuh (*full time worker*) yaitu penduduk yang bekerja dengan jumlah jam kerja 35 jam atau lebih selama seminggu. Setengah pengangguran menurut konsep definisi yang digunakan BPS dalam website datastatistik-indonesia adalah orang yang bekerja kurang dari jam kerja normal (35 jam seminggu). Setengah pengangguran sukarela adalah angkatan kerja yang bekerja di bawah jam kerja normal tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan. Setengah pengangguran terpaksa adalah angkatan kerja yang bekerja dibawah jam kerja normal dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan.

2.2. Pengangguran (*Unemployment*)

Sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa penduduk angkatan kerja terdiri dari *employment* dan *unemployment*. Analisis ketenagakerjaan mengklasifikasikan kedua kelompok tersebut berdasarkan beberapa pendekatan. Tiga pendekatan di antaranya adalah pendekatan kebiasaan (*Gainful worker approach*), pendekatan aktivitas kini (*labor force approach*) dan pendekatan pemanfaatan dari mereka yang bekerja (*labor utilization approach*). Pendekatan

Universitas Indonesia

kebiasaan, analisis ketenagakerjaan mengelompokan seseorang melakukan aktivitas ekonomi berdasarkan kebiasaan yang dilakukan. Pendekatan ini tidak menggunakan batasan waktu tertentu dalam kegiatan ekonomi sehingga sulit untuk menentukan dengan jelas penduduk yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan (Cendrawati, 2000).

Analisis ketenagakerjaan menggunakan pendekatan aktivitas kini telah menggunakan batasan waktu tertentu untuk membedakan kelompok angkatan kerja dan bukan angkatan kerja, termasuk membedakan antara yang bekerja atau mencari pekerjaan. Namun batasan waktu yang digunakan masih belum dapat mengelompokan dengan jelas antara angkatan kerja yang bekerja atau menganggur. Beberapa orang ada yang bekerja sambil mencari kerja atau sebaliknya ada yang bekerja dengan jumlah jam kerja rendah namun tidak mencari pekerjaan (Cendrawati, 2000).

Simanjuntak (1985) menyatakan bahwa pendekatan angkatan kerja yang membedakan orang bekerja dan menganggur pada dasarnya menimbulkan tiga masalah pokok. Pertama, penentuan batasan jam kerja yang berbeda – beda mengakibatkan kekaburan pengertian dan definisi bekerja dan menganggur. Kedua, pembedaan angkatan kerja menjadi bekerja dan menganggur tidak menggambarkan masalah tenaga kerja yang sebenarnya. Ketiga, pembedaan atas orang yang bekerja dan menganggur tidak menunjukkan produktivitas tenaga kerja.

Cendrawati (2000) menjelaskan pendekatan pemanfaatan angkatan kerja melihat jumlah jam kerja, pendapatan upah dan pendidikan yang ditamatkan. Pendekatan ini sebagai penyempurnaan kedua pendekatan sebelumnya. Pendekatan ini membagi angkatan kerja dalam beberapa kelompok, menurut tingkat pendapatan upah angkatan kerja terbagi menjadi mereka yang telah dimanfaatkan secara ekonomi dan mereka yang belum dimanfaatkan secara ekonomi. Berdasarkan jumlah jam kerja, apabila seseorang bekerja di bawah jam kerja normal akan tergolong pekerja yang kurang dimanfaatkan. Berdasarkan tingkat pendidikannya akan diperoleh apakah jenis pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan pendidikan yang ditamatkan.

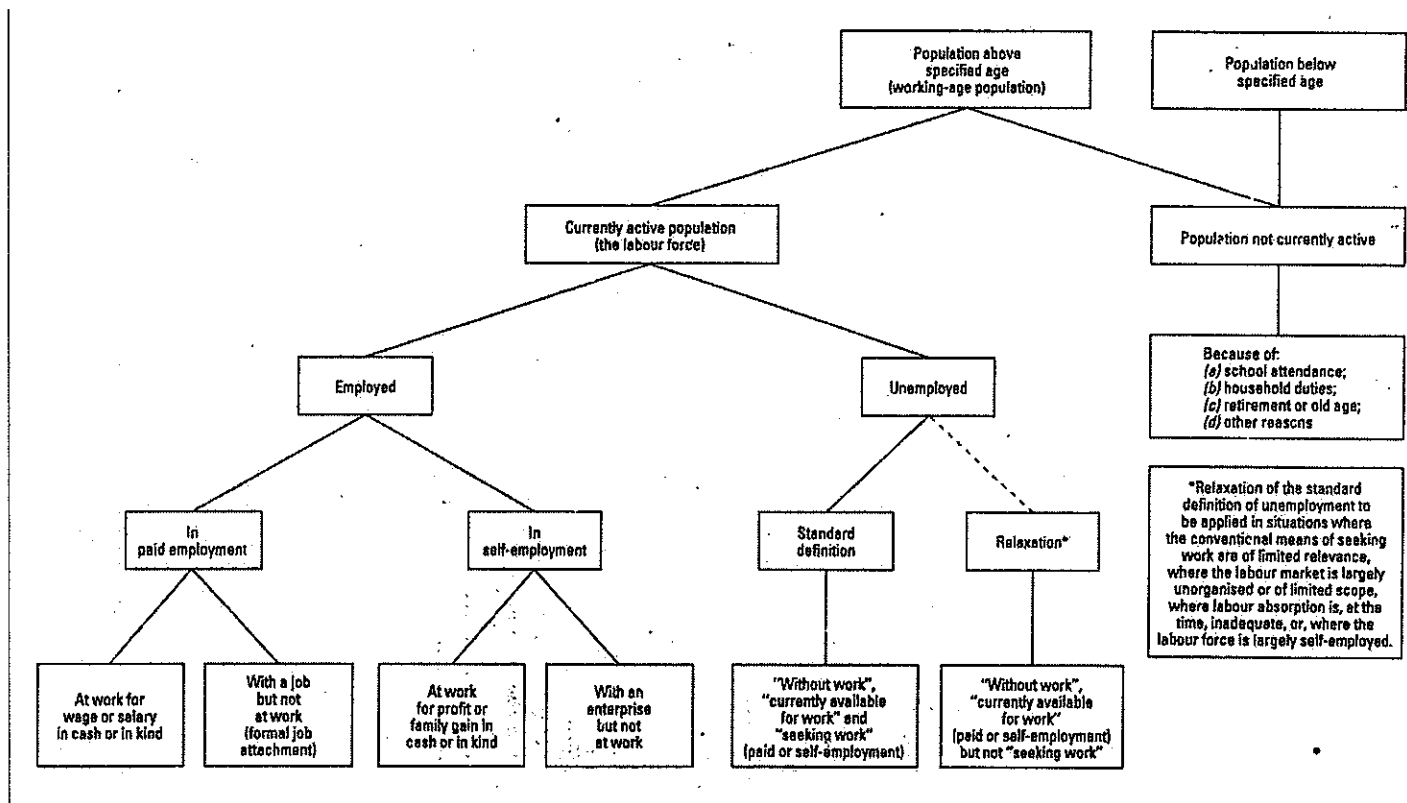
Badan Pusat Statistik telah mengubah beberapa kali konsep mengenai pengangguran. Sebelum tahun 1994, seseorang dikategorikan sebagai pengangguran jika aktif mencari kerja selama periode waktu seminggu yang lalu. Batasan waktu seminggu yang lalu tersebut dipandang terlalu sempit. Sehingga setelah tahun 1994 konsep pengangguran diubah menjadi orang yang aktif mencari kerja kapan pun waktunya, yang penting sampai saat ini dia masih menunggu balasan atau jawaban dari usahanya mencari kerja. Perubahan konsep tersebut mengakibatkan perubahan tingkat pengangguran dari 2,78 persen tahun 1993 menjadi 4,37 persen tahun 1994. Sehingga angka pengangguran sebelum tahun 1994 dan tahun 1994 ke atas tidak dapat diperbandingkan (Suryadarma, Suryahadi dan Sumarto, 2005).

Pada tahun 2001, BPS kembali menyempurnakan konsep mengenai pengangguran sebagaimana yang digunakan sampai saat ini. Penyempurnaan tersebut dilakukan dengan menambahkan tiga kelompok dalam definisi pengangguran sebelumnya. Kelompok yang ditambahkan tersebut adalah:

1. Mereka yang tidak bekerja dan tidak aktif mencari kerja karena merasa tidak ada pekerjaan yang tersedia atau sesuai untuknya (*discourage worker*).
2. Mereka yang telah memperoleh kerja atau diterima kerja namun belum mulai bekerja.
3. Mereka yang sedang mempersiapkan usaha.

Sebelum tahun 2001, kelompok ini berada di luar angkatan kerja sehingga tidak diperhitungkan dalam *unemployment rate*. Suryadarma, Suryahadi dan Sumarto (2005) lebih lanjut menjelaskan bahwa terdapat perbedaan definisi *discourage worker* antara BPS dan ILO (*International Labor Organization*). BPS hanya mendefinisikan *discourage worker* sebagai angkatan kerja yang putus asa dalam mencari kerja sehingga mereka tidak mencari kerja lagi. Sementara ILO mendefinisikan *discourage worker* tidak saja mereka yang berputus asa tetapi memang benar – benar masih ingin bekerja. Gambar berikut merupakan kerangka teoritis angkatan kerja yang dipublikasikan oleh ICLS (*International Conference of Labor Statistician*) (Husmanns et al., 1990, pg. 37). Dalam diagram tersebut *discourage worker* didefinisikan sebagai *unemployed* dengan ciri – ciri *relaxation*.

Relaxation di sini adalah keinginan individu untuk bekerja tidak diimplementasikan secara nyata dengan mencari pekerjaan karena putus asa. Secara psikologis keputusan tersebut terjadi disebabkan usaha – usaha yang dilakukan pada waktu – waktu sebelumnya untuk memperoleh pekerjaan namun tidak juga memperoleh pekerjaan.



*) *Relaxation* adalah angkatan kerja yang sebenarnya masih ingin bekerja namun tidak aktif mencari kerja.

Gambar 2.3. *The Labor Force Frame Work*
(Husmanns et al., 1990)

Dalam kuesioner SAKERNAS Semester II 2008 yang akan digunakan dalam tesis ini, selain terdapat pertanyaan mengenai alasan mengapa seseorang tidak mencari atau mempersiapkan kerja juga terdapat pertanyaan mengenai apakah masih mau bekerja apabila diberikan pekerjaan. Kombinasi kedua pertanyaan tersebut kiranya dapat mengakomodir konsep *discourage worker* yang dikemukakan oleh ILO.

Bellante dan Jackson (1990) menyatakan secara konseptual pengangguran dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu:

- a. Pengangguran Friksional

Pengangguran Friksional adalah pengangguran yang terjadi karena kesulitan mempertemukan pencari kerja dan lowongan kerja yang ada. Mereka berada dalam kondisi menganggur oleh karena informasi lapangan kerja yang kurang sempurna dan membutuhkan biaya mahal untuk memperolehnya. Pengangguran jenis ini terjadi bukan karena kurangnya lapangan kerja namun lebih disebabkan terjadinya *mismatch* (ketidaksesuaian) antara pencari kerja dengan lapangan kerja yang diinginkan.

b. Pengangguran Struktural

Perubahan struktur ekonomi wilayah menyebabkan pergeseran penciptaan lapangan kerja. Peralihan lapangan kerja tersebut tentunya membutuhkan kualifikasi tenaga kerja yang berbeda (lebih baik) daripada sebelumnya. Sehingga pengangguran struktural terjadi karena lowongan kerja yang tersedia membutuhkan keahlian yang berbeda dari yang dimiliki oleh para pengangguran atau lowongan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian para pengangguran tersebut berada di wilayah geografis lain. Akibatnya untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada dibutuhkan biaya yang cukup besar baik untuk peningkatan keahlian agar sesuai dengan kualifikasi lowongan kerja yang tersedia atau biaya perpindahan geografis tenaga kerja untuk memperoleh lowongan kerja sesuai dengan keahliannya. Pengangguran jenis ini terjadi bukan karena lapangan kerja yang terbatas atau tidak ada melainkan karena kualifikasi keahlian yang berbeda atau perlu perpindahan secara geografis.

c. Pengangguran karena kurangnya Permintaan Tenaga Kerja

Pengangguran jenis ini terjadi karena permintaan tenaga kerja sangat rendah, yang berakibat tenaga kerja yang dibutuhkan untuk aktivitas ekonomi lebih rendah daripada penawaran tenaga kerja. Penciptaan tenaga kerja sebagai dampak dari pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dimana pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan akumulasi pertumbuhan nilai tambah pada setiap sektor ekonomi sebagai hasil dari produktifitas tenaga kerja yang baik.

2.3. Setengah Pengangguran (*Underemployment*)

Konsep *underemployment* diperkenalkan untuk mengidentifikasi adanya kekurangan dalam bekerja (*lack of work*). Menurut ILO, *underemployment* meliputi semua orang yang bekerja baik dibayar atau bekerja sendiri (*self employed*) dan bekerja di bawah waktu normal secara tidak sukarela (Liu dan Jackie, 1999). Dengan demikian ada tiga kriteria yang ditetapkan sebagai klasifikasi *underemployment* yaitu: bekerja kurang dari waktu normal, melakukannya secara tidak sukarela dan bersedia menambah jam kerja. Ketiga kriteria tersebut harus terpenuhi seluruhnya. Perlu dicatat bahwa *underemployment* merupakan bagian (*sub group*) dari *employment* (Liu dan Jackie, 1999). Kriteria yang sama juga digunakan oleh Görg dan Eric (2001) dan menyebutkan bahwa *visible underemployment* merupakan kondisi *underemployment* yang berhubungan dengan waktu kerja (*time-related underemployed*).

Underemployment banyak terjadi di negara yang belum memiliki jaminan sosial bagi pengangguran, sehingga kondisi tersebut membuat seseorang harus melakukan pekerjaan apa saja untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (Taşçi, 2005). Görg dan Eric (2001) menyebutkan penelitian *underemployment* sangat sesuai (*relevant*) di negara berkembang dimana *underemployment* menjadi masalah serius yang disebabkan pasar tenaga kerja yang tidak efisien dan banyaknya sektor informal. Masyarakat menghendaki pekerjaan dengan jam kerja dan upah yang memadai sesuai harapan mereka, kondisi tersebut akan membuat tingkat pendapatan keluarganya terus mengalami perbaikan, apabila kondisi ini tidak terpenuhi maka fenomena *underemployment* merupakan masalah yang serius (Findeis, Shields dan Sundar, 2009). Menurut Görg dan Eric (2001) setengah pengangguran atau *underemployment* merupakan kondisi *under utilization of labor resources* dan *inefficiency of labor market*. Bahkan bagi negara berkembang, *underemployment* lebih jauh akan menimbulkan masalah ketidakmerataan pendapatan (*income inequality*), karena masyarakat terpaksa bekerja di bawah jam kerja normal dengan upah di bawah standar.

Wiebe (1996) menyatakan bahwa *underemployment* tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan alokasi jam kerja disebutkan bahwa

underemployment adalah pekerja dengan jam kerja kurang dari 35 jam seminggu. Dalam kelompok tersebut bagi pekerja dengan jam kerja kurang dari 24 jam seminggu disebut sebagai *severe underemployment*. Pekerja dengan jam kerja kurang dari 35 jam seminggu dikenal dengan istilah pekerja paruh waktu (*part time worker*).

Görg dan Eric (2001) menyebutkan ada 2 tipe kategori *underemployment* yaitu *visible* dan *invisible underemployment*. *Visible underemployment* yaitu pekerja dengan jumlah jam kerja yang kurang dari jam kerja normal namun masih mengharapkan untuk bekerja penuh atau *involuntary part time worker*. Sedangkan *invisible underemployment* berkaitan dengan tingkat produktivitas yang tidak memadai, yaitu pekerja yang memiliki pendapatan yang tidak mencukupi atau ketidaksesuaian antara tingkat keahliannya dengan tingkat keahlian yang dibutuhkan dalam pekerjaannya (*over qualified*). Sebagian besar literatur lebih fokus terhadap *visible underemployment* karena cukup sulit mendefinisikan produktivitas yang tidak memadai (*inadequate productivity*) yang diperlukan untuk mengukur *invisible underemployment*. *Underemployment* biasa terjadi pada wilayah perdesaan, pekerja informal dan bekerja pada sektor pertanian, perdagangan dan jasa – jasa.

Hussmans et.al (1990) menyebutkan bahwa kondisi ketenagakerjaan tidak dapat digambarkan secara menyeluruh hanya dengan data pengangguran (*unemployment*) saja harus ditambahkan data mengenai *underemployment* (Taşçi, 2005). State Institute of Statistic (SIS) (2001) menyatakan dalam pengkategorian *underemployment* terdapat dua kelompok utama dari orang – orang yang bekerja (*employed person*). Pertama adalah pekerja paruh waktu tidak sukarela, yaitu orang – orang yang bekerja di bawah waktu normal karena alasan ekonomi disebut *visible underemployment*. Kedua adalah orang – orang yang ingin merubah pekerjaannya karena merasa pendapatannya rendah (*inadequate income*) dan merasa pekerjaannya yang sekarang tidak cocok dengan keahliannya, kelompok kedua ini merupakan pendekatan *invisible underemployment* (Taşçi, 2005).

Clogg (1979) sebagaimana digambarkan dalam kerangka pikir *underemployment* dalam disertasi Cross (2007) menjelaskan yang termasuk alasan

ekonomi (*economic reason*) dari pekerja paruh waktu tidak sukarela adalah: pekerjaan yang berkurang (*slack of work*), kekurangan bahan baku (*material shortage*), perbaikan dari peralatan (mesin) kerja (*repair to equipment or plant*), baru memulai pekerjaan baru (*start a new job during the survey week*), penghentian pekerjaan (*termination of a job during the survey week*) dan tidak mampu memperoleh pekerjaan *full time* (*inability to find a full-time position*).

VEDP (n.d.) menyatakan bahwa seorang *underemployment* tidak tergolong sebagai pengangguran. Penyajian estimasi *underemployment* akan sangat bermanfaat jika dilakukan menurut wilayah. Lebih lanjut VEDP mengkategorikan *underemployment* dalam 5 tipe, yaitu:

1. *Discourage worker*, yaitu orang yang tidak tercatat sebagai pengangguran tapi juga tidak bekerja, namun dia telah berusaha mencari kerja selama 12 bulan. Saat ini orang tersebut tidak mencari kerja lagi karena putus asa (*discourage*) dan menganggap tidak memiliki kualifikasi yang dibutuhkan dalam pasar kerja.
2. *Marginally attached worker*, yaitu orang yang tergolong *discourage worker* namun saat ini dia tidak sedang mencari kerja lagi karena alasan non ekonomi seperti memelihara anak atau masalah sarana transportasi dan sebagainya.
3. *Part time worker for economic reason*, yaitu orang bekerja paruh waktu namun mengharapkan dapat bekerja penuh (*full time*). Mereka bekerja paruh waktu karena alasan ekonomi seperti iklim usaha yang kurang baik, tidak mampu memperoleh pekerjaan *full time* atau turunnya permintaan tenaga kerja musiman dan sebagainya.
4. *Multiple job holder*, yaitu orang yang memiliki lebih dari satu pekerjaan. Orang tersebut sebenarnya memiliki potensi untuk bekerja penuh apabila memperoleh kesempatan.
5. *Underutilized worker*, orang yang bekerja pada tempat/posisi yang tidak memanfaatkan keahliannya secara penuh atau pekerja yang dibayar dibawah standar jika dibandingkan kontribusinya terhadap output.

Mencermati pengkategorian di atas, maka berdasarkan ketersediaan data dalam tesis ini definisi *underemployment* akan mencakup pekerja paruh

waktu pada pekerjaan utama dan memenuhi kategori nomor 3 dan 4 yaitu *part time worker for economic reason* dan *multiple job holder*.

2.4. Utilitas Individu dalam Keterbatasan Jam Kerja

Tingkat kepuasan (*utility*) seseorang berbeda – beda. Keterbatasan waktu yang tersedia dalam setiap harinya membuat seseorang harus memilih penggunaan waktunya untuk memaksimalkan kepuasannya. Pilihannya adalah seberapa banyak seseorang mengalokasikan waktunya dalam pasar kerja dan untuk waktu santai (*leisure time*) (Sutomo, 1996). Seseorang yang bekerja tentu memiliki harapan memperoleh pendapatan pada tingkat kepuasan tertentu dengan konsekuensi harus mengurangi waktu santainya. Sebaliknya seseorang menginginkan waktu santai yang dapat digunakan antara lain untuk rekreasi, mengikuti pendidikan, berolah raga, beristirahat, bersosialisasi dan sejenisnya namun dengan konsekuensi harus kehilangan kesempatannya memperoleh pendapatan (Saddewisasi, 1997).

Teori tersebut menggambarkan bahwa bekerja bukanlah sesuatu yang menyenangkan namun harus dilakukan untuk memperoleh pendapatan guna memenuhi kebutuhan materi (Sutomo, 1996). Heckman (1974) merintis model mengenai alokasi waktu dalam pasar kerja. Asumsi yang digunakan adalah individu dapat secara bebas menentukan alokasi waktu dalam kegiatannya (Feather dan Shaw, 2000). Lebih lanjut Feather dan Shaw (2000) menyebutkan pencapaian kondisi keseimbangan (*equilibrium*) dalam model tersebut ditentukan oleh jam kerja yang fleksibel. Zabel (1993) mengkritik model Heckman tersebut terlalu membatasi (*restrictive*), seseorang tidak dapat secara fleksibel menentukan jumlah jam kerja karena adanya peraturan dan jadwal kerja, seseorang hanya dapat mengontrol pilihannya untuk bekerja atau tidak bukan berapa lama dia harus bekerja (Feather and Shaw, 2000).

Selanjutnya model yang dirintis oleh Heckman tersebut dikembangkan oleh beberapa peneliti dengan memperhatikan batasan waktu (*hours constraint*). Pada umumnya model – model tersebut mengasumsikan individu menerima bekerja atau tidak dengan membandingkan jam kerja yang ditawarkan perusahaan dan jam kerja yang diinginkan. Jika waktu yang diinginkan lebih tinggi dari waktu

yang ditawarkan perusahaan, maka seseorang akan memutuskan untuk masuk dalam pasar kerja (Feather dan Shaw, 2000).

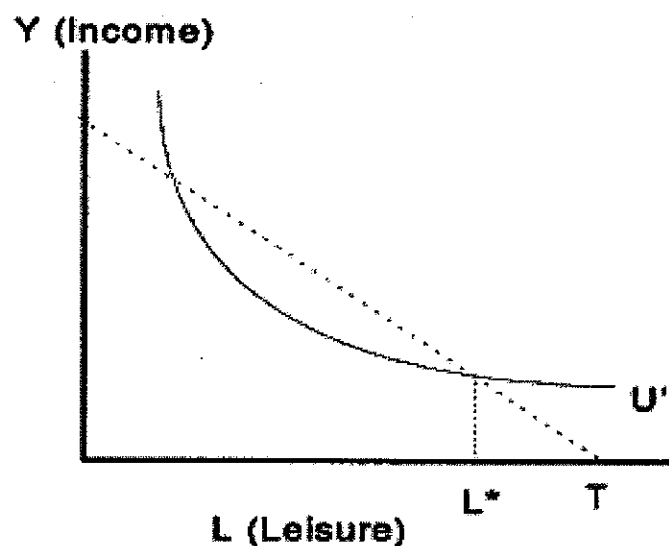
Feather dan Shaw (2000) menjelaskan bahwa model dengan memperhatikan *hour constraint* merupakan perbaikan dari model sebelumnya. Namun model tersebut masih mengabaikan kemungkinan adanya sejumlah tenaga kerja sebagai *underemployment* maupun *overemployment*. Untuk dapat menjelaskan kondisi *underemployed* maupun *overemployed*, diperlukan estimasi mengenai tingkat upah karena keputusan individu untuk berpartisipasi dalam pasar kerja ditentukan oleh tingkat upah. Tingkat upah yang diterima merupakan harga dari waktu yang dialokasikan untuk bekerja. Sebaliknya waktu santai (*leisure time*) memang tidak memiliki ukuran upah nominal, biasanya peneliti menggunakan *hedonic wage estimation* untuk mengatasi hal tersebut. Estimasi tersebut menggunakan asumsi bahwa pekerja dan non pekerja berasal dari populasi yang sama. Asumsi tersebut mengabaikan adanya faktor yang menyebabkan seseorang memutuskan untuk tidak masuk dalam pasar kerja. Zabel (1993) mengkritik hubungan yang kuat antara upah dan partisipasi kerja karena seseorang seringkali memiliki keterbatasan dalam waktu yang mereka akan alokasikan untuk bekerja sehingga tidak masuk dalam pasar kerja.

Feather dan Shaw (2000) dengan mengembangkan model yang dirintis oleh Heckman (1974) mencoba untuk menjawab kritikan - kritikan tersebut. Mereka membangun model tentang *shadow wage* dan *market wage* yang dikaitkan dengan *hours constraint*. *Hours constraint* dalam pasar kerja menyebabkan terjadinya *underemployed* dan *overemployed*. Hasilnya menunjukkan perbedaan elastisitas pemanfaatan waktu kerja bagi pekerja *underemployed* dan *overemployed* yang dipengaruhi oleh upah.

Kesediaan seseorang untuk mengalokasikan waktu untuk bekerja akan meningkat jika harga (tingkat upah) meningkat atau alokasi waktu tersebut akan dikonsumsi lebih banyak jika *opportunity cost* lebih rendah. *Opportunity cost* dari bekerja adalah kehilangan waktu untuk santai sebaliknya bagi waktu santai *opportunity cost* adalah kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan tertentu. Namun pengaruh upah terhadap alokasi jam kerja berbeda bagi pekerja normal, *underemployment* dan *overemployment*. Perilaku seseorang dalam

mengalokasikan waktu berdasarkan pertimbangan kedua hal tersebut dan tentunya dipengaruhi pula oleh faktor – faktor sosial demografi lain (Feather dan Shaw, 2000).

Gambar 2.4 di bawah ini menggambarkan seseorang yang ingin bekerja dengan waktu yang lebih panjang pada tingkat upah tertentu. Namun dia tidak dapat melakukannya karena adanya peraturan jam kerja yang tetap atau kaku (*fixed hour job*). Pada gambar tersebut, seseorang memiliki pilihan untuk bekerja selama 0 jam atau $T-L^*$ jam. Berdasarkan gambar 2.4 tersebut untuk memaksimalkan *utility* individu akan memilih bekerja selama $T-L^*$ jam walaupun dia ingin bekerja lebih lama. Jika saja waktu kerja dapat diatur secara fleksibel, maka seseorang akan memilih bekerja pada jam kerja (h) > $T-L^*$.



Gambar 2.4. Alokasi Waktu Kerja bagi Pekerja *Underemployed*
(Feather dan Shaw, 2000)

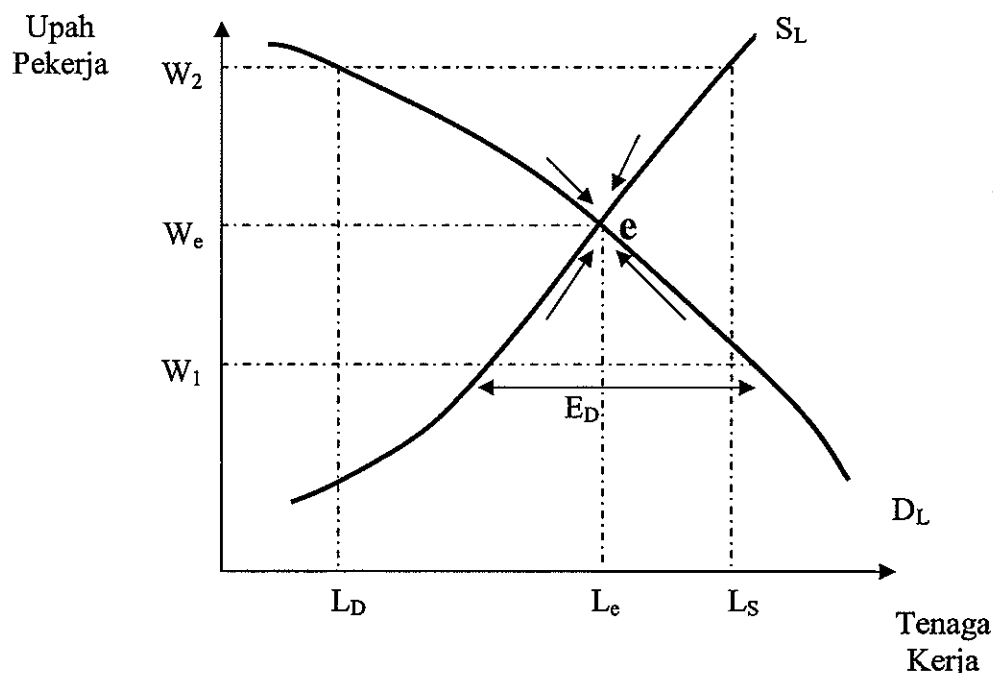
2.5. Penawaran Tenaga Kerja

Teori penawaran tenaga kerja merupakan bagian dari teori *new home economic*, yang merupakan analisis mikro dengan melibatkan beberapa elemen yang berbeda (Sutomo, 1996). Elemen pertama berhubungan dengan memaksimalkan kepuasan (*utility*), dimana komoditi yang dibicarakan tidak terbatas pada komoditi pasar melainkan juga pada komoditi produksi rumah tangga. Istilah "rumah tangga" digunakan untuk membedakan dengan istilah

Universitas Indonesia

"pasar". Dengan demikian kegiatan rumah tangga mengacu pada bukan kegiatan pasar. Elemen kedua adalah teknologi produksi rumah tangga yang digambarkan oleh satu atau beberapa fungsi produksi rumah tangga dalam bentuk transformasi input pasar dan input rumah tangga. Elemen ketiga adalah asumsi cara memperoleh sumber – sumber dalam rumah tangga, terutama waktu yang akan digunakan dalam proses produksi rumah tangga. Elemen terakhir adalah keterbatasan sumber yang dihadapi rumah tangga dalam membuat keputusan (Wirakartakusumah, 1988).

Penawaran tenaga kerja merupakan besarnya ketersediaan sumber daya tenaga kerja dalam masyarakat. Jumlah orang yang bersedia untuk bekerja tergantung pada permintaan dalam masyarakat oleh perusahaan. Permintaan tenaga kerja oleh perusahaan tergantung dari kegiatan ekonomi dan tingkat upah. Proses terjadinya hubungan kerja melalui permintaan dan penawaran tenaga kerja tersebut dikenal sebagai pasar kerja. Sehingga besarnya penyerapan tenaga kerja dalam suatu wilayah sangat tergantung dari volume kegiatan ekonomi yang terjadi dan tingkat upah yang berlaku.



Gambar 2.5. Kurva Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja
(Todaro, 1997)

Teori klasik menjelaskan bahwa pengangguran bersifat sukarela karena tidak sesuai tingkat upah yang ditawarkan dengan aspirasi angkatan kerja. Intervensi pemerintah tidak diperlukan dalam mengurangi pengangguran karena pengangguran hanya bersifat sementara yaitu transisi dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Disamping itu para pelaku ekonomi meyakini bahwa fleksibilitas harga dan upah membuat kedua item tersebut mampu secara otomatis mencapai titik keseimbangan (*equilibrium*) dalam perekonomian.

Pada kondisi upah *equilibrium* (W_e), penawaran tenaga kerja dalam masyarakat sama dengan permintaan tenaga kerja oleh perusahaan (L_e). Sehingga semua tenaga kerja dapat terserap dalam pasar kerja. Pada tingkat upah yang lebih tinggi (W_2) penawaran tenaga kerja melebihi permintaan sejumlah $L_S - L_D$. Kondisi tersebut menyebabkan terjadi persaingan antar individu untuk memperebutkan pekerjaan dampaknya adalah upah akan terdorong turun mendekati atau sama dengan upah *equilibrium* (W_e). Sebaliknya jika tingkat upah berada di bawah upah *equilibrium* (W_1), jumlah tenaga kerja yang diminta oleh perusahaan lebih banyak daripada penawaran tenaga kerja oleh masyarakat dengan selisih E_D . Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya persaingan di antara perusahaan untuk mendapatkan tenaga kerja, dampaknya upah akan terdorong naik mendekati atau sama dengan upah *equilibrium* (W_e). Pada saat penyerapan tenaga kerja pada titik L_e terciptalah kesempatan kerja atau penyerapan kerja penuh (*full employment*). Dengan demikian menurut model tersebut dalam suatu perekonomian *equilibrium* tradisional yang sepenuhnya didasarkan pada upah fleksibel, pengangguran tidak akan pernah terjadi kecuali secara sukarela (Todaro, 1997).

Menurut Todaro (1997) kondisi di atas didasarkan pada ilmu ekonomi Barat tradisional dengan ciri – ciri utamanya antara lain adalah memperhatikan kedaulatan konsumen (*consumer sovereignty*), utilitas atau kepuasan individual (*individual utility*), prinsip memaksimalkan keuntungan (*profit maximization*), persaingan sempurna (*perfect competition*) dan efisiensi ekonomi (*economic efficiency*). Produsen dan konsumen yang atomistik, yaitu tidak ada satu pun produsen maupun konsumen yang mempunyai pengaruh atau kekuatan cukup besar untuk mendikte nilai – nilai input maupun output produksi. Tingkat

penyerapan tenaga kerja (*level of employment*) dan harganya (upah/*wage*) ditentukan secara bersama – sama atau sekaligus oleh semua harga output dan faktor – faktor produksi (selain tenaga kerja) dalam suatu perekonomian yang beroperasi melalui perimbangan (*equilibrium level*) dari kekuatan – kekuatan permintaan dan penawaran.

Produsen atau pengusaha akan meminta lebih banyak tenaga kerja apabila nilai produk marjinal melebihi biayanya (tingkat upah/*wage*). Dengan asumsi *law of deminishing marginal product* berlaku dan harga produk ditentukan sepenuhnya oleh mekanisme pasar. Pada sisi penawaran, individu diasumsikan selalu menginginkan untuk memaksimalkan kepuasan (*utility maximization*). Mereka akan membagi waktunya untuk bekerja atau bersantai berdasarkan kepuasan atau utilitas marjinal masing – masing kegiatan secara relatif, sebagaimana telah disampaikan pada sub bab sebelumnya mengenai teori alokasi waktu.

Model pasar-bebas kompetitif tradisional seperti disampaikan di atas memiliki keterbatasan jika dibandingkan dengan kondisi negara – negara berkembang. Pada sektor industri modern dan sektor pemerintahan yang lapangan kerjanya paling banyak diincar oleh pencari kerja di negara – negara berkembang tingkat upah tidak pernah fleksibel. Upah ditentukan oleh kekuatan – kekuatan institusional seperti pemerintah, serikat pekerja, serikat dagang atau konglomerasi, praktek seleksi dan perekrutan pegawai secara sepihak oleh perusahaan multinasional. Kondisi yang terjadi dalam pasar kerja negara – negara berkembang seperti Indonesia, jika tingkat upah secara institusional ditentukan sebesar W_2 maka akan terjadi kelebihan penawaran sebesar $L_s - L_D$, dimana sejumlah tersebut akan menjadi pengangguran. Mekanisme pasar tidak akan mampu mengubah W_2 mendekati W_e yang merupakan tingkat upah equilibrium atau *shadow price*. Kalaupun bisa turun mendekati W_2 , tidak secara otomatis akan meningkatkan permintaan tenaga kerja. Banyak data empiris menunjukkan turunnya tingkat upah akan diikuti oleh merosotnya kesempatan kerja atau lapangan kerja dan terjadilah lonjakan pengangguran (Todaro, 1997). Dalam kenyataannya kondisi equilibrium tidak pernah tercapai karena

ketidaksempurnaan informasi pasar dan hambatan – hambatan institusional selalu ada (Cendrawati, 2000).

Pertumbuhan ekonomi dipercaya mampu menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran. Oleh sebab itu kebijakan – kebijakan ekonomi lebih diarahkan pada peningkatan output nasional, dengan memaksimalkan pertumbuhan Produk Nasional Bruto (GNP) maka secara nasional akan mampu pula memaksimalkan penyerapan tenaga kerja. Model Harrod-Domar merupakan perangkat teoritis utama untuk menjelaskan proses pertumbuhan ekonomi (Todaro, 1997). Model tersebut menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi sebagai kombinasi pemupukan tabungan dan akumulasi modal fisik pada satu pihak dan rasio modal-output pada pihak lain. Berdasarkan rasio modal-output tertentu tingkat pertumbuhan output nasional dan kesempatan kerja dapat dimaksimumkan dengan cara memaksimumkan tabungan atau investasi. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang pesat akan muncul secara otomatis jika dilakukan pemupukan dan pengerahan tabungan domestik dan cadangan devisa untuk melakukan investasi besar – besaran di sektor industri

Namun pada kenyataannya pertumbuhan output industri yang pesat tidak selalu sejalan dengan penciptaan lapangan kerja. Penyebab utamanya adalah produktifitas tenaga kerja. Semakin banyak akumulasi modal, maka perusahaan akan memikirkan cara yang lebih efektif dan efisien untuk meningkatkan output. Pada tahap industrialisasi, negara – negara berkembang mengadopsi teknologi negara – negara maju sehingga dalam meningkatkan output industri digunakan metode produksi yang lebih padat modal. Dampaknya adalah pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak sejalan dengan penciptaan lapangan kerja. Kodisi tersebut dapat dijelaskan dengan melihat rasio modal-tenaga kerja pada suatu periode tertentu.

Teori Lewis (1954) menyatakan kelebihan tenaga kerja merupakan potensi bukan permasalahan. Lewis membuat model teoritis yang memusatkan perhatian pada transformasi struktural dari perekonomian subsisten menuju perekonomian modern. Teori tersebut kemudian diubah, diformalkan dan dikembangkan lebih lanjut oleh John Fei dan Gustav Ranis (1964). Menurut model pembangunan yang diajukan Lewis, perekonomian terdiri dari 2 sektor

yaitu sektor tradisional yang merupakan sektor perdesaan subsisten dengan ciri – ciri kelebihan penduduk dan produktifitas marjinal tenaga kerja sama dengan nol, sehingga surplus tenaga kerja (*labor surplus*) di perdesaan jika sebagian ditarik dari sektor pertanian di perdesaan tidak akan mengurangi output. Sektor berikutnya adalah sektor industri perkotaan modern dengan tingkat produktifitas yang tinggi dan merupakan tempat penampungan tenaga kerja yang di transfer sedikit demi sedikit dari sektor subsisten. Model ini memperhatikan terjadinya proses peralihan tenaga kerja sebagai dampak pertumbuhan output dan peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor modern. Pertumbuhan output sektor modern disebabkan tingginya produktifitas penduduknya yang berakibat terjadinya akumulasi modal yang dapat kembali diinvestasikan untuk ekspansi perusahaan dan menciptakan lapangan kerja.

Model yang diajukan oleh Lewis memang sesuai dengan sejarah perkembangan ekonomi negara – negara Barat, namun beberapa asumsi yang digunakan tidak sesuai dengan kondisi negara – negara berkembang. Asumsi pertama adalah pengalihan tenaga kerja pada model ini karena penciptaan lapangan kerja pada sektor industri yang sejalan dengan akumulasi modal yang terjadi di wilayah perkotaan. Sebagaimana disampaikan sebelumnya, sektor ekonomi modern di negara berkembang sangat tergantung pada teknologi negara – negara maju.

Asumsi pertama menjadi tidak berlaku apabila akumulasi modal diinvestasikan dalam bentuk barang – barang modal hasil teknologi negara maju yang lebih canggih dan hemat tenaga kerja. Adanya kemungkinan keuntungan yang diperoleh ditanamkan ke negara lain misalnya dalam bentuk deposito ke bank – bank di negara maju. Asumsi kedua adalah bahwa di perdesaan terjadi kelebihan tenaga kerja dan di perkotaan terjadi penyerapan faktor – faktor produksi yang optimal. Sebagian penelitian menunjukkan kondisi sebaliknya yang terjadi di negara berkembang. Asumsi ketiga adalah pasar kerja yang kompetitif di sektor modern menjamin keberadaan upah riil di perkotaan yang konstan sampai pada suatu titik dimana surplus penawaran tenaga kerja telah habis terpakai. Kondisi di negara berkembang upah cenderung terus mengalami peningkatan karena berbagai faktor walaupun pengangguran terus meningkat.

Kondisi tersebut membuat perusahaan tidak selalu memilih untuk menambah tenaga kerja guna ekspansi perusahaan (Todaro, 1997).

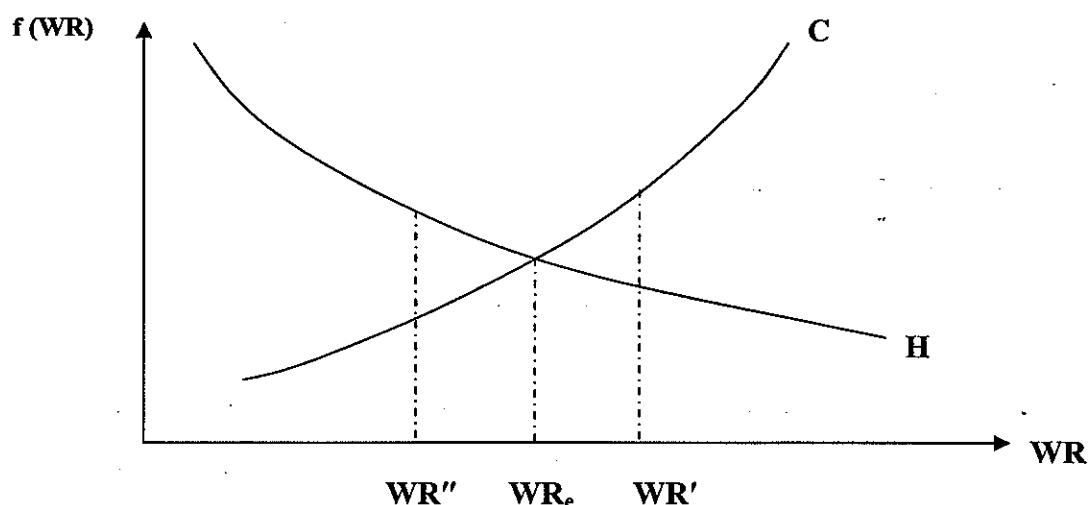
2.6. Job Search Theory

Tingkat pendidikan merupakan salah satu *human capital* yang memiliki nilai strategis dalam ketenagakerjaan. Tingginya tingkat pendidikan sering kali diidentikkan dengan peningkatan pendapatan karena akan meningkatkan produktivitasnya dalam bekerja. Namun beberapa penelitian menunjukkan pengangguran tenaga kerja dengan pendidikan tinggi lebih banyak daripada pendidikan rendah. Salah satu penyebab terjadinya kondisi ini adalah semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula standar upah yang diharapkan. Seseorang yang berpendidikan tinggi lebih memilih menganggur daripada memilih pekerjaan yang tidak sesuai dengan aspirasinya. Dengan kata lain bagi kelompok individu tersebut menganggur memiliki nilai utilitas yang lebih tinggi daripada menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan aspirasinya.

Bagi perekonomian suatu wilayah pengangguran baik tenaga kerja terdidik maupun kurang/tidak terdidik merupakan pemborosan atau *inefficiency*. Namun melihat dampak ekonomisnya pengangguran dari tenaga kerja terdidik mempunyai dampak ekonomis yang lebih besar dari tenaga kerja kurang/tidak terdidik (Suratman, 1994). Kondisi ini disebabkan tenaga kerja terdidik telah melakukan investasi terhadap peningkatan kualitas *human capital*. Dengan harapan investasi tersebut akan mendatangkan keuntungan bagi dirinya, namun ternyata kondisi perekonomian tidak mampu memberikan keuntungan tersebut. Metode *Job Search Theory* merupakan salah satu metode untuk menganalisis pengangguran tenaga kerja terdidik.

Teori ini menghipotesakan bahwa mencari kerja akan lebih efektif jika dilakukan sambil menganggur dibandingkan bila dilakukan sambil bekerja, yang berarti lama mencari kerja akan sama dengan lama menganggur. Kondisi tersebut disebabkan informasi pasar kerja yang tidak sempurna berkaitan dengan kepastian kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan dan tingkat upah yang ditawarkan. Sehingga seorang pencari kerja harus benar – benar meluangkan waktunya untuk mencari informasi pasar kerja yang lebih tepat agar memperoleh pekerjaan dan

tingkat upah sesuai aspirasinya (Suratman, 1994). Hipotesa lainnya adalah semakin tinggi tingkat pendidikan angkatan kerja maka *reservation wage* akan semakin tinggi karena memperhitungkan investasinya dalam peningkatan *human capital*.



Gambar 2.6. Kondisi Keseimbangan Mencari Kerja yang Optimal
(Sumber: Suratman, 1994)

Mencari kerja merupakan investasi yaitu suatu aktivitas yang membutuhkan biaya dan mengharapkan keuntungan. Biaya yang dimaksud meliputi seluruh pengeluaran dalam mencari kerja dan kesempatan yang hilang. Sedangkan keuntungannya adalah pendapatan yang diperoleh setelah menerima tawaran kerja. Oleh sebab itu *reservation wage* sangat menentukan keputusan seorang pencari kerja untuk menerima atau menolak tawaran kerja. Tingkat *reservation wage* dipengaruhi oleh karakteristik pekerja seperti umur, pendidikan, pengalaman kerja, pendapatan keluarga dan lainnya (Suratman, 1994).

Dalam *Job Search Model*, seorang tenaga kerja berusaha memaksimalkan *expected net income*-nya. Kegiatan mencari kerja akan diakhiri jika memperoleh tawaran kerja yang memberikan tambahan pendapatan (*marginal return*) sama dengan tambahan biaya (*marginal cost*) yang dia keluarkan selama mencari kerja. Pada strategi yang optimal besarnya *wage reservation* akan sama dengan perpotongan nilai *marginal return* dan *marginal cost*.

Gambar 2.6 menunjukkan proses pencarian kerja berkaitan dengan tambahan imbalan yang akan diterima dan tambahan biaya yang harus

dikeluarkan pada kondisi *wage reservation* (WR) tertentu. Garis H adalah *expected marginal return* yang merupakan fungsi menurun dari WR. Sementara garis C adalah *marginal cost* yang digambarkan sebagai fungsi yang meningkat dari WR. Pencari kerja dengan strategi optimal akan menetapkan besarnya nilai WR ketika H ($f(WR)$) sama dengan C ($f(WR)$) atau WR_e . Jika pencari kerja menetapkan WR yang lebih tinggi (WR'), maka tambahan biaya yang harus dikeluarkan lebih besar daripada tambahan imbalan yang akan diterima dari pekerjaan tersebut. Kondisi tersebut tentu bukan merupakan kondisi optimal. Sebaliknya jika menetapkan WR lebih rendah (WR''), walaupun tambahan biaya yang harus dikeluarkan relatif lebih murah namun pada kondisi tersebut pencari kerja belum memperoleh tambahan imbalan yang maksimal dari pekerjaan tersebut.

Search Theory mengasumsikan bahwa segala sesuatu yang bisa mengurangi biaya mencari kerja akan menaikkan aspirasi tentang upah (WR). Salah satu contoh adalah adanya tunjangan bagi pengangguran. Tunjangan tersebut akan membuat pencari kerja cenderung menaikkan WR-nya. Pencari kerja akan menolak pekerjaan dengan upah rendah (di bawah standar) dan memilih tetap menjadi pengangguran karena merasa sudah memiliki tunjangan untuk dapat bertahan hidup walaupun tanpa bekerja (Suratman, 1994). Contoh lain adalah investasi pada kegiatan ekonomi yang mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Semakin banyaknya permintaan tenaga kerja tentunya berdampak pada mudahnya pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan yang berarti biaya mencari kerja lebih murah. Kondisi tersebut akan mendorong pencari kerja meningkatkan WR-nya (Suratman, 1994).

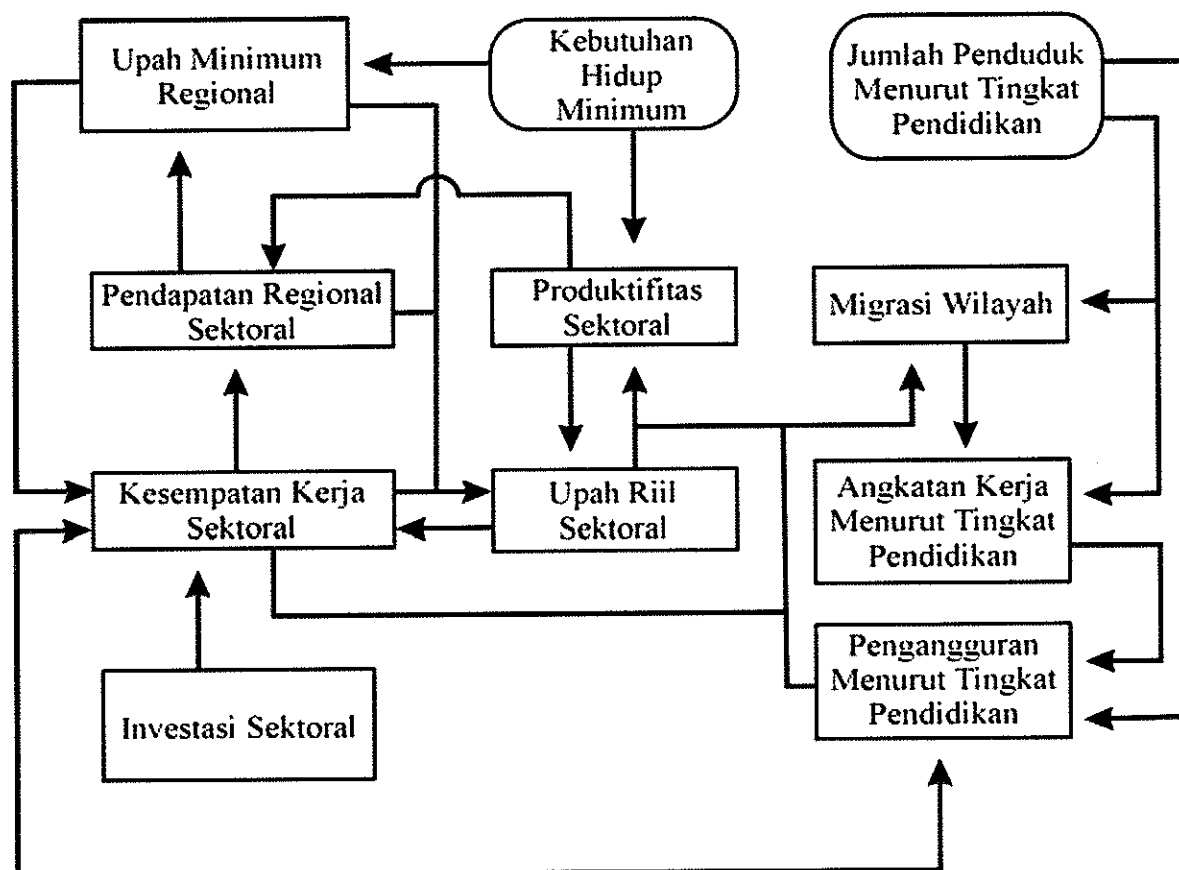
Kondisi pasar kerja di Indonesia pada umumnya kelebihan penawaran. Hal tersebut membuat *reservation wage* yang ditetapkan sangat rendah. Ditambah lagi dengan tidak adanya jaminan pendapatan bagi penganggur, maka seseorang harus melakukan pekerjaan apa saja untuk tetap memperoleh pendapatan (Suratman, 1994). Salah satu dampaknya adalah seseorang akan bekerja di bawah jam kerja normal dan atau menerima upah di bawah *reservation wage*-nya dan atau bekerja yang tidak sesuai dengan aspirasinya. Tenaga kerja tersebut terpaksa menerima tawaran kerja yang tidak sesuai dengan aspirasinya namun tetap

mencari kerja karena masih mengharapkan memperoleh pekerjaan sesuai aspirasinya, kondisi ini dikenal sebagai *underemployment*.

2.7. Kerangka Pikir Teoritis

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka kerangka pikir teoritis yang akan diajukan adalah sebagaimana disajikan pada diagram 2.8 dan 2.9. Diagram tersebut menjelaskan bahwa faktor ekonomi dan faktor non ekonomi mempengaruhi partisipasi seseorang dalam pasar kerja. Jumlah jam kerja merupakan kriteria yang digunakan oleh BPS untuk menentukan apakah seorang pekerja tersebut merupakan pekerja penuh atau pekerja paruh waktu. Pekerja dengan jam kerja 35 jam atau lebih tergolong sebagai *full time worker*, sedangkan pekerja paruh waktu tergolong *underemployment* jika masih berniat menambah jam kerja (Berger, Bollinger, Coomes & Langley, 2003).

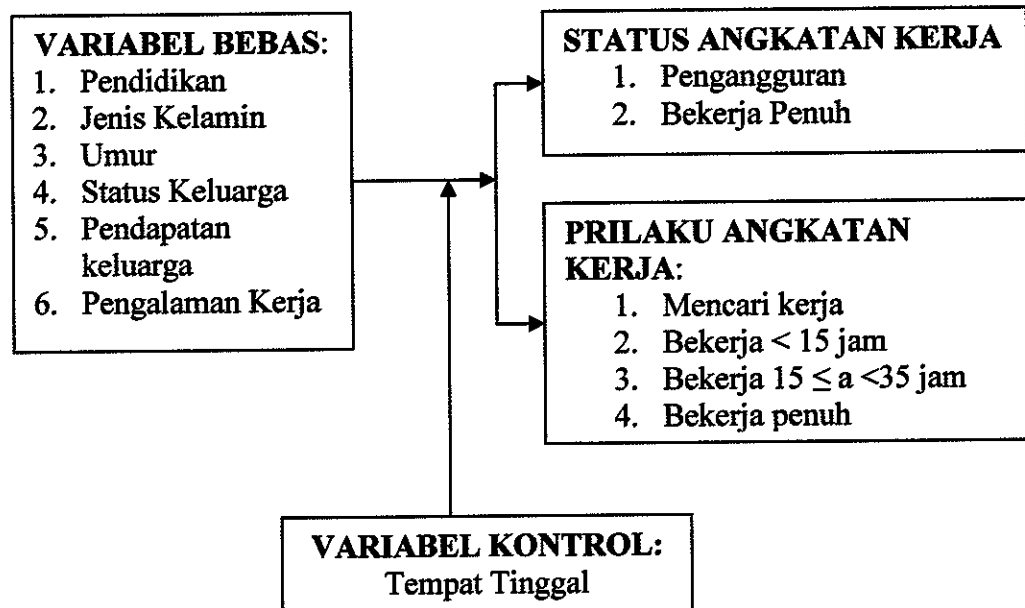
Penyerapan tenaga kerja merupakan salah satu cara perluasan usaha. Dalam melakukan perluasan usaha dibutuhkan investasi baik berasal dari domestik maupun non domestik. Bagi daerah yang sedang berkembang, tidak semua kebutuhan pembiayaan pembangunan dapat ditanggulangi sendiri termasuk memberikan bantuan modal terhadap pengembangan usaha di wilayahnya. Kondisi tersebut menuntut usaha pemerintah untuk menarik investor non domestik agar proses pembangunan dapat berjalan dengan lebih cepat. Perluasan perusahaan merupakan salah satu cerminan terjadinya pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Namun sayangnya pertumbuhan ekonomi tidak selamanya berimbang pada penyerapan tenaga kerja di suatu wilayah. Karakteristik angkatan kerja sangat menentukan pemanfaatan tenaga kerja pada wilayah tersebut. Semakin berkembang ekonomi suatu wilayah, maka kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan juga semakin meningkat.



Gambar 2.7. Kerangka Pikir Teoritis Pasar Kerja
(Siregar dan Sukwika, n.d.)

Diagram di atas dibuat oleh Siregar dan Sukwika (n.d.) dalam menjelaskan faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja pasar kerja di Kabupaten Bogor. Sebagaimana yang disampaikan VEDP (n.d.), beberapa tipe dari *underemployment* adalah *discourage worker*, *marginal attached worker*, *part time worker for economic reason*, *multiple job holder* dan *underutilized worker*. Kelima tipe *underemployment* tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan faktor non ekonomi maupun interaksi antara kedua faktor tersebut. Namun dengan keterbatasan data, *underemployment* yang akan diamati hanya berdasarkan jumlah jam kerja selama seminggu yaitu pekerja paruh waktu yang masih mengharapakan atau bersedia menambah jam kerja.

Gambaran hubungan yang lebih jelas antara variabel demografi dan status angkatan kerja adalah sebagai berikut:



Gambar 2.8. Kerangka Pemikiran Status Angkatan Kerja
(Cendrawati, 2000)

Kerangka pikir Cendrawati (2000) menjelaskan adanya pengaruh karakteristik individu terhadap status angkatan kerja. Kerangka pikir Siregar dan Sukwika (n.d.) menggambarkan adanya pengaruh kondisi ekonomi wilayah dengan status angkatan kerja dalam hal ini pengangguran. Tesis ini mengkombinasikan kedua kerangka pikir tersebut dengan tujuan memperoleh gambaran yang lebih jelas kondisi ketenagakerjaan khususnya di Provinsi NTB.

2.8. Hasil Penelitian Sebelumnya

Beberapa hasil penelitian sebelumnya terkait dengan pengangguran (*unemployment*) dan pemanfaatan jam kerja disajikan berikut ini. Penelitian mengenai angkatan kerja yang dilakukan pada umumnya selalu memisahkan antara *unemployment* dan *underemployment* padahal keduanya merupakan permasalahan bagi ketenagakerjaan.

Suratman (1994) dalam tesisnya mengenai pencari kerja di Kalimantan menyatakan bahwa berdasarkan *job search theory* seseorang menerima atau menolak pekerjaan ditentukan oleh *wage reservation*-nya. Tingkat *wage reservation* dari pencari kerja dipengaruhi oleh karakteristiknya antara lain tingkat pendidikan, jenis kelamin, umur dan sebagainya. Teori tersebut menyatakan seseorang akan menerima pekerjaan apabila tawaran upah dari perusahaan sama atau lebih tinggi dari *wage reservation*-nya. Namun karena menganggur merupakan "barang mewah" sehingga seseorang akan menerima tawaran kerja

Universitas Indonesia

walaupun tidak sesuai dengan aspirasinya supaya tetap memperoleh pendapatan untuk membiayai hidupnya. Bagi mereka yang bekerja tidak sesuai dengan aspirasinya kegiatan mencari kerja tetap dilakukan sambil bekerja.

Sutomo (1996) menggunakan data SAKERNAS 1987 menganalisis pengaruh faktor ekonomi dan non ekonomi termasuk demografi terhadap jam kerja pekerja yang memiliki upah. Dengan memperhatikan variabel upah, kelompok umur dan tingkat pendidikan, ternyata terdapat pengaruh yang signifikan pada kelompok pekerja yang memiliki upah di bawah UMR terhadap jam kerja antara pekerja yang berpendidikan SD ke bawah dan SLTA ke atas. Bagi pekerja dengan upah di bawah UMR dan berpendidikan SD ke bawah ternyata umur memiliki pengaruh yang negatif terhadap jam kerja, yang berarti pekerja kelompok umur tua memiliki jam kerja lebih rendah daripada kelompok umur muda. Kondisi yang sama juga terjadi pada kelompok pekerja berpendidikan SLTP. Interaksi antara upah dan tempat tinggal, terdapat perbedaan pengaruh pekerja yang memiliki upah di bawah UMR terhadap jam kerja bagi yang tinggal di perkotaan dengan di perdesaan. Hasilnya adalah pekerja yang tinggal di kota dengan upah di bawah atau sama dengan UMR memiliki rata – rata jam kerja lebih panjang dibandingkan yang tinggal di desa. Pekerja laki – laki memiliki jam kerja lebih panjang daripada perempuan baik yang memiliki upah di bawah maupun sama dengan UMR. Kesimpulannya adalah, berdasarkan tingkat upah dan jam kerja, maka setengah pengangguran lebih banyak terdapat di perdesaan dibandingkan perkotaan, pada pekerja perempuan dibandingkan laki – laki, pada pekerja dengan pendidikan SD ke bawah dan kelompok umur 55 tahun ke atas.

Saddewisasi (1997) menggunakan data SAKERTI 1993 meneliti jam kerja ibu rumah tangga yang bekerja. Persentase pekerja ibu rumah tangga berstatus berusaha merupakan pekerja paruh waktu tertinggi, yang terendah adalah sebagai buruh/karyawan. Kondisi tersebut terkait dengan tanggung jawab ibu rumah tangga sebagai pengurus rumah tangga sehingga tidak dapat berpartisipasi penuh dalam pasar kerja. Sebagian besar ibu rumah tangga yang bekerja adalah yang tidak memiliki anak balita. Jika dilihat dari tingkat pendidikan, maka mereka yang berpendidikan tidak tamat SD dan tamat SD memiliki proporsi tertinggi sebagai pekerja paruh waktu. Ibu rumah tangga yang

Universitas Indonesia

tinggal di pedesaan merupakan proporsi terbesar pekerja paruh waktu dibandingkan yang tinggal di perkotaan. Menurut kelompok umur disebutkan kelompok umur 30-39 merupakan proporsi pekerja ibu rumah tangga yang bekerja paruh waktu terbesar dibandingkan kelompok usia 15-29 dan 40-49. Berdasarkan besarnya asosiasi parsial pada analisis deskriptif dan signifikansi ($p < 0,05$) dalam analisis inferensial, secara umum perbedaan faktor sosial, ekonomi dan demografi memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah jam kerja ibu rumah tangga.

Cendrawati (2000) menggunakan data SAKERTI tahun 1993 menganalisis kondisi pengangguran di Indonesia. Angka pengangguran terbuka di Indonesia relatif kecil jika dibandingkan dengan negara – negara maju yang memiliki sistem tunjangan sosial bagi pengangguran. Tidak adanya tunjangan sosial dari pemerintah menyebabkan angkatan kerja yang tidak memperoleh dukungan finansial dari keluarganya, sangat kecil kemungkinan bagi mereka untuk berdiam diri. Mahalnya biaya pendidikan di Indonesia menyebabkan hanya anak dari keluarga yang mampu secara finansial dapat sekolah sampai pendidikan tinggi. Dengan kemampuan finansialnya tersebut, mereka mampu membiayai anaknya menganggur dalam proses mencari pekerjaan. Prilaku angkatan kerja dapat dibagi menjadi 4 yaitu mencari kerja saja (pengangguran), bekerja kurang dari 15 jam seminggu, bekerja antara 15 sampai dengan 35 jam seminggu dan bekerja penuh (paling sedikit 35 jam seminggu). Proporsi perempuan menganggur lebih banyak daripada laki – laki dan proporsi pengangguran lebih banyak di pedesaan. Baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan proporsi menganggur penduduk usia 35 tahun ke atas lebih besar daripada yang berusia muda. Berdasarkan tingkat pendidikan, resiko penduduk berpendidikan tinggi menjadi pengangguran lebih besar dari pada tingkat pendidikan di bawahnya untuk wilayah perkotaan. Sementara di daerah pedesaan penduduk berpendidikan SLTA memiliki resiko lebih tinggi menjadi pengangguran. Karakteristik lainnya yang memiliki resiko lebih tinggi untuk menjadi pengangguran adalah angkatan kerja berstatus kawin dan belum memiliki pengalaman kerja. Sementara pendapatan keluarga tidak memiliki pengaruh yang signifikan.

Purwaningsih & Murtiningsih (2006) melakukan analisis determinan jam kerja terhadap pekerja di Jawa Tengah. Upah dan umur memiliki pengaruh

signifikan terhadap jam kerja dimana pekerja dengan upah di atas UMR memiliki rata – rata jam kerja lebih panjang untuk setiap kelompok umur. Pengaruh tingkat pendidikan dan tempat tinggal tidak signifikan terhadap jam kerja. Sementara pengaruh jenis kelamin dan status perkawinan berpengaruh signifikan. Laki – laki berstatus kawin memiliki jam kerja dalam seminggu yang lebih panjang daripada perempuan. Pekerja berstatus kawin memiliki jam kerja dalam seminggu yang lebih panjang daripada pekerja berstatus tidak kawin.

Penelitian – penelitian di atas hanya terfokus pada pengangguran dan pemanfaatan jam kerja. Tinjauan literatur penelitian tersebut menyebutkan pengangguran belum mengungkapkan masalah sebenarnya dari tenaga kerja karena adanya sekelompok pekerja yang belum dimanfaatkan secara optimal. Namun nampaknya kondisi kelompok tersebut belum teramati secara proporsional. Permasalahan yang belum banyak diungkap adalah *underemployment* yang merupakan bentuk *underutilization of labor resource*. Sementara pemanfaatan jam kerja di bawah normal tidak sepenuhnya merupakan masalah karena ada kelompok pekerja yang memang dengan sukarela bekerja di bawah jam kerja normal. Penelitian khusus mengenai *underemployment* di Indonesia masih sangat terbatas, oleh sebab itu disajikan pula beberapa penelitian lain dari mancanegara sebagai perbandingan dan pengayaan literatur.

Wiebe (1996) menyatakan Provinsi NTB memiliki *underemployment rate* tertinggi untuk kelompok pekerja informal. Peraturan yang ada untuk standar pendapatan hanya berlaku pada sektor formal, namun bagi sektor informal memiliki risiko besar kehilangan pendapatan dan rentan terhadap guncangan ekonomi. Kerentanan sektor informal merupakan kombinasi dari tingkat pendapatan yang rendah dan ketidak pastian sumber pendapatan. Pada tahun 1993 sekitar 39,7 persen tenaga kerja Indonesia *underemployed*, bahkan 23,1 persen di antaranya merupakan *severe underemployed* (bekerja kurang dari 25 jam seminggu). Pada sektor informal terjadi *underemployment* yang lebih besar dibandingkan sektor formal. Menurut jenis kelamin, perempuan mengalami *underemployment* lebih tinggi dari laki – laki. Wilayah perdesaan memiliki *underemployment* lebih tinggi daripada perkotaan. Jika dilakukan interaksi maka laki – laki yang tinggal di perdesaan memiliki *underemployment* lebih tinggi dari

Universitas Indonesia

pada perempuan perkotaan. Sedangkan menurut umur, *underemployment* banyak terjadi pada pekerja usia muda. Pekerja dengan pendidikan SD ke bawah memiliki tingkat *underemployment* tertinggi dibandingkan tingkat pendidikan di atasnya. *Underemployment* berkaitan dengan bidang pertanian dan segala pekerjaan yang berkaitan dengan pertanian, kondisi ini disebabkan pekerja pertanian tidak membutuhkan keahlian tertentu dan merupakan karakteristik wilayah perdesaan.

Coulon (2002) dalam penelitiannya mengenai *underemployment* menyatakan bahwa apabila seseorang melakukan pekerjaan di bawah tingkat pendidikannya, maka terjadilah kompetisi dalam pasar kerja dengan orang yang tingkat pendidikannya lebih rendah. Konsekuensinya adalah orang dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah tersebut harus menerima pekerjaan di bawah tingkat pendidikannya atau menjadi pengangguran. Sehingga *underemployment* pada kelompok penduduk berpendidikan tinggi mempengaruhi kelompok penduduk dengan tingkat pendidikan di bawahnya. Kondisi ini terjadi disebabkan tingginya tingkat pendidikan masyarakat namun lapangan kerja yang tersedia bagi kelompok tersebut sangat terbatas. Variabel demografi yang mempengaruhi seorang berpendidikan memperoleh pekerjaan yang sesuai adalah umur, jenis kelamin, status sosial, pengalaman kerja dan spesialisasi.

Dhanani (2004) menyatakan sebelum krisis moneter yaitu periode 1976 - 1997, sekitar 46 persen pekerja bekerja kurang dari 35 jam seminggu dan 29 persen bekerja kurang dari 25 jam seminggu pada tahun 1976. Namun dengan adanya urbanisasi dan perubahan struktur ekonomi dari pertanian ke industri, jumlah pekerja yang bekerja di bawah 35 jam berkurang menjadi 38 persen dan yang bekerja kurang dari 25 jam seminggu berkurang menjadi 23 persen pada tahun 1997. Pada periode tersebut hanya sekitar sepersepuluh pekerja yang bekerja di bawah 35 jam seminggu berusaha mencari kerja. Selebihnya merasa tidak perlu mencari kerja karena mereka juga melakukan aktivitas lain seperti mengurus rumah tangga maupun sekolah, atau dengan kata lain mereka sukarela bekerja paruh waktu. Pada tahun 2000 sekitar 36 persen pekerja bekerja di bawah 34 jam seminggu, jika dipisahkan menurut wilayah pekerja di perdesaan sekitar 78 persen bekerja di bawah 35 jam sementara pekerja wilayah perkotaan hanya 22 persen. Dari total pekerja laki – laki hanya 27 persen yang bekerja di bawah 35

jam. Jika dibandingkan menurut jenis kelamin sebanyak 54 persen pekerja perempuan bekerja di bawah 35 jam seminggu.

Kim & Park (2006) menyebutkan perubahan kondisi bisnis di Korea pasca krisis moneter 1997. Sistem senioritas jabatan menurut umur dan struktur keluarga dalam perusahaan mengalami perubahan yang bertujuan memperbaiki kinerja supaya lebih efisien dan kompetitif. Sistem kerja pun mengalami perubahan, rapat eksekutif dikurangi menjadi hanya 1 kali seminggu bahkan kurang. Departemen – departemen diubah menjadi tim – tim kerja yang masing – masing memiliki tugas – tugas tertentu dan jelas. Walaupun saat ini tingkat pengangguran telah berkurang, namun kondisi tersebut banyak dipengaruhi oleh bermunculannya *nonstandard employment* yaitu pekerja sementara, pekerja kontrak pendek, pekerja bebas dan pekerja harian. Kondisi tersebut terjadi karena mempekerjakan *irregular worker* lebih murah dari pada *regular worker*.

Tahun 2002, dari hasil survei sekitar 40% lulusan perguruan tinggi bekerja sebagai *irregular worker*, kondisi ini menunjukkan terdapat masalah serius dalam ketenagakerjaan di Korea. Bahkan pekerja pelayanan publik hampir seperlima-nya adalah *irregular workers* yang dibayar dibawah standar.

Terjadinya *job insecurity* (karena langkah efisiensi perusahaan) dan *job-related stress* (persaingan dengan rekan kerja maupun dengan pasar kerja) mengubah persepsi pekerja dalam bekerja. Para pekerja *white collar* dan *blue collar* memiliki persepsi bahwa mereka hanya bekerja sebesar bayaran yang diterima.

Loyalitas dan tetap bertahan pada satu pekerjaan bukan lagi kondisi umum dalam pasar kerja di Korea. Bahkan sebagian pegawai inti atau yang telah berpengalaman lebih memilih keluar dari pekerjaan secara sukarela untuk mencari iklim kerja yang lebih baik atau membuka usaha sendiri. Para pekerja berusaha menyisihkan waktunya untuk meningkatkan kemampuan dalam berbahasa Inggris dan kualifikasi pendidikan mereka, karena kedua hal tersebut sangat diperhatikan untuk memperoleh rekomendasi promosi jabatan dan mempertahankan kelangsungannya karirnya dalam perusahaan.

Dua faktor utama yang menyebabkan berkembangnya *irregular workers* yaitu tingginya *unemployment rate* pasca krisis moneter sehingga

seseorang harus bekerja walaupun sebagai *irregular workers* dan tidak adanya peraturan yang melindungi hak *irregular workers* sehingga perusahaan atau siapapun dapat dengan mudah "memanfaatkan" pekerja yang "tidak berdaya" tersebut yang menyebabkan meningkatnya permintaan akan *irregular worker*.

Weststar (2007) dalam tesisnya menyebutkan terdapat hubungan signifikan antara pendidikan (formal maupun informal) dan pelatihan – pelatihan terhadap *underemployment*. Kemajuan pembangunan suatu wilayah pada umumnya menggeser dominasi sektor primer (*agriculture*) oleh sektor sekunder (*manufacture*) atau sektor tertier (*service sectors*). Banyak negara maju mengalami kemajuan pesat dalam *service sectors*. Jenis pekerjaan yang tergolong *service sectors* seperti keuangan, teknologi komunikasi dan informasi, bio teknologi dan kesehatan. Pekerjaan – pekerjaan tersebut menuntut *highly educated workers* yang dapat diperoleh dari pendidikan maupun pelatihan. Disamping pembentukan modal (*tangible capital*), peningkatan kualitas pendidikan sebagai salah satu *human capital* sangat diperlukan dalam transformasi ketenagakerjaan dari sektor primer ke sektor sekunder maupun tertier. Dalam tesisnya Weststar mengajukan adanya konsep *worker control* yang didefinisikan berdasarkan *social dimension and technical dimension*. Peningkatan pendidikan dan ketrampilan akan meningkatkan kemampuan pekerja untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan (sebagai *social dimension*) dan sistematika pembagian tugas (sebagai *technical dimension*). Kedua hal tersebut diperlukan dalam bekerja untuk menyelesaikan tugas – tugas dengan baik. Hasil penelitiannya menyatakan seorang pekerja yang memiliki *social dimension and technical dimension* dalam pekerjaannya sehari – hari memiliki kecenderungan lebih kecil untuk menjadi *underemployment*. Aspek *social* dan *technical* dalam *worker control* dapat ditingkatkan melalui *information sharing*, pendelegasian wewenang, kewenangan pengambilan keputusan dan otonomi pembagian tugas untuk menyelesaikan pekerjaan.

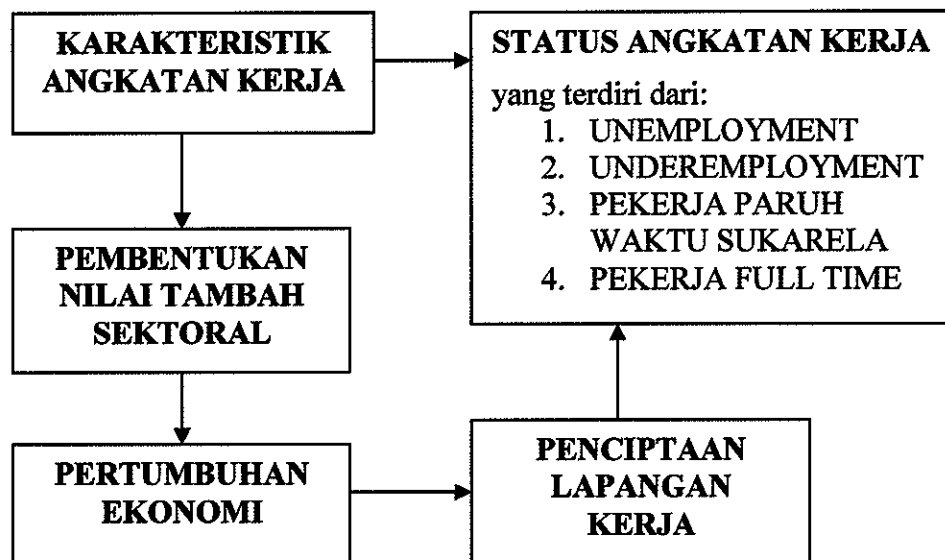
Farooq dan Ahmet (2007) meneliti hubungan *underemployment*, pendidikan dan tingkat kepuasan kerja. Peran *human capital* khususnya dalam aktivitas ekonomi telah lama menjadi perhatian para ekonom dan pengambil kebijakan. Menurut pandangan beberapa peneliti, sistem pendidikan merupakan

”kendaraan” yang efektif untuk meningkatkan keahlian yang dibutuhkan dalam memajukan perekonomian. Tingkat pendidikan penduduk Pakistan terus meningkat dari tahun ke tahun, namun kini semakin banyak penduduk lulusan pendidikan tinggi tidak dapat menggunakan latar belakang pendidikannya dalam bekerja. Kondisi *mismatch* ini mendapat perhatian dari peneliti dan pengambil kebijakan. Para ilmuwan sosial berpendapat peningkatan pendidikan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat melalui peningkatan keahlian dan produktivitas. Para pengambil kebijakan memiliki 2 pendapat, pertama bahwa tingginya tingkat pendidikan penduduk lebih didasarkan pada pertimbangan sosial (meningkatkan kebanggaan dan kepercayaan diri) sementara pasar kerja belum mampu mengakomodir banyaknya tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi. Kedua, kemungkinan adanya implikasi sosial yang dihasilkan dari kelompok penduduk berpendidikan dan tidak puas. Paradigma yang muncul dari peneliti sosial maupun ekonomi adalah bahwa tingginya pendidikan tidak selamanya meningkatkan produktivitas oleh sebab itu tidak selalu berdampak pada peningkatan pendapatan.

BAB III KERANGKA ANALISIS DAN METODOLOGI

3.1. Kerangka Analisis

Kerangka Pemikiran pada gambar 2.3 hanya menyajikan variabel bebas yang merupakan karakteristik penduduk sebagai faktor penyebab status angkatan kerja. Sebagaimana digambarkan pada gambar 2.2 terdapat pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kesempatan kerja yang selanjutnya mempengaruhi status angkatan kerja. Mencermati kerangka teoritis di atas, maka kerangka teoritis model yang akan digunakan dalam tesis ini mencoba menggabungkan antara karakteristik angkatan kerja dan kondisi pembangunan wilayah sebagai berikut:



Gambar 3.1. Kerangka Teoritis Model
(Modifikasi dari Cendrawati, 2000; Siregar dan Sukwika, n.d.)

Penduduk sebagai subyek atau pelaksana pembangunan memiliki peran penting dalam memajukan suatu wilayah. Sehingga karakteristik penduduk menentukan bagaimana pelaksanaan pembangunan wilayah mulai dari input sumber daya, proses pembangunan sampai hasil dari pembangunan yang dilakukan. Pembangunan wilayah yang semakin maju pada umumnya dicerminkan oleh tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan diharapkan mampu menciptakan kesempatan kerja yang lebih banyak bagi penduduknya (Todaro, 1997). Semakin banyak lapangan kerja yang tercipta, tentunya semakin banyak tenaga kerja yang terserap, kondisi tersebut tentunya berdampak pada

pengurangan pengangguran. VEDP (n.d.) menekankan penggambaran *unemployment* dan *underemployment* secara bersama – sama untuk mengetahui kondisi ketenagakerjaan yang sebenarnya.

Wilayah yang semakin berkembang selain menciptakan lapangan kerja baru tentunya semakin selektif dalam menerima tenaga kerja. Proses selektifitas tersebut selain disebabkan adanya transformasi lapangan kerja dari sektor primer ke sektor sekunder maupun tersier juga disebabkan persaingan dengan penduduk migran yang ingin memperoleh pekerjaan di wilayah tersebut. Keberhasilan dalam proses seleksi tersebut sangat dipengaruhi oleh karakteristik penduduk. Yang berhasil akan mengubah status menjadi pekerja sedangkan yang tidak berhasil akan menjadi pengangguran.

Pengangguran (*unemployment*) adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja dan sedang mencari kerja atau mempersiapkan usaha termasuk orang yang sudah diterima tetapi belum mulai bekerja dan *discourage worker* yang masih berniat memperoleh pekerjaan. Pekerja penuh (*full time worker*) adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja 35 jam atau lebih selama seminggu pada pekerjaan utama. Penduduk dengan lama waktu kerja pada pekerjaan utama di bawah 35 jam seminggu dikategorikan sebagai pekerja paruh waktu. Pekerja paruh waktu terdiri atas pekerja paruh waktu secara sukarela dan pekerja paruh waktu tidak sukarela (*visible underemployment*). Penentuan kategori *visible underemployment* dengan memperhatikan ketersediaan data, yaitu: pekerja paruh waktu karena alasan ekonomi (*part time worker for economic reason*), pekerja paruh waktu yang ingin menambah jam kerja namun tidak mencari kerja lagi karena alasan non ekonomi (*marginal attached worker*) dan pekerja paruh waktu yang memiliki lebih dari satu pekerjaan (*multiple job holder*).

3.2. Sumber Data

Pengolahan data menggunakan data mentah Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Semester II (Agustus) tahun 2008 untuk Provinsi NTB. SAKERNAS dilakukan rutin setiap tahun oleh BPS sejak tahun 1976. SAKERNAS beberapa kali mengalami perubahan baik dalam periode pencacahan maupun dalam cakupan sampel. Tahun 1986 sampai dengan 1993 Sakernas

dilaksanakan secara triwulanan; tahun 1994 sampai dengan 2001 secara tahunan setiap bulan Agustus; dan 2002 sampai dengan 2004 selain secara tahunan juga dilaksanakan secara triwulanan. Sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang berdasarkan berbagai pertimbangan teknis metodologi dan mencermati kondisi ketenagakerjaan, maka SAKERNAS dilaksanakan per semester.

Sebagai respon terhadap kebutuhan data pada wilayah terkecil (*small area statistic*), maka sejak Semester II (Agustus) tahun 2007 jumlah sampel dalam survei ini ditambah sehingga dapat dianalisis sampai tingkat kabupaten/kota. Kebutuhan ketersediaan data sampai tingkat kabupaten/kota meningkat pesat sejak diberlakukannya otonomi daerah. SAKERNAS bertujuan memberikan gambaran umum kondisi ketenagakerjaan di suatu wilayah. Sebagaimana diketahui program pengentasan kemiskinan yang menjadi fokus di setiap daerah selalu terkait dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi individu maupun wilayah untuk menghasilkan nilai tambah. SAKERNAS merupakan survei dengan pendekatan rumah tangga sehingga memungkinkan untuk melihat secara umum gambaran potensi ketenagakerjaan dalam masyarakat.

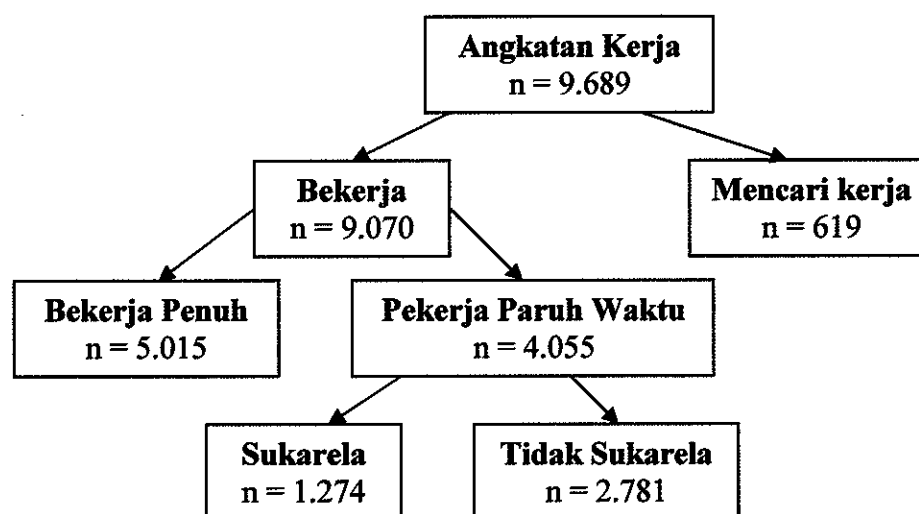
Kerangka sampel yang digunakan dalam Sakernas Agustus 2008 terdiri dari 3 jenis, yaitu kerangka sampel blok sensus, kerangka sampel untuk pemilihan sub blok sensus dalam blok sensus (khusus untuk blok sensus dengan muatan lebih dari 150 rumah tangga pada updating sketsa peta blok sensus dalam rangka Sensus Pertanian 2003) dan kerangka sampel rumah tangga. Kerangka sampel blok sensus adalah daftar blok sensus biasa hasil Sensus Ekonomi 2006 yang dilengkapi dengan jumlah rumah tangga hasil pencacahan P4B (keadaan April 2003), mencakup blok sensus di 456 kabupaten/kota se-Indonesia dan dibedakan menurut daerah perkotaan dan perdesaan (BPS, 2008a).

BPS (2008a) menjelaskan rancangan sampel Sakernas Agustus 2008 adalah rancangan sampel bertahap dua, pemilihan sampel untuk daerah perkotaan dan perdesaan dilakukan terpisah. Penarikan sampel tahap pertama (*first stage sampling*), dari kerangka sampel blok sensus dipilih sejumlah n_h blok sensus ($h = 1$ untuk perkotaan dan $h = 2$ untuk perdesaan) secara PPS (*Probability Proporsional to Size*) – Sistematis *Sampling* dengan size banyaknya rumah tangga hasil pencacahan P4B (April 2003). Penarikan sampel tahap kedua (*second stage*

sampling), dipilih sejumlah 16 rumah tangga pada setiap blok sensus atau sub blok sensus terpilih. Kerangka sampel yang digunakan adalah hasil pendaftaran (*listing*) pada blok atau sub blok sensus terpilih.

Blok sensus dalam kerangka sampel dapat dipilah menjadi dua kelompok, yaitu blok sensus terpilih untuk estimasi tingkat propinsi (periode pencacahan Februari 2007), dan blok sensus komplemen (periode pencacahan Agustus 2007 yang bukan merupakan blok sensus Februari 2007) yang bila ditambahkan kedalam blok sensus untuk estimasi propinsi dapat digunakan untuk estimasi tingkat kabupaten/kota. Kerangka sampel ini digunakan untuk periode pencacahan (Februari dan Agustus) dalam tahun 2008-2010. Untuk tahun 2011 dan seterusnya menggunakan kerangka sampel Sensus Penduduk (SP) 2010 (BPS, 2008a).

Berkaitan dengan kerangka analisis pada tesis ini, maka pemanfaatan data SAKERNAS Semester II Tahun 2008 ditujukan untuk menggali informasi resiko *unemployment* dan *underemployment* terhadap angkatan kerja berkaitan dengan karakteristiknya. Unit observasinya adalah angkatan kerja usia 15 – 64 tahun. Pengolahan data awal memperoleh alokasi sampel individu angkatan kerja yang digunakan pada analisis selanjutnya adalah sebagai berikut:



Gambar 3.2. Alokasi Sampel SAKERNAS 2008 Propinsi NTB

3.3. Definisi Variabel

3.3.1. Variabel Terikat

Model *Multinomial Logit Regression* digunakan untuk mengetahui kecenderungan terjadinya *underemployment* dan *unemployment* yang dipengaruhi

Universitas Indonesia

oleh beberapa variabel bebas. Angkatan kerja yang tergolong *underemployment* dan *unemployment* dijadikan sebagai variabel terikat dan pekerja penuh (*full time worker*) sebagai kelompok pembanding (*reference group*). *Underemployment* yang digunakan adalah *visible underemployment* dengan pertimbangan lebih mudah didefinisikan berkaitan dengan ketersediaan data.

Tabel 3.1. Definisi Operasional Variabel Terikat

No.	Variabel Label	Nama Variabel	Kriteria	Pertanyaan Kuesioner
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	<i>Underemployment</i>	Y = 1	Bekerja kurang dari 35 jam seminggu pada pekerjaan utama, namun masih berniat menambah jam kerja, dengan kondisi: 1. Mencari dan atau mempersiapkan usaha 2. Tidak mencari dan atau mempersiapkan usaha tapi masih ingin menambah jam kerja 3. Memiliki pekerjaan lain	Blok VC. Rincian 9 Blok VB. Rincian 4 & 5 Blok VE. Rincian 23 Blok VD. Rincian 17
2.	<i>Unemployment</i>	Y = 2	1. Tidak bekerja tapi mencari kerja atau mempersiapkan usaha. 2. Sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja 3. Angkatan kerja yang putus asa dalam mencari kerja namun sebenarnya masih ingin bekerja	Blok VB. Rincian 4 & 5 Blok VE. Rincian 23 Blok VE. Rincian 23 & 24
3.	Pekerja Paruh Waktu Sukarela	Y = 3	Bekerja kurang dari 35 jam seminggu pada pekerjaan utama dan sudah merasa puas.	Blok VC. Rincian 9, Blok VD. Rincian 17, Blok VE. Rincian 23
4.	Pekerja Penuh	Y = 4	Bekerja 35 jam atau lebih dalam seminggu pada pekerjaan utama	Blok VC. Rincian 9

3.3.2. Variabel Bebas

Variabel bebas yang digunakan adalah faktor – faktor yang berdasarkan penelitian sebelumnya terbukti secara signifikan memiliki pengaruh terhadap *underemployment* dan *unemployment* (Suratman, 1994; Wiebe, 1996;

Universitas Indonesia

Cendrawati 2000; Coullon, 2002; Görg dan Eric, 2001; Taşçi, 2005). Secara umum variabel tersebut dapat dikelompokkan menjadi faktor penyebab dan faktor klasifikasi. Faktor penyebab merupakan variabel bebas yang secara teoritis (substansi) diyakini sebagai penyebab dari variabel terikat dan dapat dilakukan diintervensi program. Faktor klasifikasi merupakan variabel bebas yang berperan sebagai kelompok pembeda terhadap variabel terikat dan faktor penyebab yang menjadi fokus penelitian (Agung, 2004).

a. Faktor Penyebab Terkendali

Beberapa variabel yang termasuk faktor penyebab adalah:

1. Tingkat Pendidikan, variabel ini dikelompokkan menjadi 3 kategori yaitu berpendidikan SD ke bawah, tamat SLTP atau SLTA dan tamat pendidikan tinggi. D_EDUC1: 1 = SD ke bawah; 0 = Lainnya
D_EDUC2: 1 = SLTP dan SLTA; 0 = Lainnya
D_EDUC3: 1 = Perguruan Tinggi; 0 = Lainnya

b. Faktor klasifikasi Individu

Beberapa variabel yang termasuk faktor klasifikasi individu adalah:

1. Wilayah tempat tinggal, variabel ini dikategorikan menjadi 2 kelompok yaitu perdesaan dan perkotaan. RESIDEN1: 1 = Perdesaan; 0 = lainnya.
RESIDEN2: 1 = Perkotaan; 0 = lainnya.
2. Jenis kelamin. SEX1: 1 = Perempuan; 0 = lainnya
SEX2: 1 = Laki – laki; 0 = lainnya
3. Umur, variabel umur dikelompokkan menjadi 4 kategori yaitu 15 – 19 (*undergraduate*), 20 – 29 (*fresh graduate*), 30 – 54 dan 55 – 64 (*pensiun*).
D_AGE1: 1 = 15 – 19; 0 = Lainnya
D_AGE2: 1 = 20 – 29; 0 = Lainnya
D_AGE3: 1 = 30 – 54; 0 = Lainnya
D_AGE4: 1 = 55 – 64; 0 = Lainnya
2. Status perkawinan dikelompokkan menjadi 2 kategori yaitu kawin dan belum/pernah kawin. KAWIN1: 1 = Kawin; 0 = lainnya.
KAWIN2: 1 = Belum/pernah kawin; 0 = lainnya.

c. Faktor klasifikasi Pekerjaan

- Sektor pekerjaan, variabel ini dikategorikan menjadi 2 kelompok yaitu formal dan informal. SEKTOR1: 1 = Informal; 0 = Formal
SEKTOR2: 1 = Formal; 0 = Informal

Definisi sektor pekerjaan yang digunakan adalah berdasarkan definisi BPS. Pengkategorian sektor formal dan informal sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.2. Klasifikasi Sektor Formal dan Informal

Klasifikasi Jabatan	Status/Kedudukan dalam Pekerjaan						
	1	2	3	4	5	6	7
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Formal	Formal	Formal	Formal	Formal	Formal	Informal
2	Formal	Formal	Formal	Formal	Formal	Formal	Informal
3	Formal	Formal	Formal	Formal	Formal	Formal	Informal
4	Informal	Formal	Formal	Formal	Informal	Informal	Informal
5	Informal	Formal	Formal	Formal	Informal	Informal	Informal
6	Informal	Informal	Formal	Formal	Informal	Informal	Informal
7	Informal	Formal	Formal	Formal	Informal	Informal	Informal
0	Informal	Informal	Formal	Formal	Informal	Informal	Informal

Sumber: Badan Pusat Statistik

Keterangan:

Status/kedudukan dalam pekerjaan:

- Berusaha sendiri
- Berusaha dibantu buruh tidak tetap / buruh tidak dibayar
- Berusaha dibantu buruh tetap / buruh dibayar
- Buruh / karyawan
- Pekerja bebas pertanian
- Pekerja bebas non pertanian
- Pekerja tak dibayar

Klasifikasi Jabatan Indonesia 2000:

- Tenaga Profesional, Teknisi Dan Tenaga Lain Ybdi
- Tenaga Kepemimpinan Dan Ketatalaksanaan
- Pejabat Pelaksana, Tenaga Tata Usaha Dan Tenaga Ybdi
- Tenaga Usaha Penjualan
- Tenaga Usaha Jasa

Universitas Indonesia

- 6) Tenaga Usaha Tani, Kebun, Ternak, Ikan, Hutan dan Perburuan
 - 7) Tenaga Produksi Operasional Alat Angkutan dan Pekerja Kasar
 - 0) Lainnya.
2. Lapangan pekerjaan, variabel ini dikategorikan menjadi 3 kelompok yaitu pertanian, industri pengolahan dan lainnya.
- KERJA1: 1 = Pertanian; 0 = lainnya.
- KERJA2: 1 = Industri; 0 = lainnya.
- KERJA3: 1 = Jasa-Jasa; 0 = lainnya.

Definisi lapangan pekerjaan yang digunakan berdasarkan pengelompokan lapangan kerja yang digunakan BPS. Pengkategorian lapangan kerja sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 3.3. Klasifikasi Lapangan Pekerjaan

No.	Klasifikasi Lapangan Pekerjaan	Rincian Lapangan Usaha
(1)	(2)	(3)
1.	Pertanian (<i>Agriculture</i>)	Pertanian
2.	Industri (<i>Manufacture</i>)	Pertambangan/Penggalian; Industri pengolahan; Listrik, Gas & Air Bersih dan Bangunan
3.	Jasa – Jasa (<i>Services</i>)	Perdagangan, Hotel & Restoran; Transportasi & Komunikasi; Keuangan & Persewaan dan Jasa – Jasa.

Sumber: Badan Pusat Statistik

3.3. Hipotesa Penelitian

Hipotesa yang diajukan berdasarkan penelitian – penelitian sebelumnya (Suratman, 1994; Wiebe, 1996; Cendrawati 2000; Görg dan Eric, 2001; Taşçi, 2005). Hipotesis mengenai kecenderungan resiko *underemployment* dan *unemployment* merujuk kepada pekerja penuh (*full time worker*) sebagai kelompok pembanding (*reference group*). Beberapa hipotesa yang akan diuji adalah

1. Berdasarkan penelitian – penelitian sebelumnya, pendidikan berpengaruh signifikan terhadap status angkatan kerja. Pembangunan di wilayah

Universitas Indonesia

perkotaan yang berkembang lebih cepat dibandingkan perdesaan menyebabkan kesempatan kerja di wilayah perkotaan lebih luas. Perspektif gender dalam masyarakat menyebabkan tingkat pendidikan angkatan kerja laki – laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Beban ganda yang dialami perempuan menghambatnya untuk berpartisipasi dalam kerja. Hipotesis yang diajukan adalah pendidikan mempengaruhi status angkatan kerja yang tergantung pada daerah tempat tinggal dan jenis kelamin.

- a. Pendidikan mempunyai pengaruh terhadap resiko *underemployment* yang tergantung pada wilayah tempat tinggal dan jenis kelamin.
 - b. Pendidikan mempunyai pengaruh terhadap resiko *unemployment* yang tergantung pada wilayah tempat tinggal dan jenis kelamin.
 - c. Resiko *underemployment* angkatan kerja di wilayah perdesaan lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan yang tergantung pada tingkat pendidikan dan jenis kelamin.
 - d. Resiko *unemployment* angkatan kerja di wilayah perdesaan lebih rendah dibandingkan wilayah perkotaan yang tergantung pada tingkat pendidikan dan jenis kelamin.
2. Ikatan perkawinan menyebabkan tanggung jawab seseorang bertambah dalam hal memenuhi kebutuhan sehari – hari. Pada umumnya peran perempuan yang telah kawin dalam pasar kerja sangat terbatas. Hal tersebut disebabkan tanggung jawab perempuan lebih pada mengurus rumah tangga (pekerjaan domestik). Hipotesis yang diajukan adalah pendidikan mempengaruhi status angkatan kerja yang tergantung pada status kawin dan jenis kelamin.
- a. Pendidikan mempunyai pengaruh terhadap resiko *underemployment* yang tergantung pada status kawin dan jenis kelamin.
 - b. Pendidikan mempunyai pengaruh terhadap resiko *unemployment* yang tergantung pada status kawin dan jenis kelamin.
 - c. Khusus angkatan kerja perempuan, resiko *underemployment* angkatan kerja yang berstatus kawin lebih tinggi dibandingkan yang berstatus belum/pernah kawin pada masing – masing tingkat pendidikan.

- d. Khusus angkatan kerja perempuan, resiko *unemployment* angkatan kerja yang berstatus kawin lebih rendah dibandingkan yang berstatus belum/pernah kawin pada masing – masing tingkat pendidikan.
3. Selain tingkat pendidikan, pengalaman kerja atau pengalaman berada dalam angkatan kerja mempengaruhi status angkatan kerja seseorang. Usia dari angkatan kerja merupakan *proxy* pengalaman berada dalam angkatan kerja. Hipotesis yang diajukan adalah pendidikan mempengaruhi status angkatan kerja yang tergantung pada umur.
 - a. Pendidikan angkatan kerja mempunyai pengaruh terhadap resiko *underemployment* yang tergantung pada kelompok umur.
 - b. Pendidikan angkatan kerja mempunyai pengaruh terhadap resiko *unemployment* yang tergantung pada kelompok umur.
4. Pembukaan lapangan kerja berbeda menurut potensi yang dikembangkan dalam suatu wilayah. Wilayah perdesaan identik dengan berkembangnya sektor pertanian. Sementara wilayah perkotaan identik dengan berkembangnya sektor industri atau jasa – jasa. Hipotesis yang diajukan adalah pendidikan mempunyai pengaruh terhadap resiko *underemployment* yang tergantung pada lapangan pekerjaan dan wilayah tempat tinggal.
5. Bekerja dengan jaminan pendapatan yang berkelanjutan dan kepastian jenjang karir merupakan harapan setiap angkatan kerja. Kriteria semacam itu dalam pasar kerja hanya dijumpai pada pekerjaan sektor formal. Sektor formal menuntut produktifitas yang lebih tinggi dibandingkan sektor informal, oleh sebab itu tingkat pendidikan yang memadai dan pengalaman kerja sangat dibutuhkan. Hipotesis yang diajukan adalah pendidikan mempunyai pengaruh terhadap resiko *underemployment* yang tergantung pada sektor pekerjaan dan kelompok umur pekerja.
6. Angkatan kerja berpendidikan lebih tinggi memiliki aspirasi yang lebih tinggi mengenai pekerjaan yang diharapkan dibandingkan angkatan kerja berpendidikan lebih rendah. Melakukan mobilitas non permanen merupakan salah satu usaha yang lazim dilakukan untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan. Berkaitan dengan hal tersebut hipotesis yang diajukan adalah pendidikan mempunyai pengaruh terhadap

resiko *underemployment* yang tergantung pada status migran komuter dan jenis kelamin.

3.4. Metode Analisis

Penelitian dalam tesis ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis inferensial. Kedua metode analisis tersebut saling melengkapi guna memperoleh hasil seperti yang diharapkan pada tujuan dan manfaat penelitian. Pengolahan data mentah menggunakan paket program pengolahan data SPSS 13 dan Eviews 6. Penggunaan program Eviews 6 untuk pemodelan dengan pertimbangan *software* tersebut mengakomodir berbagai macam bentuk transformasi atau modifikasi model, disesuaikan dengan fokus pembahasan.

3.4.1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif bertujuan menyajikan data atau hasil pengamatan dengan singkat dan jelas dalam bentuk tabel dan grafik atau diagram (Agung, 2004). Hasil analisis dengan memakai metode statistik deskriptif bermanfaat untuk menyajikan rangkuman (*aggregate*) data atau nilai-nilai yang dihitung berdasarkan data yang digunakan. Analisis deskriptif disajikan dalam bentuk tabel dan grafik secara sederhana yang diharapkan akan lebih mudah dipahami, khususnya bagi orang awam. Salah satu manfaat analisis deskriptif adalah identifikasi awal terhadap akar permasalahan *unemployment* dan *underemployment* di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

3.4.2. Analisis Inferensial

Analisis inferensial bertujuan ingin menguji suatu hipotesis berdasarkan data sampel apakah dapat berlaku umum (generalisasi). Model *multinomial logit regression* digunakan dalam tesis ini untuk melihat rasio kecenderungan beberapa variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Penggunaan *multinomial logit regression* dengan alasan bahwa variabel terikat merupakan variabel kategorik. Untuk dapat mengaplikasikan model ini, sebelumnya telah dilakukan pemilahan data (*select cases*) yaitu penduduk usia 15 – 64 tahun dan berdasarkan kegiatan selama seminggu yang lalu.

Variabel terikat tidak saja dipengaruhi oleh faktor utama dari variabel bebas, namun juga oleh interaksi faktor utama dengan variabel bebas lain. Penggunaan faktor interaksi berdasarkan pada kenyataan bahwa pengaruh suatu variabel bebas terhadap variabel terikat tergantung pada variabel bebas lain. Variabel terikat yang digunakan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam definisi variabel, merupakan status angkatan kerja yang terdiri atas *unemployment*, *underemployment* dan *full time worker* (bekerja penuh) yang dijadikan sebagai kelompok referensi. Pekerja paruh waktu sukarela tidak dijadikan sebagai variabel terikat dengan pertimbangan kondisi tersebut bukan merupakan masalah ketenagakerjaan. Kategori variabel terikat adalah sebagai berikut:

$$p_1 = p(Y = 1); Y = 1, \text{ Underemployment}$$

$$p_2 = p(Y = 2); Y = 2, \text{ Unemployment}$$

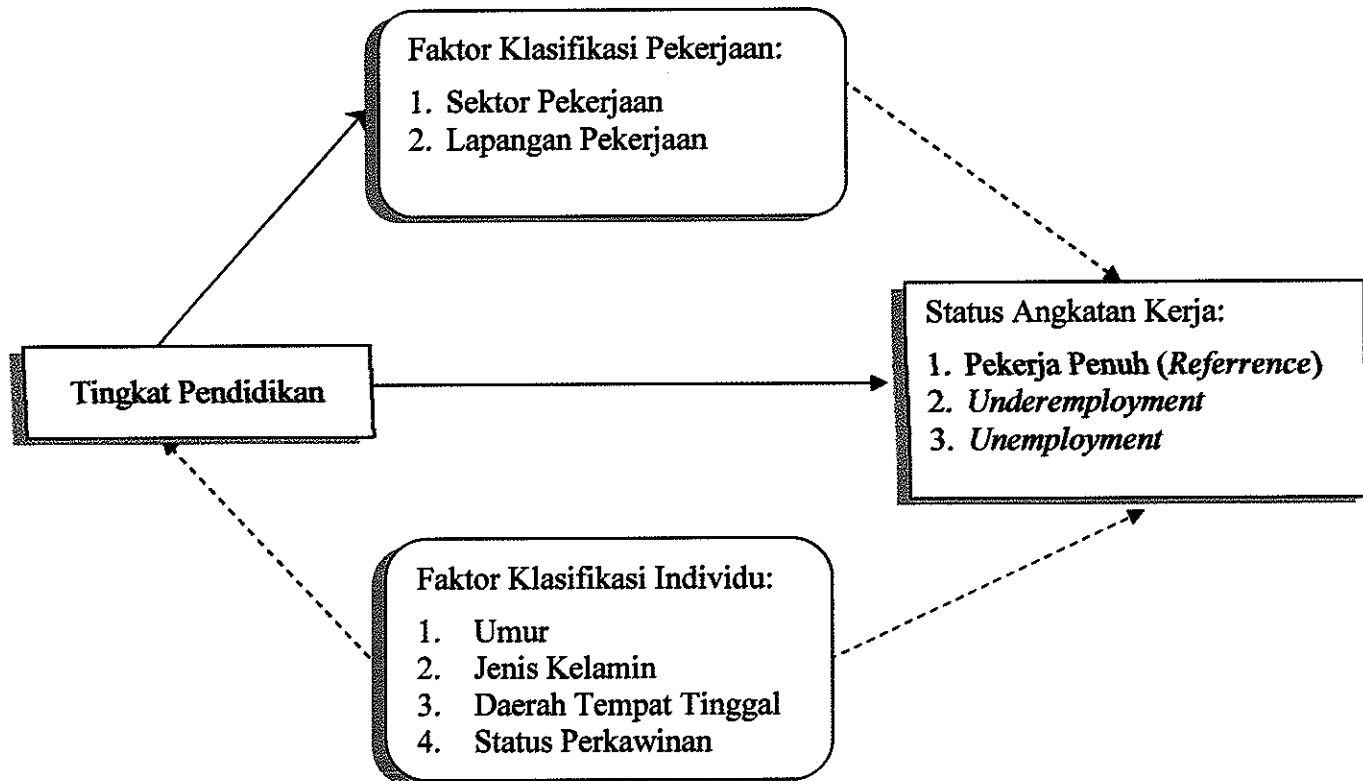
$$p_4 = p(Y = 4); Y = 4, \text{ Full time worker}$$

Berdasarkan uraian metodologi di atas, maka secara umum bentuk model *multinomial logit regression* yang dibangun adalah sebagai berikut:

$$\log\left(\frac{P_1}{P_4}\right) = \sum_{i=1} C_{(1i)} * CF_{(i)} \quad \dots\dots\dots (3.1.a)$$

$$\log\left(\frac{P_2}{P_4}\right) = \sum_{i=1} C_{(2i)} * CF_{(i)} \quad \dots\dots\dots (3.1.b)$$

Pembentukan model *multinomial logit regression* ditujukan untuk menjelaskan hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat yang berbentuk kategorik sesuai kerangka teoritis. Diagram alur sebab akibat yang menggambarkan bagaimana arah hubungan variabel – variabel bebas terhadap variabel terikat perlu disajikan agar pembentukan model lebih akurat dan mudah dijelaskan. Diagram hubungan tersebut sebagaimana disajikan di bawah ini:



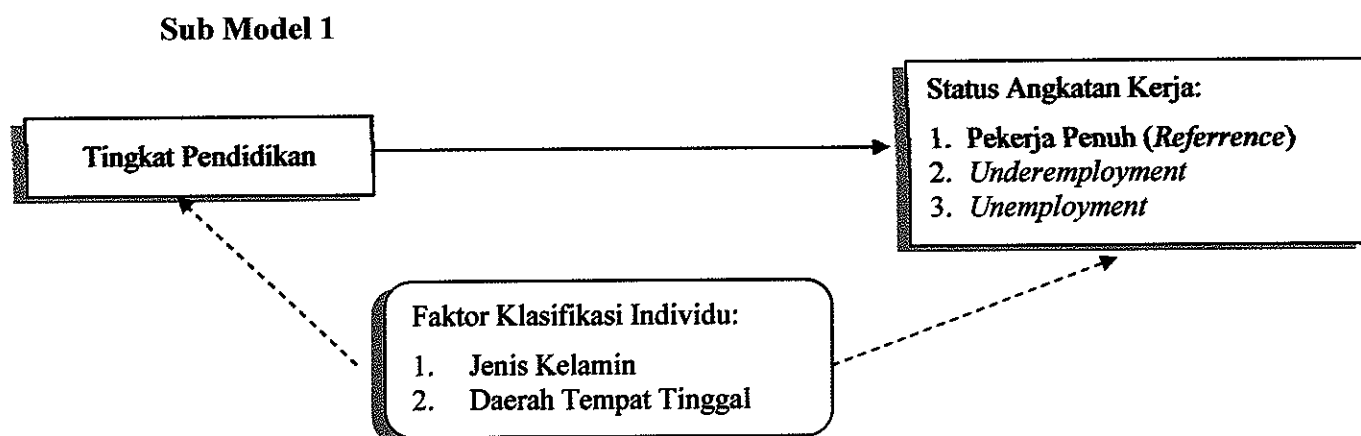
Keterangan :

—————> : Hubungan antar variabel

- - - - -> : Faktor Klasifikasi

Gambar 3.3. Kerangka Analisis Model Status Angkatan Kerja

Gambar diatas menjelaskan adanya interaksi antara faktor penyebab dan faktor klasifikasi yang mempengaruhi variabel bebas status angkatan kerja. Sebagai variabel kategorik, maka interaksi antar variabel bebas tersebut dinyatakan sebagai koefisien dalam *cell factor*. *Cell factor* adalah *cell* yang terbentuk dari interaksi antara variabel – variabel bebas yang berbentuk kategorik. Mengingat begitu banyaknya *cell factor* yang akan terbentuk maka kemungkinan terdapatnya sel kosong sangat besar, dengan demikian maka dibentuklah sub model berdasarkan model penuh di atas.



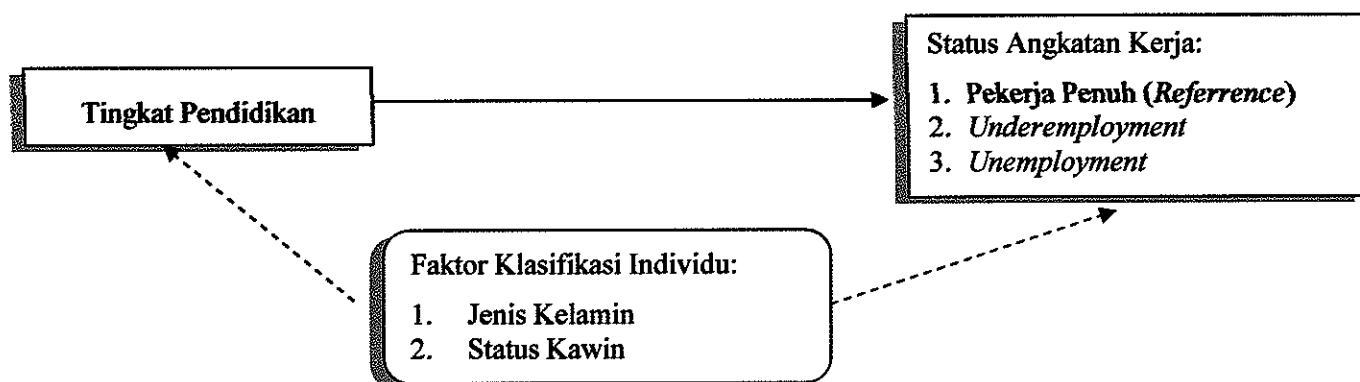
Gambar 3.4. Kerangka Analisis Sub Model 1

Sub model 1 dibangun untuk menguji hipotesis 1, menggunakan model *multinomial logit regression* dengan *full time worker* sebagai *reference group*.

$$\begin{aligned} \ln (P_1/P_4) = & C(1) + C(2)*(SEX=1) + C(3)*(SEX=1*RESIDEN=1) + C(4)*(SEX=2* \\ & RESIDEN=1) + C(5)*(SEX=1*RESIDEN=1*D_EDUC=1) + C(6)*(SEX=1* \\ & RESIDEN=1*D_EDUC=3) + C(7)*(SEX=1*RESIDEN=2*D_EDUC=1) + C(8)* \\ & (SEX=1*RESIDEN=2*D_EDUC=3) + C(9)*(SEX=2*RESIDEN=1*D_EDUC=1) + \\ & C(10)*(SEX=2*RESIDEN=1*D_EDUC=3) + C(11)*(SEX=2*RESIDEN=2* \\ & D_EDUC=1) + C(12)*(SEX=2*RESIDEN=2*D_EDUC=3) \dots\dots\dots (3.2.a) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \ln (P_2/P_4) = & C(1) + C(2)*(SEX=1) + C(3)*(SEX=1*RESIDEN=1) + C(4)*(SEX=2* \\ & RESIDEN=1) + C(5)*(SEX=1*RESIDEN=1*D_EDUC=1) + C(6)*(SEX=1* \\ & RESIDEN=1*D_EDUC=3) + C(7)*(SEX=1*RESIDEN=2*D_EDUC=1) + C(8)* \\ & (SEX=1*RESIDEN=2*D_EDUC=3) + C(9)*(SEX=2*RESIDEN=1*D_EDUC=1) + \\ & C(10)*(SEX=2*RESIDEN=1*D_EDUC=3) + C(11)*(SEX=2*RESIDEN=2* \\ & D_EDUC=1) + C(12)*(SEX=2*RESIDEN=2*D_EDUC=3) \dots\dots\dots (3.2.b) \end{aligned}$$

Sub Model 2



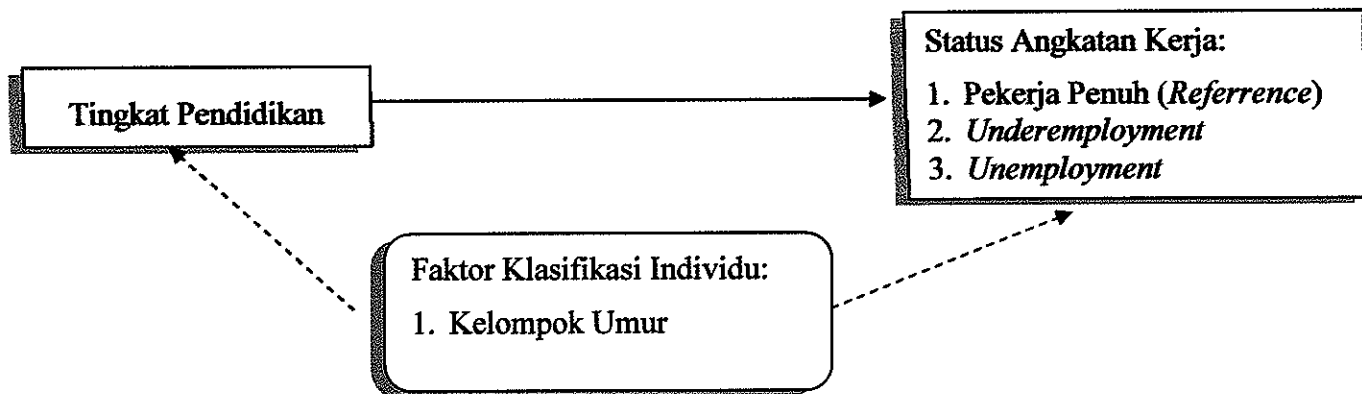
Gambar 3.5. Kerangka Analisis Sub Model 2

Model 2 dibangun untuk menguji hipotesis 2, menggunakan model *multinomial logit regression* dibangun dengan menggunakan *full time worker* sebagai *reference group*.

$$\begin{aligned} \ln(P_1/P_4) = & C(1) + C(2)*(SEX=1) + C(3)*(SEX=1*KAWIN=1) + C(4)*(SEX=2* \\ & KAWIN=1) + C(5)*(SEX=1*KAWIN=1*D_EDUC=1) + C(6)*(SEX=1*KAWIN=1* \\ & D_EDUC=3) + C(7)*(SEX=1*KAWIN=2*D_EDUC=1) + C(8)*(SEX=1*KAWIN=2* \\ & D_EDUC=3) + C(9)*(SEX=2*KAWIN=1*D_EDUC=1) + C(10)*(SEX=2*KAWIN=1* \\ & D_EDUC=3) + C(11)*(SEX=2*KAWIN=2*D_EDUC=1) + C(12)*(SEX=2*KAWIN=2* \\ & D_EDUC=3) \dots\dots\dots (3.3.a) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \ln(P_2/P_4) = & C(1) + C(2)*(SEX=1) + C(3)*(SEX=1*KAWIN=1) + C(4)*(SEX=2* \\ & KAWIN=1) + C(5)*(SEX=1*KAWIN=1*D_EDUC=1) + C(6)*(SEX=1*KAWIN=1* \\ & D_EDUC=3) + C(7)*(SEX=1*KAWIN=2*D_EDUC=1) + C(8)*(SEX=1*KAWIN=2* \\ & D_EDUC=3) + C(9)*(SEX=2*KAWIN=1*D_EDUC=1) + C(10)*(SEX=2*KAWIN=1* \\ & D_EDUC=3) + C(11)*(SEX=2*KAWIN=2*D_EDUC=1) + C(12)*(SEX=2*KAWIN=2* \\ & D_EDUC=3) \dots\dots\dots (3.3.b) \end{aligned}$$

Sub Model 3



Gambar 3.6. Kerangka Analisis Sub Model 3

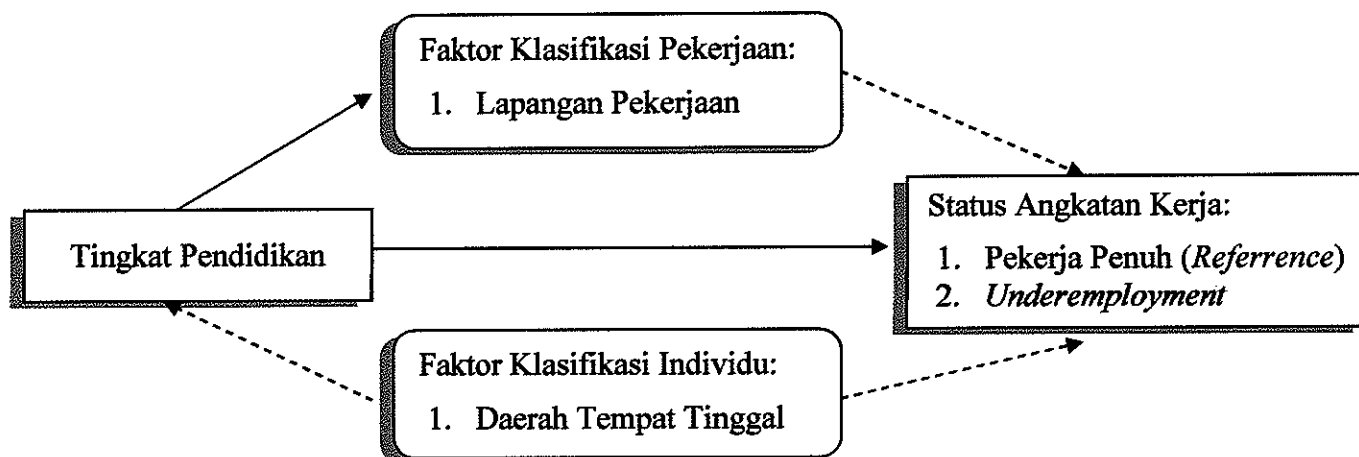
Sub model 3 digunakan untuk menguji hipotesis 3, menggunakan *multinomial logit regression* dengan status angkatan kerja sebagai variabel terikat dan status pekerja *full time* sebagai kelompok pembanding (*reference group*).

$$\begin{aligned} \ln(P_1/P_4) = & C(1) + C(2)*(D_EDUC=1) + C(3)*(D_EDUC=3) + C(4)*(D_AGE=1* \\ & D_EDUC=1) + C(5)*(D_AGE=1*D_EDUC=2) + C(6)*(D_AGE=2*D_EDUC=1) + \\ & C(7)*(D_AGE=2*D_EDUC=2) + C(8)*(D_AGE=2*D_EDUC=3) + C(9)*(D_AGE=4* \\ & D_EDUC=1) + C(10)*(D_AGE=4*D_EDUC=2) + C(11)*(D_AGE=4*D_EDUC=3) \dots \\ & \dots\dots\dots (3.4.a) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \ln(P_2/P_4) = & C(1) + C(2)*(D_EDUC=1) + C(3)*(D_EDUC=3) + C(4)*(D_AGE=1* \\ & D_EDUC=1) + C(5)*(D_AGE=1*D_EDUC=2) + C(6)*(D_AGE=2* D_EDUC=1) + \\ & C(7)*(D_AGE=2*D_EDUC=2) + C(8)*(D_AGE=2*D_EDUC=3) + C(9)*(D_AGE=4* \\ & D_EDUC=1) + C(10)*(D_AGE=4*D_EDUC=2) + C(11)* (D_AGE=4*D_EDUC=3) \dots \\ & \dots\dots\dots (3.4.b) \end{aligned}$$

Permasalahan *underemployment* pekerja selain dipengaruhi oleh karakteristik individu juga berkaitan dengan kondisi karakteristik pekerjaan. Model Logit Biner dibangun untuk menjelaskan hubungan faktor penyebab terkendali, faktor klasifikasi individu dan faktor klasifikasi pekerjaan terhadap status pekerja. Pekerja dalam hal ini adalah angkatan kerja dengan status sedang bekerja, sebagaimana telah disampaikan sebelumnya. Sebagaimana pada model – model regresi sebelumnya, maka untuk membangun model selanjutnya perlu dibuat diagram yang menjelaskan arah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Diagram tersebut adalah sebagai berikut:

Sub Model 4



Gambar 3.7. Kerangka Analisis Sub Model 4

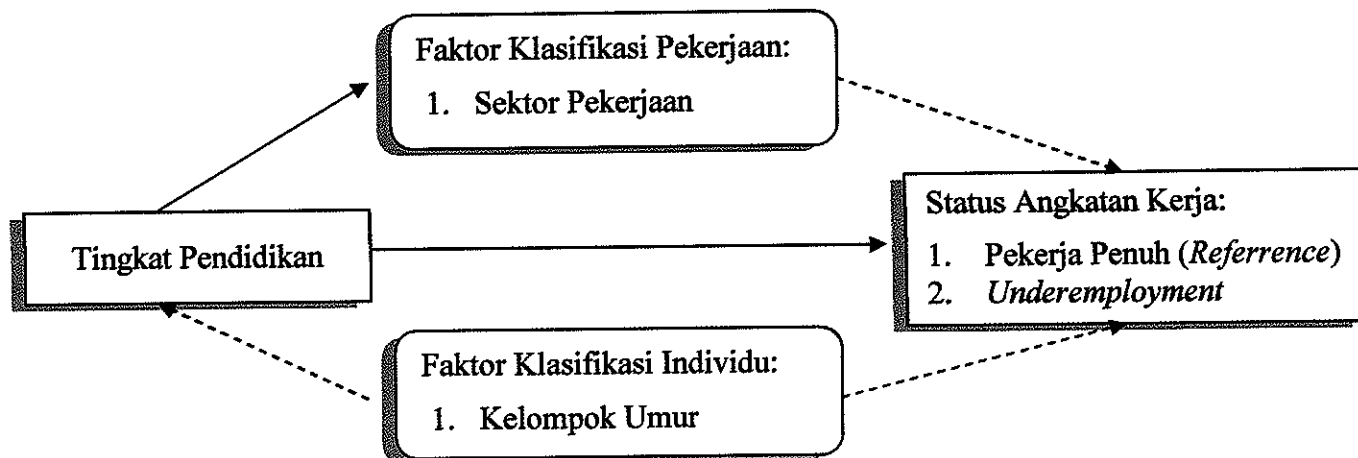
Sub model 4 ini untuk menguji hipotesis 4, pekerja *full time worker* sebagai *reference*, persamaan *binary logit regression* yang dibangun adalah:

$$\begin{aligned} \ln(P_1 / (1 - P_1)) = & C(1) + C(2)*(RESIDEN=1) + C(3)*(RESIDEN=1*KERJA=2) + \\ & C(4)*(RESIDEN=1*KERJA=3) + C(5)*(RESIDEN=2*KERJA=2) + C(6)*(RESIDEN=2 \\ & *KERJA=3) + C(7)*(RESIDEN=1*KERJA=1*D_EDUC=1) + C(8)*(RESIDEN=1* \\ & KERJA=1*D_EDUC=3) + C(9)*(RESIDEN=1*KERJA=2* D_EDUC=1) + C(10)* \\ & (RESIDEN=1*KERJA=2*D_EDUC=3) + C(11)*(RESIDEN=1*KERJA=3* \end{aligned}$$

Universitas Indonesia

$$\begin{aligned}
 & D_EDUC=1) + C(12)*(RESIDEN=1* KERJA=3*D_EDUC=3) + C(13)*(RESIDEN=2* \\
 & KERJA=1*D_EDUC=1) + C(14)*(RESIDEN=2*KERJA=1* D_EDUC=3) + C(15)* \\
 & (RESIDEN=2*KERJA=2*D_EDUC=1) + C(16)*(RESIDEN=2*KERJA=2* \\
 & D_EDUC=3) + C(17)*(RESIDEN=2*KERJA=3*D_EDUC=1) + C(18)*(RESIDEN=2* \\
 & KERJA=3*D_EDUC=3) \dots\dots\dots (3.5)
 \end{aligned}$$

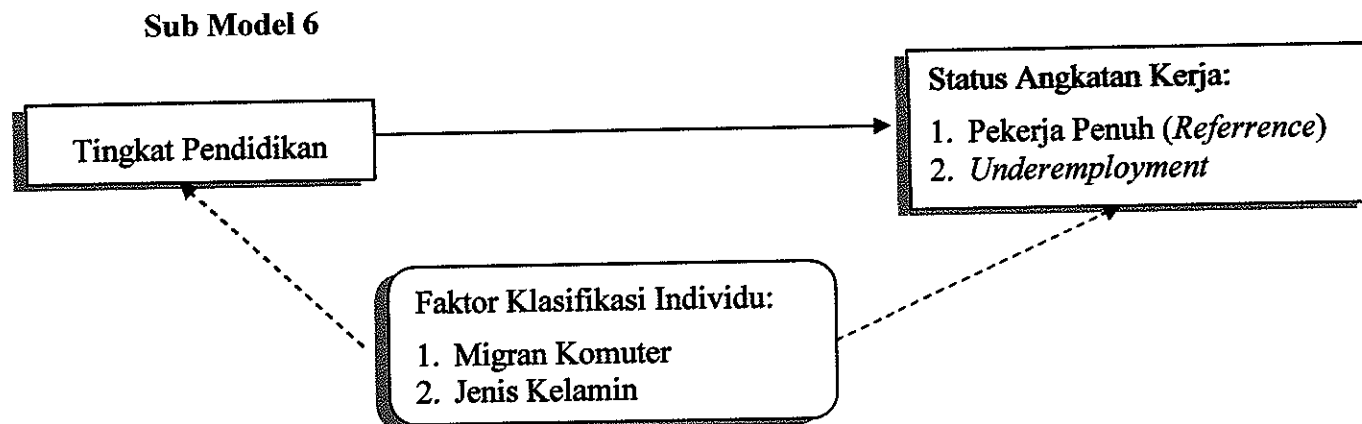
Sub Model 5



Gambar 3.8. Kerangka Analisis Sub Model 5

Sub Model 5 untuk menguji hipotesis 5, persamaan *binary logit regression* yang dibangun adalah:

$$\begin{aligned}
 \ln \left(\frac{P_1}{1 - P_1} \right) = & C(1) + C(2)*(SEKTOR=1) + C(3)*(SEKTOR=1*D_AGE=1) + \\
 & C(4)*(SEKTOR=1*D_AGE=2) + C(5)*(SEKTOR=1*D_AGE=4) + C(6)*(SEKTOR=2* \\
 & D_AGE=1) + C(7)*(SEKTOR=2*D_AGE=2) + C(8)*(SEKTOR=2*D_AGE=4) + \\
 & C(9)*(SEKTOR=1*D_AGE=1*D_EDUC=1) + C(10)*(SEKTOR=1*D_AGE=2* \\
 & D_EDUC=1) + C(11)*(SEKTOR=1*D_AGE=2*D_EDUC=3) + C(12)*(SEKTOR=1* \\
 & D_AGE=3*D_EDUC=1) + C(13)*(SEKTOR=1*D_AGE=3*D_EDUC=3) + C(14)* \\
 & (SEKTOR=1*D_AGE=4*D_EDUC=1) + C(15)*(SEKTOR=2*D_AGE=1*D_EDUC=1) \\
 & + C(16)*(SEKTOR=2*D_AGE=2*D_EDUC=1) + C(17)*(SEKTOR=2*D_AGE=2* \\
 & D_EDUC=3) + C(18)*(SEKTOR=2*D_AGE=3*D_EDUC=1) + C(19)*(SEKTOR=2* \\
 & D_AGE=3*D_EDUC=3) + C(20)*(SEKTOR=2*D_AGE=4*D_EDUC=1) + C(21)* \\
 & (SEKTOR=2*D_AGE=4*D_EDUC=3) \dots\dots\dots (3.6)
 \end{aligned}$$



Gambar 3.9. Kerangka Analisis Sub Model 6

Sub Model 6 untuk menguji hipotesis 6, persamaan *binnary logit regression* yang dibangun adalah:

$$\begin{aligned}
 \ln \left(\frac{P_1}{1 - P_1} \right) = & C(1) + C(2) * (KOMUTER=1) + C(3) * (KOMUTER=1 * SEX=1) + \\
 & C(4) * (KOMUTER=2 * SEX=1) + C(5) * (SEX=1 * KOMUTER=1 * D_EDUC=1) + C(6) * \\
 & (SEX=1 * KOMUTER=1 * D_EDUC=3) + C(7) * (SEX=1 * KOMUTER=2 * D_EDUC=1) + \\
 & C(8) * (SEX=1 * KOMUTER=2 * D_EDUC=3) + C(9) * (SEX=2 * KOMUTER=1 * \\
 & D_EDUC=1) + C(10) * (SEX=2 * KOMUTER=1 * D_EDUC=3) + C(11) * (SEX=2 * \\
 & KOMUTER=2 * D_EDUC=1) + C(12) * (SEX=2 * KOMUTER=2 * D_EDUC=3) \dots\dots (3.7)
 \end{aligned}$$

BAB IV **PEMBAHASAN dan ANALISIS**

4.1. Kondisi Umum Wilayah

Provinsi Nusa Tenggara Barat terletak pada 115° 46' BT sampai 119° 5' BT dan 8° 10' LS sampai 9° 5' LS dengan luas 20.153,15 km². Pengembangan wilayah administrasi telah terjadi beberapa kali, hingga saat ini Provinsi NTB terdiri atas 8 kabupaten, 2 kota, 116 kecamatan dan 913 desa/kelurahan. Provinsi ini terdiri dari 2 pulau besar yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa yang dihubungkan oleh Selat Alas. Ibukota Provinsi NTB adalah Kota Mataram yang terletak di Pulau Lombok dengan ketinggian 16 m di atas permukaan laut. Kebudayaan kedua pulau besar tersebut cukup beragam. Disamping itu terdapat beberapa bahasa daerah seperti Bahasa Sasak, Bahasa Samawa dan Bahasa Mbojo. Gunung Rinjani merupakan gunung tertinggi di Pulau Lombok, dengan tinggi 3.726 m di atas permukaan laut. Sementara Gunung Tambora adalah yang tertinggi di Pulau Sumbawa dengan tinggi 2.851 m di atas permukaan laut. Gunung Tambora pernah mengeluarkan letusan yang dahsyat pada tahun 1883.

Jumlah Penduduk Provinsi NTB berdasarkan Sensus Penduduk 2000 sebesar 3.008.601 jiwa. Pada tahun 2005 berdasarkan SUPAS 2005 meningkat menjadi 4.169.695 jiwa atau meningkat sekitar 0,86 persen per tahun. Pertumbuhan penduduk tersebut masih di bawah pertumbuhan penduduk nasional periode 2000 – 2005 sekitar 1,30 persen per tahun. Baik pada tahun 2000 maupun 2005, jumlah penduduk laki – laki lebih sedikit dibandingkan perempuan dengan *sex ratio* masing – masing sebesar 0,949 dan 0,935. Berdasarkan publikasi Provinsi NTB dalam Angka tahun 2009, jumlah penduduk Provinsi NTB telah bertambah menjadi 4.363.756 terdiri dari 2.084.364 laki – laki dan 2.279.392 perempuan atau *sex ratio* sekitar 1,094. Kepadatan penduduk di Pulau Lombok lebih tinggi dibandingkan Pulau Sumbawa, hal tersebut antara lain disebabkan pusat pemerintahan Provinsi NTB terdapat di Pulau Lombok. Penduduk Provinsi NTB mayoritas beragama Islam.

Berdasarkan berita resmi BPS NTB (2009), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) bulan Agustus 2008 67,69 persen lebih rendah dibandingkan TPAK Bulan Agustus 2007 yaitu 68,96 persen. Jumlah angkatan

kerja mengalami penurunan pada bulan Agustus 2008 dibandingkan Agustus 2007. Jumlah angkatan kerja yang bekerja pada Agustus 2008 1.904.781 jiwa berkurang dibandingkan Agustus 2007 yang sebesar 1.951.182 jiwa. Demikian juga penduduk yang menganggur (*unemployment*) mengalami penurunan dari 135.264 pada Agustus 2007 menjadi 124.300 pada Agustus 2008. Penurunan tersebut terjadi baik pada angkatan kerja laki – laki maupun perempuan. Data perbandingan angkatan kerja tersebut dapat dilihat pada tabel 4.1. Jumlah setengah penganggur justru mengalami peningkatan dari 756.452 jiwa pada Agustus 2007 menjadi 782.462 jiwa pada Agustus 2008. Sebagian besar tenaga kerja di Provinsi NTB terserap pada sektor pertanian sekitar 45,50 persen diikuti oleh sektor perdagangan dan jasa – jasa masing – masing 17,14 persen dan 11,54 persen. Data selengkapnya pekerjaan penduduk Provinsi NTB kondisi Agustus 2008 dapat dilihat pada grafik 4.1.

Tabel 4.1. Penduduk Usia 15 Tahun ke atas Menurut Kegiatan Utama di Provinsi NTB periode Agustus 2007 – Agustus 2008

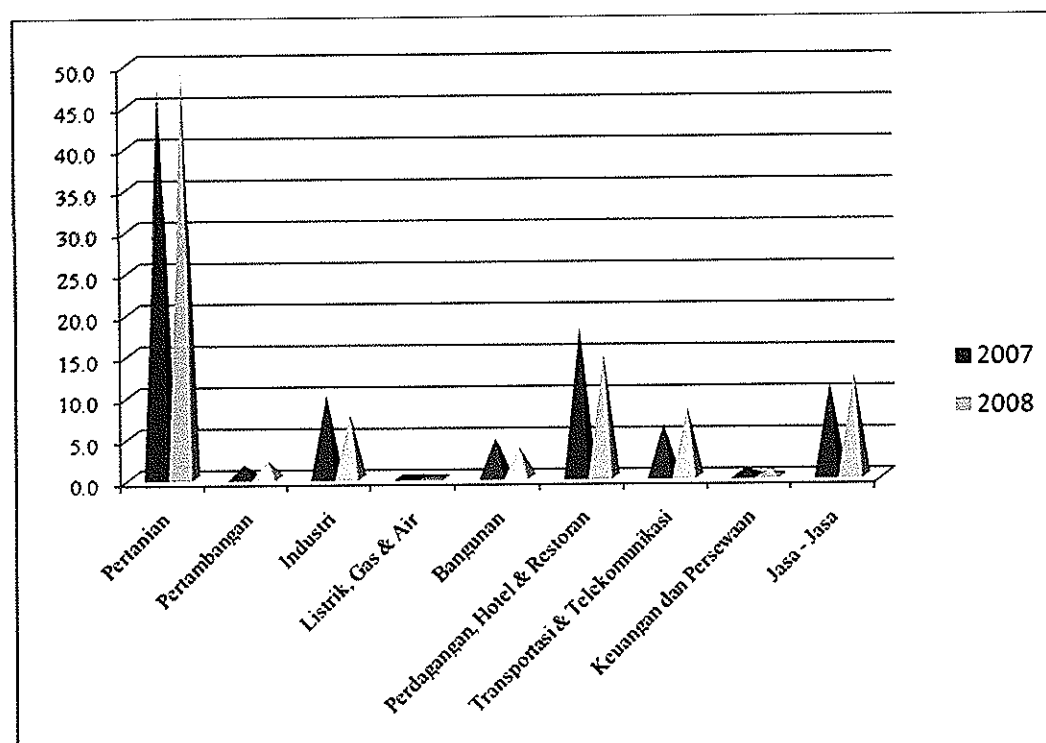
Kegiatan Utama	Laki – Laki		Perempuan		Total	
	Agt 2007	Agt 2008	Agt 2007	Agt 2008	Agt 2007	Agt 2008
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Penduduk Usia 15 Tahun ke atas	1.433.875	1.400.900	1.591.775	1.596.825	3.025.650	2.997.725
2. Angkatan Kerja	1.169.915	1.136.835	916.531	892.246	2.086.446	2.029.081
a. Bekerja	1.096.055	1.068.498	855.127	836.283	1.951.182	1.904.781
b. Pengangguran	73.860	68.337	61.404	55.963	135.264	124.300
3. Bukan Angkatan Kerja	263.960	264.065	675.244	704.579	939.204	968.664
4. TPAK (%)	81,59	81,15	57,58	55,88	68,96	67,69
5. TPT (%)	6,31	6,01	6,70	6,27	6,48	6,13
6. Setengah Pengangguran	341.216	365.037	415.236	417.425	756.452	782.462

Sumber: Berita Resmi BPS NTB, 2009

Tabel 4.1 di atas memperlihatkan bahwa berkurangnya jumlah angkatan kerja pada Agustus 2008 dibanding Agustus 2007 diiringi dengan peningkatan jumlah bukan angkatan kerja periode yang sama. Kondisi tersebut menunjukkan terdapat angkatan kerja yang keluar menjadi bukan angkatan kerja

Universitas Indonesia

selama periode Agustus 2007 – Agustus 2008. Kondisi menarik lainnya adalah turunnya jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas periode Agustus 2007 – Agustus 2008 khususnya pada laki – laki. Kemungkinan penyebab kondisi tersebut adalah terjadinya migrasi keluar yang lebih tinggi dibandingkan migrasi masuk. Penduduk Provinsi NTB usia 15 tahun ke atas didominasi oleh yang berpendidikan SD ke bawah (tamat SD, belum/tidak tamat SD dan tidak bersekolah) baik laki – laki maupun perempuan.



Gambar 4.1. Distribusi Pekerja Menurut Lapangan Usaha di Provinsi NTB, 2008

Gambar 4.1 menunjukkan sebagian besar penduduk Provinsi NTB bekerja di sektor pertanian dan persentasenya semakin meningkat di tahun 2008 dibandingkan 2007. Persentase penduduk yang bekerja di sektor jasa – jasa dan transportasi dan telekomunikasi juga meningkat pada periode yang sama. Persentase penduduk yang bekerja di sektor industri, bangunan, perdagangan hotel dan restoran menurun pada tahun 2008 dibandingkan 2007.

Realisasi Penerimaan Daerah Provinsi NTB tahun 2008 mencapai lebih dari Rp. 1,049 trilyun. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan kontribusi 39,36 persen. Realisasi penerimaan PAD pada tahun 2008 melebihi

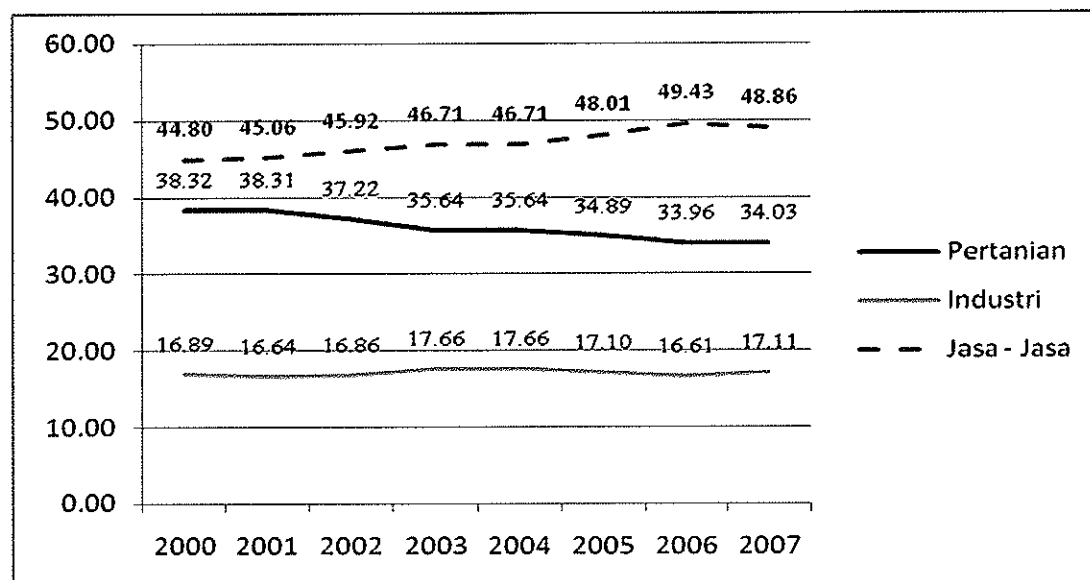
Universitas Indonesia

target yang ditetapkan sekitar 106,69 persen. Realisasi PAD tertinggi adalah Pajak Daerah sebesar 118,44 persen. Pajak daerah juga menyumbang PAD tertinggi sekitar 84,37 persen. Realisasi belanja daerah tahun 2008 sebesar lebih dari Rp. 1,039 triliun dengan alokasi terbesar adalah belanja pegawai dengan realisasi lebih dari Rp. 284 milyar. Realisasi Penerimaan dan Belanja Daerah Provinsi NTB Tahun 2008 mengalami surplus Rp. 9,708 milyar. Rencana Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tahun 2008 senilai Rp 695 juta dan akan menyerap tenaga kerja 5.010 orang. Sementara rencana Penanaman Modal Asing (PMA) senilai US\$ 33.765 yang akan menyerap tenaga kerja sekitar 2.076 orang. Realisasi investasi tahun 2008 hanya terjadi pada PMA senilai US\$ 4.601 yang menyerap tenaga kerja 159 orang.

Laju inflasi Kota Mataram tahun 2008 13,01 persen lebih tinggi dibandingkan inflasi tahun sebelumnya 8,76 persen. Laju inflasi Kota Mataram tahun 2008 tersebut juga lebih tinggi dibandingkan inflasi Nasional sebesar 11,06 persen. Pola konsumsi masyarakat Provinsi NTB tahun 2008 masih didominasi oleh konsumsi makanan. Rata – rata pengeluaran per kapita sebulan untuk makanan Rp 203.123,- sementara non makanan Rp. 169.343,-. Sektor pertambangan non migas merupakan kontribusi tertinggi PDRB Provinsi NTB tahun 2007 dengan sumbangan sekitar 37,80 persen diikuti sektor pertanian 21,42 persen. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh adanya penambangan non migas oleh perusahaan asing di wilayah Kabupaten Sumawa Barat. Laju pertumbuhan PDRB Provinsi NTB tahun 2007 sebesar 4,89 persen lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya 2,76 persen. Pemanfaatan PDRB tahun 2007 sebagian besar adalah sebagai konsumsi rumah tangga sekitar 44,03 persen diikuti oleh ekspor sekitar 42,10 persen.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi NTB terus mengalami peningkatan. Berdasarkan harga berlaku PDRB Provinsi NTB meningkat dari Rp 12,193 triliun tahun 2000 menjadi Rp 33,877 triliun tahun 2007. Peningkatannya lebih 2,5 kali lipat dalam waktu 7 tahun, hal tersebut disebabkan beroperasinya pertambangan non migas di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat. Distribusi PDRB atas dasar harga berlaku mencerminkan struktur ekonomi penduduk. Berkaitan dengan hal tersebut maka distribusi PDRB

Provinsi NTB perlu dipisahkan dari sektor pertambangan non migas. Alasannya adalah perusahaan pertambangan tersebut milik asing sehingga nilai tambah yang dihasilkan sebagian besar dibawa ke luar negeri dan hanya terdapat di satu kecamatan saja. Pemerintah Provinsi NTB hanya menerima bagi hasil dari nilai kontrak. Trend distribusi PDRB tanpa sektor pertambangan non migas terhadap 3 klasifikasi sektor (pertanian, industri dan jasa – jasa) disajikan pada grafik berikut.



Gambar 4.2. Trend Distribusi PDRB menurut 3 Klasifikasi Sektor di Provinsi NTB Tahun 2000 – 2007 (tanpa pertambangan non migas)

Pada grafik 4.2 terlihat bahwa sektor jasa – jasa mendominasi struktur perekonomian Provinsi NTB dan *trend*-nya semakin meningkat. Sementara sektor pertanian menunjukkan *trend* yang semakin menurun. Hal tersebut mengindikasikan bahwa telah terjadi transformasi struktur ekonomi di Provinsi NTB dari sektor pertanian (primer) menuju sektor jasa – jasa (tersier).

Tabel 4.2. berikut menunjukkan bahwa sebagian besar angkatan kerja di Provinsi NTB bekerja pada sektor Pertanian sekitar 47,41 persen. Namun sektor pertanian hanya menyumbangkan 21,86 persen nilai tambah terhadap PDRB, tidak sebanding dengan jumlah orang yang bekerja pada sektor tersebut. Persentase pekerja sektor Industri Pengolahan, Perdagangan, Hotel dan Restoran serta Jasa – Jasa lebih tinggi dibandingkan kontribusi nilai tambah sektor – sektor tersebut terhadap PDRB. Pada pekerja sektor – sektor tersebut rentan terjadi kemiskinan atau kesenjangan pendapatan.

Universitas Indonesia

Pekerja sektor pertambangan dan penggalian hanya 1,58 persen sementara kontribusi sektor ini terhadap PDRB adalah yang tertinggi yaitu 37,40 persen. Kontribusi sektor pertambangan yang tinggi terhadap PDRB Provinsi NTB disebabkan adanya pertambangan non migas yang dikelola oleh perusahaan asing di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat. Pada sektor pertambangan tersebut pekerja belum tentu memperoleh kesejahteraan yang paling baik dibandingkan sektor – sektor lain mengingat output perusahaan berupa hasil tambang diekspor ke luar negeri dan pemerintah hanya menerima bagian keuntungan bagi hasil.

Tabel 4.2. Distribusi PDRB (%) dan Tenaga Kerja (%) Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2007

Lapangan Usaha	% Share thd PDRB	% Tenaga Kerja
(1)	(2)	(3)
1. Pertanian	21.86	47.41
2. Pertambangan dan Penggalian	37.40	1.58
3. Industri Pengolahan	3.22	10.01
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	0.33	0.07
5. Bangunan	5.81	4.73
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	11.02	17.95
7. Transportasi dan Telekomunikasi	8.50	6.21
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	3.92	0.90
9. Jasa - Jasa	7.93	11.13
J u m l a h	100.00	100.00

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTB (2008b) (diolah kembali).

Indeks Pembangunan Manusia Provinsi NTB berada di posisi 32 dari 33 provinsi di Indonesia. IPM Provinsi NTB terus mengalami peningkatan dari 57,8 tahun 2002 menjadi 62,4 tahun 2005 dan 63,94 tahun 2007. Hal tersebut merupakan indikasi perbaikan kualitas modal manusia di Provinsi NTB secara umum. Komponen pembentuk IPM pun mengalami peningkatan. Angka Harapan Hidup meningkat dari 59,3 tahun 2002 menjadi 60,5 tahun 2005 dan 61,3 tahun 2007. Hal tersebut menunjukkan kondisi kesehatan di Provinsi NTB secara umum

mengalami perbaikan. Angka melek huruf juga mengalami peningkatan dari 77,8 tahun 2002 menjadi 78,8 tahun 2005 dan 80,10 tahun 2007. Komponen berikutnya adalah rata – rata lama sekolah juga meningkat dari 5,8 tahun 2002 menjadi 6,6 tahun 2005 dan 6,94 tahun 2007. Terakhir adalah komponen paritas daya beli yang juga mengalami peningkatan dari 583,100 tahun 2002 menjadi 623,200 tahun 2005 dan 630,48 tahun 2007.

Angka harapan hidup sebagai indikator kesehatan dalam IPM memang menunjukkan adanya perbaikan dibandingkan tahun – tahun sebelumnya, namun beberapa kondisi kesehatan masih perlu mendapat perhatian untuk perbaikan. Persentase penduduk yang mengalami keluhan sakit meningkat dari 32,47 persen tahun 2005 menjadi 37,79 persen tahun 2007. Angka kesakitan juga meningkat dari 21,23 persen tahun 2005 menjadi 22,37 persen tahun 2007 (BPS Provinsi NTB, 2008b). Gambaran tersebut mengindikasikan masih banyak penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan cenderung meningkat. Rata – rata lama sakit juga mengalami peningkatan dari 6,07 hari tahun 2005 menjadi 7,46 hari tahun 2007.

Pelayanan kesehatan menunjukkan indikasi perbaikan kinerja dengan menurunnya persentase orang yang berobat sendiri dari 70,40 persen tahun 2005 menjadi 59,79 persen tahun 2007. Persentase penduduk yang berobat jalan juga meningkat dari 38,50 persen tahun 2005 menjadi 48,53 persen tahun 2007. Pemanfaatan fasilitas kesehatan praktik dokter dan puskesmas juga mengalami peningkatan masing – masing dari 17,27 persen dan 52,69 persen tahun 2005 menjadi 22,00 persen dan 55,90 persen tahun 2007. Pengobatan di petugas kesehatan juga meningkat dari 13,65 persen tahun 2005 menjadi 30,1 persen tahun 2007. Data di atas menunjukkan potensi perbaikan kesehatan masyarakat yang didukung oleh peningkatan pemanfaatan fasilitas – fasilitas kesehatan.

Tingkat Pendidikan merupakan salah satu karakteristik yang menentukan kualitas sumber daya manusia. Kemajuan suatu wilayah sangat bergantung dari kualitas sumber daya penduduknya. Oleh sebab itu wilayah perkotaan berkembang relatif lebih cepat dibandingkan perdesaan karena rata – rata kualitas sumber daya manusianya lebih baik dibandingkan perdesaan.

Tabel 4.3. Persentase Penduduk Berusia 10 Tahun Keatas Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005 dan 2007

Tingkat Pendidikan	Perkotaan		Perdesaan		Kota + Desa	
	2005	2007	2005	2007	2005	2007
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tidak sekolah	15,52	12,45	20,61	17,59	18,65	15,63
Belum Tamat SD	22,67	19,56	25,84	24,55	24,62	22,65
Sekolah Dasar	23,60	23,91	29,02	28,00	26,93	26,44
SLTP	15,78	17,01	12,62	15,16	13,84	15,87
SLTA	17,49	20,53	10,21	12,06	13,01	15,29
Akademi + PT	4,95	6,55	1,70	2,63	2,95	4,12

Sumber: BPS Provinsi NTB (2008b)

Pada tabel 4.3 di atas, persentase penduduk yang tamat SD ke bawah lebih tinggi di perdesaan, sedangkan penduduk yang tamat SLTP ke atas lebih banyak di perkotaan. Secara umum, persentase yang berpendidikan SD kebawah menurun pada tahun 2007 dibandingkan tahun 2005, hal tersebut mengindikasikan perbaikan kualitas sumber daya manusia di Provinsi NTB. Sementara angka partisipasi sekolah dan angka melek huruf di wilayah perkotaan dan perdesaan tidak menunjukkan perbedaan yang nyata, sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.4. Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Umur dan Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005 dan 2007

Kel. Umur	Perkotaan		Perdesaan		Kota + Desa	
	2005	2007	2005	2007	2005	2007
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7 – 12	96,27	97,62	95,88	96,60	96,02	96,96
13 – 15	80,03	85,90	82,53	84,22	81,62	84,82
16 – 18	56,30	67,58	47,62	48,76	51,22	56,05

Sumber: BPS Provinsi NTB (2008b)

Penduduk miskin periode 2000 – 2008 cukup berfluktuatif. Persentase penduduk miskin cenderung mengalami penurunan dalam periode tersebut, dimana pada tahun 2000 penduduk miskin di Provinsi NTB mencapai 28,13 persen turun menjadi 23,81 persen pada tahun 2008. Namun secara kuantitas jumlah penduduk miskin tahun 2008 masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2000. Jumlah dan persentase penduduk miskin tertinggi terjadi pada tahun 2001, krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 mulai terasa dampaknya terhadap masyarakat Provinsi NTB pada tahun 2000 dan mencapai puncaknya pada tahun 2001. Data selengkapnya penduduk miskin Provinsi NTB tahun 2000 – 2008 dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.5. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi NTB

Tahun	Penduduk Miskin	
	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)
2000	1.070.430	28,13
2001	1.175.500	30,43
2002	1.145.081	27,75
2003	1.054.740	26,34
2004	1.031.605	25,26
2005	1.136.524	25,92
2006	1.156.144	27,17
2007	1.118.452	24,99
2008	1.080.613	23,81

Sumber: BPS Provinsi NTB

Semenjak tahun 2001 jumlah maupun persentase penduduk miskin terus mengalami penurunan. Berbagai program pengentasan kemiskinan dan jaring pengaman sosial nampaknya mulai menunjukkan keberhasilannya mengatasi krisis. Namun pada tahun 2005 jumlah maupun persentase penduduk miskin kembali meningkat, kondisi saat itu disebabkan kenaikan harga bahan bakar minyak yang ditetapkan pemerintah pada semester akhir tahun 2005. Pemerintah menyatakan harus menaikkan harga bahan bakar minyak mengingat harga minyak mentah dunia terus meningkat. Jika dampak dari kenaikan harga minyak mentah dunia saat itu harus ditanggulangi oleh subsidi dari pemerintah maka beban APBN terlalu besar. Sehingga pemerintah mengambil kebijakan

Universitas Indonesia

untuk menaikkan harga bahan bakar minyak dalam negeri. Dampak kebijakan tersebut terus meningkatkan jumlah maupun persentase penduduk miskin hingga tahun 2006. Setelah tahun 2006 jumlah dan persentase penduduk miskin terus mengalami penurunan hingga tahun 2008.

4.2. Analisis Deskriptif

4.2.1. Karakteristik Angkatan Kerja

Variabel bebas yang merupakan karakteristik angkatan kerja yang digunakan dalam tesis ini berdasarkan ketersediaan data adalah tingkat pendidikan, kelompok umur, daerah tempat tinggal, jenis kelamin dan status perkawinan. Variabel terikat dilambangkan oleh $Y = 1$ untuk *underemployment*, $Y = 2$ untuk *unemployment*, $Y = 3$ untuk pekerja paruh waktu sukarela dan $Y = 4$ untuk pekerja *full time*. Gambaran lengkap mengenai karakteristik angkatan kerja di Provinsi NTB dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.6. Frekuensi Sampel, Distribusi (%) dan Rasio Prevalensi (RPr) Status Angkatan Kerja Menurut Variabel Bebas di Propinsi NTB Tahun 2008

Variabel Bebas	Y=1	Y=2	Y=3	Y=4*
	n % (RPr)	n % (RPr)	n % (RPr)	n % (RPr)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Total	2.781 28.70 (0.55)	619 6.39 (0.12)	1.274 13.15 (0.25)	5.015 51.76 (1.00)
Tingkat Pendidikan (EDUC)				
1. SD ke bawah (EDUC1)	1.632 31.68 (0.64)	197 3.82 (0.08)	779 15.12 (0.31)	2.543 49.37 (1.00)
2. Tamat SLTP/SLTA (EDUC2)	1.007 26.42 (0.49)	376 9.86 (0.18)	382 10.02 (0.19)	2.047 53.70 (1.00)
3. Pendidikan Tinggi (EDUC3)	142 19.56 (0.33)	46 6.34 (0.11)	113 15.56 (0.27)	425 58.54 (1.00)

Tabel 4.6. Lanjutan

Variabel Bebas	Y=1	Y=2	Y=3	Y=4*)
	n % (RPr)	n % (RPr)	n % (RPr)	n % (RPr)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kelompok Umur (AGE)				
1. 15 – 19 tahun (AGE1)	265 35.10 (1.04)	117 15.50 (0.46)	117 15.50 (0.46)	256 33.91 (1.00)
2. 20 – 29 tahun (AGE2)	786 30.44 (0.61)	293 11.35 (0.23)	207 8.02 (0.16)	1.296 50.19 (1.00)
3. 30 – 54 Tahun (AGE3)	1.516 27.56 (0.49)	200 3.64 (0.06)	704 12.80 (0.23)	3.081 56.01 (1.00)
4. 55 – 64 Tahun (AGE4)	214 25.15 (0.56)	9 1.06 (0.02)	246 28.91 (0.64)	382 44.89 (1.00)
Status Perkawinan (KAWIN)				
1. Kawin (KAWIN1)	2.052 29.03 (0.54)	273 3.86 (0.07)	972 13.75 (0.26)	3.771 53.35 (1.00)
2. Belum/Pernah Kawin (KAWIN2)	729 27.81 (0.59)	346 13.20 (0.28)	302 11.52 (0.24)	1.244 47.46 (1.00)
Daerah Tempat Tinggal (RESIDEN)				
1. Perdesaan (RESIDEN1)	2.002 34.73 (0.77)	280 4.86 (0.11)	883 15.32 (0.34)	2.600 45.10 (1.00)
2. Perkotaan (RESIDEN2)	779 19.85 (0.32)	339 8.64 (0.14)	391 9.96 (0.16)	2.415 61.54 (1.00)
Jenis Kelamin (SEX)				
1. Perempuan (SEX1)	1.166 30.22 (0.66)	252 6.53 (0.14)	669 17.34 (0.38)	1.771 45.90 (1.00)
2. Laki – laki (SEX2)	1.615 27.70 (0.50)	367 6.29 (0.11)	605 10.38 (0.19)	3.244 55.63 (1.00)

Sumber : Pengolahan data SAKERNAS 2008

Keterangan: *) Sebagai kelompok pembanding perhitungan rasio prevalensi.

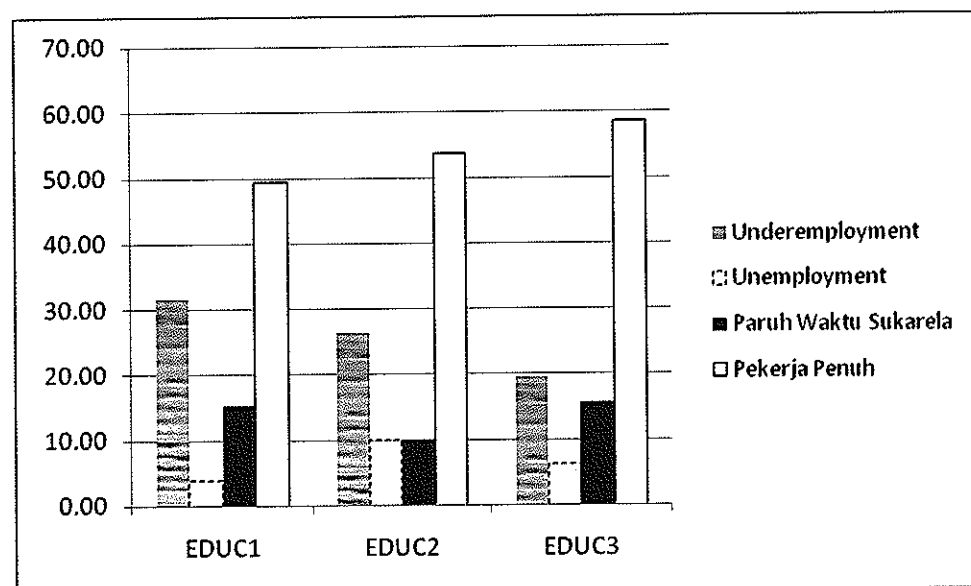
Y = 1, *underemployment*

Y = 2, *unemployment*

Y = 3, pekerja paruh waktu sukarela
 Y = 4, pekerja *full time*

4.2.1.1. Distribusi Status Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan

Tabel 4.6 menunjukkan di antara kelompok angkatan kerja berpendidikan tinggi hampir 60 persen berstatus pekerja penuh. Persentase sebagai pekerja penuh tersebut adalah yang tertinggi dibandingkan angkatan kerja pada kelompok – kelompok pendidikan yang lain. Sementara kelompok angkatan kerja berpendidikan SD kebawah (pendidikan rendah) memiliki persentase pekerja penuh sekitar 52 persen dan kelompok angkatan kerja berpendidikan SLTP/SLTA (pendidikan menengah) memiliki persentase hampir 56 persen. Kondisi ini menggambarkan pemanfaatan angkatan kerja bagi penduduk dengan pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih baik.



Gambar 4.3. Distribusi Status Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan di Provinsi NTB Tahun 2008

Gambaran tersebut ditegaskan lagi dengan besarnya persentase angkatan kerja sebagai *underemployment* pada kelompok berpendidikan rendah lebih dari 30 persen, sementara persentase angkatan kerja sebagai *underemployment* pada kelompok berpendidikan tinggi hanya sekitar 19 persen. Demikian juga dengan memperhatikan rasio prevalensi, bahwa kecenderungan *unemployment* pada kelompok angkatan kerja berpendidikan SD kebawah adalah yang terendah dibandingkan kelompok tingkat pendidikan yang lain. Kondisi

Universitas Indonesia

tersebut antara lain disebabkan daya saing kelompok angkatan kerja berpendidikan SD kebawah lebih rendah daripada kelompok tingkat pendidikan yang lain. Sehingga hanya sebagian kecil dari mereka yang bersedia bersaing dalam mencari kerja (*unemployment*) sementara yang lain memilih bekerja apa adanya (*underemployment*) jika memang belum memperoleh pekerjaan penuh. Hasil penelitian lain juga menyatakan angkatan kerja dengan tingkat pendidikan lebih tinggi memiliki aspirasi yang lebih tinggi mengenai pekerjaan yang diinginkan (Suratman, 1994).

Gambar 4.3 menunjukkan distribusi status angkatan kerja pada masing – masing kelompok tingkat pendidikan. Pada setiap kelompok tingkat pendidikan terlihat bahwa persentase sebagai pekerja *full time* adalah yang tertinggi, diikuti oleh status *underemployment* dan *unemployment*. Persentase sebagai *underemployment* berkisar sekitar 19 – 32 persen pada setiap tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan persentase sebagai pekerja penuh semakin meningkat dan persentase sebagai *underemployment* semakin menurun.

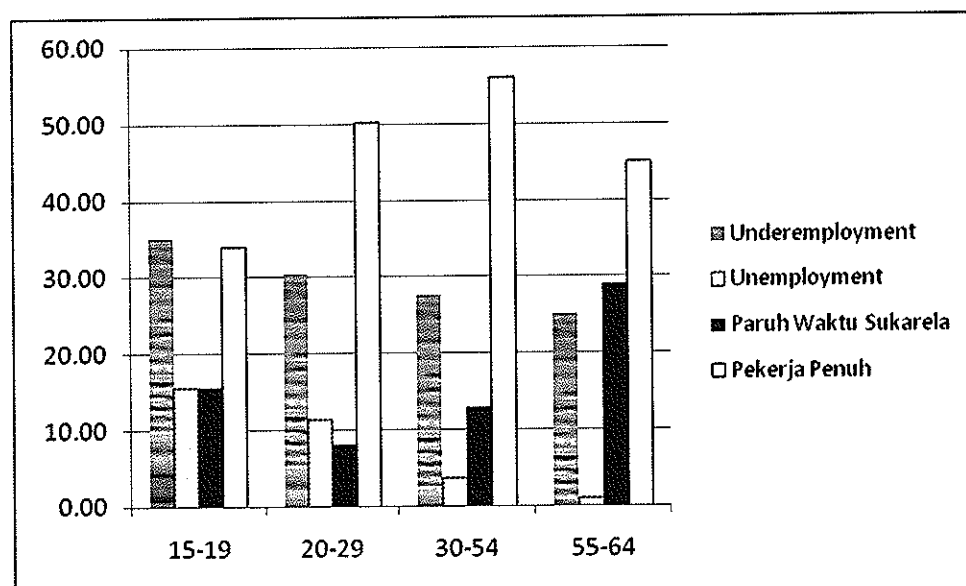
Tingginya proporsi *unemployment* dari kelompok angkatan kerja berpendidikan SLTP/SLTA dibandingkan kelompok pendidikan yang lainnya pada grafik 4.2 di atas nampaknya mencerminkan lapangan kerja di Provinsi NTB lebih banyak membutuhkan tenaga kerja berpendidikan SLTP atau SLTA. Dampaknya adalah penduduk pada kelompok pendidikan tersebut merasa sudah layak untuk mencari pekerjaan (*unemployment*) sehingga bagi penduduk golongan ekonomi menengah ke bawah cenderung tidak melanjutkan sekolah dan memilih masuk dalam angkatan kerja setelah menamatkan pendidikan menengah. Dampak lainnya adalah bagi angkatan kerja dengan pendidikan SD kebawah akan tersisih sebagai pekerja *underemployment*.

4.2.1.2. Distribusi Status Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur

Tabel 4.6 menunjukkan persentase status angkatan kerja menurut kelompok umur angkatan kerja. Angkatan kerja pada kelompok umur yang lebih tua memiliki persentase sebagai *underemployment* yang lebih kecil dibandingkan dengan kelompok umur yang lebih muda. Kelompok angkatan kerja usia muda (15–19 tahun) sekitar 35,10 persen sebagai *underemployment*, persentase tersebut sedikit lebih tinggi daripada status sebagai pekerja penuh yaitu sekitar 33,91

persen. Sementara angkatan kerja pada kelompok umur yang lain, persentase tertinggi adalah sebagai pekerja penuh. Usia yang masih muda tentunya pengalaman kerja atau pengalaman bersaing dalam pasar kerja sangat sedikit dan kualitas sumber dayanya juga masih rendah. Disamping itu, masuknya penduduk usia 15–19 tahun dalam angkatan kerja tentunya menjadikan mereka yang seharusnya masih bersekolah menjadi "terganggu" atau bahkan putus sekolah karena harus bekerja baik paruh waktu maupun *full time*.

Kondisi yang sama juga terjadi pada status *unemployment*. Angkatan kerja pada kelompok umur yang paling muda memiliki persentase sebagai *unemployment* tertinggi sekitar 15,50 persen dibandingkan angkatan kerja pada kelompok umur lainnya. Sementara di antara angkatan kerja kelompok umur 55-64 tahun hanya sekitar 1,06 persen sebagai *unemployment*. Hal tersebut mencerminkan angkatan kerja kelompok umur muda masih banyak yang belum terserap dalam pasar kerja, padahal mereka sangat membutuhkan pekerjaan karena desakan ekonomi.



Gambar 4.4. Distribusi Status Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur di Provinsi NTB Tahun 2008

Lebih lanjut tabel 4.6 menunjukkan di antara angkatan kerja kelompok umur 30-54 tahun sekitar 56,01 persen sebagai pekerja *full time*. Dibandingkan angkatan kerja kelompok umur yang lain persentase pekerja *full time* tersebut adalah yang tertinggi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pada kelompok umur 30-54 tahun tingkat penyerapan tenaga kerja relatif lebih tinggi dibandingkan

kelompok usia yang lain. Hal tersebut sangat wajar mengingat pada usia tersebut tenaga kerja memang memiliki produktifitas kerja yang relatif lebih tinggi dibandingkan kelompok umur lainnya.

Gambar 4.4 menunjukkan bahwa persentase sebagai pekerja penuh berbentuk parabola, meningkat pada kelompok umur 15-19 tahun, 20-29 tahun dan mencapai puncaknya pada kelompok umur 30-54 tahun. Namun pada kelompok umur 55-64 tahun kembali menurun. Persentase sebagai *underemployment* menunjukkan penurunan pada kelompok umur yang lebih tua. Persentase *unemployment* juga menunjukkan penurunan pada kelompok umur yang lebih tua.

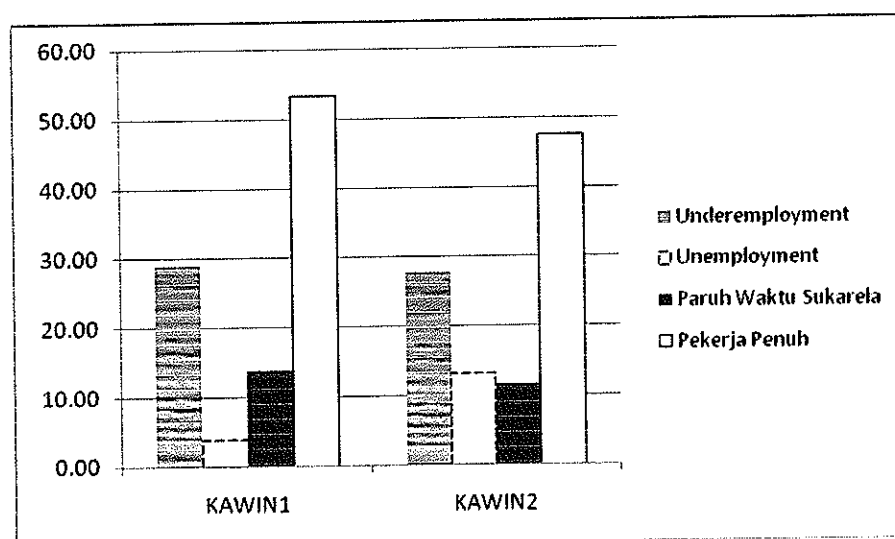
Tingginya penawaran tenaga kerja pada usia muda (15-19 tahun) pada umumnya disebabkan oleh desakan ekonomi. Pada sisi lain hal tersebut "didukung" oleh adanya permintaan tenaga kerja dari perusahaan – perusahaan pada kelompok umur tersebut dengan alasan antara lain dapat dibayar murah dan tenaga kerja usia muda relatif lebih mudah diatur dan diperintah.

Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah adanya angkatan kerja usia 55–64 tahun sebagai *unemployment*. Walaupun persentasenya cukup kecil sekitar 1,15 persen namun dengan kondisi fisik yang sudah menurun memerlukan perhatian dari pengambil kebijakan agar keinginan mereka untuk berpartisipasi dalam pasar kerja dapat terwujud secara proporsional antara beban kerja dan kemampuannya.

4.2.1.3. Distribusi Status Angkatan Kerja Menurut Status Perkawinan

Tabel 4.6 menunjukkan di antara angkatan kerja berstatus kawin persentase sebagai *full time worker* lebih tinggi dibandingkan angkatan kerja berstatus belum/pernah kawin. Persentase sebagai *underemployment* di antara angkatan kerja berstatus kawin lebih tinggi dibandingkan angkatan kerja berstatus belum/pernah kawin. Bagi angkatan kerja yang berstatus kawin, tanggung jawab terhadap keluarga kemungkinan merupakan motivasi yang kuat untuk bekerja baik dengan memperoleh pekerjaan *full time* atau *underemployment*. Angkatan kerja berstatus kawin persentase sebagai *unemployment* lebih rendah dibandingkan kelompok angkatan kerja berstatus belum/pernah kawin. Hal tersebut

kemungkinan disebabkan angkatan kerja berstatus belum/pernah kawin memiliki beban tanggung jawab rumah tangga yang lebih ringan sehingga memiliki kecenderungan yang cukup tinggi untuk menganggur sampai memperoleh pekerjaan sesuai yang diharapkan. Mereka bersedia menganggur (*unemployed*) sampai memperoleh pekerjaan yang diharapkan atau bekerja *underemployment* untuk mencari pengalaman kerja. Sedangkan bagi angkatan kerja yang berstatus kawin menganggur bukanlah pilihan tepat mengingat tanggung jawabnya terhadap pemenuhan kebutuhan keluarganya.



Gambar 4.5. Distribusi Status Angkatan Kerja Menurut Status Perkawinan di Provinsi NTB Tahun 2008

Gambar 4.5 menunjukkan persentase sebagai *underemployment* dan pekerja *full time* lebih tinggi pada angkatan kerja berstatus kawin. Persentase sebagai *underemployment* relatif tidak jauh berbeda antara angkatan kerja berstatus kawin dan belum/pernah kawin. Persentase sebagai *unemployment* angkatan kerja berstatus kawin lebih rendah dibandingkan yang berstatus belum/pernah kawin.

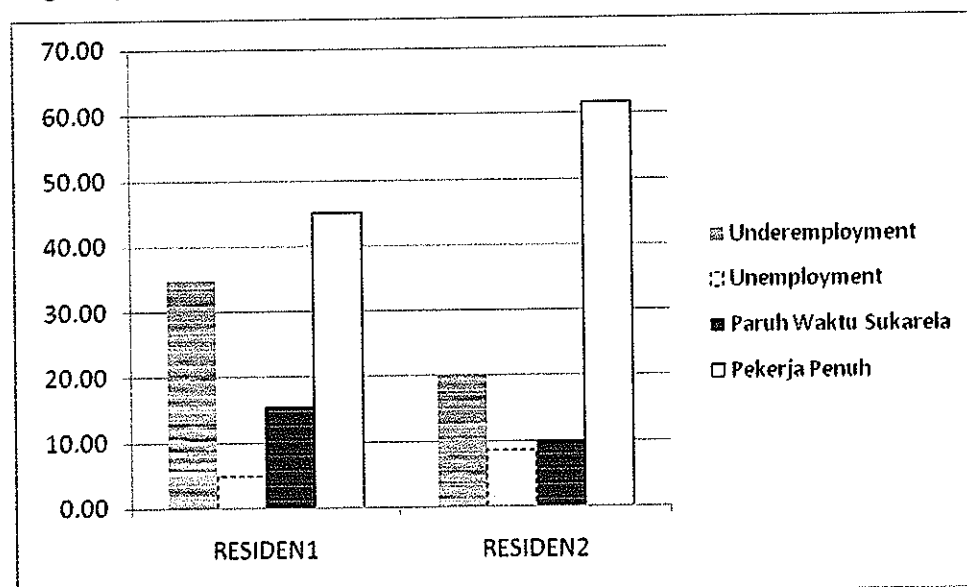
4.2.1.4. Distribusi Status Angkatan Kerja Menurut Daerah Tempat Tinggal

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa persentase pekerja *full time* dari angkatan kerja yang tinggal di wilayah perkotaan lebih tinggi dibandingkan persentase pekerja *full time* dari angkatan kerja yang tinggal di perdesaan. Kondisi tersebut menunjukkan pemanfaatan tenaga kerja di wilayah perkotaan lebih baik

Universitas Indonesia

dibandingkan perdesaan, hal tersebut menyebabkan produktifitas tenaga kerja di perkotaan lebih tinggi dibandingkan perdesaan (Todaro, 1997). Hal tersebut diperkuat dengan persentase *underemployment* angkatan kerja yang tinggal di wilayah perdesaan lebih tinggi dibandingkan angkatan kerja di wilayah perkotaan.

Persentase menjadi *unemployment* di antara angkatan kerja yang tinggal di perkotaan lebih tinggi daripada angkatan kerja di wilayah perdesaan. Kondisi ini kemungkinan disebabkan lebih pesatnya pembangunan di wilayah perkotaan memunculkan harapan dari angkatan kerja bahwa di perkotaan lebih banyak kesempatan kerja. Hal tersebut diyakini merupakan salah satu sebab meningkatnya urbanisasi (Todaro, 1997).



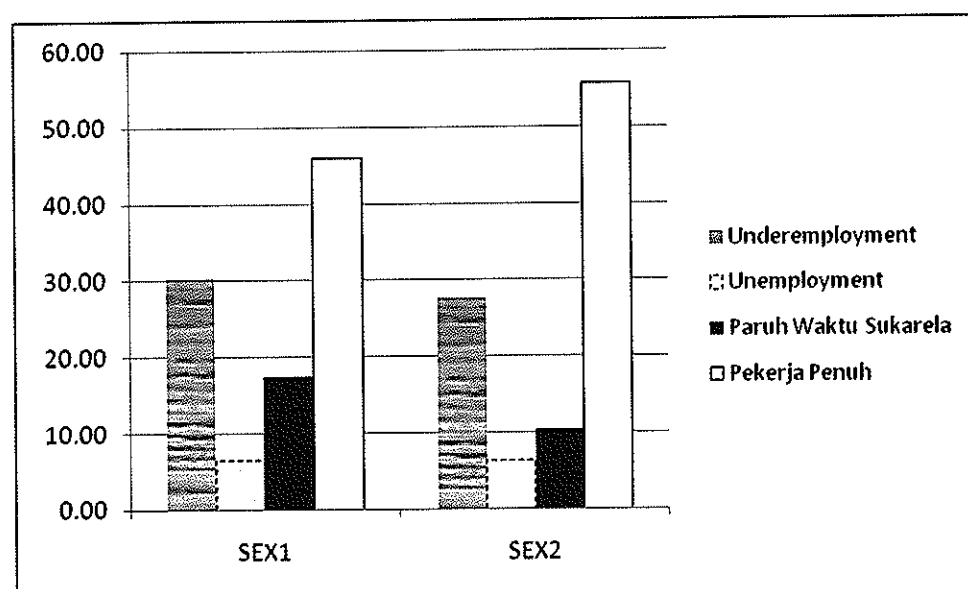
Gambar 4.6. Distribusi Status Angkatan Kerja Menurut Wilayah Tempat Tinggal di Provinsi NTB Tahun 2008

Gambar 4.6 menunjukkan bahwa persentase sebagai *unemployment* dan pekerja penuh di wilayah perdesaan lebih rendah dibandingkan perkotaan. Persentase *underemployment* menunjukkan hal yang sebaliknya dimana perdesaan memiliki persentase yang lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa wilayah perkotaan memiliki penyerapan dan pemanfaatan tenaga kerja lebih baik dibandingkan perdesaan.

4.2.1.5. Distribusi Status Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin

Kelompok angkatan kerja laki – laki memiliki persentase sebagai pekerja *full time* lebih tinggi dibandingkan kelompok angkatan kerja perempuan

(tabel 4.6 dan gambar 4.7). Lebih lanjut tabel 4.6 menunjukkan persentase kelompok angkatan kerja perempuan menjadi *underemployment* lebih tinggi daripada kelompok angkatan kerja laki – laki. Hal tersebut mencerminkan pemanfaatan tenaga kerja laki – laki lebih baik dibandingkan perempuan. Persentase perempuan sebagai *unemployment* tidak menunjukkan perbedaan yang nyata dibandingkan laki – laki. Kondisi ini tentunya perlu dicermati dengan lebih memperhatikan kesetaraan gender dalam penciptaan lapangan kerja dan kesempatan memperoleh pekerjaan yang layak.



Gambar 4.7. Distribusi Status Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Provinsi NTB Tahun 2008

Gambar 4.7 menunjukkan bahwa pada status angkatan kerja sebagai pekerja paruh waktu sukarela persentase perempuan lebih tinggi dibandingkan laki – laki. Kondisi ini mencerminkan di antara pekerja yang paruh waktu, perempuan cenderung lebih menerima kondisi tersebut dan tidak berusaha menambah jam kerja dibandingkan laki – laki. Pada kelompok status angkatan kerja sebagai pekerja *full time*, persentase angkatan kerja laki – laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Persentase status *underemployment* dari angkatan kerja perempuan lebih tinggi dibandingkan laki – laki. Namun persentase *unemployment* tidak menunjukkan perbedaan yang nyata antara laki – laki dan perempuan.

4.2.2. Kondisi *Human Capital* Angkatan Kerja di Provinsi NTB

Provinsi NTB memiliki permasalahan masih rendahnya modal manusia (*human capital*) sebagaimana dicerminkan oleh peringkat IPM dibandingkan seluruh provinsi se - Indonesia. Mencermati proporsi status angkatan kerja pada setiap tingkat pendidikan, kecenderungan angkatan kerja berpendidikan SD ke bawah untuk menjadi pekerja *underemployment* adalah yang paling besar. Angkatan kerja berpendidikan SLTP atau SLTA memiliki kecenderungan paling besar sebagai *unemployment* dibandingkan tingkat pendidikan lainnya. Sedangkan kecenderungan sebagai pekerja *full time* yang terbesar adalah kelompok angkatan kerja berpendidikan tinggi.

Sebagian besar ahli ekonomi sepakat bahwa sumber daya manusia (*human resources*) dari suatu bangsa merupakan faktor yang paling menentukan karakter dan kecepatan pembangunan sosial ekonomi bangsa bersangkutan (Todaro, 1997). Lebih lanjut Todaro menyatakan bahwa diskusi mengenai hubungan pendidikan dan kesempatan kerja berputar disekitar 2 proses ekonomi yang fundamental, yang pertama yaitu interaksi antara permintaan yang bermotivasi ekonomi (sebagai investasi *human capital*) dan penawaran yang bermotivasi politis (berapa banyak sekolah yang didirikan dan siapa saja yang menjadi sasarannya). Kedua adalah Selisih antara manfaat dan biaya – biaya, baik secara individual maupun sosial dari masing – masing tingkat pendidikan. Sebagai suatu investasi, permintaan terhadap pendidikan memiliki harapan mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang lebih baik pada sektor modern di masa yang akan datang (*private benefits of education*). Disamping itu adapula biaya – biaya (materi maupun non materi) yang harus dikeluarkan baik langsung maupun tidak langsung oleh siswa dan atau keluarganya.

4.2.2.1. Persentase *Underemployment* dan *Unemployment* Menurut Tingkat Pendidikan, Wilayah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin

Tabel 4.6 di atas menggambarkan kecenderungan *underemployment* dan *unemployment* menurut tingkat pendidikan, wilayah tempat tinggal dan jenis kelamin secara terpisah (masing – masing). Tabel 4.7 menggambarkan proporsi *underemployment* dan *unemployment* angkatan kerja menurut interaksi antar kelompok tingkat pendidikan, wilayah dan jenis kelamin. Tabel 4.7 menunjukkan

Universitas Indonesia

semakin tinggi tingkat pendidikan, maka proporsi sebagai *underemployment* semakin berkurang pada setiap kelompok wilayah dan jenis kelamin angkatan kerja. Hal tersebut mencerminkan investasi pendidikan bagi laki – laki maupun perempuan pada wilayah perkotaan dan perdesaan berpengaruh positif terhadap pemanfaatan sumber daya tenaga kerja.

Proporsi angkatan kerja laki – laki maupun perempuan sebagai *underemployment* di wilayah perdesaan selalu lebih tinggi dibandingkan angkatan kerja di wilayah perkotaan pada setiap tingkat pendidikan. Proporsi angkatan kerja perempuan sebagai *underemployment* selalu lebih tinggi dibandingkan laki – laki pada setiap tingkat pendidikan di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Kondisi tersebut menunjukkan pemanfaatan sumber daya tenaga kerja wilayah perkotaan lebih baik (tinggi) dibandingkan perdesaan demikian juga pemanfaatan tenaga kerja laki – laki lebih optimal dibandingkan perempuan.

Tabel 4.7. Proporsi *Underemployment* dan *Unemployment* Menurut Tingkat Pendidikan, Wilayah dan Jenis Kelamin

RESIDEN	SEX	<i>Underemployment</i>			<i>Unemployment</i>		
		EDUC1	EDUC2	EDUC3	EDUC1	EDUC2	EDUC3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	1	0.364	0.359	0.311	0.038	0.093	0.089
1	2	0.343	0.342	0.248	0.034	0.059	0.041
2	1	0.237	0.206	0.184	0.043	0.124	0.077
2	2	0.237	0.161	0.141	0.044	0.131	0.056

Sumber : SAKERNAS Provinsi NTB Agustus 2008 (telah diolah kembali)

Proporsi angkatan kerja berpendidikan menengah sebagai *unemployment* adalah yang tertinggi dibandingkan tingkat pendidikan lainnya pada setiap kelompok wilayah dan jenis kelamin angkatan kerja. Hal tersebut kemungkinan disebabkan lapangan kerja di wilayah Provinsi NTB lebih membutuhkan tenaga kerja berpendidikan menengah. Kondisi itu menyebabkan penduduk tamatan pendidikan menengah (SLTP dan SLTA) dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah lebih memilih masuk dalam angkatan kerja, karena harapannya cukup besar untuk memperoleh pekerjaan.

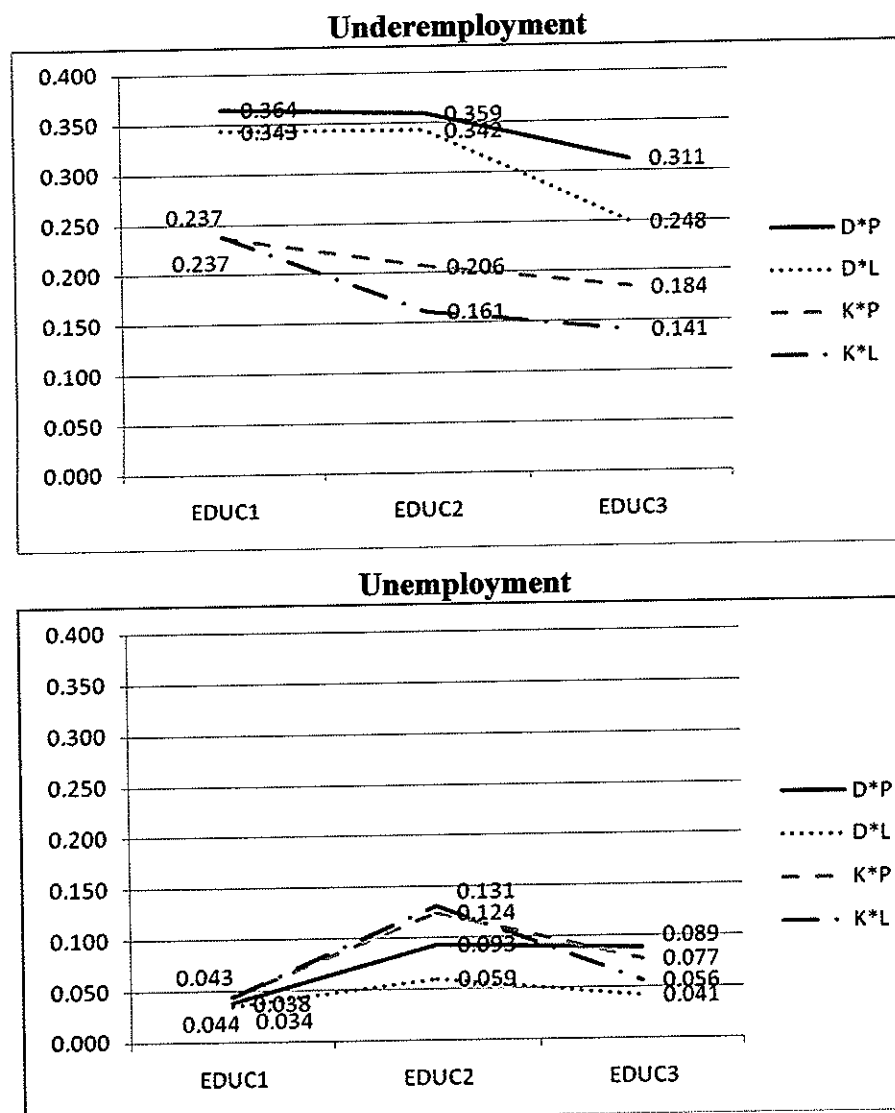
Proporsi angkatan kerja laki – laki maupun perempuan sebagai *unemployment* di wilayah perkotaan lebih tinggi dibandingkan perdesaan. Hal

tersebut menunjukkan angkatan kerja lebih tertarik mencari kerja di wilayah perkotaan yang diharapkan memiliki kesempatan kerja lebih luas dibandingkan perdesaan. Kondisi tersebut sama seperti yang digambarkan pada tabel 4.6.

Tabel 4.6 menggambarkan bahwa tidak terdapat perbedaan *unemployment* yang nyata antara laki – laki dan perempuan. Hal tersebut dapat lebih dijelaskan pada tabel 4.7 yaitu *unemployment* perempuan lebih tinggi dibandingkan laki – laki di wilayah perdesaan namun di wilayah perkotaan terjadi kondisi yang sebaliknya, namun tidak menunjukkan perbedaan yang nyata. Hal tersebut kemungkinan disebabkan laki – laki lebih memilih mencari kerja (*unemployment*) di perkotaan dengan harapan bisa memperoleh pekerjaan yang lebih baik atau penyerapan tenaga kerja perempuan dan laki – laki di wilayah perkotaan tidak jauh berbeda. Hal tersebut mengindikasikan kesenjangan gender dalam partisipasi kerja di perkotaan lebih baik dibandingkan perdesaan.

Sementara pada kelompok angkatan kerja berpendidikan tinggi proporsi perempuan sebagai *unemployment* lebih tinggi dibandingkan laki – laki. Kemungkinan penyerapan tenaga kerja laki – laki berpendidikan tinggi di wilayah perkotaan maupun perdesaan relatif lebih baik dibandingkan perempuan. Kemungkinan lain adalah laki – laki mencari kerja sambil bekerja seadanya sebagai tambahan pengalaman kerja.

Pada gambar 4.8 terlihat bahwa proporsi *underemployment* wilayah perdesaan relatif lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Perbedaan proporsi *underemployment* antar perempuan dan laki - laki di wilayah perdesaan relatif sama pada tingkat pendidikan rendah dan menengah sementara pada tingkat pendidikan tinggi perbedaannya semakin jauh. Sementara pada wilayah perkotaan proporsi *underemployment* laki – laki relatif sama dengan perempuan pada tingkat pendidikan rendah, namun pada tingkat pendidikan menengah dan tinggi terlihat perbedaannya semakin jauh.



Gambar 4.8. Proporsi *Underemployment* dan *Unemployment* Menurut Tingkat Pendidikan, Wilayah dan Jenis Kelamin

Keterangan: D = Perdesaan
 K = Perkotaan
 P = Perempuan
 L = Laki - laki

Proporsi *unemployment* di wilayah perkotaan lebih tinggi dibandingkan perdesaan, kecuali pada tingkat pendidikan tinggi. Proporsi *unemployment* antara laki - laki dan perempuan di wilayah perkotaan pada setiap tingkat pendidikan relatif tidak berbeda. Namun di wilayah perdesaan semakin tinggi tingkat pendidikan menunjukkan proporsi *unemployment* perempuan semakin tinggi dibandingkan laki - laki.

4.2.2.2. Persentase *Underemployment* dan *Unemployment* Menurut Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin dan Kelompok Umur

Dalam penelitian mengenai ketenagakerjaan, pada umumnya variabel umur digunakan sebagai *proxy* pengalaman kerja. Sisi lain yang juga dapat menggunakan umur sebagai *proxy* adalah kekuatan fisik dan kondisi kesehatan. Sebagaimana diketahui secara luas bahwa harapan hidup perempuan lebih tinggi dibandingkan laki – laki, hal tersebut mencerminkan bahwa secara umum kondisi kesehatan perempuan lebih baik dibandingkan laki – laki.

Tabel 4.6 menunjukkan persentase *underemployment* dan *unemployment* menurut pendidikan, kelompok umur dan jenis kelamin secara terpisah (masing – masing). Tabel 4.8 menggambarkan proporsi *underemployment* dan *unemployment* menurut interaksi antar kelompok pendidikan, umur dan jenis kelamin. Angkatan kerja kelompok umur 15-19 tahun tidak ada yang berpendidikan tinggi, oleh sebab itu proporsi sebagai *underemployment* dan *unemployment* tidak dapat dihitung.

Secara umum tabel 4.8 menggambarkan bahwa kondisi angkatan kerja sebagaimana tersaji pada tabel 4.6 yaitu proporsi *underemployment* semakin berkurang pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan kelompok umur yang lebih tua serta proporsi pengangguran semakin meningkat pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan berkurang pada kelompok umur yang lebih tua. Namun ada beberapa kelompok dengan kondisi yang berbeda.

Tabel 4.8. Proporsi *Underemployment* dan *Unemployment* Menurut Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin dan Kelompok Umur

SEX	AGE	<i>Underemployment</i>			<i>Unemployment</i>		
		EDUC1	EDUC2	EDUC3	EDUC1	EDUC2	EDUC3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	1	0.396	0.354		0.099	0.164	
1	2	0.380	0.325	0.252	0.085	0.141	0.126
1	3	0.321	0.229	0.200	0.028	0.069	0.053
1	4	0.213	0.167	0.250	0.000	0.000	0.000
2	1	0.339	0.338		0.139	0.182	
2	2	0.344	0.241	0.278	0.071	0.138	0.103
2	3	0.303	0.248	0.152	0.021	0.050	0.036
2	4	0.295	0.247	0.103	0.017	0.011	0.034

Sumber : SAKERNAS Provinsi NTB Agustus 2008 (telah diolah kembali)

Kelompok angkatan kerja perempuan berumur 55-64 tahun, proporsi angkatan kerja pendidikan rendah dan menengah sebagai *underemployment* lebih rendah dibandingkan pendidikan tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan sebenarnya aspirasi bekerja dari perempuan berpendidikan tinggi dan berusia tua (55-64 tahun) masih cukup besar, namun tidak dapat dimanfaatkan dengan baik. Rendahnya proporsi *underemployment* perempuan kelompok umur 55-64 tahun berpendidikan rendah dan menengah kemungkinan disebabkan mereka sudah merasa cukup dengan bekerja paruh waktu.

Kondisi yang berbeda juga ditunjukkan oleh angkatan kerja kelompok umur 20-29 tahun pada tingkat pendidikan tinggi, dimana proporsi *underemployment* perempuan lebih rendah dibandingkan laki – laki. Karena sebagai *fresh graduate*, nampaknya perempuan cenderung memilih menjadi pengangguran sebelum memperoleh pekerjaan yang diharapkan. Sebagian perempuan *fresh graduate* lebih memilih sebagai *unemployment* daripada *underemployment* kemungkinan mereka merasa waktunya akan lebih bermanfaat untuk membantu pekerjaan dalam rumah tangga. Sementara laki – laki *fresh graduate* lebih memilih mencari kerja sambil bekerja paruh waktu yang kemungkinan bertujuan untuk menambah pengalaman. Alasan lain adalah bagi laki – laki yang belum kawin kemungkinan memiliki pertimbangan untuk segera menata ekonominya terlebih dulu sebagai persiapan berkeluarga dan bagi yang sudah kawin kemungkinan karena rasa tanggung jawab harus memenuhi kebutuhan keluarga.

Proporsi *underemployment* laki – laki usia 20-29 tahun berpendidikan tinggi lebih tinggi dibandingkan berpendidikan menengah. Kemungkinan disebabkan sebagai *fresh graduate* belum dimanfaatkan secara optimal dalam pasar kerja disamping mereka juga masih mencari pekerjaan yang sesuai sambil bekerja paruh waktu untuk menambah pengalaman.

Angkatan kerja kelompok umur 30-54 tahun pada tingkat pendidikan menengah juga menunjukkan proporsi laki – laki sebagai *underemployment* lebih tinggi dibandingkan perempuan. Hal tersebut kemungkinan disebabkan angkatan kerja perempuan pada kelompok tersebut lebih memilih sebagai pekerja paruh

waktu karena sebagian telah berstatus kawin atau memang lebih banyak terserap sebagai pekerja penuh.

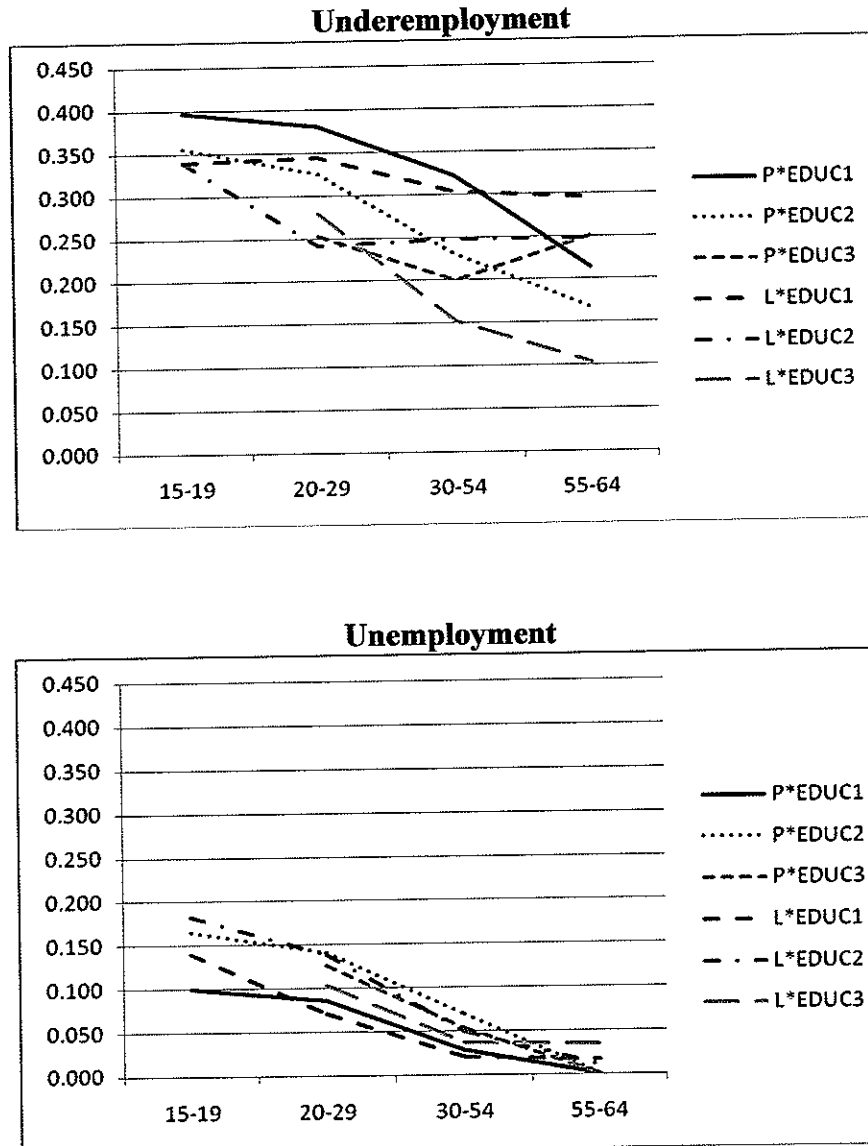
Laki – laki berpendidikan rendah kelompok umur 20-29 tahun memiliki proporsi *underemployment* lebih tinggi dibandingkan kelompok umur 15-19 tahun. Hal tersebut kemungkinan disebabkan bagi angkatan kerja berusia 20-29 tahun dan berpendidikan rendah kemungkinan tersisih dalam persaingan kerja karena adanya tenaga kerja berpendidikan menengah dan tinggi pada kelompok umur yang sama. Tenaga kerja laki – laki berpendidikan menengah kelompok umur 30-54 tahun memiliki proporsi *underemployment* lebih tinggi dibandingkan kelompok umur 20-29 tahun. Hal itu disebabkan proporsi *unemployment* angkatan kerja laki – laki kelompok umur 20-29 tahun lebih tinggi dibandingkan kelompok umur 30-54 tahun.

Tenaga kerja perempuan berpendidikan tinggi kelompok umur 55-64 tahun memiliki proporsi *underemployment* lebih tinggi dibandingkan kelompok umur 30-54 tahun. Hal tersebut kemungkinan disebabkan produktifitas kerja yang semakin menurun dan kurang terakomodir dalam pasar kerja.

Kelompok umur 55-64 tahun pada tingkat pendidikan rendah dan menengah proporsi *underemployment* perempuan juga lebih rendah dibandingkan laki – laki. Hal tersebut kemungkinan disebabkan pada usia tua (55-64 tahun) kondisi kesehatan sudah menurun dimana kesehatan perempuan relatif lebih baik dibandingkan laki – laki sementara pekerjaan yang dilakukan tetap menuntut aktifitas fisik sehingga laki – laki cenderung mengurangi porsi pekerjaannya. Berbeda dengan angkatan kerja berpendidikan tinggi dimana pekerjaan yang dilakukan pada umumnya mengutamakan keahlian dan aktifitas non fisik sehingga tidak terlalu mempengaruhi partisipasi kerja laki – laki kelompok umur 55-64 tahun. Kemungkinan lain adalah perempuan usia tua berpendidikan rendah dan menengah merasa cukup dengan bekerja paruh waktu.

Proporsi angkatan kerja perempuan sebagai *unemployment* lebih tinggi dibandingkan laki – laki pada masing – masing kelompok umur dan tingkat pendidikan. Kecuali pada kelompok umur muda (15-19 tahun), dimana proporsi perempuan sebagai *unemployment* lebih rendah dibandingkan laki – laki pada tingkat pendidikan rendah dan menengah. Hal tersebut mencerminkan penyerapan

tenaga kerja perempuan usia muda relatif lebih tinggi dibandingkan laki – laki atau laki – laki lebih memilih tetap menjadi *unemployment* sebelum memperoleh pekerjaan yang diinginkan.



Gambar 4.9. Proporsi *Underemployment* dan *Unemployment* Menurut Kelompok Umur, Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

Keterangan: P = Perempuan

L = Laki – laki

EDUC1 = Berpendidikan SD kebawah (rendah)

EDUC2 = Berpendidikan SLTP/SLTA (menengah)

EDUC3 = Berpendidikan Tinggi

Gambar 4.9 menunjukkan proporsi *underemployment* cenderung menurun pada kelompok umur yang semakin tua, kecuali untuk perempuan berpendidikan tinggi dimana proporsi *underemployment* kelompok umur 55-64

tahun lebih tinggi dibandingkan 30-54 tahun. Perempuan berpendidikan tinggi yang saat survei berusia 55-64 tahun tentunya berasal dari keluarga dengan latar belakang ekonomi yang cukup baik. Sehingga pada usia lanjut bekerja *full time* bukanlah pilihan utama, kemungkinan mereka lebih memilih membagi waktu dengan keluarga atau kegiatan sosial. Gambar 4.9 untuk *unemployment* menunjukkan bahwa semakin tua umur, proporsi *unemployment* semakin berkurang, kondisi ini terjadi pada setiap tingkat pendidikan bagi laki – laki dan perempuan.

Partisipasi Angkatan Kerja Anak Usia Sekolah (10-18) tahun

Mencermati partisipasi kerja menurut kelompok umur dan tingkat pendidikan sangat penting untuk membedakannya berdasarkan status sekolah. Sebagaimana diketahui pada usia sekolah selain terdapat kelompok yang hanya bekerja saja dan hanya bersekolah saja, terdapat pula kelompok yang bekerja sambil bersekolah. Kelompok anak usia sekolah yang bekerja di Provinsi NTB pada umumnya disebabkan karena desakan kondisi ekonomi keluarga, sehingga mereka harus membantu kerja orang tuanya. Informasi kelompok – kelompok tersebut sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.9. Status Angkatan Kerja Anak Usia Sekolah Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi NTB Tahun 2008

Kelompok Umur	Jenis Kelamin	Status Angkatan Kerja			
		Y=1	Y=2	Y=3	Y=4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10-12	Perempuan	0	2	0	0
			1.000		
	Laki - laki	0	4	0	0
			1.000		
	Sub Total	0	6	0	0
			1.000		
13-15	Perempuan	10	0	6	3
		0.556	0.000	0.750	0.375
	Laki - laki	13	0	20	2
		0.419	0.000	0.909	0.167
	Sub Total	23	0	26	5
		0.469	0.000	0.867	0.250

Tabel 4.9. Lanjutan

Kelompok Umur	Jenis Kelamin	Status Angkatan Kerja			
		Y=1	Y=2	Y=3	Y=4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16-18	Perempuan	18	0	26	5
		0.257	0.000	0.667	0.078
	Laki - laki	28	2	31	9
		0.359	0.045	0.795	0.094
	Sub Total	46	2	57	14
		0.311	0.029	0.731	0.088
Total		69	8	83	19
		0.350	0.094	0.769	0.106

Sumber : SAKERNAS Provinsi NTB Agustus 2008 (telah diolah kembali)

Rangkuman statistik deskriptif pada tabel 4.9 di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Anak usia 10-12 tahun tidak ada yang bekerja hanya sebagai unemployment, dengan kata lain mereka hanya bersekolah.
2. Pada pihak lain, anak usia 13-18 tahun terdapat 35,26 persen yang sekolah sambil bekerja, dengan perincian sebagai berikut.
 - a. Terdapat 25,00 persen anak usia 13-15 tahun yang sekolah sambil bekerja *full time* dan 8,80 persen anak usia 16-18 tahun yang sekolah sambil bekerja *full time*.
 - b. Proporsi anak yang bersekolah sambil bekerja sebagai paruh waktu sukarela cukup besar. Anak usia 13-15 tahun yang bekerja paruh waktu sukarela sebanyak 86,70 persen adalah masih bersekolah. Anak usia 16-18 tahun yang bekerja paruh waktu sukarela sebanyak 73,10 persen adalah masih bersekolah.
 - c. Proporsi anak usia 13-15 tahun yang underemployment dan masih bersekolah adalah 46,90 persen. Lebih tinggi dibandingkan proporsi anak usia 16-18 tahun yang underemployment dan masih bersekolah yaitu 31,10 persen.
3. Proporsi laki – laki usia 13-18 tahun yang sekolah sambil bekerja lebih tinggi dibandingkan perempuan. Proporsi laki – laki usia 13-18 tahun yang sekolah sambil bekerja sebanyak 37,05 persen, sementara proporsi perempuan sebanyak 32,85 persen.

Universitas Indonesia

Tabel 4.10. Status Angkatan Kerja Anak Usia Sekolah Menurut Kelompok Umur dan Daerah Tempat Tinggal di Provinsi NTB Tahun 2008

Kelompok Umur	Tempat Tinggal	Status Angkatan Kerja			
		Y=1	Y=2	Y=3	Y=4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10-12	Perdesaan	0	3	0	0
			1.000		
	Perkotaan	0	3	0	0
			1.000		
	Sub Total	0	6	0	0
			1.000		
13-15	Perdesaan	19	0	19	3
		0.543	0.000	0.905	0.250
	Perkotaan	4	0	7	2
		0.286	0.000	0.778	0.250
	Sub Total	23	0	26	5
		0.469	0.000	0.867	0.250
16-18	Perdesaan	37	2	35	5
		0.325	0.051	0.673	0.060
	Perkotaan	9	0	22	9
		0.265	0.000	0.846	0.117
	Sub Total	46	2	57	14
		0.311	0.029	0.731	0.088
Total		69	8	83	19
		0.350	0.094	0.769	0.106

Sumber : SAKERNAS Provinsi NTB Agustus 2008 (telah diolah kembali)

Rangkuman statistik deskriptif pada tabel 4.10 di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kondisi partisipasi kerja masing – masing kelompok umur sama seperti yang telah digambarkan pada tabel 4.9.
2. Proporsi anak usia 13-18 tahun di perdesaan yang sekolah sambil bekerja sebanyak 37,22 persen, lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan sebesar 31,55 persen.
3. Bagi yang masih bersekolah, proporsi *underemployment* kelompok umur 13-15 tahun dan 16-18 tahun lebih tinggi di perdesaan dibandingkan perkotaan. Hal tersebut mengindikasikan masyarakat perkotaan relatif lebih sejahtera, sehingga dapat lebih fokus terhadap pendidikan anak.

4.2.2.3. Persentase Underemployment dan Unemployment Menurut Tingkat Pendidikan, Wilayah, Jenis Kelamin dan Status Perkawinan

Sebagaimana disebutkan dalam beberapa literatur (Bates, 1971; Todaro, 1997; Bellante dan Jackson, 1990; Görg dan Eric, 2001), bahwa negara berkembang (seperti Indonesia) memiliki kendala pengarusutamaan gender dalam pemanfaatan tenaga kerja berkaitan dengan aktifitas ekonomi. Kendala tersebut tentunya membatasi peran perempuan dalam berkarir di pasar kerja. Dampak dari hal tersebut adalah adanya *sex preference* dalam segala hal, misalnya pendidikan, mengurus rumah tangga, memiliki anak dan investasi modal manusia. Menyadari kondisi tersebut menghambat laju pertumbuhan pembangunan, hingga saat ini berbagai gerakan pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*) telah dilakukan baik yang berskala regional, nasional bahkan internasional.

Penduduk yang dalam ikatan perkawinan khususnya perempuan, partisipasinya dalam angkatan kerja pada umumnya masih tergantung kondisi pasangannya (suaminya). Peran wanita yang bekerja hanya sebagai tambahan pendapatan dalam keluarga, sehingga tidak jarang perempuan tidak memiliki kesempatan untuk memanfaatkan potensinya secara optimal. Bellante and Jackson (1990) menyatakan bahwa kenaikan pendapatan suami akan meningkatkan pendapatan keluarga, jika pendapatan tersebut telah mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan sehari – hari, maka perempuan (istri) tidak perlu bekerja untuk memperoleh tambahan pendapatan. Mengurus rumah tangga mengurangi semangat dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pasar kerja bagi wanita bersuami. Namun kenaikan pendapatan keluarga yang cukup signifikan dapat mempekerjakan orang untuk mengurus pekerjaan rumah tangga sehingga kesempatan perempuan kawin untuk berpartisipasi dalam pasar kerja lebih terbuka.

Tabel 4.6 sebelumnya menggambarkan distribusi status angkatan kerja menurut pendidikan, wilayah, jenis kelamin dan status kawin secara terpisah. Tabel 4.11 menginteraksikan keempat variabel bebas tersebut guna memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai *underemployment* dan *unemployment*. Secara umum tabel 4.11 menunjukkan kondisi yang berbeda dibandingkan tabel 4.3 untuk proporsi underemployment. Hal tersebut mengingat pada tabel 4.6 persentase underemployment antar status kawin dan antar jenis kelamin tidak jauh

Universitas Indonesia

berbeda. Kondisi yang sejalan dengan tabel 4.6 hanya perbedaan proporsi *underemployment* menurut wilayah.

Tabel 4.11. Proporsi *Underemployment* dan *Unemployment* Menurut Tingkat Pendidikan, Wilayah, Jenis Kelamin dan Status Perkawinan

RESIDEN	SEX	KAWIN	<i>Underemployment</i>			<i>Unemployment</i>		
			EDUC1	EDUC2	EDUC3	EDUC1	EDUC2	EDUC3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	1	1	0.374	0.359	0.300	0.032	0.076	0.083
1	1	2	0.327	0.359	0.333	0.062	0.122	0.100
1	2	1	0.341	0.330	0.250	0.020	0.031	0.017
1	2	2	0.350	0.366	0.241	0.100	0.119	0.138
2	1	1	0.258	0.185	0.183	0.035	0.079	0.076
2	1	2	0.188	0.237	0.184	0.063	0.193	0.079
2	2	1	0.233	0.160	0.133	0.032	0.061	0.036
2	2	2	0.255	0.162	0.169	0.091	0.255	0.136

Sumber : SAKERNAS Provinsi NTB Agustus 2008 (telah diolah kembali)

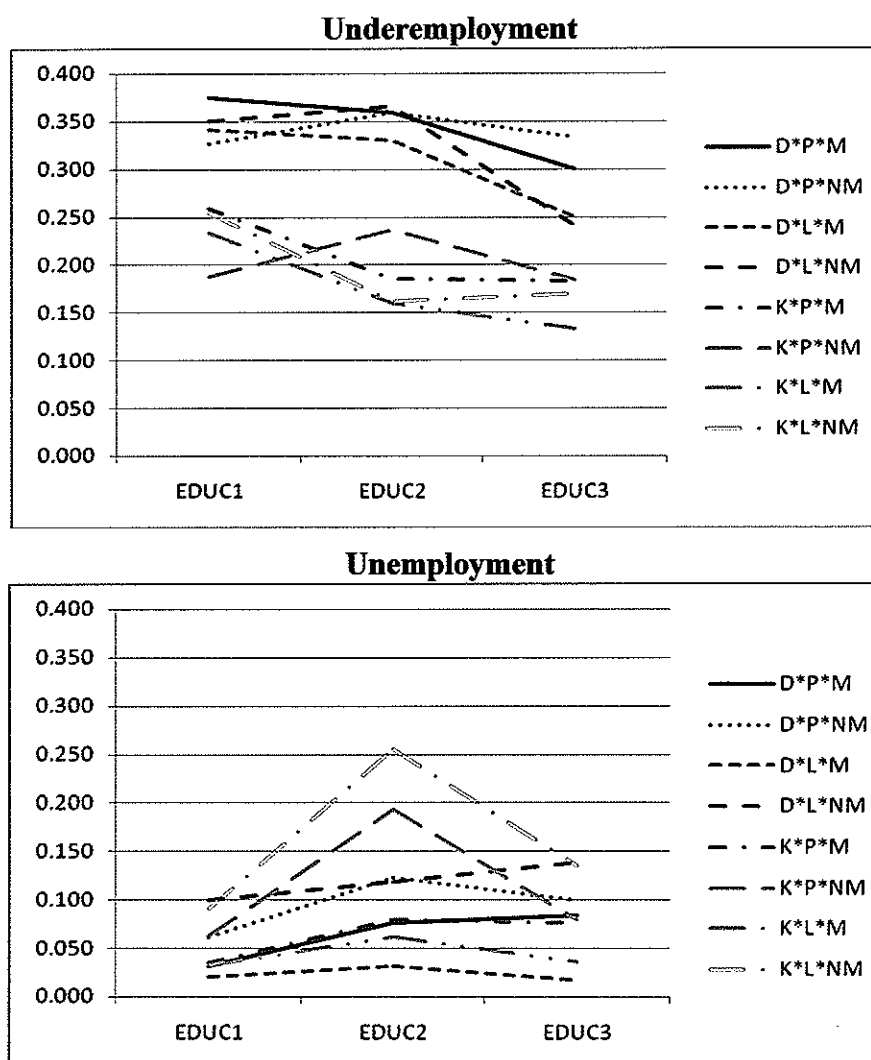
Tingkat pendidikan yang semakin tinggi memiliki proporsi *underemployment* yang semakin rendah bagi laki – laki dan perempuan di setiap wilayah, namun hal tersebut hanya terjadi pada yang berstatus kawin. Bagi yang berstatus belum/pernah kawin kondisinya berbeda. Kondisi tersebut kemungkinan disebabkan bagi angkatan kerja berpendidikan rendah dan belum/pernah kawin sudah merasa cukup dengan bekerja paruh waktu karena beban tanggung jawabnya tidak sebesar mereka yang berstatus kawin.

Kelompok perempuan berpendidikan menengah dan tinggi proporsi *underemployment* yang berstatus kawin lebih rendah atau sama dibandingkan berstatus belum/pernah kawin. Hal tersebut kemungkinan mengindikasikan kesetaraan gender yang semakin baik pada kelompok perempuan berpendidikan menengah dan tinggi. Pertimbangan perempuan kawin untuk memasuki pasar kerja adalah dapat menambah penghasilan rumah tangga dan dapat tetap menyelesaikan pekerjaan rumah tangga (Saddewisasi, 1997). Penyebab yang lain kemungkinan adalah pada tingkat pendidikan menengah atau tinggi kondisi ekonomi relatif lebih baik sehingga mereka cukup bekerja paruh waktu sukarela.

Laki – laki dengan status kawin merupakan kepala keluarga sehingga mempunyai beban tanggung jawab yang lebih besar. Menganggur bukanlah pilihan yang tepat, mereka harus bekerja *full time* untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Kecuali kondisi yang memaksa (terpaksa karena faktor

Universitas Indonesia

ekonomi) maka mereka akan bekerja seadanya sambil terus mencari kerja yang lebih baik. Motivasi tersebut kemungkinan menyebabkan laki – laki berstatus kawin lebih sedikit proporsi *underemployment*-nya dibandingkan yang belum/ pernah kawin. Lebih rendahnya proporsi *underemployment* perempuan berstatus belum/ pernah kawin dibandingkan laki – laki kemungkinan disebabkan perempuan mereka cukup dengan bekerja paruh waktu.



Gambar 4.10. Proporsi *Underemployment* dan *Unemployment* Menurut Tingkat Pendidikan, Wilayah, Jenis Kelamin dan Status Perkawinan

Keterangan: D = Perdesaan
 K = Perkotaan
 P = Perempuan
 L = Laki – Laki
 M = Kawin
 NM = Belum/Pernah Kawin

Proporsi perempuan berstatus kawin sebagai *unemployment* lebih rendah dibandingkan perempuan berstatus belum/pernah kawin pada setiap tingkat pendidikan di wilayah perdesaan maupun perkotaan. Kondisi tersebut kemungkinan disebabkan keterbatasan partisipasi perempuan untuk memasuki pasar kerja karena beban tanggung jawab terhadap pekerjaan rumah tangga dan tergantung ijin suami (Bellante dan Jackson, 1990; Saddewisasi, 1997). Perbedaan proporsi tersebut tidak jauh berbeda pada kelompok angkatan kerja berpendidikan tinggi di wilayah perkotaan. Hal tersebut kemungkinan disebabkan angkatan kerja berpendidikan tinggi memiliki dukungan finansial yang kuat sehingga mereka dapat mempekerjakan orang untuk membantu menyelesaikan pekerjaan rumah tangganya. Sehingga perempuan berstatus kawin dapat menyalurkan aspirasinya dalam pasar kerja tidak jauh berbeda dengan perempuan yang berstatus belum/pernah kawin. Kemungkinan lainnya adalah mereka merasa waktunya lebih berharga jika dimanfaatkan dalam pasar kerja dibandingkan tinggal di rumah.

Proporsi *unemployment* laki – laki berstatus belum/pernah kawin lebih tinggi dibandingkan perempuan. Kemungkinan hal tersebut disebabkan laki – laki berstatus belum/pernah kawin lebih fokus mencari kerja sampai memperoleh pekerjaan yang diharapkan.

Proporsi *unemployment* perempuan berstatus kawin lebih tinggi dibandingkan laki – laki. Kemungkinan hal tersebut disebabkan perempuan berstatus kawin sebelum memasuki pasar kerja lebih selektif dalam memilih pekerjaan dengan pertimbangan tidak mengganggu pekerjaan rumah tangganya.

4.2.3. Karakteristik Angkatan Kerja yang Bekerja

Tabel 4.6 menggambarkan distribusi status angkatan kerja berdasarkan karakteristik individu saja secara terpisah. Sebagaimana disajikan dalam gambar 3.1 bahwa status angkatan kerja juga dipengaruhi oleh penciptaan lapangan kerja, maka selanjutnya pada tabel – tabel berikut akan menggambarkan proporsi pekerja *underemployment* sebagai interaksi antara beberapa karakteristik individu dengan kondisi penciptaan lapangan kerja. Pekerja yang dimaksud pada sub bab ini adalah angkatan kerja yang telah memperoleh pekerjaan.

Beberapa penelitian menunjukkan pekerja pada sektor pekerjaan informal dan lapangan kerja pertanian memiliki resiko lebih tinggi sebagai *underemployment* (Wiebe, 1996). Hal tersebut disebabkan sektor informal dan pertanian memiliki tingkat produktifitas yang lebih rendah dibandingkan sektor formal dan lapangan kerja industri dan jasa – jasa (Todaro, 1997). Alasan ekonomi merupakan salah satu alasan yang kuat seseorang melakukan mobilitas regional. Berdasarkan ketersediaan data, mobilitas yang dicakup dalam analisis ini adalah mobilitas non permanen (migrasi komuter).

4.2.3.1. Persentase *Underemployment* Menurut Tingkat Pendidikan, Wilayah, Jenis Kelamin dan Status Migran Komuter

Pekerja komuter yang dimaksud adalah seorang pekerja dengan melakukan komuter yaitu perjalanan pergi pulang setidaknya antar kabupaten/kota dalam sehari. Bekerja dengan status komuter merupakan salah satu usaha yang dilakukan untuk dapat memperoleh pekerjaan yang diharapkan.

Tabel 4.12. Proporsi *Underemployment* Menurut Tingkat Pendidikan, Wilayah, Jenis Kelamin dan Status Pekerja Komuter

RESIDEN	SEX	KOMUTER	<i>Underemployment</i>		
			EDUC1	EDUC2	EDUC3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	1	1	0.238	0.429	0.000
1	1	2	0.381	0.395	0.346
1	2	1	0.233	0.176	0.000
1	2	2	0.358	0.368	0.263
2	1	1	0.364	0.077	0.200
2	1	2	0.246	0.239	0.199
2	2	1	0.129	0.050	0.069
2	2	2	0.253	0.193	0.159

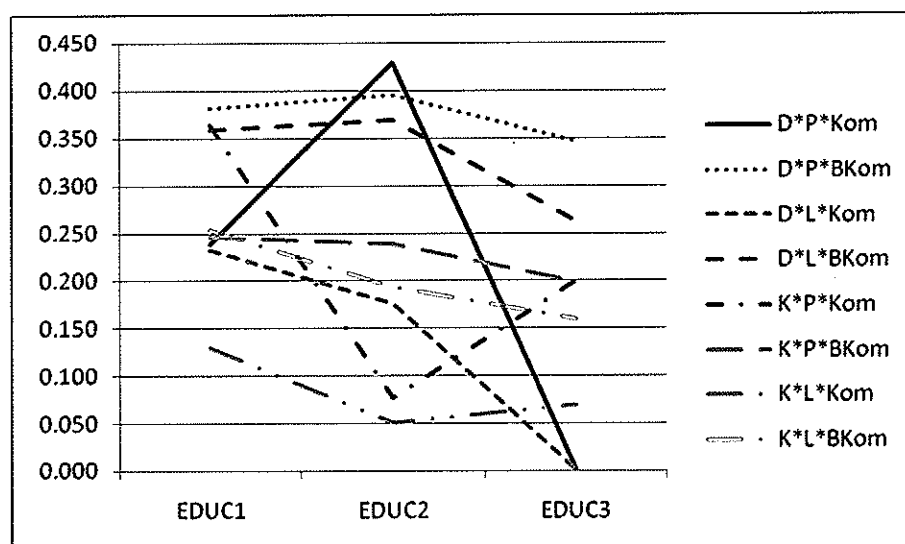
Sumber : SAKERNAS Provinsi NTB Agustus 2008 (telah diolah kembali)

Proporsi pekerja komuter sebagai *underemployment* secara umum lebih rendah dibandingkan bukan pekerja komuter. Kondisi yang berbeda terjadi pada kelompok pekerja perempuan berpendidikan rendah di wilayah perkotaan dan kelompok pekerja perempuan berpendidikan menengah di wilayah perdesaan. Kondisi *underemployment* yang tidak jauh berbeda terjadi pada kelompok pekerja perempuan perkotaan berpendidikan tinggi. Hal tersebut menunjukkan bagi perempuan status sebagai pekerja komuter tidak menjamin lebih termanfaatkan

Universitas Indonesia

dalam pasar kerja. Kemungkinan perempuan kurang sesuai dengan bekerja paruh waktu dan di wilayah lain.

Proporsi *underemployment* perempuan pekerja komuter berpendidikan menengah di perdesaan lebih tinggi dibandingkan berpendidikan rendah. Perempuan pekerja komuter berpendidikan tinggi di perkotaan memiliki proporsi *underemployment* lebih tinggi dibandingkan pendidikan menengah. Kondisi tersebut nampaknya menunjukkan bagi perempuan pekerja komuter berpendidikan menengah di perdesaan dan berpendidikan tinggi di perkotaan tidak merasa puas dengan hanya bekerja paruh waktu.



Gambar 4.11. Proporsi *Underemployment* Menurut Tingkat Pendidikan, Wilayah, Jenis Kelamin dan Status Pekerja Komuter

Keterangan: D = Perdesaan
 K = Perkotaan
 P = Perempuan
 L = Laki – Laki
 Kom = Komuter
 Bkom = Bukan Komuter

Pada gambar 4.11 di atas secara umum menunjukkan bahwa proporsi *underemployment* pekerja komuter lebih rendah dibandingkan bukan pekerja komuter. Walau terdapat beberapa kelompok pekerja dengan kondisi berbeda. Proporsi *underemployment* juga cenderung menurun pada pekerja dengan pendidikan yang lebih tinggi.

4.2.3.2. Persentase Underemployment Menurut Tingkat Pendidikan, Wilayah, Jenis Kelamin dan Lapangan Pekerjaan

Setiap wilayah mempunyai potensi sumber daya ekonomi perlu dikembangkan untuk kemajuan wilayah tersebut. Pengembangan potensi ekonomi tersebut berkaitan erat dengan berkembangnya lapangan kerja di suatu daerah yang mencerminkan struktur ekonomi masyarakat.

Todaro (1997) menjelaskan bahwa perkembangan ekonomi suatu wilayah dimulai dari sektor primer yang padat karya dan memiliki produktifitas rendah. Akumulasi modal menyebabkan transformasi struktur ekonomi ke arah lapangan kerja sekunder maupun tersier. Pergeseran tersebut perlu diikuti oleh transformasi tenaga kerja dalam hal ini adalah keahlian dan profesionalitas.

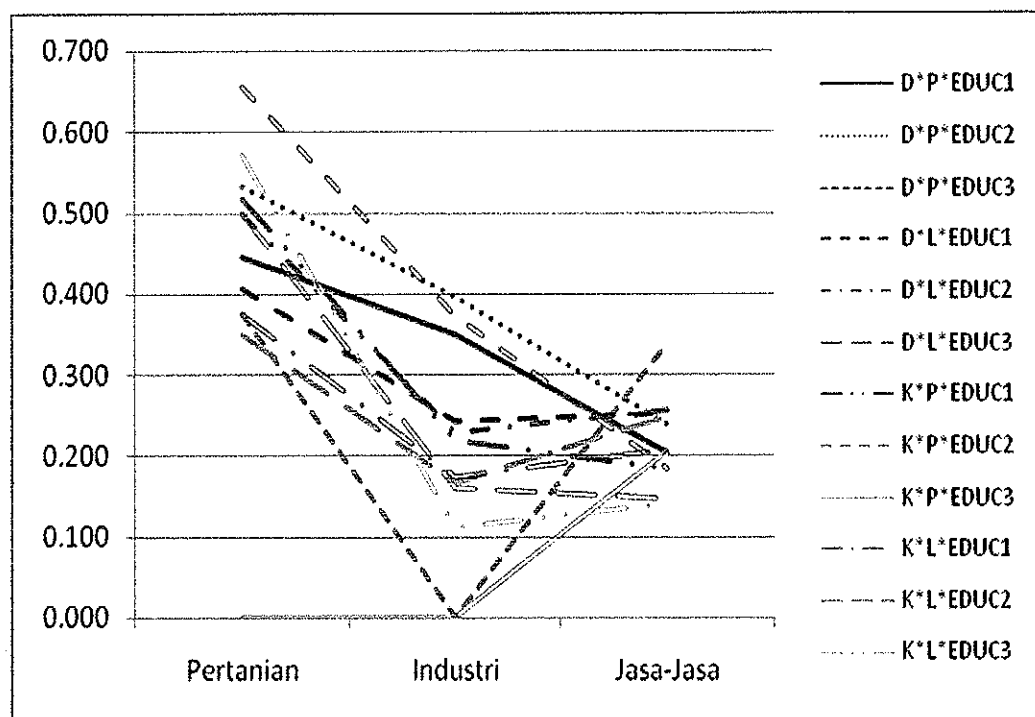
Tabel 4.13. Proporsi *Underemployment* Menurut Tingkat Pendidikan, Wilayah, Jenis Kelamin dan Lapangan Pekerjaan

RESIDEN	SEX	KERJA	<i>Underemployment</i>		
			EDUC1	EDUC2	EDUC3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	1	1	0.444	0.533	0.375
1	1	2	0.349	0.397	NA
1	1	3	0.203	0.238	0.338
1	2	1	0.405	0.497	0.350
1	2	2	0.243	0.229	0.167
1	2	3	0.252	0.255	0.248
2	1	1	0.517	0.656	0.000
2	1	2	0.219	0.373	0.000
2	1	3	0.184	0.184	0.205
2	2	1	0.375	0.500	0.571
2	2	2	0.175	0.162	0.111
2	2	3	0.207	0.147	0.140

Sumber : SAKERNAS Provinsi NTB Agustus 2008 (telah diolah kembali)

Proporsi pekerja pertanian baik laki – laki maupun perempuan sebagai *underemployment* secara umum lebih tinggi dibandingkan lapangan pekerjaan industri dan jasa – jasa pada masing – masing tingkat pendidikan di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Proporsi *underemployment* pekerja pertanian di wilayah perkotaan secara umum lebih tinggi dibandingkan perdesaan, hal tersebut memang menunjukkan bahwa perdesaan lebih memiliki potensi pada lapangan kerja pertanian dibandingkan perkotaan.

Proporsi pekerja pertanian berpendidikan rendah sebagai *underemployment* lebih rendah dibandingkan pekerja berpendidikan menengah baik laki – laki maupun perempuan di wilayah perdesaan maupun perkotaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pekerja berpendidikan rendah lebih termanfaatkan pada lapangan kerja pertanian. Pada lapangan kerja industri dan jasa - jasa, proporsi pekerja laki – laki berpendidikan tinggi sebagai *underemployment* lebih rendah dibandingkan kelompok pendidikan menengah dan rendah di wilayah perdesaan dan perkotaan. Kondisi tersebut menunjukkan produktifitas sektor industri cukup tinggi dengan lebih termanfaatkannya pekerja berpendidikan tinggi.



Gambar 4.12. Proporsi *Underemployment* Menurut Tingkat Pendidikan, Wilayah, Jenis Kelamin dan Lapangan Kerja

Bagi pekerja perempuan, nampaknya justru yang berpendidikan rendah lebih termanfaatkan di sektor industri dan jasa – jasa dibandingkan pekerja perempuan berpendidikan menengah dan tinggi. Kondisi sebaliknya terjadi pada pekerjaan pertanian dimana pekerja perempuan berpendidikan tinggi memiliki proporsi *underemployment* terendah. Hal tersebut kemungkinan disebabkan perempuan hanya ditugaskan sebagai pekerja pelaksana atau pekerja produksi

pada pekerjaan industri dan jasa – jasa sehingga lebih memanfaatkan tenaga kerja berpendidikan rendah dan menengah. Nampaknya terdapat indikasi kesenjangan gender dalam partisipasi kerja menurut lapangan pekerjaan.

Gambar 4.12 menunjukkan bahwa proporsi *underemployment* pekerja pertanian relatif lebih tinggi dibandingkan pekerja industri dan jasa – jasa. Proporsi *underemployment* pekerja industri adalah yang terendah pada setiap kelompok jenis kelamin dan tingkat pendidikan di wilayah perdesaan dan perkotaan. Kondisi yang berbeda terdapat pada kelompok pekerja perempuan di wilayah perdesaan yang berpendidikan rendah dan menengah serta pekerja perempuan berpendidikan rendah dan menengah di perkotaan.

4.2.3.3. Persentase Underemployment Menurut Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin, Kelompok Umur dan Sektor Pekerjaan

Bekerja pada sektor formal merupakan harapan sebagian besar angkatan kerja. Adanya jaminan pendapatan dan jenjang karir nampaknya menjadi alasan angkatan kerja lebih tertarik pada sektor formal. Banyaknya calon pekerja sektor formal menyebabkan seleksi untuk memperoleh pekerjaan sektor formal cukup ketat. Tidak saja dibutuhkan keahlian dan tingkat pendidikan tertentu melainkan juga pengalaman kerja sangat diperhitungkan.

Tabel 4.14 menunjukkan bahwa proporsi pekerja sektor informal sebagai *underemployment* lebih tinggi dibandingkan pekerja sektor formal pada pekerja laki – laki dan perempuan untuk masing – masing tingkat pendidikan dan kelompok umur. Kecuali kelompok pekerja perempuan berpendidikan tinggi berumur 20-29 tahun proporsi *underemployment* pekerja sektor informal lebih rendah dibanding pekerja sektor formal. Sebagai *fresh graduate* (baru lulus sekolah) pekerja perempuan paruh waktu pada sektor formal kemungkinan masih mencari pengalaman dan berharap memperoleh pekerjaan *full time* di sektor formal.

Laki – laki kelompok umur 20-29 tahun baik pada sektor formal maupun informal proporsi *underemployment* pekerja berpendidikan tinggi lebih tinggi dibandingkan pendidikan menengah. Kemungkinan hal tersebut disebabkan karena baru lulus sehingga pekerja berpendidikan tinggi masih berusaha mencari pekerjaan yang lebih baik sambil bekerja paruh waktu untuk menambah pengalaman kerja.

Universitas Indonesia

Pekerja formal perempuan pada setiap tingkat pendidikan proporsi *underemployment* kelompok umur 55-64 tahun lebih tinggi dibandingkan kelompok umur 30-54 tahun. Nampaknya pekerja formal perempuan kelompok umur 55-64 tahun kurang dimanfaatkan lagi secara optimal, walaupun sebenarnya mereka masih ingin bekerja secara optimal khususnya bagi pekerja perempuan usia tua tersebut yang berpendidikan tinggi.

Tabel 4.14. Proporsi *Underemployment* Menurut Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin, Kelompok Umur dan Sektor Pekerjaan

SEX	AGE	SEKTOR	<i>Underemployment</i>		
			EDUC1	EDUC2	EDUC3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	1	1	0.477	0.466	
1	1	2	0.214	0.200	
1	2	1	0.464	0.460	0.200
1	2	2	0.181	0.248	0.293
1	3	1	0.362	0.325	0.385
1	3	2	0.160	0.116	0.196
1	4	1	0.218	0.174	
1	4	2	0.184	0.143	0.250
2	1	1	0.414	0.439	
2	1	2	0.200	0.150	
2	2	1	0.392	0.374	0.455
2	2	2	0.270	0.150	0.289
2	3	1	0.354	0.355	0.348
2	3	2	0.161	0.172	0.141
2	4	1	0.324	0.327	0.000
2	4	2	0.145	0.135	0.120

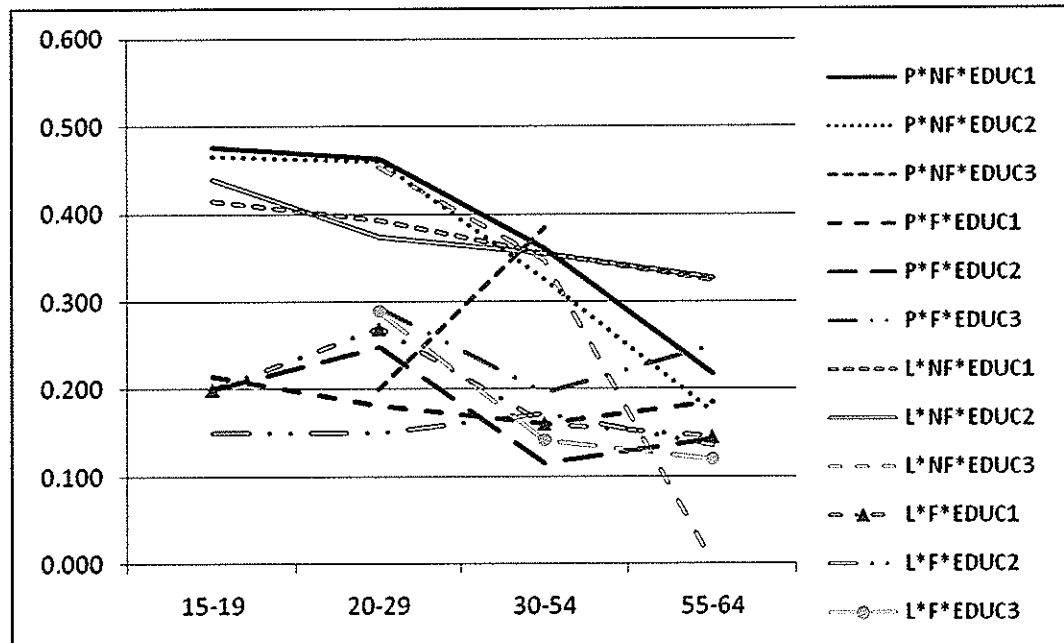
Sumber : Data SAKERNAS Provinsi NTB Agustus 2008 (telah diolah kembali)

Keterangan: NA = data tidak tersedia

Proporsi pekerja kelompok umur muda (15-19 tahun) sebagai *underemployment* secara umum lebih tinggi dibandingkan kelompok umur yang lebih tua pada masing – masing tingkat pendidikan, jenis kelamin dan sektor pekerjaan. Ada beberapa kelompok pekerja yang tidak sesuai dengan kondisi umum tersebut dan semuanya berasal dari pekerja sektor formal, yaitu kelompok umur 20-29 tahun bagi pekerja perempuan berpendidikan menengah dan pekerja laki – laki berpendidikan rendah serta kelompok umur 30-54 tahun bagi pekerja laki – laki berpendidikan menengah. Kondisi tersebut mencerminkan pemanfaatan tenaga kerja usia muda masih banyak terjadi pada sektor formal, hal tersebut

Universitas Indonesia

kemungkinan didasari alasan bahwa tenaga kerja usia muda lebih mudah diatur dan tidak banyak menuntut.



Gambar 4.13. Proporsi *Underemployment* Menurut Kelompok Umur, Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin dan Sektor Pekerjaan

Keterangan: P = Perempuan
 L = Laki-laki
 F = Sektor formal
 NF = Sektor non formal

Gambar 4.13 menunjukkan pekerja sektor non formal memiliki proporsi *underemployment* lebih tinggi dibandingkan sektor formal pada setiap tingkat pendidikan laki-laki dan perempuan. Kelompok umur 30-54 tahun dan 55-64 tahun secara umum memiliki proporsi *underemployment* yang lebih rendah dibandingkan kelompok umur 15-19 tahun pada setiap kelompok pekerja menurut jenis kelamin, sektor pekerjaan dan tingkat pendidikan.

Tabel 4.7 sampai 4.14 menunjukkan bahwa pekerja berpendidikan tinggi tidak selalu dimanfaatkan lebih baik dibandingkan yang berpendidikan rendah maupun menengah sebagaimana disajikan pada tabel 4.6. Kondisi yang sama juga terjadi pada pemanfaatan tenaga kerja menurut jenis kelamin, status kawin dan kelompok umur. Hal tersebut membuktikan secara empiris bahwa memperhatikan pengaruh suatu variabel bebas terhadap variabel terikat tergantung variabel bebas lain.

4.2.4. Upah Pekerja di Provinsi NTB

Sebagaimana daerah – daerah lain, tingkat upah pekerja sektor formal lebih tinggi dibandingkan sektor informal. Pendapatan bersih yang dimaksudkan dalam tabel 4.15 adalah upah/gaji yang diterima pekerja dikurangi iuran wajib atau biaya produksi. Secara keseluruhan, rata – rata (*grand mean*) upah pekerja sektor formal hampir 3 kali pekerja sektor informal, namun perbedaan tersebut tidak signifikan karena masih kurang dari 1 kali standar deviasi. Berdasarkan lapangan kerja, rata – rata upah tertinggi adalah pekerja jasa – jasa dan yang terendah adalah pekerja pertanian. Secara keseluruhan, rata – rata (*grand mean*) upah pekerja jasa – jasa adalah hampir 5 kali pekerja pertanian dan perbedaannya cukup signifikan dengan selisih lebih dari 1 kali standar deviasi. Gambaran rata – rata upah pekerja menurut karakteristik pekerja dapat dilihat pada tabel 4.15.

Bagi pekerja *underemployment*, rata – rata upah pekerja sektor formal lebih dari 3 kali lipat pekerja sektor informal. Memperhatikan standar deviasi upah pekerja *underemployment* maka upah sektor informal memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan sektor formal. Bahkan rata – rata upah pekerja sektor formal dari pekerja *underemployment* masih lebih tinggi dibandingkan upah pekerja sektor informal yang *full time worker*. Melihat perbedaan yang terjadi antara upah pekerja sektor formal dibandingkan informal, maka seseorang akan bersedia untuk bekerja di sektor formal walaupun sebagai *underemployment* dibandingkan bekerja *full time* pada sektor informal.

Pada sektor informal terlihat adanya perbedaan rata – rata upah hampir 2,5 kali antara pekerja *underemployment* dan *full time worker*, namun perbedaan tersebut masih kurang dari 1 kali standar deviasinya. Perbedaan rata – rata tersebut lebih tinggi dibandingkan upah pekerja sektor formal. Sektor formal selain menjanjikan tingkat upah yang lebih tinggi dan relatif tidak memiliki kesenjangan yang besar antara pekerja penuh dan *underemployment*, sektor ini juga memiliki jaminan pendapatan bagi pekerjaanya dan dilindungi oleh peraturan perundang – undangan. Kondisi ini menjadi alasan bekerja di sektor formal merupakan harapan bagi sebagian besar angkatan kerja.

Rata – rata upah dan standar deviasi pada tabel 4.15 menunjukkan terdapat perbedaan upah yang signifikan antara pekerja pertanian dan pekerja jasa

– jasa. Dibandingkan rata – rata upah pekerja industri, rata – rata upah pekerja pertanian secara umum juga lebih rendah. Kesenjangan upah antara ketiga sektor lebih nampak dengan melihat upah pekerja sektor industri dan jasa – jasa bagi pekerja *underemployment* masih lebih tinggi daripada upah pekerja sektor pertanian bagi pekerja *full time*. Kondisi tersebut mencerminkan tingkat produktivitas pekerja sektor pertanian lebih rendah dibandingkan sektor industri dan jasa – jasa.

Tabel 4.15. Rata – Rata Pendapatan Bersih (Rupiah per bulan) dan Standar Deviasi Menurut Karakteristik Pekerja di Provinsi NTB Tahun 2008

		Status Pekerja						Grand Mean	
		Underemployment		Pekerja Paruh Waktu Sukarela		Full Time Worker			
		Mean	Std Deviation	Mean	Std Deviation	Mean	Std Deviation	Mean	Std Deviation
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Tingkat Pendidikan	SD kebawah	190,270	332,726	131,531	289,057	382,529	532,237	191,218	397,575
	SLTP atau SLTA	252,835	455,104	377,011	864,325	761,564	1,686,973	314,971	1,061,739
	Perguruan Tinggi	1,284,235	2,538,396	1,626,775	1,086,641	1,613,227	1,476,905	1,319,709	1,668,826
Kelompok Umur	15-19	116,634	192,871	57,692	153,893	498,432	2,811,866	73,644	963,945
	20-29	243,608	589,135	277,053	481,484	572,793	706,027	265,301	564,577
	30-54	312,177	847,718	432,414	874,114	698,893	1,272,894	419,489	1,013,158
	55-64	242,248	587,651	251,167	631,223	508,082	1,009,867	238,170	689,150
Status Kawin	Kawin	293,513	817,748	363,547	800,815	671,507	1,230,596	368,467	943,400
	Belum/Pernah Kawin	199,174	327,067	254,765	508,810	550,693	1,373,860	189,276	758,373
Lapangan Usaha	Pertanian	136,626	665,870	81,765	269,655	233,902	400,893	159,839	521,818
	Industri	349,961	592,410	226,686	327,426	705,405	1,658,360	583,157	1,415,462
	Jasa	512,311	820,872	831,855	1,087,414	814,932	1,328,444	756,161	1,224,257
Sektor Pekerjaan	Informal	183,054	312,970	141,293	321,013	495,784	1,273,582	322,331	915,048
	Formal	648,703	1,494,583	1,082,268	1,248,755	837,195	1,235,365	826,466	1,289,814
Daerah Tempat Tinggal	Perdesaan	225,372	479,581	209,687	541,345	534,838	1,405,152	243,445	865,842
	Perkotaan	380,349	1,122,621	626,990	1,009,814	756,413	1,091,485	399,154	914,130
Jenis Kelamin	Perempuan	206,830	524,374	271,002	558,541	457,618	706,530	169,193	479,268
	Laki-Laki	313,512	835,306	411,580	899,490	741,946	1,478,888	453,557	1,156,297
Status Migrasi Komuter Pekerja	Pekerja Komuter	723,487	880,433	969,913	936,548	1,158,414	2,990,758	1,075,544	2,644,600
	Pekerja Bukan Komuter	262,316	718,890	326,138	734,684	620,628	1,141,522	467,290	989,244
Grand Mean		268,783	723,250	337,760	743,317	641,539	1,268,577	308,234	889,539

Sumber : SAKERNAS Provinsi NTB Agustus 2008 (telah diolah kembali)

Universitas Indonesia

Secara umum rata – rata upah bagi pekerja berpendidikan tinggi adalah yang tertinggi dibandingkan karakteristik lainnya. Rata – rata upah pekerja berpendidikan SD ke bawah adalah yang terendah dibandingkan karakteristik pendidikan yang lain. Perbedaan rata – rata upah yang cukup signifikan antara pekerja berpendidikan tinggi dengan yang berpendidikan rendah (SD kebawah) merupakan salah satu indikasi investasi *human capital* memberikan benefit yang lebih tinggi bagi angkatan kerja yang telah bekerja. Bagi pekerja berpendidikan tinggi yang *underemployment* pun rata – rata upahnya lebih tinggi daripada pekerja berpendidikan SLTP atau SLTA yang bekerja *full time*.

Rata – rata upah menurut kelompok umur secara umum menunjukkan pekerja pada kelompok usia 30 – 54 tahun adalah yang tertinggi, sementara kelompok usia muda (15 – 19 tahun) memiliki rata – rata upah terendah. Rata – rata upah antara pekerja usia 30 – 54 tahun hampir 6 kali rata – rata upah pekerja usia 15 – 19 tahun. Walaupun perbedaannya cukup besar namun memperhatikan standar deviasi upah pekerja usia 15 – 19 tahun perbedaan tersebut relatif tidak signifikan. Kondisi ini mencerminkan produktifitas pekerja mencapai puncaknya pada periode usia 30 – 54 tahun. Sementara pada kelompok usia muda produktifitas pekerja masih rendah yang antara lain disebabkan rendahnya *human capital* karena harus putus sekolah dan masih minimnya pengalaman dalam bekerja.

Tingkat upah pekerja wilayah perdesaan lebih rendah daripada wilayah perkotaan walaupun terlihat tidak jauh berbeda. Kondisi ini mungkin mencerminkan tingkat produktifitas pekerja di wilayah perkotaan tidak jauh berbeda dengan wilayah perdesaan di Provinsi NTB. Walaupun demikian jika dibandingkan dengan rata – rata secara umum (*grand mean*) upah pekerja *full time* maka rata – rata upah pekerja perkotaan lebih tinggi dari *grand mean* upah pekerja *full time*, sebaliknya pekerja di perdesaan lebih rendah. Jika mengingat faktor mobilitas non permanen (komuter), kemungkinan pekerja yang tinggal di wilayah perdesaan bekerja di wilayah perkotaan sehingga tingkat upah yang diperolehnya meningkatkan rata – rata upah pekerja yang tinggal di wilayah perdesaan.

Perbedaan rata – rata upah juga terjadi antara pekerja laki – laki dan perempuan. Baik bagi pekerja *underemployment*, *full time* maupun rata – rata

Universitas Indonesia

secara umum, upah laki – laki lebih tinggi daripada perempuan. Hal tersebut mencerminkan bahwa secara rata – rata produktifitas kerja laki – laki lebih tinggi daripada perempuan. Seringkali perempuan mengalami ketidakadilan dalam hal pengupahan karena *stereotype* produktifitas kerja yang semacam itu, sehingga tanpa adanya standar pengupahan yang jelas, tingkat upah pekerja perempuan selalu lebih rendah dibandingkan laki – laki.

Status perkawinan pada beberapa jenis pekerjaan memang mempengaruhi tingkat upah. Sebagai contoh gaji pegawai negeri yang menyertakan tunjangan istri dan anak. Secara umum, walaupun rata – rata upah pekerja berstatus kawin lebih tinggi dibandingkan yang belum/pernah kawin di Provinsi NTB, namun tidak jauh berbeda. Perbedaan rata – rata upah pekerja *full time* yang lebih dari 2 kali rata – rata upah pekerja *underemployment* menjadi salah satu alasan bagi pekerja berstatus kawin untuk berusaha memperoleh pekerjaan *full time*. Namun tentunya harapan menjadi pekerja *full time* bagi pekerja berstatus kawin relatif lebih tinggi mengingat beban biaya hidup yang harus ditanggung dalam keluarganya relatif lebih tinggi.

Rata – rata umum (*grand mean*) upah pekerja komuter lebih tinggi dibandingkan pekerja bukan komuter, walaupun perbedaannya lebih dari 2 kali lipat, namun perbedaannya tidak terlalu nyata dan masih kurang dari 1 kali standar deviasi. Bagi pekerja *underemployment* dan pekerja *full time*, rata – rata upah pekerja komuter juga lebih tinggi dibandingkan bukan pekerja komuter, namun perbedaannya masih kurang dari 1 kali standar deviasinya (tidak signifikan).

4.3. Analisis Inferensial

4.3.1. Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Faktor – Faktor Klasifikasi terhadap Status Angkatan Kerja

Analisis inferensial untuk mengetahui pengaruh beberapa variabel bebas terhadap status angkatan kerja menggunakan model multinomial logit regression. Variabel terikat berbentuk kategorik yang merupakan status angkatan kerja, sebagai berikut:

1. $P_1 = P(Y=1)$: probabilita seseorang sebagai *underemployment*
2. $P_2 = P(Y=2)$: probalilita seseorang sebagai *unemployment*

3. $P_4 = P(Y=4)$: probabilita seseorang bekerja penuh (*full time worker*).

Probabilita seseorang bekerja penuh (P_4) dijadikan sebagai kelompok pembanding (*reference gorup*) bagi variabel terikat.

Variabel bebas yang digunakan juga berupa variabel kategorik sebagaimana telah dijelaskan dalam sub bab 3.3.2. Pembangunan model secara umum mengacu pada kerangka analisis pada gambar 3.3. Dengan pertimbangan bahwa pengaruh suatu variabel bebas terhadap variabel terikat bergantung pada variabel bebas lain, maka untuk memodelkan hubungan sebab akibat pada gambar 3.3 dibutuhkan 576 faktor sel. Banyaknya faktor sel yang diperlukan tersebut mengakibatkan adanya sel kosong dan model tidak dapat dibangun. Oleh sebab itu untuk memodelkannya dibentuklah sub – sub model berdasarkan pengujian hipotesa yang akan dilakukan.

4.3.1.1. Pengaruh Tingkat Pendidikan, Wilayah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin terhadap Status Angkatan Kerja

Sub model pertama dibangun untuk menerjemahkan pola hubungan sebagaimana tersaji pada gambar 3.3 yang telah diuraikan pada gambar 3.4. Gambar 3.4 menjelaskan bahwa pendidikan mempengaruhi status *underemployment* dan *unemployment* angkatan kerja yang tergantung pada jenis kelamin dan daerah tempat tinggal. Bentuk umum dari sub model pertama telah disajikan sebelumnya pada persamaan (3.2.a) dan (3.2.b). Dalam memudahkan analisis, maka dibangunlah model menggunakan tingkat pendidikan SLTP/SLTA (EDUC2), wilayah tempat tinggal perkotaan (RESIDEN2) dan jenis kelamin laki – laki (SEX2) sebagai kelompok pembanding.

Tabel. 4.16. Ringkasan Statistik Mengenai Perbedaan Resiko *Underemployment* dan *Unemployment* Menurut Tingkat Pendidikan, Wilayah dan Jenis Kelamin

Variabel Bebas	Underemployment				Unemployment				
	SEX1	SEX2	SEX(1-2)		SEX1	SEX2	SEX(1-2)		
			OR	Prob			OR	Prob	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
RESIDEN1	EDUC1	-0.043	-0.356	1.368	0.000	-2.309	-2.654	1.412	0.062
	EDUC2	-0.097	-0.379	1.327	0.010	-1.444	-2.130	1.987	0.000
	EDUC3	-0.251	-0.721	1.599	0.147	-1.504	-2.512	2.741	0.081
	EDUC(1-2)	0.054	0.023			-0.865	-0.524		
	Prob	0.623	0.767			0.000	0.002		
	OR	1.055	1.024			0.421	0.592		

Tabel 4.16. Lanjutan

Variabel Bebas	Underemployment				Unemployment				
	SEX1	SEX2	SEX(1-2)		SEX1	SEX2	SEX(1-2)		
			OR	Prob			OR	Prob	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
RESIDEN1	EDUC(3-2)	-0.155	-0.341			-0.060	-0.382		
	Prob	0.564	0.108			0.885	0.386		
	OR	0.857	0.711			0.942	0.683		
RESIDEN2	EDUC1	-0.901	-0.983	1.085	0.505	-2.600	-2.675	1.078	0.765
	EDUC2	-0.975	-1.394	1.520	0.001	-1.478	-1.597	1.126	0.436
	EDUC3	-1.133	-1.594	1.586	0.070	-1.998	-2.511	1.669	0.169
	EDUC(1-2)	0.074	0.411			-1.122	-1.078		
	Prob	0.590	0.000			0.000	0.000		
	OR	1.076	1.509			0.326	0.340		
	EDUC(3-2)	-0.158	-0.200			-0.520	-0.914		
	Prob	0.458	0.294			0.077	0.001		
RESIDEN (1-2)	EDUC1	0.858	0.626			0.291	0.021		
	Prob	0.000	0.000			0.203	0.922		
	OR	2.359	1.871			1.338	1.021		
	EDUC2	0.878	1.014			0.034	-0.533		
	Prob	0.000	0.000			0.858	0.000		
	OR	2.407	2.758			1.035	0.587		
	EDUC3	0.882	0.874			0.494	-0.002		
	Prob	0.005	0.001			0.296	0.997		
OR	2.415	2.396			1.639	0.998			
Wald Test	F-statistic	df	Prob		F-statistic	df	Prob		
EDUC(1=2=3)	2.839	(8, 7784)	0.004		11.692	(8, 5622)	0.000		

Sumber: Pengolahan data mentah SAKERNAS NTB Agustus 2008

Keterangan: Status pekerja penuh sebagai kelompok pembanding

Likelihood ratio test pada tabel output tersebut menyimpulkan bahwa persamaan regresi logit multinomial yang dibangun berdasarkan gambar 3.4 signifikan pada *level of significant* $\alpha = 0,05$. Rangkuman hasil analisis disajikan dalam tabel 4.16.

Tabel 4.16 di atas menunjukkan perbedaan resiko *underemployment* dan *unemployment* menurut kelompok yang dibentuk berdasarkan tingkat pendidikan, wilayah dan jenis kelamin. Selanjutnya dengan mencermati tabel tersebut dan berdasarkan *level of significant* $\alpha = 0,05$, dapat diambil kesimpulan uji hipotesis sebagai berikut:

1. Hasil Wald Test menunjukkan bahwa data mendukung hipotesis 1a pada sub bab 3.3, yaitu pendidikan mempunyai pengaruh terhadap resiko *underemployment* yang tergantung pada wilayah tempat tinggal dan jenis kelamin dan hipotesis 1b yaitu pendidikan mempunyai pengaruh terhadap resiko *unemployment* yang tergantung pada wilayah tempat tinggal dan jenis kelamin.
2. Tabel 4.16 menunjukkan bahwa angkatan kerja pada masing – masing kelompok tingkat pendidikan dan kelompok jenis kelamin resiko *underemployment* wilayah perdesaan lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Hal tersebut menunjukkan data mendukung hipotesis 1c.
3. Sementara untuk resiko *unemployment*, hanya kelompok angkatan kerja dengan tingkat pendidikan SLTP/SLTA (menengah) dan jenis kelamin laki – laki yang mendukung hipotesis 1d yaitu resiko *unemployment* wilayah perdesaan lebih rendah dibandingkan perkotaan yang tergantung pada tingkat pendidikan dan jenis kelamin. Kelompok yang lain tidak menunjukkan perbedaan resiko *unemployment* yang signifikan antara wilayah perdesaan dan perkotaan.
4. Pada wilayah perdesaan, resiko *underemployment* perempuan lebih tinggi dibandingkan laki – laki pada kelompok pendidikan rendah (SD kebawah) dan menengah. Pada wilayah perkotaan, resiko *underemployment* perempuan lebih tinggi dibandingkan laki – laki pada kelompok angkatan kerja berpendidikan menengah dan tinggi.
5. Poin 4 menunjukkan pemanfaatan pekerja perempuan pada wilayah perdesaan maupun perkotaan lebih rendah dibandingkan laki – laki untuk setiap tingkat pendidikan.
6. Pada wilayah perdesaan, resiko *unemployment* perempuan lebih tinggi dibandingkan laki – laki pada setiap kelompok tingkat pendidikan angkatan kerja. Hal tersebut mengindikasikan kesempatan kerja di wilayah perdesaan lebih menyerap tenaga kerja laki – laki dibandingkan perempuan. Hal tersebut sesuai dengan hipotesis pada penelitian – penelitian sebelumnya dimana kecenderungan perempuan sebagai

penganggur (*unemployment*) lebih tinggi dibandingkan laki – laki (Suratman, 1994 dan Cendrawati, 2000).

7. Pada wilayah perkotaan, resiko *unemployment* perempuan tidak berbeda signifikan dibandingkan laki – laki pada setiap kelompok tingkat pendidikan tinggi. Hal tersebut mengindikasikan wilayah perkotaan relatif lebih memberikan kesempatan kerja yang sama antara laki – laki dan perempuan.

4.3.1.2. Pengaruh Tingkat Pendidikan, Status Perkawinan dan Jenis Kelamin terhadap Status Angkatan Kerja

Sub model kedua dibangun untuk menerjemahkan pola hubungan sebagaimana tersaji pada gambar 3.3 yang selanjutnya diuraikan dalam gambar 3.5. Gambar 3.5 menjelaskan bahwa pendidikan mempengaruhi status *underemployment* dan *unemployment* yang tergantung pada status perkawinan dan jenis kelamin. Bentuk umum dari sub model kedua telah disajikan sebelumnya pada persamaan (3.3.a) dan (3.3.b). Dalam memudahkan analisis, maka dibangunlah model menggunakan tingkat pendidikan SLTP/SLTA (EDUC2), berstatus belum/pernah kawin (KAWIN2) dan jenis kelamin laki – laki (SEX2) sebagai kelompok pembanding.

Tabel. 4.17. Ringkasan Statistik Mengenai Perbedaan Resiko *Underemployment* dan *Unemployment* Menurut Tingkat Pendidikan, Status Kawin dan Jenis Kelamin

Variabel Bebas		Underemployment				Unemployment			
		SEX1	SEX2	SEX(1-2)		SEX1	SEX2	SEX(1-2)	
				OR	Prob			OR	Prob
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
KAWIN1	EDUC1	-0.219	-0.564	1.411	0.000	-2.566	-3.135	1.767	0.003
	EDUC2	-0.602	-0.913	1.365	0.003	-1.864	-2.630	2.150	0.000
	EDUC3	-0.877	-1.325	1.565	0.057	-1.907	-3.100	3.297	0.005
KAWIN1	EDUC(1-2)	0.383	0.349			-0.702	-0.506		
	Prob	0.000	0.000			0.000	0.005		
	OR	1.466	1.418			0.495	0.603		
	EDUC(3-2)	-0.276	-0.412			-0.043	-0.470		
	Prob	0.174	0.009			0.890	0.172		
	OR	0.759	0.662			0.958	0.625		
KAWIN2	EDUC1	-0.648	-0.409	0.788	0.093	-2.119	-1.602	0.596	0.030
	EDUC2	-0.353	-0.565	1.235	0.122	-0.979	-0.900	0.924	0.628
	EDUC3	-0.792	-1.059	1.305	0.476	-1.773	-1.407	0.693	0.449

Tabel 4.17. Lanjutan

Variabel Bebas		Underemployment				Unemployment			
		SEX1	SEX2	SEX(1-2)		SEX1	SEX2	SEX(1-2)	
				OR	Prob			OR	Prob
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
KAWIN2	EDUC(1-2)	-0.295	0.155			-1.140	-0.701		
	Prob	0.047	0.231			0.000	0.000		
	OR	0.745	1.168			0.320	0.496		
	EDUC(3-2)	-0.439	-0.494			-0.794	-0.507		
	Prob	0.103	0.092			0.039	0.131		
	OR	0.645	0.610			0.452	0.602		
KAWIN(1-2)	EDUC1	0.429	-0.154			-0.447	-1.534		
	Prob	0.000	0.161			0.050	0.000		
	OR	1.536	0.857			0.639	0.216		
	EDUC2	-0.249	-0.348			-0.885	-1.729		
	Prob	0.072	0.001			0.000	0.000		
	OR	0.780	0.706			0.413	0.177		
	EDUC3	-0.085	-0.267			-0.134	-1.693		
	Prob	0.781	0.401			0.768	0.000		
	OR	0.918	0.766			0.875	0.184		
	Wald Test	F-statistic	df	Prob		F-statistic	df	Prob	
EDUC(1=2=3)	9.010	(8, 7784)	0.000		8.154	(8, 5622)	0.000		

Sumber: Pengolahan data mentah SAKERNAS NTB Agustus 2008

Keterangan: Status pekerja penuh sebagai kelompok pembanding

Output pengolahan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. *Likelihood ratio test* pada tabel output tersebut menyimpulkan bahwa persamaan regresi logit multinomial yang dibangun berdasarkan gambar 3.5 signifikan pada *level of significant* $\alpha = 0,05$. Rangkuman hasil analisis disajikan dalam tabel 4.17.

Tabel 4.17 di atas menunjukkan perbedaan resiko *underemployment* dan *unemployment* menurut kelompok yang dibentuk berdasarkan tingkat pendidikan, status perkawinan dan jenis kelamin. Selanjutnya dengan menggunakan *level of significant* $\alpha = 0,05$ dapat diambil kesimpulan uji hipotesis sebagai berikut:

1. Hasil Wald test menunjukkan bahwa data mendukung hipotesis 2a pada sub bab 3.3 yaitu pendidikan mempunyai pengaruh terhadap resiko *underemployment* yang tergantung pada status perkawinan dan jenis kelamin serta data mendukung hipotesis 2b yaitu pendidikan mempunyai pengaruh terhadap resiko *unemployment* yang tergantung pada status perkawinan dan jenis kelamin.

2. Kelompok angkatan kerja berstatus kawin, resiko *underemployment* perempuan selalu lebih tinggi dibandingkan laki – laki di setiap kelompok tingkat pendidikan. Sementara pada pekerja perempuan berstatus belum/pernah kawin yang berpendidikan rendah resiko *underemployment* lebih rendah dibandingkan laki – laki.
3. Resiko *unemployment* perempuan lebih tinggi dibandingkan laki – laki pada kelompok angkatan kerja berstatus kawin di setiap tingkat pendidikan. Pada kelompok angkatan kerja berstatus belum/pernah kawin, resiko *unemployment* perempuan lebih rendah dibandingkan laki - laki pada kelompok angkatan kerja berpendidikan rendah.
4. Kondisi yang terjadi pada poin 2 dan 3 kemungkinan disebabkan perempuan cenderung menjadi pekerja paruh waktu sukarela sebagaimana terlihat pada tabel 4.6.
5. Resiko *underemployment* perempuan berstatus kawin lebih rendah dibandingkan perempuan berstatus belum/pernah kawin pada tingkat pendidikan menengah dan pada kelompok pendidikan tinggi tidak terdapat perbedaan yang signifikan (data tidak mendukung hipotesis 2c). Hanya kelompok pekerja perempuan pada tingkat pendidikan rendah yang menunjukkan bahwa data mendukung hipotesis 2c pada sub bab 3.3 yaitu khusus angkatan kerja perempuan, resiko *underemployment* angkatan kerja berstatus kawin lebih tinggi dibandingkan yang berstatus belum/pernah kawin pada masing – masing tingkat pendidikan.
6. Kondisi yang tidak mendukung hipotesis 2c pada poin 5 kemungkinan disebabkan pemanfaatan tenaga kerja berpendidikan menengah lebih baik dibandingkan berpendidikan rendah dan lebih berpeluang untuk bekerja *full time*. Bagi perempuan berstatus kawin memiliki motivasi yang lebih besar untuk bekerja *full time* dibandingkan perempuan berstatus belum/pernah kawin karena memiliki beban tanggung jawab membantu ekonomi rumah tangga. Sementara untuk pekerjaan rumah tangga kemungkinan memperoleh bantuan dari orang tua atau sanak famili lain.
7. Selanjutnya, resiko *unemployment* perempuan berstatus kawin lebih rendah dibandingkan perempuan berstatus belum/pernah kawin pada

kelompok tingkat pendidikan rendah dan menengah. Hal tersebut menunjukkan data mendukung hipotesis 2d pada sub bab 3.3 yaitu khusus angkatan kerja perempuan, resiko *unemployment* angkatan kerja berstatus kawin lebih rendah dibandingkan yang berstatus belum/pernah kawin pada masing – masing tingkat pendidikan.

8. Pada angkatan kerja laki – laki berstatus kawin memiliki resiko *underemployment* dan resiko *unemployment* lebih rendah dibandingkan yang berstatus belum/pernah kawin. Hal tersebut disebabkan tanggung jawab laki – laki berstatus kawin sebagai pencari nafkah keluarga memotivasi mereka untuk harus bekerja walaupun belum memperoleh pekerjaan layak dan menganggur bukanlah pilihan yang bijaksana.
9. Kelompok angkatan kerja perempuan berpendidikan tinggi tidak terdapat perbedaan resiko *underemployment* dan *unemployment* yang signifikan antara angkatan kerja berstatus kawin dibandingkan belum/pernah kawin. Kondisi tersebut kemungkinan disebabkan upah yang diterima pekerja perempuan berpendidikan tinggi dapat mengkompensasi beban pekerjaan rumah tangga, misalnya dengan mempekerjakan pembantu. Sehingga tidak mengganggu jam kerjanya dan aktivitas mereka mencari kerja.

4.3.1.3. Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Kelompok Umur terhadap Status Angkatan Kerja

Sub model ketiga dibangun untuk menerjemahkan pola hubungan sebagaimana tersaji pada gambar 3.3 yang selanjutnya diuraikan dalam gambar 3.6. Gambar 3.6 menjelaskan bahwa pendidikan angkatan kerja mempengaruhi status *underemployment* dan *unemployment* yang tergantung pada kelompok umur. Bentuk umum dari sub model pertama telah disajikan sebelumnya pada persamaan (3.4.a) dan (3.4.b). Untuk keperluan analisis dibangunlah model menggunakan tingkat pendidikan menengah (EDUC2) dan kelompok umur 30-54 tahun (AGE3) sebagai kelompok pembanding. Variabel umur biasa digunakan sebagai *proxy* pengalaman kerja atau pengalaman berada dalam angkatan kerja (sebagai *unemployment* atau *employment*), namun di sisi lain umur juga dapat dijadikan *proxy* kesehatan atau kemampuan fisik angkatan kerja.

Output pengolahan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. *Likelihood ratio test* pada tabel output tersebut menyimpulkan bahwa persamaan regresi logit multinomial yang dibangun berdasarkan gambar 3.6 signifikan pada *level of significant* $\alpha = 0,05$. Rangkuman hasil analisis disajikan dalam tabel 4.18.a dan 4.18.b.

Tabel. 4.18.a. Ringkasan Statistik Mengenai Perbedaan Resiko *Underemployment* Antar Tingkat Pendidikan dan Kelompok Umur

Variabel Bebas	Underemployment						
	EDUC1	EDUC2	EDUC3	EDUC(1-2)		EDUC(3-2)	
				OR	Prob	OR	Prob
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
AGE1	-0.134	0.163		0.744	0.095		
AGE2	-0.261	-0.669	-0.639	1.503	0.000	1.030	0.867
AGE3	-0.514	-0.925	-1.315	1.507	0.000	0.677	0.005
AGE4	-0.525	-0.711	-1.335	1.204	0.456	0.536	0.259
AGE(1-3)	0.381	1.087					
Prob	0.006	0.000					
OR	1.464	2.966					
AGE(2-3)	0.254	0.256	0.676				
Prob	0.002	0.003	0.001				
OR	1.289	1.292	1.966				
AGE(4-3)	-0.011	0.214	-0.020				
Prob	0.917	0.368	0.969				
OR	0.989	1.238	0.980				
Wald Test	F-statistic	df	Prob				
EDUC(1=2=3)	12.329	(7, 7785)	0.000				

Sumber: SAKERNAS Provinsi NTB Agustus 2008 (telah diolah kembali)

Tabel. 4.18.b. Ringkasan Statistik Mengenai Perbedaan Resiko *Unemployment* Antar Tingkat Pendidikan dan Kelompok Umur

Variabel Bebas	Unemployment						
	EDUC1	EDUC2	EDUC3	EDUC(1-2)		EDUC(3-2)	
				OR	Prob	OR	Prob
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
AGE1	-1.204	-0.518		0.504	0.004		
AGE2	-1.800	-1.330	-1.463	0.625	0.001	0.875	0.572
AGE3	-3.065	-2.397	-2.701	0.513	0.000	0.738	0.229
AGE4	-3.778	-4.043	-2.944	1.304	0.806	3.000	0.445
AGE(1-3)	1.861	1.879					
Prob	0.000	0.000					
OR	6.432	6.546					

Tabel 4.18.b. Lanjutan

Variabel Bebas	Unemployment						
	EDUC1	EDUC2	EDUC3	EDUC(1-2)		EDUC(3-2)	
				OR	Prob	OR	Prob
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
AGE(2-3)	1.265	1.067	1.238				
Prob	0.000	0.000	0.000				
OR	3.543	2.907	3.449				
AGE(4-3)	-0.712	-1.646	-0.243				
Prob	0.075	0.105	0.817				
OR	0.490	0.193	0.784				
Wald Test	F-statistic	df	Prob				
EDUC(1=2=3)	5.397	(7, 5623)	0.000				

Sumber: SAKERNAS Provinsi NTB Agustus 2008 (telah diolah kembali)

Tabel 4.18.a dan 4.18.b di atas menunjukkan resiko *underemployment* dan *unemployment* menurut kelompok yang dibentuk berdasarkan tingkat pendidikan, wilayah dan jenis kelamin. Pada kelompok umur 15-19 tahun (AGE1) belum ada yang lulus pendidikan tinggi, sehingga isian untuk tingkat pendidikan tinggi tidak tersedia (NA). Mencermati rangkuman statistik tersebut dan menggunakan *level of significant* $\alpha = 0,05$ dapat diambil beberapa kesimpulan uji hipotesis sebagai berikut:

1. Hasil Uji Wald pada tabel 4.18.a dan 4.18.b menunjukkan data mendukung hipotesis 3a pada sub bab 3.3, yaitu pendidikan angkatan kerja mempunyai pengaruh terhadap resiko *underemployment* yang tergantung pada kelompok umur dan 3b yaitu pendidikan angkatan kerja mempunyai pengaruh terhadap resiko *unemployment* yang tergantung pada kelompok umur.
2. Angkatan kerja pada tingkat pendidikan rendah memiliki resiko *underemployment* yang lebih tinggi dibandingkan pendidikan menengah pada kelompok umur 20-29 tahun dan 30-54 tahun. Sementara angkatan kerja berpendidikan tinggi memiliki resiko *underemployment* lebih rendah dibandingkan yang berpendidikan menengah hal itu terjadi pada kelompok umur 30-54 tahun.
3. Kondisi yang berbeda terjadi pada kelompok umur 15-19 tahun, dimana resiko *underemployment* angkatan kerja berpendidikan rendah lebih rendah dibandingkan pendidikan menengah. Keputusan bekerja bagi

Universitas Indonesia

kelompok umur 15-19 tahun sebagian besar kemungkinan disebabkan alasan ekonomi, mereka terpaksa putus sekolah untuk membantu ekonomi keluarga oleh sebab itu dorongan mereka untuk bekerja penuh lebih besar. Sementara bagi angkatan kerja pada tingkat pendidikan menengah, kelompok umur 15-19 masih tergolong baru lulus, sehingga keputusan mereka untuk bekerja kemungkinan tidak selalu bermotivasi membantu ekonomi melainkan ada juga yang memiliki motivasi untuk menambah pengalaman kerja.

4. Resiko *unemployment* angkatan kerja berpendidikan rendah lebih rendah dibandingkan pendidikan menengah. Hal tersebut terjadi pada kelompok umur 15-19 tahun, 20-29 tahun dan 30-54 tahun. Sementara pada kelompok umur 55-64 tahun perbedaan resiko tersebut tidaklah signifikan, mengingat pada usia tersebut keinginan mencari kerja atau menjadi pengangguran sudah jauh berkurang.
5. Resiko *unemployment* antara angkatan kerja berpendidikan menengah dan tinggi tidak berbeda signifikan pada setiap kelompok umur. Hal tersebut mencerminkan kesempatan kerja bagi angkatan kerja berpendidikan menengah maupun tinggi relatif tidak berbeda.
6. Resiko *underemployment* angkatan kerja kelompok umur 15-19 tahun dan 20-29 tahun lebih tinggi dibandingkan kelompok umur 30-54 tahun pada setiap tingkat pendidikan. Kondisi tersebut sesuai dengan hipotesis penelitian – penelitian sebelumnya (Görg dan Eric, 2001; Taşçi, 2005; Cross, 2007) yaitu resiko *underemployment* angkatan kerja kelompok umur muda lebih tinggi dibandingkan kelompok umur yang lebih tua.
7. Kondisi yang sama terjadi pada resiko *unemployment*, dimana resiko *unemployment* angkatan kerja kelompok umur 15-19 tahun dan 20-29 tahun lebih tinggi dibandingkan kelompok umur 30-54 tahun pada setiap tingkat pendidikan. Sementara resiko *unemployment* kelompok umur 55-64 tahun lebih rendah dibandingkan kelompok umur 30-54 tahun pada kelompok angkatan kerja berpendidikan rendah.

4.3.2. Pengaruh Variabel Bebas terhadap Status Pekerja

Analisis inferensial untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan dan beberapa variabel bebas terhadap status pekerja menggunakan model *logit binner regression*. Pekerja bukan saja orang yang dipekerjakan melainkan termasuk juga pengusaha atau orang yang berusaha. Sehingga pekerja yang dimaksud disini adalah angkatan kerja yang telah bekerja baik sebagai pekerja maupun pengusaha (orang yang memiliki usaha). Variabel terikat berbentuk kategorik yang merupakan status pekerja, sebagai berikut:

1. $P_1 = P(Y=1)$: probabilita seseorang sebagai underemployment
2. $1 - P_1 = P(Y=4)$: probabilita seseorang bekerja penuh (*full time worker*).

Probabilita seseorang bekerja penuh dijadikan sebagai kelompok pembanding (*reference gorup*) bagi variabel terikat.

4.3.2.1. Pengaruh Tingkat Pendidikan, Lapangan Pekerjaan dan Daerah Tempat Tinggal terhadap Status Pekerja

Sub model keempat dibangun untuk menerjemahkan pola hubungan sebagaimana tersaji pada gambar 3.3 yang selanjutnya diuraikan dalam gambar 3.7. Gambar 3.7 menjelaskan bahwa pendidikan mempengaruhi status *underemployment* pekerja yang tergantung pada lapangan pekerjaan dan daerah tempat tinggal. Bentuk umum dari sub model pertama telah disajikan sebelumnya pada persamaan 3.5. Untuk keperluan analisis, model yang dibangun menggunakan variabel pendidikan menengah (EDUC2), lapangan kerja pertanian (KERJA1) dan wilayah perkotaan (RESIDEN2) sebagai kelompok pembanding.

Output pengolahan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. *Likelihood ratio test* pada tabel output tersebut menyimpulkan bahwa persamaan regresi logit binner yang dibangun berdasarkan gambar 3.7 signifikan signifikan pada *level of significant* $\alpha = 0,05$. Rangkuman analisis disajikan pada tabel 4.19 berikut ini.

Tabel. 4.19. Ringkasan Statistik Mengenai Perbedaan Resiko *Underemployment* Antar Tingkat Pendidikan, Lapangan Pekerjaan dan Wilayah Tempat Tinggal

Variabel Bebas		EDUC1	EDUC2	EDUC3	EDUC(1-2)		EDUC(3-2)	
					OR	Prob	OR	Prob
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
RESIDEN1	KERJA1	0.154	0.496	0.000	0.710	0.000	0.609	0.274
	KERJA2	-0.823	-0.927	-1.386	1.110	0.538	0.632	0.684
	KERJA3	-1.091	-0.994	-0.594	0.907	0.466	1.492	0.038

Universitas Indonesia

Tabel 4.19. Lanjutan

Variabel Bebas		EDUC1	EDUC2	EDUC3	EDUC(1-2)		EDUC(3-2)	
					OR	Prob	OR	Prob
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
RESIDN1	KERJA(2-1)	-0.977	-1.423	-1.386				
	Prob	0.000	0.000	0.250				
	OR	0.376	0.241	0.250				
	KERJA(3-1)	-1.246	-1.490	-0.594				
	Prob	0.000	0.000	0.215				
	OR	0.288	0.225	0.552				
RESIDEN2	KERJA1	0.068	0.419	0.000	0.704	0.110	0.658	0.566
	KERJA2	-1.332	-1.225	-2.251	0.898	0.585	0.358	0.175
	KERJA3	-1.292	-1.525	-1.400	1.262	0.055	1.133	0.418
	KERJA(2-1)	-1.400	-1.644	-2.251				
	Prob	0.000	0.000	0.028				
	OR	0.247	0.193	0.105				
	KERJA(3-1)	-1.360	-1.944	-1.400				
	OR	0.257	0.143	0.247				
RESIDEN(1-2)	KERJA1	0.086	0.077	0.000				
	Prob	0.493	0.702	1.000				
	OR	1.090	1.080	1.000				
	KERJA2	0.509	0.298	0.865				
	Prob	0.002	0.135	0.519				
	OR	1.664	1.347	2.375				
	KERJA3	0.201	0.531	0.806				
	OR	1.222	1.701	2.239				
Wald Test		F-statistic	df	Prob				
EDUC(1=2=3)		2.475	(12, 7778)	0.003				

Sumber: Pengolahan data mentah SAKERNAS NTB Agustus 2008

Keterangan: Status pekerja penuh sebagai kelompok pembanding

Mencermati perbedaan resiko *underemployment* pada tabel 4.19 di atas serta menguji hipotesis (pada *level of significant* $\alpha = 0,05$) sebagaimana telah disajikan pada sub bab 3.3, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil Wald test menunjukkan bahwa data mendukung hipotesis 4 yaitu pendidikan pekerja mempunyai pengaruh terhadap resiko *underemployment* yang tergantung pada lapangan pekerjaan dan wilayah tempat tinggal.
2. Pada lapangan pekerjaan pertanian di wilayah perdesaan resiko *underemployment* pekerja berpendidikan rendah lebih rendah

dibandingkan pekerja berpendidikan menengah. Hal tersebut memang cukup wajar mengingat pertanian memang mendominasi lapangan kerja di perdesaan dan pekerja pertanian memang tidak membutuhkan tingkat pendidikan atau keahlian tertentu sehingga pekerja berpendidikan rendah banyak dimanfaatkan oleh lapangan kerja pertanian.

3. Lapangan kerja pertanian di wilayah perkotaan dengan *level of significant* $\alpha = 0,10$ menunjukkan resiko *underemployment* pekerja berpendidikan rendah lebih rendah dibandingkan berpendidikan menengah. Hal ini memperkuat penjelasan pada poin 2, bahwa pekerja berpendidikan rendah lebih dimanfaatkan pada pekerjaan pertanian demikian juga di perkotaan.
4. Pada wilayah perdesaan, pemanfaatan tenaga kerja berpendidikan tinggi masih kurang. Hal tersebut dapat dilihat dari resiko *underemployment* pekerja berpendidikan tinggi yang lebih tinggi dibandingkan pekerja berpendidikan menengah untuk lapangan kerja jasa – jasa.
5. Sementara pada wilayah perkotaan, resiko *underemployment* pekerja berpendidikan rendah lebih tinggi dibandingkan berpendidikan menengah pada lapangan kerja jasa – jasa. Apabila menggunakan *level of significant* $\alpha = 0,10$, resiko *underemployment* pekerja berpendidikan tinggi lebih rendah dibandingkan berpendidikan menengah pada lapangan kerja industri. Kondisi tersebut menunjukkan pada lapangan kerja non pertanian yang membutuhkan spesifikasi keahlian atau tingkat pendidikan tertentu, pekerja berpendidikan rendah kalah bersaing dengan yang berpendidikan lebih tinggi, sehingga mereka kurang dimanfaatkan.
6. Pekerja pertanian memiliki resiko *underemployment* lebih tinggi dibandingkan pekerja non pertanian. Kondisi tersebut terjadi di perdesaan dan perkotaan pada setiap tingkat pendidikan kecuali pekerja berpendidikan tinggi di perdesaan
7. Pemanfaatan pekerja di wilayah perdesaan lebih rendah dibandingkan perkotaan. Hal tersebut terlihat dari lebih tingginya resiko *underemployment* pekerja di wilayah perdesaan dibandingkan perkotaan untuk kelompok pekerja industri berpendidikan rendah serta kelompok pekerja jasa – jasa berpendidikan menengah dan tinggi.

4.3.2.2. Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kelompok Umur dan Sektor Pekerjaan terhadap Status Pekerja

Sub model kelima dibangun untuk menerjemahkan pola hubungan sebagaimana tersaji pada gambar 3.3 yang selanjutnya diuraikan dalam gambar 3.8. Gambar 3.8 menjelaskan pendidikan memiliki pengaruh terhadap status *underemployment* pekerja yang tergantung pada kelompok umur dan sektor pekerjaan. Bentuk umum dari sub model kelima telah disajikan sebelumnya pada persamaan 3.6. Untuk kebutuhan analisis, model dibangun dengan menggunakan variabel tingkat pendidikan menengah (EDUC2), kelompok umur 30-54 tahun (AGE3) dan sektor formal (SEKTOR2) sebagai kelompok pembanding.

Output pengolahan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. *Likelihood ratio test* pada tabel output tersebut menyimpulkan bahwa persamaan regresi logit binner yang dibangun berdasarkan gambar 3.8 signifikan pada *level of significant* $\alpha = 0,05$. Rangkuman analisis disajikan pada tabel 4.20 berikut ini.

Tabel. 4.20. Ringkasan Statistik Perbedaan Resiko *Underemployment* Antar Tingkat Pendidikan, Kelompok Umur dan Sektor Pekerjaan

Variabel Bebas	EDUC1	EDUC2	EDUC3	EDUC(1-2)		EDUC(3-2)		
				OR	Prob	OR	Prob	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
SEKTOR1	AGE1	0.010	0.419		0.665	0.033		
	AGE2	-0.078	-0.222	-0.511	1.155	0.195	0.749	0.580
	AGE3	-0.280	-0.455	-0.268	1.191	0.038	1.205	0.620
	AGE4	-0.389	-0.205		0.832	0.544		
	AGE(1-3)	0.290	0.873					
	Prob	0.052	0.000					
	OR	1.336	2.395					
	AGE(2-3)	0.202	0.233	-0.243				
	Prob	0.023	0.030	0.702				
	OR	1.224	1.262	0.785				
	AGE(4-3)	-0.109	0.250					
	Prob	0.319	0.399					
	OR	0.896	1.284					
SEKTOR2	AGE1	-1.299	-1.504		1.227	0.735		
	AGE2	-1.160	-1.436	-0.653	1.318	0.214	2.188	0.000
	AGE3	-1.578	-1.572	-1.434	0.994	0.966	1.148	0.406
	AGE4	-1.403	-1.609	-1.335	1.230	0.698	1.316	0.683
	AGE(1-3)	0.279	0.068					
	Prob	0.556	0.866					
	OR	1.322	1.070					
	AGE(2-3)	0.419	0.136	0.781				
	Prob	0.056	0.373	0.000				
OR	1.520	1.146	2.183					

Tabel 4.20. Lanjutan

Variabel Bebas	EDUC1	EDUC2	EDUC3	EDUC(1-2)		EDUC(3-2)	
				OR	Prob	OR	Prob
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	AGE(4-3)	0.176	-0.037	0.099			
	Prob	0.570	0.935	0.850			
	OR	1.192	0.963	1.104			
SEKTOR(1-2)	AGE1	1.309	1.923				
	Prob	0.007	0.000				
	OR	3.704	6.840				
	AGE2	1.082	1.214	0.142			
	Prob	0.000	0.000	0.794			
	OR	2.951	3.368	1.153			
	AGE3	1.299	1.118	1.165			
	Prob	0.000	0.000	0.003			
	OR	3.664	3.057	3.207			
	AGE4	1.014	1.405				
	Prob	0.001	0.008				
	OR	2.755	4.074				
Wald Test	F-statistic	df	Prob				
EDUC(1=2=3)	2.041	(13, 7775)	0.015				

Sumber: SAKERNAS Provinsi NTB Agustus 2008 (telah diolah kembali)

Mencermati perbedaan resiko *underemployment* pada tabel 4.20 di atas serta menguji hipotesis (pada *level of significant* $\alpha = 0,05$) sebagaimana telah disajikan pada sub bab 3.3, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil Wald test menunjukkan bahwa data mendukung hipotesis 5 yaitu pendidikan mempunyai pengaruh terhadap resiko *underemployment* yang tergantung pada kelompok umur dan sektor pekerjaan.
2. Resiko *underemployment* pekerja berpendidikan rendah lebih tinggi dibandingkan pekerja berpendidikan menengah pada kelompok umur 30-54 tahun sektor informal.
3. Pada pekerja kelompok umur 15-19 tahun sektor informal resiko *underemployment* tingkat pendidikan rendah lebih rendah dibandingkan pendidikan menengah dan pekerja kelompok umur 20-29 tahun sektor formal resiko *underemployment* tingkat pendidikan tinggi lebih tinggi dibandingkan pendidikan menengah. Hal tersebut kemungkinan disebabkan perbedaan pengalaman kerja dimana kelompok umur 15-19

adalah lulusan baru dari pendidikan SLTP/SLTA dan kelompok umur 20-29 adalah *fresh graduate* (lulusan baru dari pendidikan tinggi).

4. Pada sektor informal, resiko *underemployment* pekerja kelompok umur 15-19 tahun dan 20-29 tahun lebih tinggi dibandingkan kelompok umur 30-54 tahun untuk kelompok tingkat pendidikan rendah dan menengah.
5. Pada sektor formal, resiko *underemployment* kelompok umur 20-29 tahun lebih tinggi dibandingkan kelompok umur 30-54 tahun untuk pekerja kelompok pendidikan rendah dan tinggi.
6. Baik sektor formal maupun informal, resiko *underemployment* pekerja dengan kelompok umur lebih muda lebih tinggi dibandingkan kelompok umur yang lebih tua untuk setiap tingkat pendidikan. Hal ini menunjukkan umur sebagai pendekatan pengalaman kerja memiliki peran penting dalam pemanfaatan tenaga kerja baik di sektor formal maupun informal.
7. Sektor informal memiliki resiko *underemployment* yang lebih tinggi dibandingkan sektor formal pada setiap kelompok tingkat pendidikan dan kelompok umur. Namun pada kelompok pekerja berumur 20-29 tahun dan berpendidikan tinggi, perbedaan tersebut tidak signifikan. Sebagaimana disampaikan sebelumnya hal tersebut kemungkinan disebabkan sebagai lulusan baru belum memiliki banyak pengalaman kerja atau masih mencari pekerjaan yang sesuai.

4.3.2.3. Pengaruh Tingkat Pendidikan, Status Migran Komuter dan Jenis Kelamin terhadap Status Pekerja

Sub model keenam dibangun untuk menerjemahkan pola hubungan sebagaimana tersaji pada gambar 3.3 yang selanjutnya diuraikan dalam gambar 3.9. Gambar 3.9 menjelaskan pendidikan memiliki pengaruh terhadap status *underemployment* pekerja yang tergantung pada status migran komuter dan jenis kelamin. Bentuk umum dari sub model kelima telah disajikan sebelumnya pada persamaan 3.7. Untuk kebutuhan analisis, model dibangun dengan menggunakan variabel tingkat pendidikan menengah (EDUC2), status bukan migran komuter (KOMUTER2) dan jenis kelamin laki – laki (SEX2) sebagai kelompok pembanding.

Output pengolahan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. *Likelihood ratio test* pada tabel output tersebut menyimpulkan bahwa persamaan regresi logit biner yang dibangun berdasarkan gambar 3.9 signifikan pada *level of significant* $\alpha = 0,10$. Rangkuman hasil analisis disajikan pada tabel 4.21.

Tabel. 4.21. Ringkasan Statistik Perbedaan Resiko *Underemployment* Antar Tingkat Pendidikan, Status Migran Komuter dan Jenis Kelamin

Variabel Bebas		EDUC1	EDUC2	EDUC3	EDUC(1-2)		EDUC(3-2)	
					OR	Prob	OR	Prob
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
SEX1	KOMUTER1	-0.847	-1.253	-1.099	1.500	0.559	1.167	0.905
	KOMUTER2	-0.312	-0.496	-0.843	1.202	0.027	0.707	0.033
	KOMUTER (1-2)	-0.535	-0.757	-0.256				
	Prob	0.182	0.185	0.826				
	OR	0.585	0.469	0.774				
SEX2	KOMUTER1	-1.386	-2.134	-2.526	2.111	0.106	0.676	0.630
	KOMUTER2	-0.514	-0.765	-1.201	1.284	0.000	0.646	0.002
	KOMUTER (1-2)	-0.872	-1.369	-1.324				
	Prob	0.004	0.000	0.076				
	OR	0.418	0.254	0.266				
SEX (1-2)	KOMUTER 1	0.539	0.881	1.427				
	Prob	0.279	0.187	0.297				
	OR	1.714	2.413	4.167				
	KOMUTER 2	0.203	0.269	0.358				
	Prob	0.002	0.001	0.072				
	OR	1.225	1.308	1.431				
Wald Test		F-statistic	df	Prob				
EDUC (1=2=3)		6.419	(8, 7784)	0.000				

Sumber: SAKERNAS Provinsi NTB Agustus 2008 (telah diolah kembali)

Keterangan: Status pekerja penuh sebagai kelompok pembandingan

Perbedaan resiko *underemployment* pada tabel 4.21 di atas serta menguji hipotesis (pada *level of significant* $\alpha = 0,05$) sebagaimana telah disajikan pada sub bab 3.3, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil Wald test menunjukkan bahwa data mendukung hipotesis 6 yaitu pendidikan mempunyai pengaruh terhadap resiko *underemployment* yang tergantung pada status migran komuter dan jenis kelamin.
2. Pada pekerja laki – laki maupun perempuan berstatus bukan migran komuter, resiko *underemployment* pekerja berpendidikan rendah lebih tinggi dibandingkan pekerja berpendidikan menengah. Sementara resiko

underemployment pekerja berpendidikan tinggi lebih rendah dibandingkan pekerja berpendidikan menengah.

3. Pekerja berstatus migran baik laki – laki maupun perempuan tidak menunjukkan adanya perbedaan resiko *underemployment* yang signifikan antar tingkat pendidikan.
4. Penjelasan poin 3 mengindikasikan bahwa melakukan perjalanan komuter untuk bekerja mengurangi adanya perbedaan pemanfaatan tenaga kerja (resiko *underemployment*) antar tingkat pendidikan baik laki – laki maupun perempuan.
5. Pada pekerja perempuan, dengan menggunakan *level of significant* $\alpha = 0,10$ resiko *underemployment* pekerja komuter lebih rendah dibandingkan bukan komuter pada tingkat pendidikan rendah dan menengah.
6. Pada pekerja laki – laki resiko *underemployment* pekerja komuter lebih rendah dibandingkan bukan pekerja komuter pada setiap tingkat pendidikan. Hal tersebut menunjukkan melakukan kegiatan komuter merupakan salah satu cara agar sumber daya tenaga kerja baik laki – laki maupun perempuan dapat lebih termanfaatkan.
7. Bagi pekerja bukan komuter, resiko *underemployment* perempuan lebih tinggi dibandingkan laki – laki pada setiap tingkat pendidikan. Namun bagi pekerja komuter pada taraf signifikansi yang sama, tidak terdapat perbedaan resiko *underemployment* antara laki – laki dan perempuan. Hal tersebut menunjukkan bekerja komuter mengurangi perbedaan resiko *underemployment* antara laki – laki dan perempuan pada setiap tingkat pendidikan.

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian – uraian pada analisis dan pembahasan, maka sesuai kelompok variabel yang diperhatikan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat pendidikan memiliki pengaruh signifikan terhadap kecenderungan resiko *underemployment* dan *unemployment* yang tergantung pada jenis kelamin dan wilayah tempat tinggal.
2. Tingkat pendidikan memiliki pengaruh signifikan terhadap kecenderungan resiko *underemployment* dan *unemployment* yang tergantung pada jenis kelamin dan status perkawinan.
3. Tingkat pendidikan memiliki pengaruh signifikan terhadap kecenderungan resiko *underemployment* dan *unemployment* yang tergantung pada kelompok umur.
4. Bagi angkatan kerja yang telah bekerja, tingkat pendidikan pekerja memiliki pengaruh signifikan terhadap kecenderungan *underemployment* yang tergantung pada lapangan pekerjaan dan wilayah tempat tinggal.
5. Bagi angkatan kerja yang telah bekerja, tingkat pendidikan pekerja memiliki pengaruh signifikan terhadap kecenderungan *underemployment* yang tergantung pada kelompok umur dan sektor pekerjaan.
6. Bagi angkatan kerja yang telah bekerja, tingkat pendidikan pekerja memiliki pengaruh signifikan terhadap kecenderungan *underemployment* yang tergantung pada status pekerja komuter dan jenis kelamin.
7. Secara umum semakin tinggi tingkat pendidikan kecenderungan sebagai *underemployment* semakin berkurang dan kecenderungan sebagai *unemployment* semakin meningkat. Kondisi tersebut menunjukkan investasi pada pendidikan bagi angkatan kerja memberikan keuntungan (*benefit*) seperti yang diharapkan yaitu memperbesar kesempatan untuk bekerja penuh (*full time*) dan dimanfaatkan secara optimal.
8. Secara umum pekerja perempuan memiliki resiko *underemployment* dan *unemployment* lebih tinggi dibandingkan laki – laki pada setiap tingkat

pendidikan. Hal tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan gender untuk berpartisipasi dalam pasar kerja.

9. Secara umum resiko *underemployment* wilayah perkotaan lebih rendah dibandingkan perdesaan pada setiap tingkat pendidikan. Hal tersebut menunjukkan pemanfaatan tenaga kerja di wilayah perkotaan lebih baik dibandingkan perdesaan.
10. Secara umum resiko *unemployment* atau kesempatan memperoleh pekerjaan tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan antara wilayah perkotaan dan perdesaan, kecuali pada tingkat pendidikan menengah. Hal tersebut menunjukkan resiko menjadi pengangguran (*unemployment*) antara wilayah perdesaan dan perkotaan relatif tidak berbeda.
11. Angkatan kerja perempuan yang berstatus kawin memiliki resiko sebagai *underemployment* lebih tinggi dibandingkan yang belum/pernah kawin hanya pada tingkat pendidikan rendah. Kondisi yang sebaliknya terjadi pada pekerja perempuan berpendidikan menengah.
12. Sebaliknya resiko *unemployment* angkatan kerja perempuan berstatus kawin lebih rendah dibandingkan yang berstatus belum/pernah kawin. Partisipasi kerja perempuan kawin lebih disebabkan alasan membantu ekonomi rumah tangganya dengan pertimbangan tidak mengganggu pekerjaan domestiknya.
13. Angkatan kerja perempuan berstatus kawin dan berpendidikan tinggi tidak terdapat perbedaan resiko yang signifikan sebagai *underemployment* maupun *unemployment* dibandingkan yang berstatus belum/pernah kawin.
14. Kelompok umur angkatan kerja merupakan *proxy* pengalaman kerja atau pengalaman berada dalam angkatan kerja, hal tersebut menyebabkan semakin tua kelompok umur angkatan kerja mengurangi resiko sebagai *unemployment* maupun *underemployment* pada setiap tingkat pendidikan.
15. Pengalaman kerja juga mempengaruhi pemanfaatan tenaga kerja. Pada umumnya angkatan kerja yang baru lulus sekolah (dasar, menengah dan tinggi) belum dapat dimanfaatkan secara optimal dalam pasar kerja karena belum memiliki pengalaman.

16. Pemanfaatan tenaga kerja sektor pertanian baik di perdesaan maupun perkotaan tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Pekerjaan pertanian lebih memanfaatkan tenaga kerja berpendidikan rendah. Sementara pekerjaan non pertanian lebih membutuhkan pekerja dengan keahlian dan kualifikasi pendidikan tertentu.
17. Resiko *underemployment* pekerja sektor informal lebih tinggi dibandingkan sektor formal. Pekerja pertanian memiliki resiko *underemployment* lebih tinggi dibandingkan pekerja industri dan jasa – jasa. Kondisi tersebut terjadi ada setiap kelompok tingkat pendidikan dan jenis kelamin pekerja di wilayah perdesaan maupun perkotaan.
18. Pekerja komuter umumnya tidak memiliki perbedaan resiko *underemployment* yang signifikan antar kelompok tingkat pendidikan dan jenis kelamin dibandingkan bukan pekerja komuter. Hal tersebut menunjukkan dengan bekerja di wilayah lain (komuter) mengurangi resiko menjadi *underemployment*.
19. Rata – rata penghasilan bersih pekerja penuh lebih tinggi dibandingkan pekerja *underemployment* pada setiap karakteristik individu pekerja maupun karakteristik pekerjaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pekerja *underemployment* lebih beresiko menjadi miskin.
20. Karakteristik individu mempengaruhi perbedaan rata – rata pendapatan bersih. Semakin tinggi tingkat pendidikan rata – rata pendapatan semakin meningkat. Semakin umur mencapai puncak produktifitas rata – rata pendapatan semakin meningkat kemudian kembali menurun setelah melewati usia puncak produktifitas. Pekerja yang berstatus kawin memiliki rata – rata pendapatan bersih lebih tinggi dibandingkan yang belum/pernah kawin. Rata – rata pendapatan pekerja di wilayah perdesaan lebih rendah dibandingkan perkotaan, namun perbedaan tersebut tidak signifikan. Pekerja perempuan memiliki rata – rata pendapatan lebih rendah dibandingkan laki – laki walaupun perbedaannya tidak signifikan.
21. Karakteristik pekerjaan memiliki pengaruh terhadap perbedaan upah. Pekerja sektor informal memiliki rata – rata pendapatan yang lebih rendah dibandingkan sektor formal. Sedangkan pekerja pertanian memiliki rata –

rata pendapatan bersih yang paling rendah dibandingkan pekerja industri dan jasa – jasa. Pekerja komuter memiliki rata – rata pendapatan lebih tinggi dibandingkan bukan pekerja komuter.

5.2. Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan hasil analisa dan pembahasan, maka terdapat beberapa saran yang direkomendasikan untuk dapat dipertimbangkan guna meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan pemanfaatan tenaga kerja, yaitu sebagai berikut:

1. Pendidikan rendah memiliki resiko sebagai *underemployment* lebih tinggi dibandingkan pendidikan yang lebih tinggi. Penyebabnya adalah kualitas sumber daya manusia pada angkatan kerja berpendidikan rendah yang masih kurang. Hal tersebut dapat diperbaiki dengan jalan mengikuti pendidikan jalur non formal atau mengikuti kursus, pendidikan dan pelatihan kerja yang akan meningkatkan keahlian. Oleh sebab itu Pemerintah Provinsi NTB dibantu pihak – pihak terkait hendaknya lebih menyebarluaskan lagi kegiatan pendidikan non formal, kursus – kursus, pendidikan dan latihan disesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja dan potensi sumber daya ekonomi yang ada di wilayah Provinsi NTB.
2. Angkatan kerja yang masih muda (15-19 tahun) secara umum memiliki resiko *underemployment* yang lebih tinggi dibandingkan kelompok umur usia kerja lainnya. Pemerintah perlu memikirkan program kebijakan agar penduduk kelompok umur 15-19 tahun tidak terburu – buru masuk menjadi angkatan kerja, melainkan tetap melanjutkan pendidikannya. Masuknya penduduk usia 15-19 tahun menjadi angkatan kerja umumnya disebabkan oleh desakan ekonomi. Kebijakan pendidikan gratis dan jaminan sosial lainnya terhadap rumah tangga tidak mampu yang telah dilaksanakan perlu untuk diintensifkan antara lain dengan mengurangi terjadinya salah sasaran dan meminimalkan adanya rumah tangga – rumah tangga kurang mampu yang tidak tercakup.
3. Meningkatnya perbaikan kualitas kesehatan menyebabkan angkatan kerja usia tua saat ini masih mampu dan ingin melakukan aktifitas ekonomi.

Pengalaman mereka selama bekerja merupakan potensi tersendiri yang sangat berharga untuk dimanfaatkan. Fenomena ini perlu disikapi dengan merancang suatu kebijakan ketenagakerjaan khusus bagi angkatan kerja usia lanjut agar potensinya tetap dapat dimanfaatkan sesuai dengan kondisinya. Kebijakan tersebut antara lain menaikan usia pensiun pegawai/karyawan dan dengan memberikan tugas atau pekerjaan yang lebih fokus pada pemanfaatan pengalaman dari pekerja usia lanjut.

4. Pemerintah perlu lebih mengintensifkan sosialisasi pengarusutamaan gender dengan melibatkan pihak – pihak terkait dengan sasaran seluruh lapisan masyarakat tidak hanya perempuan. Hal tersebut dimaksudkan agar peran perempuan khususnya yang sudah kawin dalam pasar kerja tidak terhambat serta meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender bagi perempuan dalam pasar kerja.
5. Sektor formal lebih dipilih oleh pencari kerja karena tingkat produktifitas yang lebih tinggi dan adanya jaminan pendapatan dibandingkan sektor informal. Pada sisi lain sektor informal merupakan alternatif kesempatan kerja bagi penduduk ekonomi menengah ke bawah atau pengangguran. Perlu pemberdayaan sektor informal, salah satu jalan yang dapat dilakukan adalah mengurangi kendala – kendala yang dihadapi seperti membrikan bantuan modal, membantu pemasaran dan penyediaan bahan baku serta memberikan pembinaan secara berkesinambungan untuk mengatasi minimnya pengetahuan tentang bisnis.
6. Lapangan kerja pertanian walaupun memiliki produktifitas rendah namun banyak memanfaatkan tenaga kerja berpendidikan rendah. Harus diakui hal tersebut cukup berguna mengurangi *unemployment* dan *underemployment* terutama bagi wilayah yang memiliki angkatan kerja berpendidikan rendah cukup besar seperti Provinsi NTB. Selanjutnya yang penting untuk dipikirkan adalah peningkatan produktifitas pertanian dengan jalan antara lain lebih mengintensifkan bimbingan dan penyuluhan bagi petani, bantuan atau subsidi yang berkaitan dengan biaya produksi (seperti bibit, pupuk dan pestisida), membangun sarana penunjang

pertanian (saluran irigasi dan pintu – pintu air) dan membantu pemasaran hasil panen termasuk mempertahankan harga komoditi pertanian.

7. Transformasi struktural ekonomi perlu lebih diarahkan untuk menunjang sektor pertanian, yaitu menciptakan lapangan kerja baru di bidang industri dan jasa – jasa yang berkaitan dengan pertanian seperti industri pengeringan dan penggilingan gabah, jasa penyewaan alat – alat pertanian, jasa angkutan hasil – hasil pertanian dan sebagainya.
8. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan komunikasi serta pendukung aktifitas ekonomi perlu ditingkatkan. Hal tersebut dimaksudkan agar perkembangan wilayah perkotaan dapat lebih cepat menjalar ke wilayah sekitar. Aktivitas ekonomi sangat membutuhkan sarana pendukung seperti pasar, listrik, bahan bakar dan sebagainya.

DAFTAR REFERENSI

- Adioetomo, Sri Moertiningsih. (2005). *Bonus Demografi Menjelaskan Hubungan Antara Pertumbuhan Penduduk dengan Pertumbuhan Ekonomi*. Pidato Upacara Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ekonomi Kependudukan Universitas Indonesia. Depok: Universitas Indonesia.
- Agung, I Gusti Ngurah. (2003). *Statistika: Penerapan Metode Analisis untuk Tabulasi Sepurna dan Tak Sempurna*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Agung, I Gusti Ngurah. (2004). *Manajemen Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi. Kiat – Kiat untuk Mempersingkat Waktu Penulisan Karya Ilmiah yang Bermutu*. Program Studi Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Divisi Buku Perguruan Tinggi: PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Agung, I Gusti Ngurah. (2009). *Time Series Data Analysis Using Eviews*. John Wiley & Sons (Asia) Pte Ltd. Singapore
- Andrew Eungi Kim and Innwon Park. (2006). *Changing Trends of Work in South Korea – The Rapid Growth of Underemployment and Job Insecurity*. Asian Survey , Vol. 46, Issue 3, pp. 437–456. The Regents of the University of California, 2006
- Badan Pusat Statistik, BAPPENAS, and UNDP. (2004). *Indonesia Human Development Report*. Jakarta
- Badan Pusat Statistik (BPS. (n.d.1.). *Data statistik ketenagakerjaan*. Badan Pusat Statistik (BPS), Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LD-FEUI) dan Australia National University (ANU). <http://www.datastatistik-indonesia.com/component?option=com_tabel/task/Itemid,171/>
- Badan Pusat Statistik (BPS. (n.d.2.). *Proyeksi penduduk 2000 - 2025*. Badan Pusat Statistik (BPS), Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LD-FEUI) dan Australia National University (ANU). <http://www.datastatistik-indonesia.com/proyeksi/index.php?option=com_proyeksi&task=show&Itemid=941/>
- Badan Pusat Statistik. (2009). *Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial Ekonomi Indonesia*. Maret 2009. BPS – Jakarta
- Badan Pusat Statistik. (2008a). *Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Semester I/2008 – Pedoman Pencacah*. Jakarta
- Badan Pusat Statistik. (2008b). *Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial Ekonomi Indonesia*. Maret 2008. BPS – Jakarta
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat. (2008a). *Situasi Ketenagakerjaan Nusa Tenggara Barat Agustus Tahun 2007*. Berita Resmi Statistik – Januari 2008. Mataram
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat. (2008b). *Indikator Kesejahteraan di Provinsi NTB Tahun 2007*. Mataram

- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat. (2008c). *Tingkat Kemiskinan di Provinsi NTB Tahun 2008*. Berita Resmi Statistik – Juli 2008. Mataram
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat. (2009a). *Situasi Ketenagakerjaan Nusa Tenggara Barat Agustus Tahun 2008*. Berita Resmi Statistik – Januari 2009. Mataram
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat. (2009b). *Situasi Ketenagakerjaan Nusa Tenggara Barat Februari Tahun 2009*. Berita Resmi Statistik – Mei 2009. Mataram
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat. (2009c). *Tingkat Kemiskinan di Provinsi NTB Tahun 2009*. Berita Resmi Statistik – Juli 2009. Mataram
- Bates, Timothy. (1976). *Involuntary Underemployment among Heads of Household*. Institute of Research and Poverty, Wisconsin University. Madison
- Bellante, Don and Mark Jackson. (1990). *Ekonomi Ketenagakerjaan*. (Wimandjaja K. Liotohe & M. Yasin, Penerjemah). Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Depok
- Berger, Mark., Chris Bollinger, Paul Coomes and Ron Langley. (2003). *Underemployment in Kentucky Counties*. Kentucky Annual Economic Report, 2003. Kentucky, USA
- Binardjo, Goro. (1997). *Analisis Mencari Kerja di Jawa Tengah (Pendekatan Search Theory)*. Tesis Program Pasca Sarjana Kependudukan dan Ketenagakerjaan Universitas Indonesia. Depok: Universitas Indonesia.
- Cendrawati, Nur Kartika. (2000). *Analisis Pengangguran di Indonesia Berdasarkan Data SAKERTI 1993*. Tesis Program Pasca Sarjana Kependudukan dan Ketenagakerjaan Universitas Indonesia. Depok: Universitas Indonesia
- Coulon, Allana. (2002). *Underemployment Amongst New Zealand Graduate: Reflection from The Lived Experiences*. New Zealand Journal of Industrial Relations; Oct 2002; 27, 3; ABI/INFORM Global pg. 283 – 297. New Zealand
- Cross, Jennifer More. (2007). *The New Economic, Stress and Health: An Examination of Underemployment Trajectories Over The Adult Life Course*. Dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor in Philosophy. Duke University
- Dhanani, Shafiq. (2004). *Unemployment and Underemployment in Indonesia, 1976-2000: Paradoxes and Issues*. International Labour Organization Office, Geneva, Switzerland
- Dooley, D dan J. Prause. (2004). *The Social Cost of Underemployment: Inadequate Employment as Disguised Unemployment*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Farooq, Shujaat and Usman Ahmet. (2007). *Underemployment, Education, and Job Satisfaction*. The Pakistan Development Review 46 : 4 Part II (Winter 2007) pp. 895–907. Pakistan

- Feather, Peter M. and W. Douglas Shaw. (2000). *The Demand of Leisure Time in Presence of Constraint Work Hour*. *Economic Inquiry*; Oct 2000; 38, 4; ABI/INFORM Global pg. 651 – 661. Western Economic Association International
- Fei Ling Wang. (1998). *Floater, Moonlighter and The Underemployed: A National Labor Market with Chinese Characteristic*. *Journal of Contemporary China*; Nov 1998; 7, 19; Academic Research Library pg 459 – 475
- Findeis, Jill L., Shield Martin and Sundar Shresta. (2009). *Determining Policy Options for Reducing Unemployment and Underemployment in Rural Pennsylvania*. Studies on Unemployment and Underemployment in Rural Pennsylvania, March 2009. Department of Agricultural Economics and Rural Sociology, the Center for Economic and Community Development, and the Population Research Institute, Pennsylvania State University
- Golden, Lonnie and Tesfayi Gebreselassie. (2007). *Overemployment and Underemployment Mismatches in the US Work Force: The Preference to Exchange Income for Fewer Work Hours*. Forthcoming Monthly Labor Review April 2007 Issue. USA
- Görg, Holger and Eric Eric. (2001). *The Incidence of Visible Underemployment: Evidence for Trinidad and Tobago*. CREDIT Research Paper No. 01/10. Centre for Research in Economic Development and International Trade, University of Nottingham
- Hong, Philip Young P and Shanta Pandey. (2007). *Human Capital as Structural Vulnerability of US Poverty*. Equal Opportunities International: equality, diversity and inclusion Vol. 26 No. 1, 2007 pp. 18-43. Emerald Group Publishing Ltd. USA
- Hosmer, David W. and Stanley Lemeshow. (2000). *Applied Logistic Regression Second Edition*. John Wiley & Sons Inc, 2000. USA
- Husmanns, Ralf, Farhad Mehran, and Vijay Verma. (1990). *Surveys of Economically Active Population, Employment, Unemployment, and Underemployment: An ILO Manual on Concepts and Methods*. International Labour Office, Geneva.
- Jensen, Leif., Jill L. Findeis, Wan Ling Hsu and John P. Schachter. (1999). *Slipping Into And Out of Underemployment: Another Disadvantage for Nonmetropolitan Workers?* *Rural Sociology*. College Station: Sep 1999. Vol. 64, Edisi 3. Institute, The Pennsylvania State University, University Park, Pennsylvania
- Livingstone, David W. (2003). *Hidden Dimension of Work and Learning: The Significance of Unpaid Work and Informal Learning in Global Capitalism*. *Journal of Workplace Learning*; 2003; 15, 7/8; ABI/INFORM Global pg. 359 – 367. Toronto, Canada
- Liu, Eva. dan Jackie Wu. (1999, February 4). *The Measurement of Unemployment and Underemployment*. Research and Library Services Division Legislative Council Secretariat. Hong Kong.

- Long, J. Scott. (1997). *Regression Model for Categorical and Limited Dependent Variables*. Sage Publication Inc, 1997. USA
- Nabi, Ghulam R. (2003). *Graduate Employment and Underemployment: Opportunity of Skill Use and Career Experiences Amongst Recent Business Graduate*. Education & Training; 2003; 45, 7; ABI/INFORM Global pg. 371 – 382. Leeds, UK
- Nair, N. Gopalakrishnan. (2004). *Measurement of Employment, Unemployment, and Underemployment*. Discussion Paper No. 72. Kerala Research Programme on Local Level Development Centre for Development Studies Thiruvananthapuram. India
- O'Hare, William P., Kelvin M. Pollard and Amy R. Ritualo. (2004). *Educational and Economic Characteristics*. Siegel, Jacob S. and David A. Swanson (Ed.). *The Methods and Materials of Demography (2nd Edition)* (pg. 211 – 251). Elsevier Academic Press. London, UK
- Panter, John and Dough Tweedy. (2007). *Measuring Underemployment in Idaho*. Idaho Commerce and Labor. Idaho – USA
- Purwaningsih, Yunastiti dan Murtiningsih. (2006). *Determinan Jam Kerja Pekerja di Propinsi Jawa Tengah*. Empirika, Vol. 19 No. 1, Juni 2006
- Ruiz-Quintanilla, S. Antonio and Rita Claes. (1996). *Determinants of Underemployment of Young Adults: A Multi Country Study*. Industrial & Labor Relations Review; Apr 1996; 49, 3; ABI/INFORM Global pg. 424 – 438. Cornell University
- Saddewisasi Wyati. (1997). *Studi Tentang Jam Kerja Pekerja Ibu Rumah Tangga di Indonesia (Analisis Data Sakerti 1993)*. Tesis Program Pasca Sarjana Kependudukan dan Ketenagakerjaan Universitas Indonesia. Depok: Universitas Indonesia
- Schultz, Paul T. (1981). *Economics of Population*. Addison – Wesley Publishing Company, Inc. Philippines.
- Siregar, Hermanto., Tatan Sukwika. (n.d.). *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pasar Tenaga Kerja dan Implikasi Kebijakannya Terhadap Sektor Pertanian di Kabupaten Bogor*. Bogor: Institut Pertanian Bogor. <[http://ejournal.unud.ac.id/abstrak/\(1\)%20soca-hermanto-tatab-faktoor-faktor\(1\).pdf](http://ejournal.unud.ac.id/abstrak/(1)%20soca-hermanto-tatab-faktoor-faktor(1).pdf)>
- Slack Tim and Leif Jensen. (2008). *Employment Hardship Among Older Workers: Does Residential and Gender Inequality Extend into Older Age?* The Journals of Gerontology; Jan 2008; 63B, 1; Academic Research Library pg. 815 – 824. The Gerontological Society of America.
- State Institute of Statistics (SIS) (2001), *Household Labor Force Survey Results 2000*, October 2001, Ankara: State Institute of Statistics.
- Sugiharso. (1992). *Teori Permintaan dan Penawaran Pekerja*. Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Depok: Universitas Indonesia.

- Suratman, Eddy. (1994). *Determinan Mencari Kerja di Kalimantan: Suatu Analisa Data Sakernas 1992 dengan Pendekatan Search Theory*. Tesis Program Pasca Sarjana Kependudukan dan Ketenagakerjaan Universitas Indonesia. Depok: Universitas Indonesia
- Sutomo.(1996). *Analisis Jam Kerja Pekerja di Propinsi Jawa Tengah 1987 (Suatu Analisis Data Sakernas 1987)*. Tesis Program Pasca Sarjana Kependudukan dan Ketenagakerjaan Universitas Indonesia. Depok: Universitas Indonesia
- Taşçi, H. Mehmet. (2005). *Recent Trends in Underemployment and Determinants of Underemployment in Turkey*. Department of Economics Middle East Technical University, June 2005. Ankara, Turkey
- Todaro, Michael P. (1997). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga (Edisi Keenam)*. (Haris Munandar, Penerjemah). Jakarta : Airlangga
- VEDP. (n.d.). *Underemployment Estimates For Virginia's Regions And Localities*. Research Division of Virginia Economic Development Partnership (VEDP). Virginia, USA. <www.virginiaallies.org/assets/files/MethodologyUnderemployment.pdf>
- Weststar, Johanna Lies. (2007). *Studies of Learning and Works: Job Control, Participation in Learning and Underemployment*. A thesis submitted in conformity with the requirements for the degree of Doctor of Philosophy. University of Toronto. Canada, 2007
- Wiebe, Frank. (1996). *Income Insecurity and Underemployment in Indonesia's Informal Sector*. The World Bank East Asia and Pacific Country Department III Indonesia Policy and Operations Division, August 1996. Washington
- Wirakartakusumah, M. Djuhari. (1988). *Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja, Analisis Ekonomi Mikro*. Jakarta: PAU Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Yerger, David B and Jack D. Julian. (2009). *Assessing Rural Underemployment and Unemployment in Pennsylvania*. Studies on Unemployment and Underemployment in Rural Pennsylvania, March 2009. Department of Economics, Indiana University of Pennsylvania
- Zabel, J. (1993). *The Relationship between Hours of Work and Labor Force Participation in Four Models of Labor Supply Behavior*. Journal of Labor Economics pg. 387 – 416.

Dependent Variable: Y1

Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing)

Date: 03/20/10 Time: 08:56

Sample: 1 14259 IF STATUS_A=1 OR STATUS_A=4 AND D_AGE<=4

Included observations: 7796

Convergence achieved after 4 iterations

Covariance matrix computed using second derivatives

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
SEX=1,RESIDEN=1,D_EDUC=1	-0.043	0.059	-0.733	0.464
SEX=1,RESIDEN=1,D_EDUC=2	-0.097	0.092	-1.053	0.293
SEX=1,RESIDEN=1,D_EDUC=3	-0.251	0.252	-0.997	0.319
SEX=1,RESIDEN=2,D_EDUC=1	-0.901	0.090	-10.055	0.000
SEX=1,RESIDEN=2,D_EDUC=2	-0.975	0.103	-9.436	0.000
SEX=1,RESIDEN=2,D_EDUC=3	-1.133	0.187	-6.075	0.000
SEX=2,RESIDEN=1,D_EDUC=1	-0.356	0.050	-7.161	0.000
SEX=2,RESIDEN=1,D_EDUC=2	-0.379	0.061	-6.237	0.000
SEX=2,RESIDEN=1,D_EDUC=3	-0.721	0.203	-3.546	0.000
SEX=2,RESIDEN=2,D_EDUC=1	-0.983	0.083	-11.884	0.000
SEX=2,RESIDEN=2,D_EDUC=2	-1.394	0.080	-17.468	0.000
SEX=2,RESIDEN=2,D_EDUC=3	-1.594	0.173	-9.193	0.000
Mean dependent var	0.356721	S.D. dependent var	0.479062	
S.E. of regression	0.468315	Akaike info criterion	1.258807	
Sum squared resid	1707.177	Schwarz criterion	1.269522	
Log likelihood	-4894.83	Hannan-Quinn criter	1.262479	
Avg. log likelihood	-0.62786			
Obs with Dep=0	5015	Total obs	7796	
Obs with Dep=1	2781			

EDUC (1=2=3)
 Wald Test:
 Equation: AK1_SM1

Test Statistic	Value	df	Probability
F-statistic	2.839	(8, 7784)	0.004
Chi-square	22.716	8	0.004

Null Hypothesis Summary:

Normalized Restriction Value	Std. Err.	
C(1) - C(3)	0.208316	0.258714
C(2) - C(3)	0.154804	0.268137
C(4) - C(6)	0.231776	0.206942
C(5) - C(6)	0.1581	0.213228
C(7) - C(9)	0.364308	0.209204
C(8) - C(9)	0.341057	0.212115
C(10) - C(12)	0.611631	0.192129
C(11) - C(12)	0.200406	0.190903

Restrictions are linear in coefficients.

Dependent Variable: Y1

Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing)

Date: 03/17/10 Time: 12:27

Sample: 1 14259 IF STATUS_A=1 OR STATUS_A=4 AND D_AGE<=4

Included observations: 7796

Convergence achieved after 4 iterations

Covariance matrix computed using second derivatives

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
C	-1.394	0.080	-17.468	0.000
SEX=1	0.419	0.131	3.209	0.001
SEX=1,RESIDEN=1	0.878	0.138	6.360	0.000
SEX=2,RESIDEN=1	1.014	0.100	10.109	0.000
SEX=1,RESIDEN=1,D_EDUC=1	0.054	0.109	0.492	0.623
SEX=1,RESIDEN=1,D_EDUC=3	-0.155	0.268	-0.577	0.564
SEX=1,RESIDEN=2,D_EDUC=1	0.074	0.137	0.539	0.590
SEX=1,RESIDEN=2,D_EDUC=3	-0.158	0.213	-0.741	0.458
SEX=2,RESIDEN=1,D_EDUC=1	0.023	0.079	0.296	0.767
SEX=2,RESIDEN=1,D_EDUC=3	-0.341	0.212	-1.608	0.108
SEX=2,RESIDEN=2,D_EDUC=1	0.411	0.115	3.579	0.000
SEX=2,RESIDEN=2,D_EDUC=3	-0.200	0.191	-1.050	0.294
McFadden R-squared	0.036291	Mean dependent va	0.356721	
S.D. dependent var	0.479062	S.E. of regression	0.468315	
Akaike info criterion	1.258807	Sum squared resid	1707.177	
Schwarz criterion	1.269522	Log likelihood	-4894.83	
Hannan-Quinn criter.	1.262479	Restr. log likelihood	-5079.16	
LR statistic	368.6599	Avg. log likelihood	-0.62786	
Prob(LR statistic)	0.0000			
Obs with Dep=0	5015	Total obs	7796	
Obs with Dep=1	2781			

Dependent Variable: Y1

Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing)

Date: 03/20/10 Time: 08:59

Sample: 1 14259 IF STATUS_A=1 OR STATUS_A=4 AND D_AGE<=4

Included observations: 7796

Convergence achieved after 4 iterations

Covariance matrix computed using second derivatives

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
C	-1.394	0.080	-17.468	0.000
D_EDUC=1	0.411	0.115	3.579	0.000
D_EDUC=3	-0.200	0.191	-1.050	0.294
D_EDUC=1,SEX=1	0.081	0.122	0.667	0.505
D_EDUC=2,SEX=1	0.419	0.131	3.209	0.001
D_EDUC=3,SEX=1	0.461	0.255	1.811	0.070
SEX=1,RESIDEN=1,D_EDUC=1	0.858	0.107	8.012	0.000
SEX=1,RESIDEN=1,D_EDUC=2	0.878	0.138	6.360	0.000
SEX=1,RESIDEN=1,D_EDUC=3	0.882	0.314	2.813	0.005
SEX=2,RESIDEN=1,D_EDUC=1	0.626	0.097	6.492	0.000
SEX=2,RESIDEN=1,D_EDUC=2	1.014	0.100	10.109	0.000
SEX=2,RESIDEN=1,D_EDUC=3	0.874	0.267	3.271	0.001
McFadden R-squared	0.036291	Mean dependent va	0.356721	
S.D. dependent var	0.479062	S.E. of regression	0.468315	
Akaike info criterion	1.258807	Sum squared resid	1707.177	
Schwarz criterion	1.269522	Log likelihood	-4894.83	
Hannan-Quinn criter.	1.262479	Restr. log likelihood	-5079.16	
LR statistic	368.6599	Avg. log likelihood	-0.62786	
Prob(LR statistic)	0.0000			
Obs with Dep=0	5015	Total obs	7796	
Obs with Dep=1	2781			

Dependent Variable: Y1

Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing)

Date: 03/20/10 Time: 09:00

Sample: 1 14259 IF STATUS_A=1 OR STATUS_A=4 AND D_AGE<=4

Included observations: 7796

Convergence achieved after 4 iterations

Covariance matrix computed using second derivatives

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
C	-1.394	0.080	-17.468	0.000
D_EDUC=1	0.411	0.115	3.579	0.000
D_EDUC=3	-0.200	0.191	-1.050	0.294
D_EDUC=1,RESIDEN=1	0.626	0.097	6.492	0.000
D_EDUC=2,RESIDEN=1	1.014	0.100	10.109	0.000
D_EDUC=3,RESIDEN=1	0.874	0.267	3.271	0.001
SEX=1,RESIDEN=1,D_EDUC=1	0.313	0.077	4.073	0.000
SEX=1,RESIDEN=1,D_EDUC=2	0.283	0.110	2.572	0.010
SEX=1,RESIDEN=1,D_EDUC=3	0.469	0.324	1.450	0.147
SEX=1,RESIDEN=2,D_EDUC=1	0.081	0.122	0.667	0.505
SEX=1,RESIDEN=2,D_EDUC=2	0.419	0.131	3.209	0.001
SEX=1,RESIDEN=2,D_EDUC=3	0.461	0.255	1.811	0.070
McFadden R-squared	0.036291	Mean dependent va	0.356721	
S.D. dependent var	0.479062	S.E. of regression	0.468315	
Akaike info criterion	1.258807	Sum squared resid	1707.177	
Schwarz criterion	1.269522	Log likelihood	-4894.83	
Hannan-Quinn criter.	1.262479	Restr. log likelihood	-5079.16	
LR statistic	368.6599	Avg. log likelihood	-0.62786	
Prob(LR statistic)	0.0000			
Obs with Dep=0	5015	Total obs	7796	
Obs with Dep=1	2781			

Dependent Variable: Y2

Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing)

Date: 03/05/10 Time: 15:45

Sample: 1 17774 IF STATUS_A = 2 OR STATUS_A = 4 AND D_AGE<=4

Included observations: 5634

Convergence achieved after 5 iterations

Covariance matrix computed using second derivatives

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
SEX=1,RESIDEN=1,D_EDUC=1	-2.309	0.137	-16.918	0.000
SEX=1,RESIDEN=1,D_EDUC=2	-1.444	0.145	-9.976	0.000
SEX=1,RESIDEN=1,D_EDUC=3	-1.504	0.391	-3.848	0.000
SEX=1,RESIDEN=2,D_EDUC=1	-2.600	0.183	-14.192	0.000
SEX=1,RESIDEN=2,D_EDUC=2	-1.478	0.125	-11.780	0.000
SEX=1,RESIDEN=2,D_EDUC=3	-1.998	0.266	-7.500	0.000
SEX=2,RESIDEN=1,D_EDUC=1	-2.654	0.125	-21.313	0.000
SEX=2,RESIDEN=1,D_EDUC=2	-2.130	0.119	-17.901	0.000
SEX=2,RESIDEN=1,D_EDUC=3	-2.512	0.424	-5.919	0.000
SEX=2,RESIDEN=2,D_EDUC=1	-2.675	0.170	-15.739	0.000
SEX=2,RESIDEN=2,D_EDUC=2	-1.597	0.087	-18.420	0.000
SEX=2,RESIDEN=2,D_EDUC=3	-2.511	0.260	-9.658	0.000
Mean dependent var	0.109869	S.D. dependent var	0.312754	
S.E. of regression	0.309472	Akaike info criterion	0.674817	
Sum squared resid	538.4345	Schwarz criterion	0.688952	
Log likelihood	-1888.96	Hannan-Quinn criter	0.679741	
Avg. log likelihood	-0.33528			
Obs with Dep=0	5015	Total obs	5634	
Obs with Dep=1	619			

EDUC (1=2=3)

Wald Test:

Equation: AK2_SM1

Test Statistic	Value	df	Probability
F-statistic	11.692	(8, 5622)	0.000
Chi-square	93.535	8	0.000

Null Hypothesis Summary:

Normalized Restriction Value	Std. Err.
C(1) - C(3)	-0.80526 0.414017
C(2) - C(3)	0.060154 0.416806
C(4) - C(6)	-0.60228 0.323334
C(5) - C(6)	0.519994 0.294481
C(7) - C(9)	-0.14216 0.442371
C(8) - C(9)	0.381966 0.440843
C(10) - C(12)	-0.16447 0.310589
C(11) - C(12)	0.913756 0.274029

Restrictions are linear in coefficients.

Dependent Variable: Y2

Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing)

Date: 03/05/10 Time: 15:54

Sample: 1 17774 IF STATUS_A = 2 OR STATUS_A = 4 AND D_AGE<=4

Included observations: 5634

Convergence achieved after 5 iterations

Covariance matrix computed using second derivatives

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
C	-1.597	0.087	-18.420	0.000
SEX=1	0.119	0.153	0.779	0.436
SEX=1,RESIDEN=1	0.034	0.192	0.178	0.858
SEX=2,RESIDEN=1	-0.533	0.147	-3.623	0.000
SEX=1,RESIDEN=1,D_EDUC=1	-0.865	0.199	-4.350	0.000
SEX=1,RESIDEN=1,D_EDUC=3	-0.060	0.417	-0.144	0.885
SEX=1,RESIDEN=2,D_EDUC=1	-1.122	0.222	-5.054	0.000
SEX=1,RESIDEN=2,D_EDUC=3	-0.520	0.294	-1.766	0.077
SEX=2,RESIDEN=1,D_EDUC=1	-0.524	0.172	-3.043	0.002
SEX=2,RESIDEN=1,D_EDUC=3	-0.382	0.441	-0.866	0.386
SEX=2,RESIDEN=2,D_EDUC=1	-1.078	0.191	-5.651	0.000
SEX=2,RESIDEN=2,D_EDUC=3	-0.914	0.274	-3.335	0.001
McFadden R-squared	0.031661	Mean dependent va	0.109869	
S.D. dependent var	0.312754	S.E. of regression	0.309472	
Akaike info criterion	0.674817	Sum squared resid	538.4345	
Schwarz criterion	0.688952	Log likelihood	-1888.96	
Hannan-Quinn criter.	0.679741	Restr. log likelihood	-1950.72	
LR statistic	123.5233	Avg. log likelihood	-0.33528	
Prob(LR statistic)	0.0000			
Obs with Dep=0	5015	Total obs	5634	
Obs with Dep=1	619			

Dependent Variable: Y2

Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing)

Date: 03/05/10 Time: 15:58

Sample: 1 17774 IF STATUS_A = 2 OR STATUS_A = 4 AND D_AGE<=4

Included observations: 5634

Convergence achieved after 5 iterations

Covariance matrix computed using second derivatives

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
C	-1.597	0.087	-18.420	0.000
SEX=1	0.119	0.153	0.779	0.436
SEX=1,D_EDUC=1	-1.122	0.222	-5.054	0.000
SEX=1,D_EDUC=3	-0.520	0.294	-1.766	0.077
SEX=2,D_EDUC=1	-1.078	0.191	-5.651	0.000
SEX=2,D_EDUC=3	-0.914	0.274	-3.335	0.001
SEX=1,RESIDEN=1,D_EDUC=1	0.291	0.228	1.274	0.203
SEX=1,RESIDEN=1,D_EDUC=2	0.034	0.192	0.178	0.858
SEX=1,RESIDEN=1,D_EDUC=3	0.494	0.473	1.044	0.296
SEX=2,RESIDEN=1,D_EDUC=1	0.021	0.211	0.098	0.922
SEX=2,RESIDEN=1,D_EDUC=2	-0.533	0.147	-3.623	0.000
SEX=2,RESIDEN=1,D_EDUC=3	-0.002	0.498	-0.003	0.997
McFadden R-squared	0.031661	Mean dependent va	0.109869	
S.D. dependent var	0.312754	S.E. of regression	0.309472	
Akaike info criterion	0.674817	Sum squared resid	538.4345	
Schwarz criterion	0.688952	Log likelihood	-1888.96	
Hannan-Quinn criter.	0.679741	Restr. log likelihood	-1950.72	
LR statistic	123.5233	Avg. log likelihood	-0.33528	
Prob(LR statistic)	0.0000			
Obs with Dep=0	5015	Total obs	5634	
Obs with Dep=1	619			

Dependent Variable: Y2

Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing)

Date: 03/05/10 Time: 16:02

Sample: 1 17774 IF STATUS_A = 2 OR STATUS_A = 4 AND D_AGE<=4

Included observations: 5634

Convergence achieved after 5 iterations

Covariance matrix computed using second derivatives

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
C	-1.597	0.087	-18.420	0.000
RESIDEN=1	-0.533	0.147	-3.623	0.000
RESIDEN=1,D_EDUC=1	-0.524	0.172	-3.043	0.002
RESIDEN=1,D_EDUC=3	-0.382	0.441	-0.866	0.386
RESIDEN=2,D_EDUC=1	-1.078	0.191	-5.651	0.000
RESIDEN=2,D_EDUC=3	-0.914	0.274	-3.335	0.001
SEX=1,RESIDEN=1,D_EDUC=1	0.345	0.185	1.868	0.062
SEX=1,RESIDEN=1,D_EDUC=2	0.686	0.187	3.663	0.000
SEX=1,RESIDEN=1,D_EDUC=3	1.008	0.577	1.747	0.081
SEX=1,RESIDEN=2,D_EDUC=1	0.075	0.250	0.299	0.765
SEX=1,RESIDEN=2,D_EDUC=2	0.119	0.153	0.779	0.436
SEX=1,RESIDEN=2,D_EDUC=3	0.513	0.372	1.377	0.169
McFadden R-squared	0.031661	Mean dependent va	0.109869	
S.D. dependent var	0.312754	S.E. of regression	0.309472	
Akaike info criterion	0.674817	Sum squared resid	538.4345	
Schwarz criterion	0.688952	Log likelihood	-1888.96	
Hannan-Quinn criter.	0.679741	Restr. log likelihood	-1950.72	
LR statistic	123.5233	Avg. log likelihood	-0.33528	
Prob(LR statistic)	0.0000			
Obs with Dep=0	5015	Total obs	5634	
Obs with Dep=1	619			

Dependent Variable: Y1

Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing)

Date: 03/20/10 Time: 09:01

Sample: 1 14259 IF STATUS_A=1 OR STATUS_A=4 AND D_AGE<=4

Included observations: 7796

Convergence achieved after 3 iterations

Covariance matrix computed using second derivatives

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
SEX=1,KAWIN=1,D_EDUC=1	-0.219	0.055	-3.983	0.000
SEX=1,KAWIN=1,D_EDUC=2	-0.602	0.085	-7.044	0.000
SEX=1,KAWIN=1,D_EDUC=3	-0.877	0.184	-4.779	0.000
SEX=1,KAWIN=2,D_EDUC=1	-0.648	0.101	-6.390	0.000
SEX=1,KAWIN=2,D_EDUC=2	-0.353	0.109	-3.248	0.001
SEX=1,KAWIN=2,D_EDUC=3	-0.792	0.246	-3.220	0.001
SEX=2,KAWIN=1,D_EDUC=1	-0.564	0.047	-12.072	0.000
SEX=2,KAWIN=1,D_EDUC=2	-0.913	0.058	-15.862	0.000
SEX=2,KAWIN=1,D_EDUC=3	-1.325	0.146	-9.047	0.000
SEX=2,KAWIN=2,D_EDUC=1	-0.409	0.100	-4.114	0.000
SEX=2,KAWIN=2,D_EDUC=2	-0.565	0.083	-6.807	0.000
SEX=2,KAWIN=2,D_EDUC=3	-1.059	0.281	-3.761	0.000
Mean dependent var	0.356721	S.D. dependent var	0.479062	
S.E. of regression	0.475731	Akaike info criterion	1.290571	
Sum squared resid	1761.678	Schwarz criterion	1.301286	
Log likelihood	-5018.65	Hannan-Quinn criteri	1.294243	
Avg. log likelihood	-0.64375			
Obs with Dep=0	5015	Total obs	7796	
Obs with Dep=1	2781			

EDUC (1=2=3)

Wald Test:

Equation: AK1_SM2

Test Statistic	Value	df	Probability
F-statistic	9.010	(8, 7784)	0.000
Chi-square	72.080	8	0.000

Null Hypothesis Summary:

Normalized Restriction Value	Std. Err.
C(1) - C(3)	0.658342 0.191667
C(2) - C(3)	0.275612 0.202513
C(4) - C(6)	0.144003 0.26613
C(5) - C(6)	0.439041 0.268993
C(7) - C(9)	0.761564 0.15373
C(8) - C(9)	0.412164 0.157374
C(10) - C(12)	0.649181 0.298558
C(11) - C(12)	0.493991 0.293447

Restrictions are linear in coefficients.

Dependent Variable: Y1

Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing)

Date: 03/17/10 Time: 12:30

Sample: 1 14259 IF STATUS_A=1 OR STATUS_A=4 AND D_AGE<=4

Included observations: 7796

Convergence achieved after 4 iterations

Covariance matrix computed using second derivatives

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
C	-0.565	0.083	-6.807	0.000
SEX=1	0.211	0.137	1.546	0.122
SEX=1,KAWIN=1	-0.249	0.138	-1.798	0.072
SEX=2,KAWIN=1	-0.348	0.101	-3.451	0.001
SEX=1,KAWIN=1,D_EDUC=1	0.383	0.102	3.766	0.000
SEX=1,KAWIN=1,D_EDUC=3	-0.276	0.203	-1.361	0.174
SEX=1,KAWIN=2,D_EDUC=1	-0.295	0.149	-1.984	0.047
SEX=1,KAWIN=2,D_EDUC=3	-0.439	0.269	-1.632	0.103
SEX=2,KAWIN=1,D_EDUC=1	0.349	0.074	4.715	0.000
SEX=2,KAWIN=1,D_EDUC=3	-0.412	0.157	-2.619	0.009
SEX=2,KAWIN=2,D_EDUC=1	0.155	0.130	1.198	0.231
SEX=2,KAWIN=2,D_EDUC=3	-0.494	0.293	-1.683	0.092
McFadden R-squared	0.011914	Mean dependent va	0.356721	
S.D. dependent var	0.479062	S.E. of regression	0.475731	
Akaike info criterion	1.290571	Sum squared resid	1761.678	
Schwarz criterion	1.301286	Log likelihood	-5018.65	
Hannan-Quinn criter.	1.294243	Restr. log likelihood	-5079.16	
LR statistic	121.0296	Avg. log likelihood	-0.64375	
Prob(LR statistic)	0.0000			
Obs with Dep=0	5015	Total obs	7796	
Obs with Dep=1	2781			

Dependent Variable: Y1

Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing)

Date: 03/20/10 Time: 09:03

Sample: 1 14259 IF STATUS_A=1 OR STATUS_A=4 AND D_AGE<=4

Included observations: 7796

Convergence achieved after 4 iterations

Covariance matrix computed using second derivatives

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
C	-0.565	0.083	-6.807	0.000
D_EDUC=1	0.155	0.130	1.198	0.231
D_EDUC=3	-0.494	0.293	-1.683	0.092
D_EDUC=1,SEX=1	-0.239	0.142	-1.680	0.093
D_EDUC=2,SEX=1	0.211	0.137	1.546	0.122
D_EDUC=3,SEX=1	0.266	0.374	0.712	0.476
SEX=1,KAWIN=1,D_EDUC=1	0.429	0.115	3.719	0.000
SEX=1,KAWIN=1,D_EDUC=2	-0.249	0.138	-1.798	0.072
SEX=1,KAWIN=1,D_EDUC=3	-0.085	0.307	-0.278	0.781
SEX=2,KAWIN=1,D_EDUC=1	-0.154	0.110	-1.402	0.161
SEX=2,KAWIN=1,D_EDUC=2	-0.348	0.101	-3.451	0.001
SEX=2,KAWIN=1,D_EDUC=3	-0.267	0.317	-0.840	0.401
McFadden R-squared	0.011914	Mean dependent va	0.356721	
S.D. dependent var	0.479062	S.E. of regression	0.475731	
Akaike info criterion	1.290571	Sum squared resid	1761.678	
Schwarz criterion	1.301286	Log likelihood	-5018.65	
Hannan-Quinn criter.	1.294243	Restr. log likelihood	-5079.16	
LR statistic	121.0296	Avg. log likelihood	-0.64375	
Prob(LR statistic)	0.0000			
Obs with Dep=0	5015	Total obs	7796	
Obs with Dep=1	2781			

Dependent Variable: Y1

Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing)

Date: 03/20/10 Time: 09:04

Sample: 1 14259 IF STATUS_A=1 OR STATUS_A=4 AND D_AGE<=4

Included observations: 7796

Convergence achieved after 4 iterations

Covariance matrix computed using second derivatives

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
C	-0.565	0.083	-6.807	0.000
D_EDUC=1	0.155	0.130	1.198	0.231
D_EDUC=3	-0.494	0.293	-1.683	0.092
D_EDUC=1,KAWIN=1	-0.154	0.110	-1.402	0.161
D_EDUC=2,KAWIN=1	-0.348	0.101	-3.451	0.001
D_EDUC=3,KAWIN=1	-0.267	0.317	-0.840	0.401
SEX=1,KAWIN=1,D_EDUC=1	0.344	0.072	4.775	0.000
SEX=1,KAWIN=1,D_EDUC=2	0.311	0.103	3.020	0.003
SEX=1,KAWIN=1,D_EDUC=3	0.448	0.235	1.906	0.057
SEX=1,KAWIN=2,D_EDUC=1	-0.239	0.142	-1.680	0.093
SEX=1,KAWIN=2,D_EDUC=2	0.211	0.137	1.546	0.122
SEX=1,KAWIN=2,D_EDUC=3	0.266	0.374	0.712	0.476
McFadden R-squared	0.011914	Mean dependent va	0.356721	
S.D. dependent var	0.479062	S.E. of regression	0.475731	
Akaike info criterion	1.290571	Sum squared resid	1761.678	
Schwarz criterion	1.301286	Log likelihood	-5018.65	
Hannan-Quinn criter.	1.294243	Restr. log likelihood	-5079.16	
LR statistic	121.0296	Avg. log likelihood	-0.64375	
Prob(LR statistic)	0.0000			
Obs with Dep=0	5015	Total obs	7796	
Obs with Dep=1	2781			

Dependent Variable: Y2

Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing)

Date: 03/05/10 Time: 16:18

Sample: 1 17774 IF STATUS_A = 2 OR STATUS_A = 4 AND D_AGE<=4

Included observations: 5634

Convergence achieved after 5 iterations

Covariance matrix computed using second derivatives

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
SEX=1,KAWIN=1,D_EDUC=1	-2.566	0.137	-18.671	0.000
SEX=1,KAWIN=1,D_EDUC=2	-1.864	0.139	-13.435	0.000
SEX=1,KAWIN=1,D_EDUC=3	-1.907	0.277	-6.892	0.000
SEX=1,KAWIN=2,D_EDUC=1	-2.119	0.182	-11.675	0.000
SEX=1,KAWIN=2,D_EDUC=2	-0.979	0.134	-7.326	0.000
SEX=1,KAWIN=2,D_EDUC=3	-1.773	0.361	-4.918	0.000
SEX=2,KAWIN=1,D_EDUC=1	-3.135	0.138	-22.764	0.000
SEX=2,KAWIN=1,D_EDUC=2	-2.630	0.119	-22.140	0.000
SEX=2,KAWIN=1,D_EDUC=3	-3.100	0.323	-9.590	0.000
SEX=2,KAWIN=2,D_EDUC=1	-1.602	0.153	-10.434	0.000
SEX=2,KAWIN=2,D_EDUC=2	-0.900	0.093	-9.691	0.000
SEX=2,KAWIN=2,D_EDUC=3	-1.407	0.322	-4.368	0.000
Mean dependent var	0.109869	S.D. dependent var	0.312754	
S.E. of regression	0.302104	Akaike info criterion	0.636358	
Sum squared resid	513.1034	Schwarz criterion	0.650494	
Log likelihood	-1780.62	Hannan-Quinn criter	0.641283	
Avg. log likelihood	-0.31605			
Obs with Dep=0	5015	Total obs	5634	
Obs with Dep=1	619			

EDUC (1=2=3)

Wald Test:

Equation: AK2_SM2

Test Statistic	Value	df	Probability
F-statistic	8.154	(8, 5622)	0.000
Chi-square	65.235	8	0.000

Null Hypothesis Summary:

Normalized Restriction Value	Std. Err.
C(1) - C(3)	-0.65923 0.308965
C(2) - C(3)	0.04299 0.309545
C(4) - C(6)	-0.34602 0.403639
C(5) - C(6)	0.793863 0.384505
C(7) - C(9)	-0.0354 0.351392
C(8) - C(9)	0.470478 0.344399
C(10) - C(12)	-0.19465 0.356794
C(11) - C(12)	0.506702 0.335217

Restrictions are linear in coefficients.

Dependent Variable: Y2

Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing)

Date: 03/05/10 Time: 16:25

Sample: 1 17774 IF STATUS_A = 2 OR STATUS_A = 4 AND D_AGE<=4

Included observations: 5634

Convergence achieved after 5 iterations

Covariance matrix computed using second derivatives

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
C	-0.900	0.093	-9.691	0.000
SEX=1	-0.079	0.163	-0.485	0.628
SEX=1,KAWIN=1	-0.885	0.193	-4.593	0.000
SEX=2,KAWIN=1	-1.729	0.151	-11.470	0.000
SEX=1,KAWIN=1,D_EDUC=1	-0.702	0.195	-3.596	0.000
SEX=1,KAWIN=1,D_EDUC=3	-0.043	0.310	-0.139	0.890
SEX=1,KAWIN=2,D_EDUC=1	-1.140	0.225	-5.057	0.000
SEX=1,KAWIN=2,D_EDUC=3	-0.794	0.385	-2.065	0.039
SEX=2,KAWIN=1,D_EDUC=1	-0.506	0.182	-2.781	0.005
SEX=2,KAWIN=1,D_EDUC=3	-0.470	0.344	-1.366	0.172
SEX=2,KAWIN=2,D_EDUC=1	-0.701	0.179	-3.909	0.000
SEX=2,KAWIN=2,D_EDUC=3	-0.507	0.335	-1.512	0.131
McFadden R-squared	0.087197	Mean dependent va	0.109869	
S.D. dependent var	0.312754	S.E. of regression	0.302104	
Akaike info criterion	0.636358	Sum squared resid	513.1034	
Schwarz criterion	0.650494	Log likelihood	-1780.62	
Hannan-Quinn criter.	0.641283	Restr. log likelihood	-1950.72	
LR statistic	340.1958	Avg. log likelihood	-0.31605	
Prob(LR statistic)	0.0000			
Obs with Dep=0	5015	Total obs	5634	
Obs with Dep=1	619			

Dependent Variable: Y2

Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing)

Date: 03/05/10 Time: 16:29

Sample: 1 17774 IF STATUS_A = 2 OR STATUS_A = 4 AND D_AGE<=4

Included observations: 5634

Convergence achieved after 5 iterations

Covariance matrix computed using second derivatives

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
C	-0.900	0.093	-9.691	0.000
SEX=1	-0.079	0.163	-0.485	0.628
SEX=1,D_EDUC=1	-1.140	0.225	-5.057	0.000
SEX=1,D_EDUC=3	-0.794	0.385	-2.065	0.039
SEX=2,D_EDUC=1	-0.701	0.179	-3.909	0.000
SEX=2,D_EDUC=3	-0.507	0.335	-1.512	0.131
SEX=1,KAWIN=1,D_EDUC=1	-0.447	0.228	-1.964	0.050
SEX=1,KAWIN=1,D_EDUC=2	-0.885	0.193	-4.593	0.000
SEX=1,KAWIN=1,D_EDUC=3	-0.134	0.454	-0.295	0.768
SEX=2,KAWIN=1,D_EDUC=1	-1.534	0.206	-7.438	0.000
SEX=2,KAWIN=1,D_EDUC=2	-1.729	0.151	-11.470	0.000
SEX=2,KAWIN=1,D_EDUC=3	-1.693	0.456	-3.710	0.000
McFadden R-squared	0.087197	Mean dependent va	0.109869	
S.D. dependent var	0.312754	S.E. of regression	0.302104	
Akaike info criterion	0.636358	Sum squared resid	513.1034	
Schwarz criterion	0.650494	Log likelihood	-1780.62	
Hannan-Quinn criter.	0.641283	Restr. log likelihood	-1950.72	
LR statistic	340.1958	Avg. log likelihood	-0.31605	
Prob(LR statistic)	0.0000			
Obs with Dep=0	5015	Total obs	5634	
Obs with Dep=1	619			

Dependent Variable: Y2

Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing)

Date: 03/06/10 Time: 09:28

Sample: 1 17774 IF STATUS_A = 2 OR STATUS_A = 4 AND D_AGE<=4

Included observations: 5634

Convergence achieved after 5 iterations

Covariance matrix computed using second derivatives

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
C	-0.900	0.093	-9.691	0.000
KAWIN=1	-1.729	0.151	-11.470	0.000
KAWIN=1,D_EDUC=1	-0.506	0.182	-2.781	0.005
KAWIN=1,D_EDUC=3	-0.470	0.344	-1.366	0.172
KAWIN=2,D_EDUC=1	-0.701	0.179	-3.909	0.000
KAWIN=2,D_EDUC=3	-0.507	0.335	-1.512	0.131
SEX=1,KAWIN=1,D_EDUC=1	0.569	0.195	2.925	0.003
SEX=1,KAWIN=1,D_EDUC=2	0.766	0.183	4.191	0.000
SEX=1,KAWIN=1,D_EDUC=3	1.193	0.426	2.804	0.005
SEX=1,KAWIN=2,D_EDUC=1	-0.518	0.238	-2.177	0.030
SEX=1,KAWIN=2,D_EDUC=2	-0.079	0.163	-0.485	0.628
SEX=1,KAWIN=2,D_EDUC=3	-0.366	0.483	-0.757	0.449
McFadden R-squared	0.087197	Mean dependent va	0.109869	
S.D. dependent var	0.312754	S.E. of regression	0.302104	
Akaike info criterion	0.636358	Sum squared resid	513.1034	
Schwarz criterion	0.650494	Log likelihood	-1780.62	
Hannan-Quinn criter.	0.641283	Restr. log likelihood	-1950.72	
LR statistic	340.1958	Avg. log likelihood	-0.31605	
Prob(LR statistic)	0.0000			
Obs with Dep=0	5015	Total obs	5634	
Obs with Dep=1	619			

Dependent Variable: Y1

Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing)

Date: 03/20/10 Time: 09:06

Sample: 1 14259 IF STATUS_A=1 OR STATUS_A=4 AND D_AGE<=4

Included observations: 7796

Convergence achieved after 3 iterations

Covariance matrix computed using second derivatives

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
D_AGE=1,D_EDUC=1	-0.134	0.134	-0.999	0.318
D_AGE=1,D_EDUC=2	0.163	0.117	1.393	0.164
D_AGE=2,D_EDUC=1	-0.261	0.070	-3.715	0.000
D_AGE=2,D_EDUC=2	-0.669	0.064	-10.456	0.000
D_AGE=2,D_EDUC=3	-0.639	0.164	-3.904	0.000
D_AGE=3,D_EDUC=1	-0.514	0.040	-12.787	0.000
D_AGE=3,D_EDUC=2	-0.925	0.056	-16.580	0.000
D_AGE=3,D_EDUC=3	-1.315	0.126	-10.444	0.000
D_AGE=4,D_EDUC=1	-0.525	0.094	-5.600	0.000
D_AGE=4,D_EDUC=2	-0.711	0.231	-3.080	0.002
D_AGE=4,D_EDUC=3	-1.335	0.503	-2.656	0.008
Mean dependent var	0.356721	S.D. dependent var	0.479062	
S.E. of regression	0.474524	Akaike info criterion	1.285546	
Sum squared resid	1752.971	Schwarz criterion	1.295369	
Log likelihood	-5000.06	Hannan-Quinn criter	1.288913	
Avg. log likelihood	-0.64136			
Obs with Dep=0	5015	Total obs	7796	
Obs with Dep=1	2781			

EDUC (1=2=3)

Wald Test:

Equation: AK1_SM3

Test Statistic	Value	df	Probability
F-statistic	12.329	(7, 7785)	0.000
Chi-square	86.303	7	0.000

Null Hypothesis Summary:

Normalized Restriction Value	Std. Err.
C(1) - C(2)	-0.29605 0.17737
C(3) - C(5)	0.378217 0.178142
C(4) - C(5)	-0.02944 0.175758
C(6) - C(8)	0.8006 0.132191
C(7) - C(8)	0.390348 0.137718
C(9) - C(11)	0.809913 0.511297
C(10) - C(11)	0.624154 0.553073

Restrictions are linear in coefficients.

Dependent Variable: Y1

Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing)

Date: 03/20/10 Time: 09:06

Sample: 1 14259 IF STATUS_A=1 OR STATUS_A=4 AND D_AGE<=4

Included observations: 7796

Convergence achieved after 3 iterations

Covariance matrix computed using second derivatives

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
C	-0.925	0.056	-16.580	0.000
D_AGE=1	1.087	0.129	8.410	0.000
D_AGE=2	0.256	0.085	3.020	0.003
D_AGE=4	0.214	0.237	0.901	0.368
D_AGE=1,D_EDUC=1	-0.296	0.177	-1.669	0.095
D_AGE=2,D_EDUC=1	0.408	0.095	4.293	0.000
D_AGE=2,D_EDUC=3	0.029	0.176	0.168	0.867
D_AGE=3,D_EDUC=1	0.410	0.069	5.965	0.000
D_AGE=3,D_EDUC=3	-0.390	0.138	-2.834	0.005
D_AGE=4,D_EDUC=1	0.186	0.249	0.746	0.456
D_AGE=4,D_EDUC=3	-0.624	0.553	-1.129	0.259
McFadden R-squared	0.015573	Mean dependent va	0.356721	
S.D. dependent var	0.479062	S.E. of regression	0.474524	
Akaike info criterion	1.285546	Sum squared resid	1752.971	
Schwarz criterion	1.295369	Log likelihood	-5000.06	
Hannan-Quinn criter.	1.288913	Restr. log likelihood	-5079.16	
LR statistic	158.2001	Avg. log likelihood	-0.64136	
Prob(LR statistic)	0.0000			
Obs with Dep=0	5015	Total obs	7796	
Obs with Dep=1	2781			

Dependent Variable: Y1

Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing)

Date: 03/17/10 Time: 12:31

Sample: 1 14259 IF STATUS_A=1 OR STATUS_A=4 AND D_AGE<=4

Included observations: 7796

Convergence achieved after 3 iterations

Covariance matrix computed using second derivatives

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
C	-0.925	0.056	-16.580	0.000
D_EDUC=1	0.410	0.069	5.965	0.000
D_EDUC=3	-0.390	0.138	-2.834	0.005
D_AGE=1,D_EDUC=1	0.381	0.140	2.730	0.006
D_AGE=1,D_EDUC=2	1.087	0.129	8.410	0.000
D_AGE=2,D_EDUC=1	0.254	0.081	3.133	0.002
D_AGE=2,D_EDUC=2	0.256	0.085	3.020	0.003
D_AGE=2,D_EDUC=3	0.676	0.207	3.273	0.001
D_AGE=4,D_EDUC=1	-0.011	0.102	-0.104	0.917
D_AGE=4,D_EDUC=2	0.214	0.237	0.901	0.368
D_AGE=4,D_EDUC=3	-0.020	0.518	-0.038	0.969
McFadden R-squared	0.015573	Mean dependent va	0.356721	
S.D. dependent var	0.479062	S.E. of regression	0.474524	
Akaike info criterion	1.285546	Sum squared resid	1752.971	
Schwarz criterion	1.295369	Log likelihood	-5000.06	
Hannan-Quinn criter.	1.288913	Restr. log likelihood	-5079.16	
LR statistic	158.2001	Avg. log likelihood	-0.64136	
Prob(LR statistic)	0.0000			
Obs with Dep=0	5015	Total obs	7796	
Obs with Dep=1	2781			

Dependent Variable: Y2

Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing)

Date: 03/05/10 Time: 16:45

Sample: 1 17774 IF STATUS_A = 2 OR STATUS_A = 4 AND D_AGE<=4

Included observations: 5634

Convergence achieved after 6 iterations

Covariance matrix computed using second derivatives

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
D_AGE=1,D_EDUC=1	-1.204	0.190	-6.336	0.000
D_AGE=1,D_EDUC=2	-0.518	0.140	-3.692	0.000
D_AGE=2,D_EDUC=1	-1.800	0.123	-14.635	0.000
D_AGE=2,D_EDUC=2	-1.330	0.081	-16.343	0.000
D_AGE=2,D_EDUC=3	-1.463	0.222	-6.593	0.000
D_AGE=3,D_EDUC=1	-3.065	0.117	-26.292	0.000
D_AGE=3,D_EDUC=2	-2.397	0.103	-23.290	0.000
D_AGE=3,D_EDUC=3	-2.701	0.231	-11.695	0.000
D_AGE=4,D_EDUC=1	-3.778	0.382	-9.882	0.000
D_AGE=4,D_EDUC=2	-4.043	1.009	-4.008	0.000
D_AGE=4,D_EDUC=3	-2.944	1.026	-2.870	0.004
Mean dependent var	0.109869	S.D. dependent var	0.312754	
S.E. of regression	0.301569	Akaike info criterion	0.631638	
Sum squared resid	511.3787	Schwarz criterion	0.644595	
Log likelihood	-1768.32	Hannan-Quinn criter	0.636152	
Avg. log likelihood	-0.31387			
Obs with Dep=0	5015	Total obs	5634	
Obs with Dep=1	619			

EDUC (1=2=3)

Wald Test:

Equation: AK2_SM3

Test Statistic	Value	df	Probability
F-statistic	5.397	(7, 5623)	0.000
Chi-square	37.777	7	0.000

Null Hypothesis Summary:

Normalized Restriction Value	Std. Err.
C(1) - C(2)	-0.68577 0.236241
C(3) - C(5)	-0.33713 0.253756
C(4) - C(5)	0.133504 0.236389
C(6) - C(8)	-0.36397 0.258744
C(7) - C(8)	0.304349 0.252879
C(9) - C(11)	-0.83324 1.094877
C(10) - C(11)	-1.09861 1.43881

Restrictions are linear in coefficients.

Dependent Variable: Y2

Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing)

Date: 03/05/10 Time: 16:53

Sample: 1 17774 IF STATUS_A = 2 OR STATUS_A = 4 AND D_AGE<=

Included observations: 5634

Convergence achieved after 6 iterations

Covariance matrix computed using second derivatives

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
C	-2.397	0.103	-23.290	0.000
D_AGE=1	1.879	0.174	10.795	0.000
D_AGE=2	1.067	0.131	8.135	0.000
D_AGE=4	-1.646	1.014	-1.623	0.105
D_AGE=1,D_EDUC=1	-0.686	0.236	-2.903	0.004
D_AGE=2,D_EDUC=1	-0.471	0.147	-3.191	0.001
D_AGE=2,D_EDUC=3	-0.134	0.236	-0.565	0.572
D_AGE=3,D_EDUC=1	-0.668	0.156	-4.297	0.000
D_AGE=3,D_EDUC=3	-0.304	0.253	-1.204	0.229
D_AGE=4,D_EDUC=1	0.265	1.079	0.246	0.806
D_AGE=4,D_EDUC=3	1.099	1.439	0.764	0.445
McFadden R-squared	0.093502	Mean dependent va	0.109869	
S.D. dependent var	0.312754	S.E. of regression	0.301569	
Akaike info criterion	0.631638	Sum squared resid	511.3787	
Schwarz criterion	0.644595	Log likelihood	-1768.32	
Hannan-Quinn criter.	0.636152	Restr. log likelihood	-1950.72	
LR statistic	364.7937	Avg. log likelihood	-0.31387	
Prob(LR statistic)	0.0000			
Obs with Dep=0	5015	Total obs	5634	
Obs with Dep=1	619			

Dependent Variable: Y2

Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing)

Date: 03/05/10 Time: 16:56

Sample: 1 17774 IF STATUS_A = 2 OR STATUS_A = 4 AND D_AGE<=

Included observations: 5634

Convergence achieved after 6 iterations

Covariance matrix computed using second derivatives

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
C	-2.397	0.103	-23.290	0.000
D_EDUC=1	-0.668	0.156	-4.297	0.000
D_EDUC=3	-0.304	0.253	-1.204	0.229
D_AGE=1,D_EDUC=1	1.861	0.223	8.349	0.000
D_AGE=1,D_EDUC=2	1.879	0.174	10.795	0.000
D_AGE=2,D_EDUC=1	1.265	0.169	7.463	0.000
D_AGE=2,D_EDUC=2	1.067	0.131	8.135	0.000
D_AGE=2,D_EDUC=3	1.238	0.320	3.865	0.000
D_AGE=4,D_EDUC=1	-0.712	0.400	-1.782	0.075
D_AGE=4,D_EDUC=2	-1.646	1.014	-1.623	0.105
D_AGE=4,D_EDUC=3	-0.243	1.052	-0.231	0.817
McFadden R-squared	0.093502	Mean dependent va	0.109869	
S.D. dependent var	0.312754	S.E. of regression	0.301569	
Akaike info criterion	0.631638	Sum squared resid	511.3787	
Schwarz criterion	0.644595	Log likelihood	-1768.32	
Hannan-Quinn criter.	0.636152	Restr. log likelihood	-1950.72	
LR statistic	364.7937	Avg. log likelihood	-0.31387	
Prob(LR statistic)	0.0000			
Obs with Dep=0	5015	Total obs	5634	
Obs with Dep=1	619			

Dependent Variable: Y1

Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing)

Date: 03/20/10 Time: 09:14

Sample: 1 14259 IF STATUS_A=1 OR STATUS_A=4 AND D_AGE<=4

Included observations: 7796

Convergence achieved after 4 iterations

Covariance matrix computed using second derivatives

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
RESIDEN=1,KERJA=1,D_EDUC=1	0.154	0.047	3.268	0.001
RESIDEN=1,KERJA=1,D_EDUC=2	0.496	0.078	6.384	0.000
RESIDEN=1,KERJA=1,D_EDUC=3	0.000	0.447	0.000	1.000
RESIDEN=1,KERJA=2,D_EDUC=1	-0.823	0.099	-8.345	0.000
RESIDEN=1,KERJA=2,D_EDUC=2	-0.927	0.137	-6.750	0.000
RESIDEN=1,KERJA=2,D_EDUC=3	-1.386	1.118	-1.240	0.215
RESIDEN=1,KERJA=3,D_EDUC=1	-1.091	0.099	-11.011	0.000
RESIDEN=1,KERJA=3,D_EDUC=2	-0.994	0.090	-11.104	0.000
RESIDEN=1,KERJA=3,D_EDUC=3	-0.594	0.171	-3.471	0.001
RESIDEN=2,KERJA=1,D_EDUC=1	0.068	0.117	0.583	0.560
RESIDEN=2,KERJA=1,D_EDUC=2	0.419	0.186	2.256	0.024
RESIDEN=2,KERJA=1,D_EDUC=3	0.000	0.707	0.000	1.000
RESIDEN=2,KERJA=2,D_EDUC=1	-1.332	0.133	-9.983	0.000
RESIDEN=2,KERJA=2,D_EDUC=2	-1.225	0.144	-8.478	0.000
RESIDEN=2,KERJA=2,D_EDUC=3	-2.251	0.743	-3.028	0.003
RESIDEN=2,KERJA=3,D_EDUC=1	-1.292	0.091	-14.156	0.000
RESIDEN=2,KERJA=3,D_EDUC=2	-1.525	0.080	-19.049	0.000
RESIDEN=2,KERJA=3,D_EDUC=3	-1.400	0.132	-10.641	0.000
Mean dependent var	0.356721	S.D. dependent var	0.479062	
S.E. of regression	0.450771	Akaike info criterion	1.19018	
Sum squared resid	1580.45	Schwarz criterion	1.206253	
Log likelihood	-4621.32	Hannan-Quinn criteri	1.195688	
Avg. log likelihood	-0.59278			
Obs with Dep=0	5015	Total obs	7796	
Obs with Dep=1	2781			

EDUC (1=2=3)
 Wald Test:
 Equation: AK1_SM4

Test Statistic	Value	df	Probability
F-statistic	2.475	(12, 7778)	0.003
Chi-square	29.700	12	0.003

Null Hypothesis Summary:

Normalized Restriction Value	Std. Err.
C(1) - C(3)	0.154322 0.449699
C(2) - C(3)	0.496437 0.453925
C(4) - C(6)	0.563424 1.122374
C(5) - C(6)	0.459251 1.126437
C(7) - C(9)	-0.49718 0.197754
C(8) - C(9)	-0.39985 0.193124
C(10) - C(12)	0.068053 0.716674
C(11) - C(12)	0.419258 0.731117
C(13) - C(15)	0.919263 0.755269
C(14) - C(15)	1.02657 0.757296
C(16) - C(18)	0.10796 0.16014
C(17) - C(18)	-0.12482 0.15402

Restrictions are linear in coefficients.

Dependent Variable: Y1

Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing)

Date: 03/17/10 Time: 12:52

Sample: 1 14259 IF STATUS_A=1 OR STATUS_A=4 AND D_AGE<=4

Included observations: 7796

Convergence achieved after 4 iterations

Covariance matrix computed using second derivatives

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
C	0.419	0.186	2.256	0.024
RESIDEN=1	0.077	0.201	0.383	0.702
RESIDEN=1,KERJA=2	-1.423	0.158	-9.019	0.000
RESIDEN=1,KERJA=3	-1.490	0.119	-12.569	0.000
RESIDEN=2,KERJA=2	-1.644	0.235	-6.985	0.000
RESIDEN=2,KERJA=3	-1.944	0.202	-9.609	0.000
RESIDEN=1,KERJA=1,D_EDUC=1	-0.342	0.091	-3.760	0.000
RESIDEN=1,KERJA=1,D_EDUC=3	-0.496	0.454	-1.094	0.274
RESIDEN=1,KERJA=2,D_EDUC=1	0.104	0.169	0.616	0.538
RESIDEN=1,KERJA=2,D_EDUC=3	-0.459	1.126	-0.408	0.684
RESIDEN=1,KERJA=3,D_EDUC=1	-0.097	0.134	-0.729	0.466
RESIDEN=1,KERJA=3,D_EDUC=3	0.400	0.193	2.070	0.038
RESIDEN=2,KERJA=1,D_EDUC=1	-0.351	0.219	-1.600	0.110
RESIDEN=2,KERJA=1,D_EDUC=3	-0.419	0.731	-0.573	0.566
RESIDEN=2,KERJA=2,D_EDUC=1	-0.107	0.197	-0.546	0.585
RESIDEN=2,KERJA=2,D_EDUC=3	-1.027	0.757	-1.356	0.175
RESIDEN=2,KERJA=3,D_EDUC=1	0.233	0.121	1.917	0.055
RESIDEN=2,KERJA=3,D_EDUC=3	0.125	0.154	0.810	0.418
McFadden R-squared	0.090141	Mean dependent va	0.356721	
S.D. dependent var	0.479062	S.E. of regression	0.450771	
Akaike info criterion	1.19018	Sum squared resid	1580.45	
Schwarz criterion	1.206253	Log likelihood	-4621.32	
Hannan-Quinn criter.	1.195688	Restr. log likelihood	-5079.16	
LR statistic	915.6775	Avg. log likelihood	-0.59278	
Prob(LR statistic)	0.0000			
Obs with Dep=0	5015	Total obs	7796	
Obs with Dep=1	2781			

Dependent Variable: Y1

Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing)

Date: 03/20/10 Time: 09:13

Sample: 1 14259 IF STATUS_A=1 OR STATUS_A=4 AND D_AGE<=4

Included observations: 7796

Convergence achieved after 4 iterations

Covariance matrix computed using second derivatives

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
C	0.419	0.186	2.256	0.024
D_EDUC=1	-0.351	0.219	-1.600	0.110
D_EDUC=3	-0.419	0.731	-0.573	0.566
D_EDUC=1,RESIDEN=1	0.086	0.126	0.685	0.493
D_EDUC=2,RESIDEN=1	0.077	0.201	0.383	0.702
D_EDUC=3,RESIDEN=1	0.000	0.837	0.000	1.000
RESIDEN=1,KERJA=2,D_EDUC=1	-0.977	0.109	-8.938	0.000
RESIDEN=1,KERJA=2,D_EDUC=2	-1.423	0.158	-9.019	0.000
RESIDEN=1,KERJA=2,D_EDUC=3	-1.386	1.204	-1.151	0.250
RESIDEN=1,KERJA=3,D_EDUC=1	-1.246	0.110	-11.346	0.000
RESIDEN=1,KERJA=3,D_EDUC=2	-1.490	0.119	-12.569	0.000
RESIDEN=1,KERJA=3,D_EDUC=3	-0.594	0.479	-1.241	0.215
RESIDEN=2,KERJA=2,D_EDUC=1	-1.400	0.177	-7.898	0.000
RESIDEN=2,KERJA=2,D_EDUC=2	-1.644	0.235	-6.985	0.000
RESIDEN=2,KERJA=2,D_EDUC=3	-2.251	1.026	-2.194	0.028
RESIDEN=2,KERJA=3,D_EDUC=1	-1.360	0.148	-9.180	0.000
RESIDEN=2,KERJA=3,D_EDUC=2	-1.944	0.202	-9.609	0.000
RESIDEN=2,KERJA=3,D_EDUC=3	-1.400	0.719	-1.947	0.052
McFadden R-squared	0.090141	Mean dependent va	0.356721	
S.D. dependent var	0.479062	S.E. of regression	0.450771	
Akaike info criterion	1.19018	Sum squared resid	1580.45	
Schwarz criterion	1.206253	Log likelihood	-4621.32	
Hannan-Quinn criter.	1.195688	Restr. log likelihood	-5079.16	
LR statistic	915.6775	Avg. log likelihood	-0.59278	
Prob(LR statistic)	0.0000			
Obs with Dep=0	5015	Total obs	7796	
Obs with Dep=1	2781			

Dependent Variable: Y1

Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing)

Date: 03/20/10 Time: 09:14

Sample: 1 14259 IF STATUS_A=1 OR STATUS_A=4 AND D_AGE<=4

Included observations: 7796

Convergence achieved after 5 iterations

Covariance matrix computed using second derivatives

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
C	0.419	0.186	2.256	0.024
D_EDUC=1	-0.351	0.219	-1.600	0.110
D_EDUC=3	-0.419	0.731	-0.573	0.566
D_EDUC=1,KERJA=2	-1.400	0.177	-7.898	0.000
D_EDUC=1,KERJA=3	-1.360	0.148	-9.180	0.000
D_EDUC=2,KERJA=2	-1.644	0.235	-6.985	0.000
D_EDUC=2,KERJA=3	-1.944	0.202	-9.609	0.000
D_EDUC=3,KERJA=2	-2.251	1.026	-2.194	0.028
D_EDUC=3,KERJA=3	-1.400	0.719	-1.947	0.052
RESIDEN=1,KERJA=1,D_EDUC=1	0.086	0.126	0.685	0.493
RESIDEN=1,KERJA=1,D_EDUC=2	0.077	0.201	0.383	0.702
RESIDEN=1,KERJA=1,D_EDUC=3	0.000	0.837	0.000	1.000
RESIDEN=1,KERJA=2,D_EDUC=1	0.509	0.166	3.069	0.002
RESIDEN=1,KERJA=2,D_EDUC=2	0.298	0.199	1.493	0.135
RESIDEN=1,KERJA=2,D_EDUC=3	0.865	1.343	0.644	0.519
RESIDEN=1,KERJA=3,D_EDUC=1	0.201	0.135	1.491	0.136
RESIDEN=1,KERJA=3,D_EDUC=2	0.531	0.120	4.422	0.000
RESIDEN=1,KERJA=3,D_EDUC=3	0.806	0.216	3.734	0.000
McFadden R-squared	0.090141	Mean dependent va	0.356721	
S.D. dependent var	0.479062	S.E. of regression	0.450771	
Akaike info criterion	1.19018	Sum squared resid	1580.45	
Schwarz criterion	1.206253	Log likelihood	-4621.32	
Hannan-Quinn criter.	1.195688	Restr. log likelihood	-5079.16	
LR statistic	915.6775	Avg. log likelihood	-0.59278	
Prob(LR statistic)	0.0000			
Obs with Dep=0	5015	Total obs	7796	
Obs with Dep=1	2781			

Dependent Variable: Y1

Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing)

Date: 03/20/10 Time: 09:24

Sample: 1 14259 IF STATUS_A=1 OR STATUS_A=4 AND D_AGE<=4

Included observations: 7796

Convergence achieved after 4 iterations

Covariance matrix computed using second derivatives

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
SEKTOR=1,D_AGE=1,D_EDUC=1	0.010	0.142	0.071	0.943
SEKTOR=1,D_AGE=1,D_EDUC=2	0.419	0.129	3.252	0.001
SEKTOR=1,D_AGE=2,D_EDUC=1	-0.078	0.077	-1.004	0.315
SEKTOR=1,D_AGE=2,D_EDUC=2	-0.222	0.080	-2.774	0.006
SEKTOR=1,D_AGE=2,D_EDUC=3	-0.511	0.516	-0.989	0.323
SEKTOR=1,D_AGE=3,D_EDUC=1	-0.280	0.044	-6.295	0.000
SEKTOR=1,D_AGE=3,D_EDUC=2	-0.455	0.072	-6.340	0.000
SEKTOR=1,D_AGE=3,D_EDUC=3	-0.268	0.368	-0.728	0.467
SEKTOR=1,D_AGE=4,D_EDUC=1	-0.389	0.101	-3.872	0.000
SEKTOR=1,D_AGE=4,D_EDUC=2	-0.205	0.287	-0.713	0.476
SEKTOR=2,D_AGE=1,D_EDUC=1	-1.299	0.461	-2.821	0.005
SEKTOR=2,D_AGE=1,D_EDUC=2	-1.504	0.391	-3.848	0.000
SEKTOR=2,D_AGE=2,D_EDUC=1	-1.160	0.188	-6.155	0.000
SEKTOR=2,D_AGE=2,D_EDUC=2	-1.436	0.119	-12.109	0.000
SEKTOR=2,D_AGE=2,D_EDUC=3	-0.653	0.173	-3.783	0.000
SEKTOR=2,D_AGE=3,D_EDUC=1	-1.578	0.111	-14.226	0.000
SEKTOR=2,D_AGE=3,D_EDUC=2	-1.572	0.096	-16.374	0.000
SEKTOR=2,D_AGE=3,D_EDUC=3	-1.434	0.136	-10.545	0.000
SEKTOR=2,D_AGE=4,D_EDUC=1	-1.403	0.288	-4.868	0.000
SEKTOR=2,D_AGE=4,D_EDUC=2	-1.609	0.447	-3.599	0.000
SEKTOR=2,D_AGE=4,D_EDUC=3	-1.335	0.503	-2.656	0.008
Mean dependent var	0.356721	S.D. dependent var	0.479062	
S.E. of regression	0.464041	Akaike info criterion	1.240283	
Sum squared resid	1674.225	Schwarz criterion	1.259035	
Log likelihood	-4813.62	Hannan-Quinn criteri	1.246709	
Avg. log likelihood	-0.61745			
Obs with Dep=0	5015	Total obs	7796	
Obs with Dep=1	2781			

EDUC (1=2=3)

Wald Test:

Equation: AK1_SM5

Test Statistic	Value	df	Probability
F-statistic	2.041	(13, 7775)	0.015
Chi-square	26.527	13	0.014

Null Hypothesis Summary:

Normalized Restriction Value	Std. Err.
C(1) - C(2)	-0.40856 0.192052
C(3) - C(5)	0.433175 0.522155
C(4) - C(5)	0.289102 0.522545
C(6) - C(8)	-0.01151 0.371109
C(7) - C(8)	-0.18629 0.37535
C(9) - C(10)	-0.18448 0.304298
C(11) - C(12)	0.204795 0.604069
C(13) - C(15)	-0.50663 0.255565
C(14) - C(15)	-0.78302 0.209471
C(16) - C(18)	-0.14469 0.175481
C(17) - C(18)	-0.13845 0.166441
C(19) - C(21)	-0.06782 0.579389
C(20) - C(21)	-0.27444 0.672779

Restrictions are linear in coefficients.

Dependent Variable: Y1

Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing)

Date: 03/17/10 Time: 12:54

Sample: 1 14259 IF STATUS_A=1 OR STATUS_A=4 AND D_AGE<=4

Included observations: 7796

Convergence achieved after 4 iterations

Covariance matrix computed using second derivatives

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
C	-1.572	0.096	-16.374	0.000
SEKTOR=1	1.118	0.120	9.326	0.000
SEKTOR=1,D_AGE=1	0.873	0.147	5.925	0.000
SEKTOR=1,D_AGE=2	0.233	0.107	2.169	0.030
SEKTOR=1,D_AGE=4	0.250	0.296	0.844	0.399
SEKTOR=2,D_AGE=1	0.068	0.402	0.169	0.866
SEKTOR=2,D_AGE=2	0.136	0.153	0.891	0.373
SEKTOR=2,D_AGE=4	-0.037	0.457	-0.082	0.935
SEKTOR=1,D_AGE=1,D_EDUC=1	-0.409	0.192	-2.127	0.033
SEKTOR=1,D_AGE=2,D_EDUC=1	0.144	0.111	1.296	0.195
SEKTOR=1,D_AGE=2,D_EDUC=3	-0.289	0.523	-0.553	0.580
SEKTOR=1,D_AGE=3,D_EDUC=1	0.175	0.084	2.072	0.038
SEKTOR=1,D_AGE=3,D_EDUC=3	0.186	0.375	0.496	0.620
SEKTOR=1,D_AGE=4,D_EDUC=1	-0.184	0.304	-0.606	0.544
SEKTOR=2,D_AGE=1,D_EDUC=1	0.205	0.604	0.339	0.735
SEKTOR=2,D_AGE=2,D_EDUC=1	0.276	0.223	1.241	0.214
SEKTOR=2,D_AGE=2,D_EDUC=3	0.783	0.209	3.738	0.000
SEKTOR=2,D_AGE=3,D_EDUC=1	-0.006	0.147	-0.043	0.966
SEKTOR=2,D_AGE=3,D_EDUC=3	0.138	0.166	0.832	0.406
SEKTOR=2,D_AGE=4,D_EDUC=1	0.207	0.532	0.388	0.698
SEKTOR=2,D_AGE=4,D_EDUC=3	0.274	0.673	0.408	0.683
McFadden R-squared	0.05228	Mean dependent va	0.356721	
S.D. dependent var	0.479062	S.E. of regression	0.464041	
Akaike info criterion	1.240283	Sum squared resid	1674.225	
Schwarz criterion	1.259035	Log likelihood	-4813.62	
Hannan-Quinn criter.	1.246709	Restr. log likelihood	-5079.16	
LR statistic	531.0753	Avg. log likelihood	-0.61745	
Prob(LR statistic)	0.0000			
Obs with Dep=0	5015	Total obs	7796	
Obs with Dep=1	2781			

Dependent Variable: Y1

Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing)

Date: 03/20/10 Time: 09:30

Sample: 1 14259 IF STATUS_A=1 OR STATUS_A=4 AND D_AGE<=4

Included observations: 7796

Convergence achieved after 4 iterations

Covariance matrix computed using second derivatives

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
C	-1.572	0.096	-16.374	0.000
D_EDUC=1	-0.006	0.147	-0.043	0.966
D_EDUC=3	0.138	0.166	0.832	0.406
D_EDUC=1,SEKTOR=1	1.299	0.120	10.865	0.000
D_EDUC=2,SEKTOR=1	1.118	0.120	9.326	0.000
D_EDUC=3,SEKTOR=1	1.165	0.393	2.967	0.003
SEKTOR=1,D_AGE=1,D_EDUC=1	0.290	0.149	1.942	0.052
SEKTOR=1,D_AGE=1,D_EDUC=2	0.873	0.147	5.925	0.000
SEKTOR=1,D_AGE=2,D_EDUC=1	0.202	0.089	2.266	0.023
SEKTOR=1,D_AGE=2,D_EDUC=2	0.233	0.107	2.169	0.030
SEKTOR=1,D_AGE=2,D_EDUC=3	-0.243	0.634	-0.382	0.702
SEKTOR=1,D_AGE=4,D_EDUC=1	-0.109	0.110	-0.996	0.319
SEKTOR=1,D_AGE=4,D_EDUC=2	0.250	0.296	0.844	0.399
SEKTOR=2,D_AGE=1,D_EDUC=1	0.279	0.474	0.589	0.556
SEKTOR=2,D_AGE=1,D_EDUC=2	0.068	0.402	0.169	0.866
SEKTOR=2,D_AGE=2,D_EDUC=1	0.419	0.219	1.914	0.056
SEKTOR=2,D_AGE=2,D_EDUC=2	0.136	0.153	0.891	0.373
SEKTOR=2,D_AGE=2,D_EDUC=3	0.781	0.220	3.552	0.000
SEKTOR=2,D_AGE=4,D_EDUC=1	0.176	0.309	0.568	0.570
SEKTOR=2,D_AGE=4,D_EDUC=2	-0.037	0.457	-0.082	0.935
SEKTOR=2,D_AGE=4,D_EDUC=3	0.099	0.521	0.189	0.850
McFadden R-squared	0.05228	Mean dependent va	0.356721	
S.D. dependent var	0.479062	S.E. of regression	0.464041	
Akaike info criterion	1.240283	Sum squared resid	1674.225	
Schwarz criterion	1.259035	Log likelihood	-4813.62	
Hannan-Quinn criter.	1.246709	Restr. log likelihood	-5079.16	
LR statistic	531.0753	Avg. log likelihood	-0.61745	
Prob(LR statistic)	0.0000			
Obs with Dep=0	5015	Total obs	7796	
Obs with Dep=1	2781			

Dependent Variable: Y1

Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing)

Date: 03/20/10 Time: 09:35

Sample: 1 14259 IF STATUS_A=1 OR STATUS_A=4 AND D_AGE<=4

Included observations: 7796

Convergence achieved after 4 iterations

Covariance matrix computed using second derivatives

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
C	-1.572	0.096	-16.374	0.000
D_EDUC=1	-0.006	0.147	-0.043	0.966
D_EDUC=3	0.138	0.166	0.832	0.406
D_EDUC=1,D_AGE=1	0.279	0.474	0.589	0.556
D_EDUC=1,D_AGE=2	0.419	0.219	1.914	0.056
D_EDUC=1,D_AGE=4	0.176	0.309	0.568	0.570
D_EDUC=2,D_AGE=1	0.068	0.402	0.169	0.866
D_EDUC=2,D_AGE=2	0.136	0.153	0.891	0.373
D_EDUC=2,D_AGE=4	-0.037	0.457	-0.082	0.935
D_EDUC=3,D_AGE=2	0.781	0.220	3.552	0.000
D_EDUC=3,D_AGE=4	0.099	0.521	0.189	0.850
SEKTOR=1,D_AGE=1,D_EDUC=1	1.309	0.482	2.716	0.007
SEKTOR=1,D_AGE=1,D_EDUC=2	1.923	0.412	4.672	0.000
SEKTOR=1,D_AGE=2,D_EDUC=1	1.082	0.204	5.313	0.000
SEKTOR=1,D_AGE=2,D_EDUC=2	1.214	0.143	8.492	0.000
SEKTOR=1,D_AGE=2,D_EDUC=3	0.142	0.544	0.261	0.794
SEKTOR=1,D_AGE=3,D_EDUC=1	1.299	0.120	10.865	0.000
SEKTOR=1,D_AGE=3,D_EDUC=2	1.118	0.120	9.326	0.000
SEKTOR=1,D_AGE=3,D_EDUC=3	1.165	0.393	2.967	0.003
SEKTOR=1,D_AGE=4,D_EDUC=1	1.014	0.305	3.321	0.001
SEKTOR=1,D_AGE=4,D_EDUC=2	1.405	0.531	2.643	0.008
McFadden R-squared	0.05228	Mean dependent va	0.356721	
S.D. dependent var	0.479062	S.E. of regression	0.464041	
Akaike info criterion	1.240283	Sum squared resid	1674.225	
Schwarz criterion	1.259035	Log likelihood	-4813.62	
Hannan-Quinn criter.	1.246709	Restr. log likelihood	-5079.16	
LR statistic	531.0753	Avg. log likelihood	-0.61745	
Prob(LR statistic)	0.0000			
Obs with Dep=0	5015	Total obs	7796	
Obs with Dep=1	2781			

Dependent Variable: Y1
 Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing)
 Date: 03/20/10 Time: 09:46
 Sample: 1 14259 IF STATUS_A=1 OR STATUS_A=4 AND D_AGE<=4
 Included observations: 7796
 Convergence achieved after 5 iterations
 Covariance matrix computed using second derivatives

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
SEX=1,KOMUTER=1,D_EDUC=1	-0.847	0.398	-2.127	0.033
SEX=1,KOMUTER=1,D_EDUC=2	-1.253	0.567	-2.210	0.027
SEX=1,KOMUTER=1,D_EDUC=3	-1.099	1.155	-0.951	0.341
SEX=1,KOMUTER=2,D_EDUC=1	-0.312	0.049	-6.425	0.000
SEX=1,KOMUTER=2,D_EDUC=2	-0.496	0.068	-7.335	0.000
SEX=1,KOMUTER=2,D_EDUC=3	-0.843	0.148	-5.682	0.000
SEX=2,KOMUTER=1,D_EDUC=1	-1.386	0.299	-4.639	0.000
SEX=2,KOMUTER=1,D_EDUC=2	-2.134	0.353	-6.052	0.000
SEX=2,KOMUTER=1,D_EDUC=3	-2.526	0.735	-3.437	0.001
SEX=2,KOMUTER=2,D_EDUC=1	-0.514	0.043	-12.033	0.000
SEX=2,KOMUTER=2,D_EDUC=2	-0.765	0.048	-16.001	0.000
SEX=2,KOMUTER=2,D_EDUC=3	-1.201	0.133	-9.060	0.000
Mean dependent var	0.356721	S.D. dependent var	0.479062	
S.E. of regression	0.475743	Akaike info criterior	1.289697	
Sum squared resid	1761.762	Schwarz criterion	1.300412	
Log likelihood	-5015.24	Hannan-Quinn crite	1.293369	
Avg. log likelihood	-0.64331			
Obs with Dep=0	5015	Total obs	7796	
Obs with Dep=1	2781			

EDUC (1=2=3)

Wald Test:

Equation: AK1_SM6

Test Statistic	Value	df	Probability
F-statistic	6.419	(8, 7784)	0.000
Chi-square	51.351	8	0.000

Null Hypothesis Summary:

Normalized Restrictor	Value	Std. Err.
C(1) - C(3)	0.251314	1.221501
C(2) - C(3)	-0.15415	1.286375
C(4) - C(6)	0.531016	0.156089
C(5) - C(6)	0.34695	0.163028
C(7) - C(9)	1.139446	0.793279
C(8) - C(9)	0.392232	0.815031
C(10) - C(12)	0.686786	0.139308
C(11) - C(12)	0.436741	0.14093

Restrictions are linear in coefficients.

Dependent Variable: Y1

Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing)

Date: 03/17/10 Time: 12:55

Sample: 1 14259 IF STATUS_A=1 OR STATUS_A=4 AND D_AGE<=4

Included observations: 7796

Convergence achieved after 5 iterations

Covariance matrix computed using second derivatives

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
C	-0.765	0.048	-16.001	0.000
KOMUTER=1	-1.369	0.356	-3.848	0.000
KOMUTER=1,SEX=1	0.881	0.668	1.319	0.187
KOMUTER=2,SEX=1	0.269	0.083	3.244	0.001
SEX=1,KOMUTER=1,D_EDUC=1	0.405	0.693	0.585	0.559
SEX=1,KOMUTER=1,D_EDUC=3	0.154	1.286	0.120	0.905
SEX=1,KOMUTER=2,D_EDUC=1	0.184	0.083	2.211	0.027
SEX=1,KOMUTER=2,D_EDUC=3	-0.347	0.163	-2.128	0.033
SEX=2,KOMUTER=1,D_EDUC=1	0.747	0.462	1.617	0.106
SEX=2,KOMUTER=1,D_EDUC=3	-0.392	0.815	-0.481	0.630
SEX=2,KOMUTER=2,D_EDUC=1	0.250	0.064	3.900	0.000
SEX=2,KOMUTER=2,D_EDUC=3	-0.437	0.141	-3.099	0.002
McFadden R-squared	0.012585	Mean dependent var	0.356721	
S.D. dependent var	0.479062	S.E. of regression	0.475743	
Akaike info criterion	1.289697	Sum squared resid	1761.762	
Schwarz criterion	1.300412	Log likelihood	-5015.24	
Hannan-Quinn criter.	1.293369	Restr. log likelihood	-5079.16	
LR statistic	127.8432	Avg. log likelihood	-0.64331	
Prob(LR statistic)	0.0000			
Obs with Dep=0	5015	Total obs	7796	
Obs with Dep=1	2781			

Dependent Variable: Y1

Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing)

Date: 03/20/10 Time: 09:40

Sample: 1 14259 IF STATUS_A=1 OR STATUS_A=4 AND D_AGE<=4

Included observations: 7796

Convergence achieved after 5 iterations

Covariance matrix computed using second derivatives

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
C	-0.765	0.048	-16.001	0.000
D_EDUC=1	0.250	0.064	3.900	0.000
D_EDUC=3	-0.437	0.141	-3.099	0.002
D_EDUC=1,SEX=1	0.203	0.065	3.132	0.002
D_EDUC=2,SEX=1	0.269	0.083	3.244	0.001
D_EDUC=3,SEX=1	0.358	0.199	1.801	0.072
SEX=1,KOMUTER=1,D_EDUC=1	-0.535	0.401	-1.334	0.182
SEX=1,KOMUTER=1,D_EDUC=2	-0.757	0.571	-1.326	0.185
SEX=1,KOMUTER=1,D_EDUC=3	-0.256	1.164	-0.220	0.826
SEX=2,KOMUTER=1,D_EDUC=1	-0.872	0.302	-2.888	0.004
SEX=2,KOMUTER=1,D_EDUC=2	-1.369	0.356	-3.848	0.000
SEX=2,KOMUTER=1,D_EDUC=3	-1.324	0.747	-1.774	0.076
McFadden R-squared	0.012585	Mean dependent var	0.356721	
S.D. dependent var	0.479062	S.E. of regression	0.475743	
Akaike info criterion	1.289697	Sum squared resid	1761.762	
Schwarz criterion	1.300412	Log likelihood	-5015.24	
Hannan-Quinn criter.	1.293369	Restr. log likelihood	-5079.16	
LR statistic	127.8432	Avg. log likelihood	-0.64331	
Prob(LR statistic)	0.0000			
Obs with Dep=0	5015	Total obs	7796	
Obs with Dep=1	2781			

Dependent Variable: Y1

Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing)

Date: 03/20/10 Time: 09:45

Sample: 1 14259 IF STATUS_A=1 OR STATUS_A=4 AND D_AGE<=4

Included observations: 7796

Convergence achieved after 5 iterations

Covariance matrix computed using second derivatives

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
C	-0.765	0.048	-16.001	0.000
D_EDUC=1	0.250	0.064	3.900	0.000
D_EDUC=3	-0.437	0.141	-3.099	0.002
D_EDUC=1,KOMUTER=1	-0.872	0.302	-2.888	0.004
D_EDUC=2,KOMUTER=1	-1.369	0.356	-3.848	0.000
D_EDUC=3,KOMUTER=1	-1.324	0.747	-1.774	0.076
SEX=1,KOMUTER=1,D_EDUC=1	0.539	0.498	1.082	0.279
SEX=1,KOMUTER=1,D_EDUC=2	0.881	0.668	1.319	0.187
SEX=1,KOMUTER=1,D_EDUC=3	1.427	1.369	1.043	0.297
SEX=1,KOMUTER=2,D_EDUC=1	0.203	0.065	3.132	0.002
SEX=1,KOMUTER=2,D_EDUC=2	0.269	0.083	3.244	0.001
SEX=1,KOMUTER=2,D_EDUC=3	0.358	0.199	1.801	0.072
McFadden R-squared	0.012585	Mean dependent va	0.356721	
S.D. dependent var	0.479062	S.E. of regression	0.475743	
Akaike info criterion	1.289697	Sum squared resid	1761.762	
Schwarz criterion	1.300412	Log likelihood	-5015.24	
Hannan-Quinn criter.	1.293369	Restr. log likelihood	-5079.16	
LR statistic	127.8432	Avg. log likelihood	-0.64331	
Prob(LR statistic)	0.0000			
Obs with Dep=0	5015	Total obs	7796	
Obs with Dep=1	2781			

V. PENERANGAN ANGGOTA UMUM LANSIA YANG BERUMUR DI TARIKH KE-47

NAMA: **NO. URUT ART:**

PEMBERI INFORMASI :

V.A. PENDIDIKAN

1.a. Apakah pendidikan tertinggi yang ditamatkan (NAMA) ?

Tidak/belum pernah sekolah	1	} R1.d	SMK	7
Tidak/belum tamat SD	2		Program Diploma I/II	8
SD/IBTIDAFIYAH	3	} R1.c	Program Diploma III	9
SMP/TSANAWIYAH	4		Program D.IV/ S1	10
SMP KEJURUAN	5		Program S2/S3	11
SMA/ALIYAH	6			

b. Jurusan pendidikan/bidang studi:

c. Tahun tamat pendidikan:

d. Apakah (NAMA) pernah mendapat pelatihan kerja dan memperoleh sertifikat ?
 YA 1 TIDAK 2 → **SUB BLOK V.B**

e. Sebutkan 2 jenis pelatihan kerja yang utama: **DIISI KORTIM**

1.

2.

V.B. KEGIATAN SEMINGGU YANG LALU

2.a. Selama seminggu yang lalu:

	YA	TIDAK
1. Apakah (NAMA) bekerja ?	1	2
2. Apakah (NAMA) sekolah ?	1	2
3. Apakah (NAMA) mengurus rumah tangga?	1	2
4. Apakah (NAMA) melakukan kegiatan lainnya, selain 'kegiatan pribadi' ?	1	2

JIKA KEGIATAN 1 s.d 4 BERKODE "2" LANJUTKAN ke R3

b. Dari kegiatan 1 s.d 4 yang menyatakan "Ya" di atas, kegiatan apakah yang menggunakan waktu terbanyak selama seminggu yang lalu?
 1 → R4 2 3 4
 (JIKA R2.a.1=1, LANJUTKAN KE R4)

3. Apakah (NAMA) mempunyai pekerjaan/usaha, tetapi sementara tidak bekerja¹⁾ selama seminggu yang lalu?
 YA 1 TIDAK 2

4. Apakah (NAMA) sedang mencari pekerjaan?
 YA 1 TIDAK 2

5. Apakah (NAMA) sedang mempersiapkan suatu usaha?
 YA 1 TIDAK 2
 (JIKA R2.a.1 = 2 dan R3 = 2, LANJUTKAN KE SUB BLOK V.E)

V.C. RUMAH DAN BERTUKAR LANGKAH Bekerja (R2.a.1 ATAU R2.a.2)

6.a. Berapa jumlah hari kerja selama seminggu yang lalu? HARI

b. Berapa jumlah jam kerja dari seluruh pekerjaan setiap hari selama seminggu yang lalu?

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming	Jmlh
							<input type="text"/>

7. Apakah lapangan usaha/bidang pekerjaan utama dari tempat bekerja (NAMA) selama seminggu yang lalu?
DIISI KORTIM

 (TULIS SELENGKAP-LENGKAPNYA)

8. Apakah jenis pekerjaan/jabatan dari pekerjaan utama (NAMA) selama seminggu yang lalu?
DIISI KORTIM

 (TULIS SELENGKAP-LENGKAPNYA)

9. Berapakah jumlah jam kerja (NAMA) pada pekerjaan utama selama seminggu yang lalu? JAM

10.a. Apakah status/kedudukan (NAMA) dalam pekerjaan utama selama seminggu yang lalu?

Berusaha sendiri	1 → R11.a
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tak dibayar	2 → R14
Berusaha dibantu buruh tetap/ buruh dibayar	3
Buruh/karyawan/pegawai	4 → R12
Pekerja bebas di pertanian	5 } R11.a
Pekerja bebas di non pertanian	6 }
Pekerja keluarga/tak dibayar	7 → R15.a

b. Berapakah jumlah buruh/karyawan/pegawai yang dibayar?
 1 - 4 orang 1 5 - 19 orang 2 ≥ 20 orang 3
 (LANJUTKAN KE R14)

11.a. Berapakah pendapatan bersih (NAMA) sebulan yang lalu dari pekerjaan utama?
 Rp

b. Jumlah hari kerja yang dibutuhkan pada R11.a:
 HARI

(JIKA R10.a = 1 → R14 ATAU R10.a = 5 ATAU 6 → R15.a)

12. Berapakah upah/gaji bersih yang diterima (NAMA) selama sebulan yang lalu dari pekerjaan utama?

a. Berupa uang:
 Rp

b. Berupa barang:
 Rp

13. Apakah ada usaha dari pihak majikan/perusahaan, untuk meningkatkan kemampuan/keterampilan dalam bekerja?
 YA 1 TIDAK 2 TIDAK TAHU 3

14. Sudah berapa lama (NAMA) bekerja di pekerjaan sekarang?
 TAHUN BULAN

1) Sementara tidak bekerja: Jika R3=1 maka R10.a tidak boleh berkode 5 atau 6 atau 7

<p>15. a. Di manakah lokasi tempat kerja (NAMA) selama seminggu yang lalu?</p> <p>Propinsi : <input type="text"/> <input type="text"/> } DHSI KORTIM</p> <p>Kabupaten/Kota ²⁾ : <input type="text"/> <input type="text"/> }</p> <p>b. Apabila di luar kabupaten/kota tempat tinggal, apakah (NAMA) pulang pergi ke tempat kerja setiap hari, setiap minggu atau setiap bulan?</p> <p>Setiap hari 1 Setiap minggu 2 Setiap bulan 3</p> <p>(JIKA R15.b = 2 ATAU 3, LANJUTKAN KE R16.a)</p> <p>c. Berapa jarak tempuh dari rumah ke tempat kerja?</p> <p>..... Km <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>d. Berapa lama perjalanan dari rumah ke tempat kerja?</p> <p>≤ 30 Menit 1 61 - 120 Menit 3</p> <p>31 - 60 Menit 2 > 120 Menit 4</p> <p>e. Apakah jenis transportasi yang biasa digunakan (NAMA) untuk pergi dan pulang ke/dari tempat kerja?</p> <p>Transportasi umum 1 Transportasi pribadi 3</p> <p>Transportasi bersama 2 Tanpa alat transportasi 4</p>	<p>20. Upaya apa sajakah yang pernah dilakukan (NAMA) dalam mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha? YA TIDAK</p> <table border="0"> <tr><td>1. Mendaftar pada bursa kesempatan kerja</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>2. Menghubungi perusahaan/kantor</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>3. Melamar dengan memanfaatkan iklan</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>4. Menghubungi keluarga/kenalan</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>5. Mengumpulkan modal/perengkapan</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>6. Mencari lokasi/tempat usaha</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>7. Mengurus surat perizinan usaha</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>8. Lainnya (.....)</td><td>3</td><td>4</td></tr> </table> <p>TULISKAN</p>	1. Mendaftar pada bursa kesempatan kerja	1	2	2. Menghubungi perusahaan/kantor	3	4	3. Melamar dengan memanfaatkan iklan	1	2	4. Menghubungi keluarga/kenalan	3	4	5. Mengumpulkan modal/perengkapan	1	2	6. Mencari lokasi/tempat usaha	3	4	7. Mengurus surat perizinan usaha	1	2	8. Lainnya (.....)	3	4				
1. Mendaftar pada bursa kesempatan kerja	1	2																											
2. Menghubungi perusahaan/kantor	3	4																											
3. Melamar dengan memanfaatkan iklan	1	2																											
4. Menghubungi keluarga/kenalan	3	4																											
5. Mengumpulkan modal/perengkapan	1	2																											
6. Mencari lokasi/tempat usaha	3	4																											
7. Mengurus surat perizinan usaha	1	2																											
8. Lainnya (.....)	3	4																											
<p>16. a. Kapankah (NAMA) pertama kali bekerja/berusaha?</p> <p>31 Agustus 2007 atau sebelumnya 1 → R17</p> <p>1 September 2007 atau sesudahnya 2 → <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> } BULAN TAHUN</p> <p>b. Berapa lama (NAMA) mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha?</p> <p>LAMANYA: BULAN <input type="text"/> <input type="text"/></p>	<p>21. Berapa lama (NAMA) mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha?</p> <p>..... TAHUN <input type="text"/> <input type="text"/> BULAN <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>22. Pekerjaan yang dicari/usaha yang sedang dipersiapkan:</p> <p>Pekerjaan penuh waktu (Full time) 1 } R25</p> <p>Pekerjaan paruh waktu (Part time) 2 }</p> <p>DITANYAKAN JIKA R4 = 2 DAN R5 = 2</p>																												
<p>17. Apakah (NAMA) selama seminggu yang lalu mempunyai pekerjaan tambahan?</p> <p>YA 1 TIDAK 2 → SUB BLOK V.E</p> <p>18. Apakah lapangan usaha/pekerjaan tambahan utama (NAMA)?</p> <p>..... DHSI KORTIM</p> <p><input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>(TULIS SELENGKAP-LENGKAPNYA)</p>	<p>23. Apakah alasan utama (NAMA) tidak mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha?</p> <p>Putus asa: Merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan ³⁾ 1</p> <p>Sudah diterima bekerja, tapi belum mulai bekerja 2</p> <p>Sedang bersekolah 3</p> <p>Mengurus rumah tangga 4</p> <p>Sudah mempunyai pekerjaan/usaha 5</p> <p>Merasa sudah cukup 6 } R25</p> <p>Tidak mampu melakukan pekerjaan 7 }</p> <p>Lainnya (.....) 8</p> <p>TULISKAN</p>																												
<p>V.E. KEGIATAN MENCAKUPI KELOMPOK</p>	<p>24. a. Jika ada penawaran pekerjaan, apakah (NAMA) masih mau menerima?</p> <p>YA 1 TIDAK 2 → R25</p> <p>b. Apakah bersedia bekerja di luar negeri?</p> <p>YA 1 TIDAK 2</p>																												
<p>19. Apakah alasan utama (NAMA) mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha?</p> <table border="0"> <tr><td>Tamat sekolah/tidak bersekolah lagi</td><td>1</td></tr> <tr><td>Tanggung jawab mencari nafkah/membantu ekonomi rumah tangga atau keluarga</td><td>2</td></tr> <tr><td>Menambah penghasilan</td><td>3</td></tr> <tr><td>Pekerjaan yang ada kurang sesuai</td><td>4</td></tr> <tr><td>PHK</td><td>5</td></tr> <tr><td>Usaha terhenti</td><td>6</td></tr> <tr><td>Lainnya (.....)</td><td>7</td></tr> </table> <p>TULISKAN</p>	Tamat sekolah/tidak bersekolah lagi	1	Tanggung jawab mencari nafkah/membantu ekonomi rumah tangga atau keluarga	2	Menambah penghasilan	3	Pekerjaan yang ada kurang sesuai	4	PHK	5	Usaha terhenti	6	Lainnya (.....)	7	<p>25. Apakah (NAMA) pernah mempunyai pekerjaan/usaha sebelumnya?</p> <p>YA 1 TIDAK 2 → STOP</p> <p>26. Apakah (NAMA) berhenti bekerja/pindah pekerjaan setelah 31 Agustus 2007?</p> <p>YA 1 TIDAK 2 → STOP</p> <p>27. Alasan utama (NAMA) berhenti bekerja/pindah pekerjaan setelah 31 Agustus 2007:</p> <table border="0"> <tr><td>PHK</td><td>1</td></tr> <tr><td>Tidak ada permintaan (order)/usaha terhenti (bangkrut)</td><td>2</td></tr> <tr><td>Pendapatan kurang memuaskan</td><td>3</td></tr> <tr><td>Tidak cocok dengan lingkungan kerja</td><td>4</td></tr> <tr><td>Habis masa kerja/kontrak</td><td>5</td></tr> <tr><td>Lainnya (.....)</td><td>6</td></tr> </table> <p>TULISKAN</p>	PHK	1	Tidak ada permintaan (order)/usaha terhenti (bangkrut)	2	Pendapatan kurang memuaskan	3	Tidak cocok dengan lingkungan kerja	4	Habis masa kerja/kontrak	5	Lainnya (.....)	6		
Tamat sekolah/tidak bersekolah lagi	1																												
Tanggung jawab mencari nafkah/membantu ekonomi rumah tangga atau keluarga	2																												
Menambah penghasilan	3																												
Pekerjaan yang ada kurang sesuai	4																												
PHK	5																												
Usaha terhenti	6																												
Lainnya (.....)	7																												
PHK	1																												
Tidak ada permintaan (order)/usaha terhenti (bangkrut)	2																												
Pendapatan kurang memuaskan	3																												
Tidak cocok dengan lingkungan kerja	4																												
Habis masa kerja/kontrak	5																												
Lainnya (.....)	6																												
<p>R19 s.d R22 DITANYAKAN JIKA R4 = 1 ATAU R5 = 1</p> <p>28. Apakah lapangan usaha/pekerjaan (NAMA) sebelum berhenti bekerja/pindah pekerjaan terakhir?</p> <p>..... DHSI KORTIM</p> <p><input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>(TULIS SELENGKAP-LENGKAPNYA)</p> <p>29. Apakah status/kedudukan (NAMA) sebelum berhenti bekerja/pindah pekerjaan terakhir?</p> <table border="0"> <tr><td>Berusaha sendiri</td><td>1</td></tr> <tr><td>Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar</td><td>2</td></tr> <tr><td>Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar</td><td>3</td></tr> <tr><td>Buruh/karyawan/pegawai</td><td>4</td></tr> <tr><td>Pekerja bebas di pertanian</td><td>5</td></tr> <tr><td>Pekerja bebas di non pertanian</td><td>6</td></tr> <tr><td>Pekerja keluarga/tak dibayar</td><td>7</td></tr> </table>	Berusaha sendiri	1	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar	2	Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	3	Buruh/karyawan/pegawai	4	Pekerja bebas di pertanian	5	Pekerja bebas di non pertanian	6	Pekerja keluarga/tak dibayar	7	<p>28. Apakah alasan utama (NAMA) mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha?</p> <table border="0"> <tr><td>Tamat sekolah/tidak bersekolah lagi</td><td>1</td></tr> <tr><td>Tanggung jawab mencari nafkah/membantu ekonomi rumah tangga atau keluarga</td><td>2</td></tr> <tr><td>Menambah penghasilan</td><td>3</td></tr> <tr><td>Pekerjaan yang ada kurang sesuai</td><td>4</td></tr> <tr><td>PHK</td><td>5</td></tr> <tr><td>Usaha terhenti</td><td>6</td></tr> <tr><td>Lainnya (.....)</td><td>7</td></tr> </table> <p>TULISKAN</p>	Tamat sekolah/tidak bersekolah lagi	1	Tanggung jawab mencari nafkah/membantu ekonomi rumah tangga atau keluarga	2	Menambah penghasilan	3	Pekerjaan yang ada kurang sesuai	4	PHK	5	Usaha terhenti	6	Lainnya (.....)	7
Berusaha sendiri	1																												
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar	2																												
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	3																												
Buruh/karyawan/pegawai	4																												
Pekerja bebas di pertanian	5																												
Pekerja bebas di non pertanian	6																												
Pekerja keluarga/tak dibayar	7																												
Tamat sekolah/tidak bersekolah lagi	1																												
Tanggung jawab mencari nafkah/membantu ekonomi rumah tangga atau keluarga	2																												
Menambah penghasilan	3																												
Pekerjaan yang ada kurang sesuai	4																												
PHK	5																												
Usaha terhenti	6																												
Lainnya (.....)	7																												

2). Coret yang tidak perlu, jika = R2 Blok I maka lanjutkan ke R16.a.

3). Rincian 23 Kode 1:

Alasan bagi mereka yang berkali-kali mencari pekerjaan tetapi tidak berhasil mendapatkan pekerjaan sehingga ia merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan atau mereka yang merasa karena situasi/kondisi/iklim/musim, tidak mungkin mendapatkan pekerjaan yang diinginkan.